

SIGAP-REDD+: Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan dalam REDD+

Herlina Hartanto, Tomy S. Yulianto dan Taufiq Hidayat



SIGAP-REDD+: Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan dalam REDD+

Herlina Hartanto, Tomy S. Yulianto dan Taufiq Hidayat



Ilustrasi oleh

Deni Ganjar Nugraha

Desain grafis dan tata letak oleh

Galih Gerryaldy

Editing oleh

Budhita Kismadi dan Dani Wahyu Munggoro

Hartanto, Herlina et.al.

SIGAP-REDD+: Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan dalam REDD+/oleh Herlina Hartanto, Tomy S. Yulianto, Taufiq Hidayat. Jakarta, Indonesia: The Nature Conservancy, 2014. 180 hal + xiv hal; 21 cm x 25 cm.

ISBN 978-602-70266-0-5

Copyright oleh The Nature Conservancy

Diterbitkan 2014

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dicetak oleh X-Graphic Printing, Jakarta

Diterbitkan oleh

The Nature Conservancy (TNC)

Graha Iskandarsyah 3rd Floor

Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C

Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia

Telp : +62-21-7279 2043

Fax : +62-21-7279 2044

nature.org

nature.or.id

Dengan dukungan dari

Norwegian Agency for Development Cooperation
(NORAD)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
Ucapan Terima kasih	xii
BAB 1	
Aksi Inspiratif Warga Dalam REDD+	1
Peranan Indonesia dalam Mengatasi Perubahan Iklim	3
Dukungan Berau bagi Dunia: Program Karbon Hutan Berau	4
Pelibatan Masyarakat dalam REDD+ dan PKHB	6
Peranan TNC dalam PKHB	7
Buku Panduan dan Pengguna yang Dituju	8
Struktur Buku Panduan	9
Bahan Bacaan	11
BAB 2	
Pelibatan Masyarakat Dalam Program Karbon Hutan Berau	13
Bahan Bacaan	26
BAB 3	
Perubahan Iklim, Hutan, dan REDD+	27
Perubahan Iklim	30
Hutan dan Laju kehilangan hutan serta kaitannya dengan perubahan iklim	31
REDD+ dan PKHB	34
Partisipasi Masyarakat dalam REDD+	36
Rancangan Proses	38
Bahan Bacaan	44



BAB 4	
Membangun Peta Kekuatan Masyarakat	45
Pemberdayaan Berbasis Kekuatan Masyarakat	49
Penyusunan Peta Kekuatan Masyarakat dalam PKHB	51
Rancangan Proses	53
Bahan Bacaan	58
BAB 5	
Membangun Mimpi Bersama	59
Rancangan Proses	66
Bahan Bacaan	68
BAB 6	
Penataan Lahan: Pembangunan Peta Tata Guna Lahan Tiga-Dimensi	69
Rancangan Proses	76
Bahan Bacaan	80
BAB 7	
Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung dan Penggalangan Dana	81
Pentingnya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung	83
Tahapan Penyusunan RPJMK	86
Rancangan Proses	89
Bahan Bacaan	92
BAB 8	
Dana Pendukung Dalam PKHB	93
Pendanaan REDD+ Dalam PKHB	96
Pendanaan Berbasis Kinerja	98
Sistem Penilaian untuk Menentukan Besaran Pendanaan Berbasis Input	99
Rancangan Proses	105



BAB 9

Penyusunan Rencana Kerja dan Pembahasan Mengenai Pembagian Manfaat 107

Kajian Cepat Penggunaan Lahan, Toleransi Perubahan dan Pendanaan Berbasis Kinerja 110

Penyusunan Rencana Kerja 115

Rancangan Proses 117

Bahan Bacaan 120

Lampiran 121

BAB 10

Penyusunan Kesepakatan Masyarakat dan Perjanjian Kerja Sama 137

Kesepakatan Masyarakat 140

Perjanjian Kerja Sama 144

Komunikasi dan Dukungan dari Pihak Pemangku Kepentingan di Luar Kampung 145

Rancangan Proses 147

Bahan Bacaan 150

BAB 11

Pelaksanaan Kesepakatan, Rencana Kerja, dan Pemantauan 151

Pelaksanaan Kesepakatan dan Rencana Kerja 154

Rancangan Proses 166

Bahan Bacaan 172

BAB 12

Perayaan 173

Epilog 179





KATA PENGANTAR

Pada Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Pittsburgh (Amerika) pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 26% pada tahun 2020, dengan usaha sendiri, atau 41% dengan dukungan internasional. Komitmen ini mempunyai nilai penting dalam menempatkan Indonesia di pusat peta inisiatif global dalam mengatasi perubahan iklim. Komitmen ini mempunyai nilai yang lebih penting bagi bangsa Indonesia karena akan membawa kita kedalam upaya yang lebih terencana dan terpadu dalam mengurangi laju kerusakan dan penggundulan hutan, melestarikan ekosistem hutan, melindungi keanekaragaman hayati dan plasma nutfah di dalamnya, dan menyejahterakan masyarakat. Menyikaplanjuti komitmen tersebut Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Strategi Nasional Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Lahan dan membentuk Badan Pengelola REDD+ sebagai lembaga pengelolanya.

Sebagai bagian penting dari strategi tersebut di atas, Pemerintah Indonesia, antara lain melalui Badan REDD+, mendorong dikembangkan dan dilaksanakannya inisiatif REDD+ di seluruh Indonesia. Pada saat ini, inisiatif REDD+ sedang dikembangkan dan diujicobakan oleh berbagai lembaga di setidaknya 40 lokasi di Indonesia. Inisiatif tersebut dilakukan pada luas wilayah yang beragam, dari skala unit pengelola, kabupaten, sampai propinsi. Salah satu dari inisiatif tersebut adalah Program Karbon Hutan Berau yang dilaksanakan di Kabupaten Berau dengan dukungan dari The Nature Conservancy (TNC). Program Karbon Hutan Berau ini dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan sebagai *Demonstration Activities* REDD+ berskala kabupaten pada bulan Januari 2010.

Badan REDD+ menjalankan tugas untuk membantu Presiden dan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta pengendalian REDD+ di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penting bagi kami untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh berbagai inisiatif REDD+ di Indonesia, mempelajari konsep, metode, dan alat bantu yang mereka kembangkan, dan mendorong proses saling berbagi pembelajaran antar berbagai inisiatif REDD+ tersebut.



Oleh sebab itu, saya menyambut dengan baik buku panduan “SIGAP REDD+: Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan dalam REDD+,” yang disusun berdasarkan pengalaman The Nature Conservancy dalam mendampingi masyarakat di beberapa kampung di Berau. Melalui strategi dan proses pelibatan masyarakat yang diurai dalam buku ini, masyarakat di Berau dapat menggalang dana dari berbagai sumber secara lebih efektif, mengembangkan berbagai sumber mata pencaharian, memperkuat tata kelola dan hak pengelolaan mereka atas hutan dan sumber daya hutan. Yang tidak kalah penting, masyarakat ikut serta secara aktif dalam mengurangi kerusakan dan penggundulan hutan melalui penerapan gilir balik dalam perladangan berpindah, patroli hutan, dan penghijauan.

Kami berharap para pelaksana inisiatif REDD+ lainnya di Indonesia berupaya untuk melibatkan masyarakat dengan bersungguh-sungguh sehingga kita tidak hanya dapat mencapai target penurunan emisi, melestarikan hutan, tetapi juga menyejahterakan masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan.

Jakarta, April 2014

Heru Prasetyo

Kepala

Badan Pengelola REDD+



KATA PENGANTAR

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (Ditjen BPDASPS) dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 adalah terbangunnya hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa (HD) seluas 2,5 juta hektar. HKm dan HD dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan hutan guna meningkatkan kesejahteraannya sekaligus melestarikan sumberdaya hutan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan HKm dan HD memerlukan delapan tahapan pemberdayaan masyarakat, yaitu: pembangunan kesepahaman, penguatan kelembagaan, pendampingan dan fasilitasi, perencanaan partisipatif, pelatihan, pengembangan ekonomi potensial, kemitraan (pasar, modal, sarana prasarana), bimbingan dan monitoring evaluasi. Pendampingan dapat dilakukan oleh unsur pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pendampingan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan HKm maupun HD mengingat terbatasnya kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang mereka miliki. Pendampingan dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

The Nature Conservancy (TNC) telah melakukan pendampingan masyarakat di beberapa kampung di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, untuk terlibat dalam Program Karbon Hutan Berau. Pendampingan dilakukan dalam bentuk penguatan kelembagaan, pemetaan partisipatif, peningkatan kapasitas masyarakat dan berbagai kegiatan lainnya, termasuk pendampingan dalam proses pengusulan Hutan Desa hingga diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 28/Menhut-II/2014 tanggal 9 Januari 2014, tentang penetapan areal kerja Hutan Desa Merabu seluas sekitar 8.245 hektar.

Buku “SIGAP REDD+: Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan dalam REDD+,” yang disusun berdasarkan pengalaman TNC dalam melakukan pendampingan masyarakat tersebut patut diberikan apresiasi. Buku ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan dan sekaligus memberikan inspirasi para pihak dalam pengembangan HKm dan HD di daerah lain dengan improvisasi menyesuaikan situasi dan kondisi tapak/masyarakat setempat.

Semoga ke depan proses/tahapan pemberdayaan masyarakat akan lebih bermanfaat.

Jakarta, April 2014

Dr. Ir. Hilman Nugroho, MP
Direktur Jenderal BPDASPS
Kementerian Kehutanan



KATA PENGANTAR

The Nature Conservancy (TNC) bekerja di Indonesia sejak tahun 1992. Salah satu sumberdaya alam penting yang menjadi perhatian TNC adalah hutan. Hutan tropis di Indonesia sangat kaya dan luas, terluas ketiga di dunia sesudah Brazil dan Congo. Itu sebabnya, sejak awal TNC sudah memusatkan perhatiannya untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian hutan yaitu di Taman Nasional Lore Lindu (Sulawesi Tengah).

Pengalaman di Taman Nasional Lore Lindu selama satu dasawarsa dan pengalaman bekerja di beberapa lokasi lain, telah memberikan pelajaran yang berharga bagi TNC. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan dan alam lainnya terlalu kompleks untuk dapat dikelola sendirian. Agar dapat memberikan hasil yang efektif dan lestari, semua pihak terkait harus bekerjasama untuk mengelola sumber daya hutan tersebut. Masyarakat adalah salah satu aktor kunci yang keterlibatannya harus dipastikan sejak awal.

TNC juga belajar bahwa sebagai suatu lembaga yang berbasis keilmuan, TNC dapat memberikan kontribusi dan dampak yang lebih besar bila bekerjasama dengan berbagai mitra dalam mengembangkan dan menguji strategi, pendekatan, dan alat bantu dalam pengelolaan sumber daya alam, dan selanjutnya mereplikasikannya secara sistematis di tempat-tempat lain.

Pembelajaran-pembelajaran tersebut di atas mengubah pendekatan TNC di Indonesia. Jika dulu TNC hanya memusatkan sumberdaya manusia dan finansial untuk menghasilkan dampak konservasi di lokasi di mana TNC bekerja, sekarang TNC merancang pendekatan yang lebih komprehensif di satu bentang alam dengan tujuan agar dapat mereplikasi pendekatannya di tempat lain.

Ketika isu Perubahan Iklim dan inisiatif REDD+ menghangat di dunia dan di Indonesia, TNC menerapkan pembelajaran-pembelajaran tersebut dalam membantu Pemerintah Indonesia dalam merancang dan melaksanakan Program Karbon Hutan Berau (PKHB). Sejak awal, PKHB dirancang sebagai suatu inisiatif untuk mengurangi laju kerusakan dan penggundulan hutan dalam satu bentang alam yang luas, yaitu meliputi seluruh wilayah daratan Berau, yang akan melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat. Program Berau ini juga dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajaran dan alat bantu yang dikembangkan tidak hanya berguna dan relevan untuk Berau saja, tetapi juga untuk banyak tempat di Indonesia.



Salah satu strategi yang telah dikembangkan oleh TNC di Berau adalah strategi pelibatan masyarakat. Penerapan strategi tersebut memberikan hasil yang menggembirakan sehingga kami ingin mendorong penerapan strategi ini di desan-deso lain di dalam dan di luar Berau. Buku panduan SIGAP REDD+ ini mengurai strategi, tahapan, dan alat bantu untuk melibatkan masyarakat secara sederhana dan sistematis sehingga pengguna buku ini dapat menggunakan dan mengadaptasikannya pada berbagai program dan konteks masyarakat yang berbeda. Kami berharap buku panduan ini memperkaya dan memperkuat inisiatif REDD+ di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat hutan yang sejahtera di dalam dan di sekitar hutan yang lestari.

Jakarta, April 2014

Rizal Algamar

Country Director

The Nature Conservancy

Indonesia Program



UCAPAN TERIMA KASIH

Buku panduan ini, beserta infografik dan film SIGAP REDD+, merupakan hasil kerjasama dan berkat dukungan dari banyak pihak. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya kepada Bupati, Berau Drs. H. Makmur HAPK, MM., yang terus menerus memberikan dukungan untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Asisten II sebagai ketua POKJA REDD+ Kabupaten Berau, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, Kesatuan Pengelolaan Hutan Berau Barat, Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada kami selama melakukan rangkaian kegiatan pendampingan di Kampung Long Duhung, Merabu, dan kampung-kampung lainnya di wilayah kabupaten Berau.

Kami juga ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat kampung Long Duhung dan Merabu yang dengan penuh antusias menyambut inisiatif dan pendampingan yang kami tawarkan. Sesungguhnya warga Long Duhung dan Merabu yang memberikan banyak inspirasi sehingga buku panduan ini bisa tersusun. Beberapa tahapan yang diuraikan di dalam buku panduan ini dilakukan terlebih dahulu di Long Duhung, sebelum mendapat pengkayaan dari Merabu dan pembelajaran dari kampung-kampung lain. Secara khusus kami ingin memberikan penghargaan kepada Pak Misak Lungui, Kepala Kampung Long Duhung, yang dengan segala kesederhanaannya mampu memperlihatkan komitmen yang kuat untuk bersama dengan warga kampung Long Duhung lainnya mewujudkan mimpi Long Duhung sebagai kampung yang “CEMERLANG” (Cerdas Mengelola Ruang, Lahan, dan Lingkungan). Kami juga berterima kasih kepada Pak Samion, selaku kepala adat, Zenas Daring, tokoh masyarakat lainnya, seluruh kelompok pemuda dan kelompok perempuan di Long Duhung, yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami sangat menghargai warga yang tiada henti saling memberikan semangat untuk membangun kampung Long Duhung sebagai salah satu kampung SIGAP. Terima kasih atas ketulusan dan nilai-nilai kekeluargaan yang diberikan kepada kami selama ini.

Rasa suka cita dan terima kasih tak terhingga kepada seluruh sahabat kami di Kampung Merabu, kampung yang “ASIK” (Aman, Sejahtera, Indah, dan Kreatif), dan telah menerima kami dengan penuh keakraban dan persahabatan. Penghargaan yang khusus kami sampaikan kepada Pak Asrani yang senantiasa optimis dalam memulai dan melakukan perubahan dan Pak Franly yang masih bersedia duduk berhujan-hujan di mobil bak terbuka ketika sudah menjadi Kepala Kampung dan menemukan kata “ASIK” sebagai mantera kampung. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Pak Agustinus yang senantiasa meladeni percakapan kami, Ibu Ani,



Ibu Rini, Ibu Ester, Ibu Not, Mama Bunga, Mama Memey yang senantiasa siap menyediakan makanan ketika kami lapar, dan Mbak Marjayanti yang bersedia kembali ke kampung halaman mengabdikan dirinya membangun kampung dengan penuh semangat dan antusias. Kami juga menghargai Pak Cai, Pak Senen, Pak Par, Pak Buntut, Pak Elhut, Pak Arif, Pak Adi, Pak Rana, Pak Cubit, dan Pak Heri yang senantiasa menemani perjalanan kami ke dalam hutan dan pegunungan karst di Merabu. Dan terakhir kepada para pemuda: Akim, Yak, Joni, Beni, beserta anak-anak sekolah Bobby, Ipan dan kelompoknya, yang telah menginspirasi kami pentingnya melakukan segala sesuatu dengan gembira.

Buku panduan, infografik, dan film SIGAP REDD+ tidak dapat terwujud tanpa sumbang saran, pemikiran, dan tenaga dari rekan-rekan TNC kami di Berau dan Samarinda, yaitu: Siswandi, Ruben Matias, Indah Astuti, Ali Sasmirul, Purnomo, Sudiyanto, Jasari, Umbar Sujoko, Alie Syopyan, Agustina Tandi Bunna, Bambang Wahjudi, Niel Makinuddin, dan Edi Sudiono. Terima kasih juga kepada rekan-rekan di Jakarta: Lex Hovani, Wahjudi Wardoyo, Ade Soekadis, Fakhrizal Nashr, Intan Ritonga, Delon Marthinus, Rizal Bukhari, dan Musnanda atas saran, bantuan, dan perhatiannya. Dukungan dari Tri Soekirman, Cicilia Peggy Mariska, dan R. Jaka Setia dalam ikut mempromosikan capaian masyarakat sangat kami hargai.

Akhir kata, terima kasih tak terhingga kami ingin sampaikan kepada Inspirit Innovation Circles untuk dukungan kritis dan kreatifnya. Terima kasih kami sampaikan khususnya kepada Mas Dani Wahyu Munggoro dan Budhita Kismadi dalam menemani kami dalam perjalanan menulis buku ini. Terima kasih atas kesediaan dan kesabarannya, dan atas sumbangan pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan mendasarnya yang telah membantu mempertajam konsep-konsep yang kami sajikan dan cerita-cerita yang kami tuliskan. Buku panduan, infografik, dan film SIGAP-REDD ini tersaji dengan baik berkat kreativitas dan ketrampilan artistik Mas Deni Ganjar Nugraha dalam menuangkan cerita kami ke dalam ilustrasi, dan kesabaran dan ketelitian Mas Galih Gerryaldy dalam me-*layout* buku panduan ini. Terima kasih!

Jakarta, April 2014

Tim Penulis





BAB 1

Aksi Inspiratif Warga Dalam REDD+



Pergeseran musim, kemarau yang berkepanjangan, intensitas curah hujan yang meningkat drastis, meningkatnya frekuensi banjir dan badai, kemarau panjang yang memicu bencana kelaparan, dan naiknya permukaan air laut adalah beberapa gejala yang sering menyita perhatian dunia akhir-akhir ini. Gejala-gejala tersebut sering dikaitkan dengan perubahan iklim. Turut menjadi sorotan adalah kontribusi manusia yang menyebabkan terjadinya penumpukan karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lain di atmosfer yang memerangkap sinar matahari sehingga suhu bumi memanas dan memicu perubahan iklim. Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam yang menelan banyak korban jiwa dan harta di berbagai belahan bumi membangkitkan kesadaran dan inisiatif global untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab terjadinya perubahan iklim ini.

Kegiatan manusia di berbagai sektor, termasuk sektor kehutanan, diyakini ikut menyebabkan terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca dan karbon dioksida. Kegiatan manusia, seperti kegiatan pembangkit tenaga listrik, pengembangan industri, transportasi, pertanian, pengambilan hasil hutan kayu, dan konversi lahan, melepaskan beberapa jenis gas rumah kaca ke atmosfer. Komponen terbesar dari gas rumah kaca ini adalah karbon dioksida. Kegiatan manusia selama periode 1970 dan 2004 telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca dari 29 gigaton menjadi 40 gigaton CO₂e per tahun di mana 77%-nya merupakan gas karbon dioksida. Kegiatan di sektor kehutanan, termasuk penggundulan hutan, bukan merupakan penyumbang emisi karbon dioksida yang terbesar tetapi cukup berarti. Selama periode 1990-an, sektor ini melepaskan rata-rata sekitar 5,9 gigaton CO₂ setiap tahunnya. Pada tahun 2004, sumbangan sektor kehutanan mencapai sekitar 17% dari total emisi gas rumah kaca (IPCC, 2007). Sekitar 75% dari emisi karbon dioksida ini berasal dari negara-negara berkembang yang memiliki hutan yang sangat luas, yaitu Brazil, Malaysia, Papua New Guinea, Gabon, Costa Rica, Cameroon, Congo, termasuk Indonesia (Stern, 2006; IPCC, 2007).

Negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis yang luas dapat memainkan peranan yang penting dalam inisiatif global untuk mengatasi perubahan iklim. Pada tahun 2005, total luasan hutan di dunia sekitar 4 milyar hektar atau sekitar 30% dari total luas daratan di bumi. Sekitar 56% dari wilayah berhutan ini terletak di wilayah tropis dan sub-tropis. Kawasan hutan ini mengalami tekanan yang luar biasa yang dapat dilihat dari tingginya laju penggundulan hutan. Data yang dikumpulkan oleh Food and Agriculture Organization (2006) dari 229 negara menunjukkan bahwa, selama periode 1990-2000 dan periode 2000-2005, rata-rata sekitar 8.9 juta hektar dan 7.3 juta hektar hutan hilang setiap tahunnya. Laju penggundulan hutan tertinggi terjadi di Amerika Selatan dan Afrika di mana sekitar 4 juta hektar hutan hilang setiap tahunnya. Bila negara-negara maju dapat berperanan dalam mengatasi perubahan iklim dengan mengembangkan teknologi rendah karbon, memberikan dukungan teknis dan pendanaan, maka negara-negara berkembang yang memiliki hutan yang luas, seperti Indonesia, dapat mengambil peran penting dalam inisiatif global ini dengan melakukan pembangunan yang tidak menyebabkan penggundulan dan pengrusakan hutan secara berlebihan.



Peranan Indonesia dalam Mengatasi Perubahan Iklim

Indonesia saat ini merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca di dunia karena tingginya laju penggundulan dan kerusakan hutan. Luasnya wilayah hutan dan berharganya hasil hutan di dalamnya menyebabkan Indonesia mengandalkan pendapatan dari sektor kehutanan untuk membiayai pembangunan. Kayu dan hasil hutan di dalamnya diambil. Wilayah hutan yang gundul kemudian diubah menjadi perkebunan tanaman industri, perkebunan, pertambangan, atau peruntukan lain, yang juga memberikan pendapatan bagi negara untuk mendorong pembangunan.

Selama periode 1990 dan 2006, diperkirakan rata-rata hampir 2 juta hektar hutan mengalami penggundulan setiap tahunnya, di mana laju penggundulan tertinggi sebesar 3,51 juta hektar per tahun terjadi sekitar periode reformasi, antara tahun 1997 dan 2000. Pada tahun 2000, penggundulan hutan yang disertai dengan pengeringan dan kebakaran lahan gambut melepaskan emisi gas rumah kaca sebesar 1,378 juta ton CO₂e atau sebesar 60% dari keseluruhan emisi Indonesia. Kecenderungan ini terus meningkat di tahun 2005 menjadi sebesar 70% dari keseluruhan emisi Indonesia. Tanpa adanya inisiatif untuk mengurangi emisi, pada tahun 2020 diperkirakan Indonesia akan melepaskan sebesar 2,95 juta ton gas rumah kaca di mana kontribusi sektor kehutanan dan lahan gambut adalah sebesar 50% (Kementerian Kehutanan, 2010a). Dengan demikian, hutan yang tersisa harus diselamatkan dan dikelola dengan lebih baik bila Indonesia ingin ikut secara aktif dalam mengatasi perubahan iklim.

Memahami pentingnya peranan hutan yang ada di wilayah nusantara, Indonesia mengambil posisi kunci dalam inisiatif global untuk mengatasi perubahan iklim. Pada Tahun 2007, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties*) ke-13 di Bali yang menghasilkan beberapa keputusan penting terkait usaha menurunkan emisi dari penggundulan dan kerusakan hutan dari negara-negara berkembang. Pada tahun 2009, saat Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Pittsburgh, Amerika, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 26% pada tahun 2020, dengan usaha sendiri, atau 41% dengan dukungan internasional. Penurunan emisi ini penting bagi Indonesia bukan hanya untuk mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim tetapi juga untuk memperbaiki pengelolaan hutan, melestarikan ekosistem hutan, melindungi keanekaragaman hayati, dan menyejahterakan masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Dengan adanya komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia harus melaksanakan upaya-upaya yang terencana dan terpadu dalam mengelola dan melestarikan hutan yang tersisa.

Sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan komitmen penurunan emisi dari sektor kehutanan, Indonesia terlibat dalam skema global untuk menurunkan emisi dari penggundulan dan pengrusakan hutan, atau *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD). Melalui skema ini, pengelola dan pemilik hutan di negara berkembang, seperti Indonesia, akan



mendapat insentif ekonomi untuk upaya mitigasi, yaitu upaya untuk mencegah atau mengurangi terjadinya emisi dari penggundulan dan pengrusakan hutan. Dengan dimasukkannya upaya-upaya konservasi, pengelolaan hutan secara lestari, dan peningkatan cadangan karbon hutan kedalam skema REDD, sehingga istilah REDD diubah menjadi REDD+, maka negara-negara berkembang yang mau melakukan tiga inisiatif tersebut juga mempunyai peluang untuk terlibat dan mendapatkan insentif. Pemerintah Indonesia mendorong dikembangkan dan dilaksanakannya inisiatif REDD+ di seluruh nusantara secara bertahap. Pada saat ini, inisiatif REDD+ sedang dikembangkan dan diujicobakan oleh berbagai lembaga di setidaknya 40 lokasi di Indonesia. Inisiatif tersebut dilakukan pada luas wilayah yang beragam, dari skala unit pengelola, kabupaten, sampai propinsi. Salah satu dari inisiatif tersebut adalah Program Karbon Hutan Berau yang dilaksanakan di Kabupaten Berau dengan dukungan dari The Nature Conservancy (TNC).

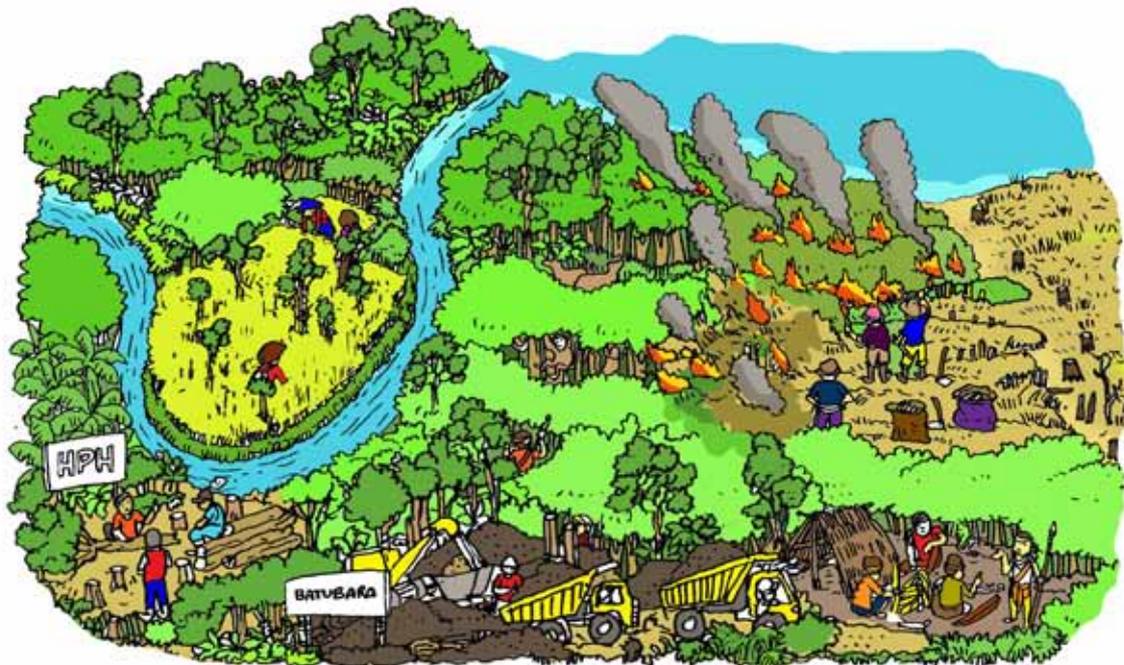
Dukungan Berau bagi Dunia: Program Karbon Hutan Berau

Program Karbon Hutan Berau (PKHB) bertujuan untuk menunjukkan bahwa upaya pembangunan dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan hutan dan sumber daya alam lainnya secara berlebihan. PKBH dicanangkan secara resmi oleh Kementerian Kehutanan sebagai program percontohan REDD+ di Indonesia pada bulan Januari 2010. PKHB merupakan inisiatif REDD+ pertama di Indonesia yang menerapkan upaya REDD+ berskala kabupaten. Dengan menerapkan inisiatif REDD+ pada seluruh wilayah daratan kabupaten, seluas 2,2 juta hektar, PKHB mempunyai peluang untuk mengatasi berbagai sumber atau penyebab penggundulan dan kerusakan hutan. Pada saat ini, lebih dari 75% wilayah Kabupaten Berau masih tertutup hutan. Walaupun demikian, luasan kawasan hutan ini dapat menyusut dengan cepat karena perekonomian kabupaten masih sangat tergantung pada sumber daya alam dan hutan. Saat ini dua sektor mendominasi perekonomian Kabupaten Berau, yaitu sektor pertambangan (40% dari Produk Domestik Bruto) dan sektor kehutanan (30% dari Produk Domestik Bruto). Pada saat ini terdapat 16 perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dengan luas sekitar 880.000 ha dan 3 perusahaan pemegang konsensi Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan luas sekitar 229.000 ha. Sejumlah izin eksplorasi dan produksi batu bara juga sudah dikeluarkan dengan luas sekitar 280.000 ha. Izin perkebunan sawit yang dikeluarkan diperkirakan sudah mencapai sekitar 320.000 ha walaupun total luas perkebunan yang sudah ditanam hanya sekitar 62.000 ha. Meluasnya hutan yang telah dan akan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara makin mengancam keutuhan hutan di Berau dan meningkatkan pelepasan karbon dioksida ke atmosfer. Antara tahun 2000 dan 2010, diperkirakan terjadi pelepasan emisi karbon dioksida sebesar 10 juta ton setiap tahun akibat penggundulan hutan dan aktivitas pengambilan kayu oleh perusahaan. Penghitungan ini belum memperhitungkan emisi dari kegiatan penebangan liar sehingga emisi yang terjadi sebetulnya lebih tinggi. PKHB menawarkan alternatif baru bagi Berau untuk mencapai sasaran pembangunan, dan pada



saat bersamaan, menjaga dan melestarikan hutan yang tersisa melalui penerapan strategi pembangunan yang rendah karbon.

Untuk mengatasi sumber atau penyebab penggundulan dan pengrusakan hutan, PKHB mengembangkan dua kelompok strategi, yaitu strategi penguatan kondisi pemungkin dan strategi berbasis tapak. **Strategi penguatan kondisi pemungkin**, yang dilaksanakan secara lintas sektor, bertujuan untuk menciptakan atau memperkuat kondisi pemungkin sehingga sumber atau penyebab penggundulan dan pengrusakan hutan dapat dikendalikan atau diminimalkan. Strategi ini mencakup penyempurnaan rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan, perbaikan tata kelola sektor kehutanan, pelibatan para pemangku kepentingan, peningkatan kesejahteraan dan pelibatan masyarakat, pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian insentif, dan pengembangan sistem penghitungan pengurangan emisi yang dapat dipantau, dilaporkan, dan diverifikasi. **Strategi berbasis tapak**, yang dilaksanakan di tingkat unit pengelola, bertujuan untuk mengembangkan model pengurangan emisi di berbagai tipe pengelolaan hutan. Strategi ini mencakup perbaikan tata kelola hutan produksi, perbaikan tata kelola hutan lindung, perbaikan tata kelola perkebunan sawit, dan perbaikan tata kelola hutan bakau. Melalui penerapan strategi-strategi tersebut selama lima tahun fase ujicoba, Kabupaten Berau diharapkan dapat mencegah pelepasan emisi karbon dioksida dari penggundulan dan pengrusakan hutan sekurang-kurangnya sebesar 10 juta ton.



Pelibatan Masyarakat dalam REDD+ dan PKHB

Masyarakat memainkan peranan penting dalam menurunkan laju penggundulan dan pengrusakan hutan sehingga harus dilibatkan secara aktif dalam inisiatif REDD+ di Indonesia, termasuk PKHB. Masyarakat harus dilibatkan dalam inisiatif-inisiatif REDD+ karena beberapa alasan, di antaranya: **Pertama**, masyarakat di Indonesia yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan besar jumlahnya, dan sebagian masih di bawah garis kemiskinan. Kementerian Kehutanan (2010b) memperkirakan terdapat sekitar 31.957 desa (36% dari seluruh jumlah desa) yang terletak di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh negara. Jumlah penduduk yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan ini diperkirakan sekitar 48,8 juta di mana 10,2 juta di antaranya masuk dalam kategori kelompok miskin. Bila data ini dibandingkan dengan data Biro Pusat Statistik (2010) mengenai jumlah total kelompok miskin di Indonesia (31,02 juta), dapat disimpulkan bahwa 30% dari kelompok miskin ini berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, selain potensi kontribusi yang dapat diberikan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan sangat besar, ada kemungkinan inisiatif REDD+ memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang miskin bila inisiatif tersebut tidak dirancang untuk melibatkan dan mengurangi kerentanan mereka.

Kedua, kehidupan masyarakat tersebut masih sangat tergantung pada hutan, sumber daya di dalamnya, dan jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan, secara sosial, budaya, dan ekonomi. Masyarakat tersebut menangkap hewan buruan, ikan, dan menggumpulkan kayu dan hasil hutan non-kayu untuk menunjang kehidupannya. Mereka tergantung pada sungai sebagai sumber air bersih yang keberadaannya didukung oleh hutan. Masyarakat menggumpulkan madu, buah-buahan, atau tanaman obat-obatan sebagai bagian dari budaya dan identitas mereka. Kuburan nenek moyang mereka terkadang terletak di dalam hutan. Kerusakan dan hilangnya hutan dapat mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan, hilangnya tradisi dan budaya yang terkait dengan hutan, dan hilangnya hubungan spiritual masyarakat dengan hutan. Masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan seharusnya memiliki motivasi dan komitmen yang tinggi untuk ikut terlibat dalam upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan hutan.

Ketiga, di banyak tempat di Indonesia, masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar memiliki pengalaman, pengetahuan, dan menerapkan aturan lokal dalam menggunakan dan mengelola hutan dan sumber daya alam sehingga sumber alam tersebut lestari. Namun, pengetahuan dan aturan lokal tersebut tidak dimiliki atau terkikis di tempat-tempat lain sehingga masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan alih fungsi hutan dan sumber daya alam secara berlebihan. Pengetahuan dan aturan lokal yang sudah ada bisa menjadi modal yang luar biasa, dan mereka masih dapat diperkuat, diperbaiki atau dihidupkan kembali, bila sudah terkikis atau hilang, terutama di saat di mana tekanan dari luar yang mendorong pengambilan sumber daya hutan atau perubahan fungsi hutan semakin besar.



Keempat, semangat dan komitmen masyarakat untuk mempertahankan hutan, yang menunjang kehidupannya, atau untuk mengubah perilakunya sedemikian rupa sehingga mengurangi tekanan terhadap hutan dan sumber daya alam lain akan meningkat bila mereka mendapat dukungan dari luar. Skema REDD+ memberikan peluang bagi masyarakat yang terlibat dalam upaya-upaya mencegah pengrusakan hutan dan pengelolaan hutan yang lebih baik untuk menerima manfaat. Keterlibatan masyarakat dalam merancang program REDD+ juga akan memastikan mereka tidak terkena dampak negatif dari upaya-upaya yang dikembangkan.

Program Karbon Hutan Berau (PKHB) memahami pentingnya melibatkan masyarakat dalam upaya-upaya menurunkan emisi dari penggundulan dan pengrusakan hutan sehingga masyarakat dilibatkan secara aktif dalam merancang dan melaksanakan strategi-strateginya. Dalam merancang strategi penurunan emisi, PKHB mempertimbangkan kondisi masyarakat di Berau dan interaksi mereka dengan hutan. Proses penyusunan strategi penurunan emisi dari berbagai tipe pengelolaan hutan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat melalui berbagai proses konsultasi. Dokumen “*Business Plan for Community Engagement Component of BFCP*”, yang disusun oleh the World Education and TNC (2010) dan menjadi salah satu sumber pengembangan strategi dan kerangka pelibatan masyarakat yang diuraikan dalam buku panduan ini, disusun melalui pengumpulan data di tingkat kampung dan proses konsultasi di tingkat kabupaten, propinsi, dan nasional. Pelaksanaan strategi pelibatan masyarakat ini akan melibatkan warga masyarakat secara aktif, setidaknya-tidaknya di 20 kampung. Pelaksanaan strategi penguatan kondisi pemungkin dan strategi berbasis tapak lainnya juga akan melibatkan masyarakat terkait.

Peranan TNC dalam PKHB

TNC memainkan peranan penting dalam merancang PKHB dan dalam proses mengembangkan dan menyusun strategi-strategi penurunan emisi dari penggundulan dan pengrusakan hutan. TNC juga ikut mengembangkan sistem tata kelola PKHB, termasuk Dewan Pengarah, Kelompok Kerja PKHB di tingkat kabupaten, propinsi, dan nasional. Selain itu, TNC juga memainkan peranan penting dalam melaksanakan berbagai strategi, termasuk di antaranya, membangun kemitraan dengan berbagai lembaga lokal, nasional, dan internasional untuk mendukung PKHB, mengembangkan mekanisme pendanaan untuk menunjang pelaksanaan PKHB, melalui *Tropical Forest Conservation Act* (TFCA), menerapkan dan menguji strategi penurunan emisi gas rumah kaca dari hutan produksi bersama-sama dengan beberapa pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA).

Terkait dengan masyarakat, selain mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi, membagi pembelajaran ke berbagai pihak terkait untuk mendukung pengelolaan hutan dan sumber daya alam berbasis masyarakat, dan mengembangkan strategi pelibatan masyarakat, TNC juga secara



langsung menerapkan dan menguji strategi tersebut di beberapa kampung di Berau sejak tahun 2011. Penerapan strategi tersebut memberikan hasil yang menggembirakan sehingga TNC ingin mendorong penerapan strategi ini di kampung-kampung lain di Berau dan tempat-tempat lain.

Buku Panduan dan Pengguna yang Dituju

Buku panduan ini disusun oleh TNC berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dalam mendampingi masyarakat sejak tahun 2011 di beberapa kampung di Berau untuk terlibat dalam upaya-upaya mencegah penggundulan dan pengrusakan hutan.

Buku ini ditujukan khususnya untuk lembaga swadaya masyarakat yang sudah memiliki pengalaman dan ketrampilan yang cukup dalam mendampingi warga masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam PKHB. Karena strategi, pendekatan, dan tahapan diuraikan secara sederhana, diharapkan kelompok swadaya masyarakat juga dapat menggunakan buku panduan ini untuk mendampingi warga masyarakat di kampungnya atau di kampung lainnya untuk terlibat dalam PKHB.

Walaupun dikembangkan untuk masyarakat kampung di Berau untuk mendukung PKHB, strategi dan tahapan yang dikembangkan sangat relevan untuk inisiatif REDD+ secara umum, sehingga buku panduan ini juga dapat dipakai dalam menunjang berbagai inisiatif REDD+ di luar Berau. Strategi dan tahapan yang disajikan dalam buku ini juga relevan bagi usaha pelibatan masyarakat adat dalam inisiatif REDD+ di berbagai tempat di Indonesia dimana wilayah dan struktur tata kelola masyarakat adat kadang-kadang berbeda dengan wilayah administrasi dan struktur pemerintahan kampung.

Alat bantu yang disajikan di buku ini dapat juga digunakan secara terpisah oleh lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam merancang atau melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dalam berbagai program dan konteks yang berbeda.

Pengguna buku ini sangat dianjurkan untuk mengadaptasi proses dan alat bantu yang disarankan di dalam buku ini dengan kondisi masyarakat yang didampingi. Untuk membantu proses penyesuaian ini, buku panduan ini dilengkapi dengan *compact disc* (CD) yang berisi materi-materi pendukung, dalam bentuk film, slide presentasi, dan materi bacaan tambahan.



Struktur Buku Panduan

Buku panduan ini dibagi menjadi 12 bab. Setiap bab terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- **Pengantar** yang menjelaskan materi yang akan diuraikan dalam bab tersebut;
- **Rancangan Proses** yang mengurai proses dan alat bantu yang bisa dipakai;
- **Bahan Bacaan** yang berisi daftar bacaan yang bisa memperkaya pengetahuan, ketrampilan, dan kesiapan fasilitator.

Kedua belas bab dalam buku panduan ini adalah:

- 1. Aksi Inspiratif Warga dalam REDD+**
Memperkenalkan buku panduan ini, mengapa buku ini dibuat, dan pengguna yang dituju.
- 2. Pelibatan Masyarakat Dalam Program Karbon Hutan Berau**
Menjelaskan mengenai PKHB, masyarakat di Berau, strategi yang dikembangkan oleh TNC untuk melibatkan masyarakat dalam PKHB, pendekatan utama yang digunakan, dan tahapan-tahapan utama dalam strategi yang dikembangkan.
- 3. Perubahan Iklim, Hutan, dan REDD+**
Mengurai apa itu Perubahan Iklim dan REDD+, peran hutan dan pentingnya hutan bagi masyarakat, bagaimana masyarakat dapat membantu mengurangi emisi dari pengrusakan dan penggundulan hutan.
- 4. Pemetaan Aset**
Apa yang dimaksud dengan pemetaan aset, mengapa pemetaan ini penting, dan bagaimana melibatkan warga masyarakat dalam pemetaan aset.
- 5. Membangun Mimpi Bersama**
Menjelaskan apa yang dimaksud dengan membangun visi berbasis rencana tata guna lahan, mengapa harus dilakukan, dan bagaimana melibatkan warga kampung dalam proses ini.
- 6. Penataan Lahan: Pembangunan Peta Tata Guna Lahan Tiga-Dimensi**
Apa yang dimaksud dengan peta tata guna lahan 3D-lahan, kenapa perlu dibangun peta ini, dan proses pendampingan yang dapat digunakan untuk melibatkan warga kampung dalam membangun peta 3D ini.
- 7. Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung dan Penggalangan Dana**
Mengurai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK), apa isi kedua dokumen perencanaan ini, dan bagaimana melibatkan warga dalam penyusunan kedua dokumen ini ini.



8. Dana Pendukung dalam PKHB

Memberi penjelasan tentang dana yang dapat dimanfaatkan oleh warga yang terlibat dalam PKHB dan sistem yang dikembangkan untuk memberikan penghargaan kepada warga masyarakat yang melaksanakan aksi-aksi untuk mendukung PKHB secara bersungguh-sungguh.

9. Penyusunan Rencana Kerja dan Pembahasan Mengenai Pembagian Manfaat

Menjelaskan kajian cepat berbasis kuesioner yang perlu dilakukan fasilitator untuk memperoleh informasi mengenai pola penggunaan lahan oleh masyarakat, perubahan yang dapat diterima oleh warga, dan dukungan yang mereka butuhkan bila pola penggunaan lahan ini diubah. Akan diuraikan juga dalam bab ini bagaimana informasi yang dikumpulkan ini digunakan sebagai basis penyusunan Rencana Kerja.

10. Pembuatan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama

Mengurai kesepakatan yang perlu dibuat oleh warga dan dokumen Perjanjian Kerjasama yang perlu disepakati oleh warga kampung dan menyandang dana, mengapa kedua dokumen tersebut penting, dan proses pendampingan yang diperlukan.

11. Pelaksanaan Kesepakatan dan Pemantauan

Menjelaskan pendampingan yang perlu diberikan kepada masyarakat dalam melakukan aksi-aksi yang diusulkan dalam Rencana Kerja Sama, pemantauan yang perlu dilakukan oleh masyarakat sehingga mereka dapat mengevaluasi dan memperbaiki perencanaan dan kinerja pada tahun berikutnya.

12. Perayaan

Menjelaskan pentingnya merayakan capaian dan langkah yang dibuat oleh warga kampung dalam mencapai mimpi mereka.

Strategi dan pendekatan yang dikembangkan oleh TNC diyakini dapat mendorong warga masyarakat untuk mendayagunakan kekuatan yang mereka miliki dan melakukan aksi inspiratif untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di tengah sumber daya hutan dan alam yang lestari.



BAHAN BACAAN

Biro Pusat Statistik. 2010. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010. Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010. BPS, Jakarta.

FAO. 2006. *Global Forest Resources Assessment 2005: Progress towards sustainable management*. FAO Forestry Paper 147. FAO, Rome.

IPCC. 2007. *Climate Change 2007. Working Group I Contributions to the IPCC Fourth Assessment Report*. Cambridge University Press, Cambridge.

IFCA (Indonesian Forest Climate Alliance). 2008. *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia*. Forestry Research and Development Agency, Ministry of Forestry of Republic of Indonesia (FORDA-MoF).

Kementerian Kehutanan. 2010a. Strategi Nasional REDD+ Versi 4 November 2010. Kementerian Kehutanan, Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2010b. Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014. Kementerian Kehutanan, Jakarta.

Stern, N. 2006. *The Economics of Climate Change: the Stern Review*. Cambridge University Press, Cambridge.

World Education and The Nature Conservancy. 2010. *Berau Forest Carbon Program: Business Plan for the Community Engagement Component of the Berau District Model REDD Program*. TNC and WE, Jakarta.

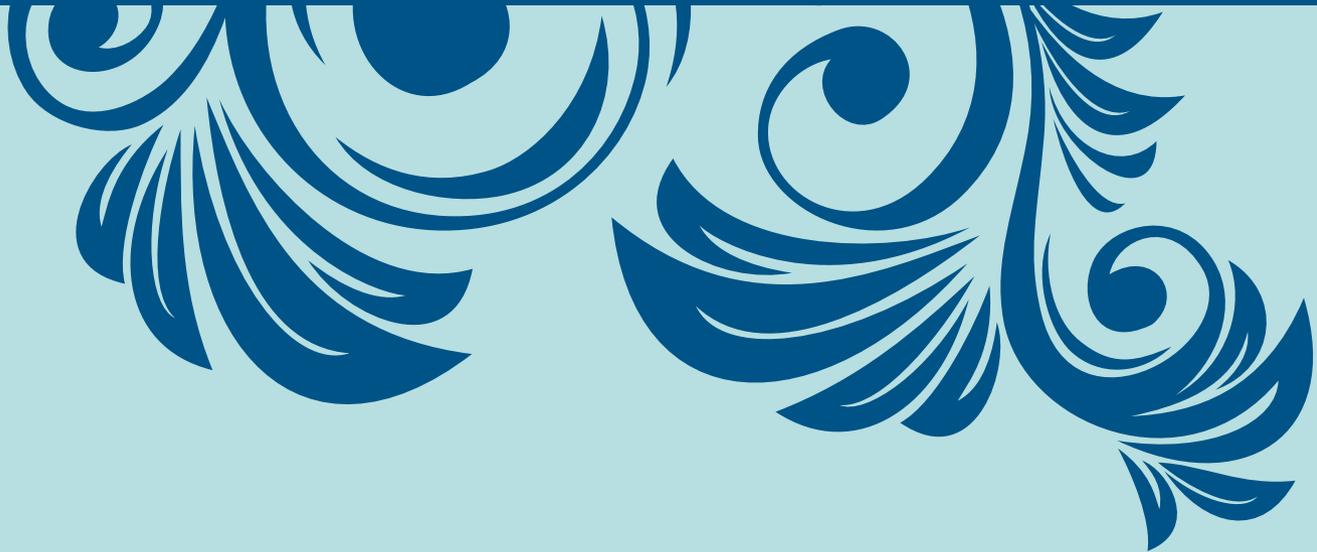






BAB 2

Pelibatan Masyarakat Dalam Program Karbon Hutan Berau



Kabupaten Berau dihuni oleh 193.831 penduduk yang tersebar di 100 kampung dan 10 kelurahan (BPS Berau, 2013). Tingkat ketergantungan pada hutan dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya beragam dari satu kampung dengan kampung lainnya. Kampung-kampung yang terletak di hulu-hulu sungai umumnya didiami oleh masyarakat yang homogen dan masih sangat tergantung pada hutan dan sumber daya alam lainnya untuk menunjang kehidupannya, seperti Suku Punan dan Gaai. Kampung-kampung ini umumnya berada di dalam wilayah konsesi kehutanan atau wilayah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Kampung-kampung yang terletak di hilir sungai memiliki komposisi masyarakat yang lebih beragam; tingkat ketergantungan warga kampung terhadap hutan lebih rendah dibandingkan dengan warga kampung yang tinggal di hulu sungai. Sebagian warga yang tinggal di hilir sungai sudah memiliki sumber penghasilan lain, seperti berdagang, bekerja sebagai guru, pegawai negeri, atau buruh. Kampung-kampung ini banyak yang terletak di dalam atau di sekitar wilayah perkebunan sawit dan sebagian warga telah mengembangkan kebun plasma. Sama seperti kampung-kampung yang terletak di hilir sungai, kampung-kampung yang terletak di pinggir pantai atau pesisir juga memiliki komposisi masyarakat yang beragam. Di kampung-kampung ini dapat dijumpai pendatang dari Sulawesi, seperti Bone dan Bugis, yang menggantungkan kehidupannya sebagai nelayan. Lebih lanjut, di Berau juga dapat dijumpai beberapa kampung transmigran. Penduduk yang tinggal di kampung-kampung tersebut berasal dari Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi dan umumnya bertani dan berkebun secara intensif (Moeliono *et al.*, 2010).

Pada saat ini, masyarakat Berau yang hidupnya masih tergantung pada hutan dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya menghadapi berbagai tantangan untuk mempertahankan kehidupannya. **Pertama**, hak mereka untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan hasil di dalamnya lemah menurut hukum. Hak pengelolaan terhadap sekitar 40% dari total luas daratan Berau sudah dipegang oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA), 10% sudah dipegang oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), dan setidaknya 27% sudah dan akan berada ditangan perusahaan sawit dan tambang. Menurut hukum, masyarakat yang berdiam di dalam dan di sekitar wilayah konsesi ini tidak sepenuhnya dapat mengambil hasil hutan dan sumber daya alam di dalamnya, walaupun mereka sudah tinggal menetap di tempat tersebut jauh sebelum hak pengelolaannya diserahkan oleh pemerintah kepada perusahaan tersebut. Untuk masyarakat yang hidupnya sangat tergantung pada hutan, praktik-praktik pengelolaan yang tidak lestari oleh perusahaan-perusahaan, baik perusahaan kayu, perkebunan, atau pertambangan, akan berdampak buruk terhadap kehidupan mereka.



Kedua, masyarakat jarang memiliki rencana bagaimana lahan, hutan, dan sumber daya alam di sekeliling kampung akan mereka kelola dan manfaatkan. Mereka juga tidak dilibatkan dalam proses perencanaan tata guna lahan di tingkat kabupaten. Bila rencana tata guna lahan kabupaten sudah tersusun, masyarakat juga tidak mendapat informasi yang cukup mengenai rencana pemerintah dalam mengelola dan mengalokasikan peruntukan hutan, lahan, dan sumber daya alam sehingga mereka tidak dapat mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Akibatnya, masyarakat akan kehilangan sumber kehidupan mereka ketika izin pengelolaan hutan dan sumber daya alam di dalam dan di sekitar wilayah kampung mereka diberikan oleh pemerintah kepada pihak swasta.

Ketiga, seperti di berbagai tempat di Indonesia, tata kelola di tingkat kampung di Berau, termasuk lembaga, nilai dan aturan adat yang mengatur tingkah laku warga dan hubungan mereka dengan hutan dan alam, juga sudah melemah. Meningkatnya tekanan dari pertumbuhan penduduk, tingginya permintaan pasar untuk berbagai hasil hutan dan perkebunan, masuknya teknologi yang tidak ramah lingkungan, dan melemahnya lembaga adat, menyebabkan sebagian warga melakukan pembalakan liar, perambahan hutan untuk memperluas lahan perladangan atau perkebunan, pertambangan dan perburuan liar. Pada yang bersamaan, terbatasnya kesempatan, keterampilan, dan dukungan menyebabkan sebagian warga tidak mampu mengembangkan sumber-sumber penghidupan lain untuk mengurangi kegiatan pengambilan hasil hutan atau penggunaan lahan yang berkontribusi terhadap kerusakan dan penggundulan hutan.

Memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, Program Karbon Hutan Berau (PKHB) telah mengembangkan strategi penguatan kondisi pemungkin dan strategi berbasis tapak yang akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan berbagai strateginya, PKHB akan melibatkan masyarakat, setidak-tidaknya di 20 kampung, secara aktif dan memberikan dukungan bagi masyarakat untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut di atas. Pendampingan dan dukungan tersebut diharapkan tidak saja dapat menghasilkan dampak yang positif bagi hutan, seperti dalam bentuk penurunan emisi karbon dari kerusakan dan penggundulan hutan, tetapi juga dampak yang positif bagi masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai oleh PKHB pada akhir fase demonstrasi di kampung-kampung yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

- **Keamanan:** Meningkatnya wilayah hutan yang dikelola oleh masyarakat secara formal dan tingkat kepuasan masyarakat dalam mempertahankan hubungan dan interaksinya dengan hutan;
- **Kesejahteraan:** Meningkatnya pendapatan, sumber-sumber mata pencaharian yang ramah lingkungan, dan akses terhadap fasilitas dan layanan umum, seperti listrik, sumber air bersih, pendidikan dan kesehatan; dan



- **Kemandirian:** Masyarakat dapat memperkuat tata kelola dalam kampung, menata lahan, menggalang dan mengelola dana, lebih percaya diri dalam bernegosiasi dengan pihak lain, dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam.

TNC mendukung upaya pelibatan masyarakat dalam PKHB melalui beberapa cara. **Pertama**, TNC mengembangkan strategi dan pendekatan pelibatan masyarakat. Dalam mengembangkan strategi dan pendekatan tersebut, TNC mengacu pada prinsip-prinsip dari Standar Sosial dan Lingkungan REDD+, termasuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*free, prior and informed consent*) dari masyarakat. **Kedua**, TNC secara langsung mendampingi warga di beberapa kampung di Berau untuk terlibat dalam PKHB dengan menggunakan strategi dan pendekatan yang dikembangkan. Bersama mitra, TNC mendorong replikasi strategi dan pendekatan tersebut di kampung-kampung lain.

Ketiga, TNC merancang dan mendukung pembentukan wadah di mana masyarakat yang mengelola hutan dan sumber daya alam dapat saling belajar, berbagi pengalaman, dan bersama-sama mencari pemecahan atas tantangan yang mereka hadapi. **Keempat**, TNC mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam PKHB memberikan kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.

Kelima, TNC menggunakan temuan dan hasil pembelajaran untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan pengambil keputusan agar kebijakan yang lebih baik dapat dikembangkan untuk mendukung pengelolaan hutan dan sumber daya alam berbasis masyarakat. **Akhirnya**, TNC juga secara aktif membagikan pengalaman ke pihak lain sehingga diharapkan lebih banyak lagi masyarakat yang dapat memperoleh manfaat.

Dalam melibatkan masyarakat secara penuh dalam PKHB, TNC mengembangkan strategi pelibatan masyarakat. Strategi tersebut berpegang pada beberapa prinsip utama, yaitu:

- Strategi dan proses pelibatan masyarakat dalam inisiatif REDD+ harus membantu masyarakat dalam mengatasi tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Strategi dan proses pelibatan masyarakat dalam PKHB dirancang tidak semata-mata untuk mengurangi pengrusakan dan penggundulan hutan, namun juga untuk menyejahterakan masyarakat, memperbaiki tata kelola di tingkat kampung, dan meningkatkan kemandirian masyarakat;
- Masyarakat merupakan sumber kekuatan atau 'aset', bukan sumber masalah. Mereka memiliki kekuatan yang dapat didayagunakan secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraannya sendiri dan mengelola hutan dan sumber daya alam lainnya;



- Masyarakat didampingi dan diberi kesempatan penuh untuk membuat keputusan apakah mereka akan terlibat atau tidak terlibat dalam PKHB. Bila mereka sepakat untuk terlibat, kesepakatan tersebut diambil dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, setelah mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi dampak keterlibatan mereka dengan baik. Masyarakat mau terlibat karena mereka memahami tantangan yang mereka alami, yaitu penurunan kualitas sumber daya alam, ekonomi, nilai sosial dan budaya, dan secara sadar membuat kesepakatan untuk melakukan perubahan yang akan memberikan dampak yang positif terhadap kondisi mereka sendiri dan alam di sekitarnya;
- Pendampingan dan dukungan yang diberikan bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat, bukan untuk menggantikan atau menafikan, aset masyarakat yang sudah ada. Pendampingan dan dukungan tersebut diberikan dan dialokasikan sedemikian rupa sehingga aset yang sudah ada, tetapi saat ini dalam kondisi lemah atau tidak lengkap, dapat dikuatkan dan didayagunakan secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan;
- Masyarakat akan menerima manfaat dari keterlibatannya. Besaran manfaat yang diperoleh akan tergantung dari tingkat kinerja mereka sendiri: masyarakat yang kinerjanya baik akan memperoleh lebih banyak manfaat. Manfaat tersebut akan dibagi secara adil dan dapat digunakan masyarakat untuk mengembangkan sumber-sumber penghidupan, pelatihan, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, atau yang lainnya, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama.

Fasilitator (pendamping) memainkan peranan yang sangat penting dalam keseluruhan proses. Peranan yang dimainkan oleh fasilitator, antara lain:

- Mendampingi warga dalam menemukenali kekuatan yang mereka miliki dan mendayagunakan kekuatan tersebut untuk mencapai mimpi dan visi besar mereka;
- Merancang proses, menyediakan alat bantu, dan menciptakan kondisi yang memudahkan warga, kelompok warga, dan pemerintah kampung dalam merencanakan dan melaksanakan suatu inisiatif;
- Menyambungkan warga dengan pihak lain, seperti lembaga pemerintah, perusahaan, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat lain;
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga terhadap berbagai isu yang relevan, terutama isu-isu pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi, pembangunan, dan hukum.

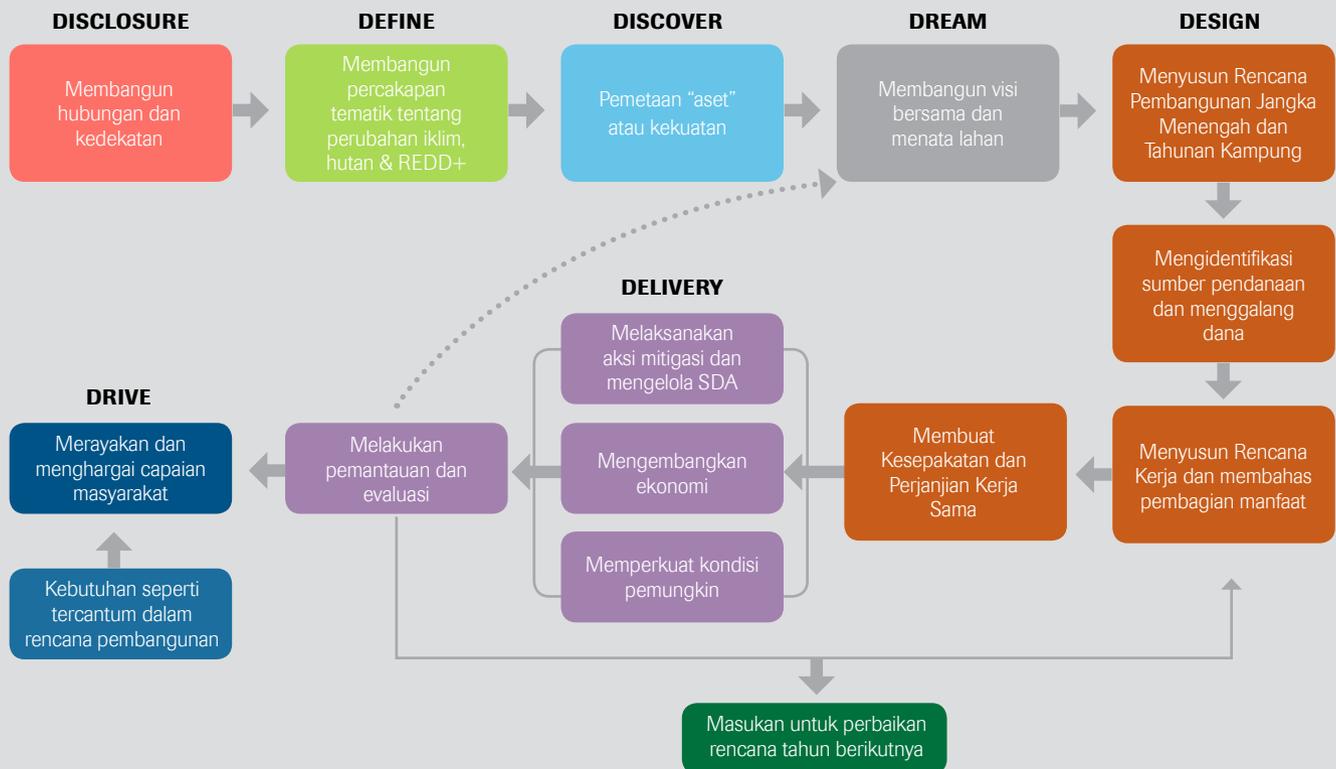


Strategi pelibatan masyarakat yang dikembangkan oleh TNC membagi proses pendampingan kedalam beberapa tahapan utama. Strategi pelibatan masyarakat ini bertumpu pada pendekatan *appreciative inquiry* untuk menggali, menemukenali, dan menghargai kekuatan yang dimiliki warga dan mendayagunakannya sebagai daya dorong untuk melakukan perubahan positif dan inspiratif. Strategi pelibatan masyarakat yang dikembangkan oleh TNC mengembangkan tahapan 4D *appreciate inquiry*, yaitu: *Discovery-Dream-Design-Delivery*, menjadi tahapan 7D sebagai berikut:

- **Disclosure** (membuka diri): Pada tahap awal ini, warga dan pendamping saling membuka diri untuk membangun hubungan dan kedekatan. Warga menyampaikan kepada pendamping mengenai kehidupan mereka, tantangan yang mereka hadapi, serta harapan dan mimpi mereka atas kehidupan yang lebih baik;
- **Define** (menentukan tema) Fasilitator dan warga membangun percakapan tematik mengenai tema-tema yang penting bagi keberlanjutan kehidupan warga, terutama yang terkait dengan perubahan iklim, hutan, dan REDD+.
- **Discovery** (menemukenali kekuatan): Pada tahap ini, warga bersama-sama menemukenali kekuatan dan aset yang mereka miliki dan memahami bahwa kekuatan ini sebetulnya bisa mereka dayagunakan secara lebih baik untuk mencapai mimpi dan harapan tersebut;
- **Dream** (bermimpi): Warga kampung membangun mimpi bersama yang akan diwujudkan bersama-sama dengan memanfaatkan kekuatan dan aset yang mereka miliki;
- **Design** (merancang): Pada tahap ini, warga kampung merancang aksi dan kegiatan yang akan mereka lakukan untuk mewujudkan mimpi bersama mereka;
- **Delivery** (melaksanakan): Warga kampung melakukan aksi-aksi inspiratif untuk memperbaiki kehidupan mereka dan sumber daya alam di sekitarnya, dan sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian sasaran PKHB;
- **Drive** (merayakan dan menggerakkan): Keberhasilan warga kampung dalam melakukan aksi dan kegiatan tersebut akan menginspirasi dan menggerakkan mereka untuk melakukan perubahan-perubahan positif lain. Warga kampung menjadi tokoh dan motor perubahan dan membawa kampung mereka semakin dekat dengan mimpi bersama mereka.

Ketujuh tahapan tersebut dan rinciannya digambarkan dalam bentuk diagram (lihat Gambar 2.1).





Gambar 2.1. Kerangka Pelibatan Masyarakat

Melalui tahapan-tahapan tersebut di atas, warga kampung akan merancang keterlibatan mereka dalam melakukan aksi dan inisiatif yang akan membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian sasaran PKHB. Mereka akan melibatkan diri dalam:

- Inisiatif untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap pengrusakan dan penggundulan hutan, misalnya perladangan berpindah atau pembalakan liar;
- Aksi untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi dan fungsi hutan dan sumber daya alam lainnya melalui kegiatan pemantauan lingkungan, penanaman pohon, dan pengelolaan bersama perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau sumber daya alam lainnya;
- Inisiatif pengembangan ekonomi, seperti budidaya karet, ikan air tawar, lebah madu, dan peternakan;

- Upaya penguatan kondisi pemungkin yang menunjang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan pengembangan ekonomi secara lestari, seperti pelatihan, penguatan kelembagaan, dan perbaikan tata kelola di tingkat kampung.

Semua tahapan tersebut diuraikan secara ringkas di bawah ini dan dirincikan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

1. Proses Membangun Hubungan dan Kedekatan

Sebagai tahapan awal, fasilitator perlu membangun hubungan dan kedekatan dengan warga kampung yang akan didampingi. Tahapan membangun landasan kerja sama ini merupakan tahapan yang sangat penting dan fasilitator perlu mengalokasikan waktu antara 3-6 bulan sampai hubungan, rasa kepercayaan dan kedekatan ini terbangun. Selama periode ini, fasilitator perlu berinteraksi secara intensif dengan tokoh dan warga kampung, baik dalam konteks formal dan informal, di kantor kepala kampung, warung, ladang, rumah warga, atau di tempat lainnya. Melalui interaksi ini, fasilitator akan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat, dan bagaimana warga kampung memanfaatkan dan mengelola hutan dan sumber daya alam di sekitar mereka. Fasilitator juga perlu menggunakan tahapan ini untuk memperkenalkan diri, lembaga yang diwakili, dan membagi pengalaman dan pembelajaran dari tempat lain.

2. Membangun Percakapan Tematik tentang Perubahan Iklim, Hutan, dan REDD+

Setelah kedekatan dengan warga mulai terbangun, fasilitator dapat mulai membangun percakapan tematik, dalam konteks formal dan informal, terkait perubahan iklim, peranan hutan dalam mengatur iklim dunia, dan inisiatif Berau dalam ikut mengatasi perubahan iklim melalui PKHB. Fasilitator perlu menggali apakah warga kampung merasakan perubahan musim atau cuaca, dampak yang mereka alami sebagai akibat dari perubahan tersebut, perubahan kondisi hutan dan sumber daya alam lainnya yang telah, sedang, dan akan dialami oleh warga berdasarkan pengamatan dan perkiraan mereka. Melalui tahapan ini, warga diharapkan lebih memahami hubungan antara kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan, penurunan kondisi dan fungsi hutan, perubahan cuaca atau iklim, dan menemukan peran yang dapat mereka mainkan untuk melakukan perubahan. Di akhir tahapan ini, fasilitator juga perlu menggali apakah warga tertarik untuk ikut terlibat dalam inisiatif PKHB. Bila warga kampung menyatakan ketertarikannya untuk terlibat secara aktif dalam PKHB, fasilitator perlu menggali lebih dalam dan mengidentifikasi peranan apa yang bisa dimainkan oleh masyarakat yang didampingi dalam inisiatif PKHB. Informasi ini perlu dikumpulkan melalui proses interaksi dan diskusi yang dapat dilakukan secara paralel dengan kegiatan pendampingan tahapan-tahapan berikutnya.

3. Membuat Peta Kekuatan

Strategi pelibatan masyarakat yang dikembangkan TNC menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat berbasis kekuatan. Landasan pendekatan ini adalah kepercayaan



bahwa masyarakat memiliki kekuatan (aset) dalam bentuk keterampilan, kemampuan, pengalaman, hubungan sosial, dan lainnya yang dapat didayagunakan untuk membangun masyarakat yang berdaya. Kekuatan ini sering tidak ditemukenali atau dinafikan sehingga warga kampung menjadi tidak percaya dengan kekuatan mereka sendiri dan terlalu tergantung pada dukungan dan sumber daya dari luar. Pada tahapan ini, fasilitator mendampingi warga kampung dalam menemukenali kekuatan-kekuatan tersebut dan mendiskusikan bagaimana kekuatan tersebut dapat lebih didayagunakan untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan membawa kampung dan kehidupan warga ke arah yang lebih baik.

4. Membangun Visi Bersama

Bila warga sudah menemukenali kekuatan mereka, mereka harus menentukan kehidupan lebih baik seperti apa yang mereka inginkan. Fasilitator mendampingi warga kampung dalam membangun mimpi atau visi bersama: kondisi ideal yang ingin mereka wujudkan dalam 10-15 tahun ke depan pada kehidupan mereka, hutan, dan sumber alam di sekeliling kampung mereka. Kondisi ideal terkait kehidupan warga meliputi, antara lain: kesejahteraan, sumber mata pencaharian yang memadai, layanan kesehatan dan pendidikan yang ideal, dan adanya prasarana dan sarana yang layak, seperti instalasi air bersih dan listrik. Kondisi hutan dan alam yang ideal meliputi, antara lain, kondisi hutan dan sungai yang baik, berlimpahnya ikan, binatang buruan, kayu, madu, gaharu, rotan, dan lainnya. Pada tahap ini, fasilitator perlu memastikan bahwa mimpi atau visi yang muncul cukup holistik (menyeluruh) dimana tidak hanya terfokus pada satu aspek saja, misalnya pembangunan infrastruktur kampung, dan mimpi atau visi tersebut dapat dicapai dalam kurun waktu yang disepakati. Pada akhir tahapan ini, warga kampung yang didampingi berhasil mengembangkan satu mimpi atau visi yang disepakati bersama.

5. Menata Lahan

Warga kampung selanjutnya didampingi untuk menata lahan dan kampung sebagai bagian dari usaha dalam mewujudkan mimpi atau visi bersama mereka. Bila pada tahap sebelumnya mereka memimpikan adanya gedung sekolah dan pembangkit tenaga air (mikrohidro) yang akan menerangi kampung mereka, maka pada tahap ini mereka perlu mendiskusikan dan menyepakati di mana gedung sekolah dan mikrohidro tersebut sebaiknya dibangun. Bila warga kampung membayangkan bahwa setiap keluarga akan mengembangkan perkebunan karet atau buah, maka pada tahap ini mereka diminta untuk mendiskusikan dan menyepakati di mana perkebunan karet atau buah tersebut sebaiknya dikembangkan. Bila mereka ingin menghijaukan kembali lahan-lahan di sekitar kampung mereka, maka mereka perlu untuk mendiskusikan dan menyepakati di mana lokasi lahan-lahan tersebut. Bila warga ingin mengembangkan lahan pertanian intensif, seperti sawah atau kebun sayur, untuk membatasi perladangan berpindah, maka mereka diminta untuk mendiskusikan di mana lahan pertanian intensif tersebut sebaiknya dikembangkan dan



seberapa jauh pembatasan ladang dapat disepakati oleh warga. Bila ada kawasan hutan yang warga ingin lindungi karena kawasan tersebut penting secara sosial, budaya, dan menunjang kehidupan warga, maka mereka diminta untuk mengidentifikasi lokasi dan luasan kawasan tersebut. Pada tahap ini, fasilitator memperkenalkan model tata guna lahan tiga dimensi yang menggambarkan wilayah kampung dan bentukan bentang alam sekitarnya, dan membantu warga dalam menuangkan mimpi dan perencanaan kampung mereka kedalam model tata guna lahan tiga dimensi ini. Butir penting dari hasil penataan lahan ini perlu dikomunikasikan dan didiskusikan dengan para pemangku kepentingan terkait. Keinginan warga untuk mengembangkan perkebunan karet di dalam wilayah IUPHHK perlu disampaikan dan didiskusikan dengan perusahaan pemegang izin dan dinas terkait.

6. Menyusun Rencana Pembangunan Kampung dan Penggalangan Dana

Setelah membangun mimpi dan menata lahan, warga kampung selanjutnya didampingi dalam mengembangkan strategi dan mengidentifikasi aksi atau kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai visi mereka. Strategi-strategi dan kegiatan-kegiatan ini selanjutnya disusun sesuai dengan urutan kepentingan dan dituangkan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK). Melalui proses membangun visi yang menyeluruh, dokumen-dokumen ini akan berisi tidak hanya strategi, kegiatan, dan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan gedung, tetapi juga aspek penting kehidupan lainnya, seperti pengembangan kapasitas, ekonomi, sosial budaya, dan pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya.

Dokumen perencanaan ini akan menjadi landasan bagi warga dalam membangun kampung mereka dengan sumber pendanaan dan kekuatan sendiri, dan menggalang sumber-sumber pendanaan lainnya. Sumber-sumber pendanaan lain yang dapat dijangkau, antara lain pendanaan yang berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten, lembaga pemerintah lainnya, perusahaan, dan LSM baik lokal maupun internasional.

7. Menyusun Rencana Kerja dan Membahas mengenai Pembagian Manfaat

Melalui proses pembuatan mimpi dan rencana pembangunan kampung, warga kampung akan mengidentifikasi strategi dan kegiatan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi hutan dan sumber daya alam lainnya. Strategi dan kegiatan ini, misalnya patroli hutan, pembatasan perladangan berpindah (ladang tidak dibuka di atas lahan yang masih berhutan), penanaman pohon di sempadan sungai, dan pengelolaan hutan desa. Sumber-sumber pendanaan dari pemerintah, perusahaan, dan LSM untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan dan sumber daya alam oleh masyarakat umumnya masih sangat terbatas. Di Kabupaten Berau, dengan dilaksanakannya PKHB, masyarakat memiliki sumber pendanaan baru yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan sumber daya alam tersebut. Bila warga kampung tertarik dan sepakat untuk



memanfaatkan dana dan terlibat dalam PKHB, fasilitator selanjutnya mendampingi warga dalam membahas dan menyusun rencana kerja secara rinci.

Dalam membantu warga dalam menyusun rencana kerja, fasilitator perlu memastikan bahwa kegiatan-kegiatan mitigasi yang diusulkan realistis dan dapat disepakati oleh warga, dan insentif yang dikembangkan sesuai dengan dengan minat dan kebutuhan warga. Untuk itu, fasilitator perlu melakukan kajian cepat penggunaan lahan dan toleransi perubahan yang dapat diterima oleh warga. Data dan informasi yang akan dikumpulkan dari setiap keluarga, antara lain jumlah lahan yang digunakan oleh setiap keluarga untuk perladangan dan perkebunan, jumlah dan luasan ladang yang dikelola oleh setiap keluarga untuk setiap tahunnya, dan seberapa jauh keluarga mau mengubah pola penggunaan lahan mereka selama ini, misalnya mengurangi jumlah atau luasan ladang berpindah, bila ada bantuan dari luar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi lain. Informasi yang dikumpulkan selanjutnya adalah kegiatan ekonomi apa yang ingin dikembangkan oleh keluarga dan dukungan apa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut. Data dan informasi yang dikumpulkan tersebut dianalisis oleh fasilitator dan selanjutnya disampaikan dan didiskusikan dengan seluruh warga. Hasil kajian dan diskusi ini akan digunakan sebagai landasan dalam menyusun rencana kerja.

Rencana kerja akan mengurai kegiatan-kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam yang akan dilakukan, kegiatan ekonomi yang ingin dikembangkan oleh warga sebagai penghargaan atas kontribusi mereka dalam usaha mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan kondisi pemungkin untuk mendukung keberhasilan kegiatan mitigasi dan pengembangan ekonomi tersebut. Penguatan kondisi pemungkin tersebut, antara lain, pelatihan, bantuan teknis, atau peningkatan tata kelola yang diperlukan oleh warga. Di dalam rencana kerja ini, warga juga akan mendeskripsikan kontribusi mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dukungan pendanaan yang dibutuhkan, bagaimana mereka akan mendistribusikan manfaat yang diterima secara adil di dalam kampung, tata kelola pendanaan dan sistem pertanggungjawaban, dan pemantauan kinerja yang akan dikembangkan. Selanjutnya rencana kerja ini juga perlu dikomunikasikan kepada pihak ketiga yang dipilih, seperti dinas pemerintahan terkait dan perusahaan pemegang izin yang wilayah kerjanya berhimpitan dengan wilayah kampung.

8. Membuat Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama

Kesepakatan warga untuk terlibat dalam PKHB selanjutnya perlu dituangkan kedalam satu dokumen kesepakatan. Dokumen kesepakatan ini mengurai komitmen warga dalam menata lahan dan kampung mereka serta keterlibatan mereka dalam usaha-usaha mitigasi sebagai bagian dari inisiatif PKHB. Dokumen kesepakatan ini merupakan dokumen yang sangat penting. Proses penyusunan dan pengesahan dokumen ini perlu dikawal dengan baik sehingga warga kampung memberikan persetujuannya tanpa ada paksaan dan memahami



bahwa mereka bertanggung jawab untuk menjalankan komitmen mitigasi tersebut dengan sungguh-sungguh. Fasilitator selanjutnya perlu memastikan bahwa setiap warga betul-betul memahami komitmen yang akan dilaksanakan bersama dan mengidentifikasi cara atau mekanisme yang paling sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat untuk mengikat kesepakatan tersebut.

Rencana kerja yang sudah disusun dan difinalisasi dapat diajukan kepada penyandang dana. Penyandang dana untuk mendukung pelaksanaan PKHB ini, antara lain, Yayasan Kehati, sebagai administrator dari Dana Konservasi Hutan Tropis (*Tropical Forest Conservation Act*), LSM yang mendapatkan Dana Konservasi Hutan Tropis, atau TNC. Bila rencana kerja masyarakat dinilai baik dan lembaga penyandang dana bersedia memberikan pendanaan, fasilitator selanjutnya perlu membantu warga dalam memahami isi Perjanjian Kerja Sama yang diajukan oleh penyandang dana dan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti selama masa perjanjian. Setelah seluruh isi perjanjian disepakati, perjanjian tersebut dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.

9. Melakukan Kesepakatan dan Pemantauan

Pada tahapan ini, fasilitator membantu lembaga kampung dan kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang direncanakan dengan menggunakan kekuatan dan aset yang dimiliki, dan memanfaatkan dana yang berhasil digalang untuk mewujudkan mimpi mereka. Lembaga kampung dan ketua kelompok didampingi dalam mengelola dana, seperti mencatat pengeluaran dan menyimpan bukti-bukti keuangan yang diperlukan, dan menyusun rencana kerja lebih rinci bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing. Selanjutnya, mereka juga didampingi dalam memantau apakah warga melaksanakan komitmen mitigasi, seperti berladang di lahan bekas ladang dan tidak di lokasi baru, jumlah bibit pohon yang sudah ditanami di lahan-lahan yang rusak, apakah pengawas lingkungan melaksanakan patroli pada kawasan hutan dan waktu yang disepakati, dan kelompok pengembangan ekonomi melakukan kegiatan seperti yang disepakati.

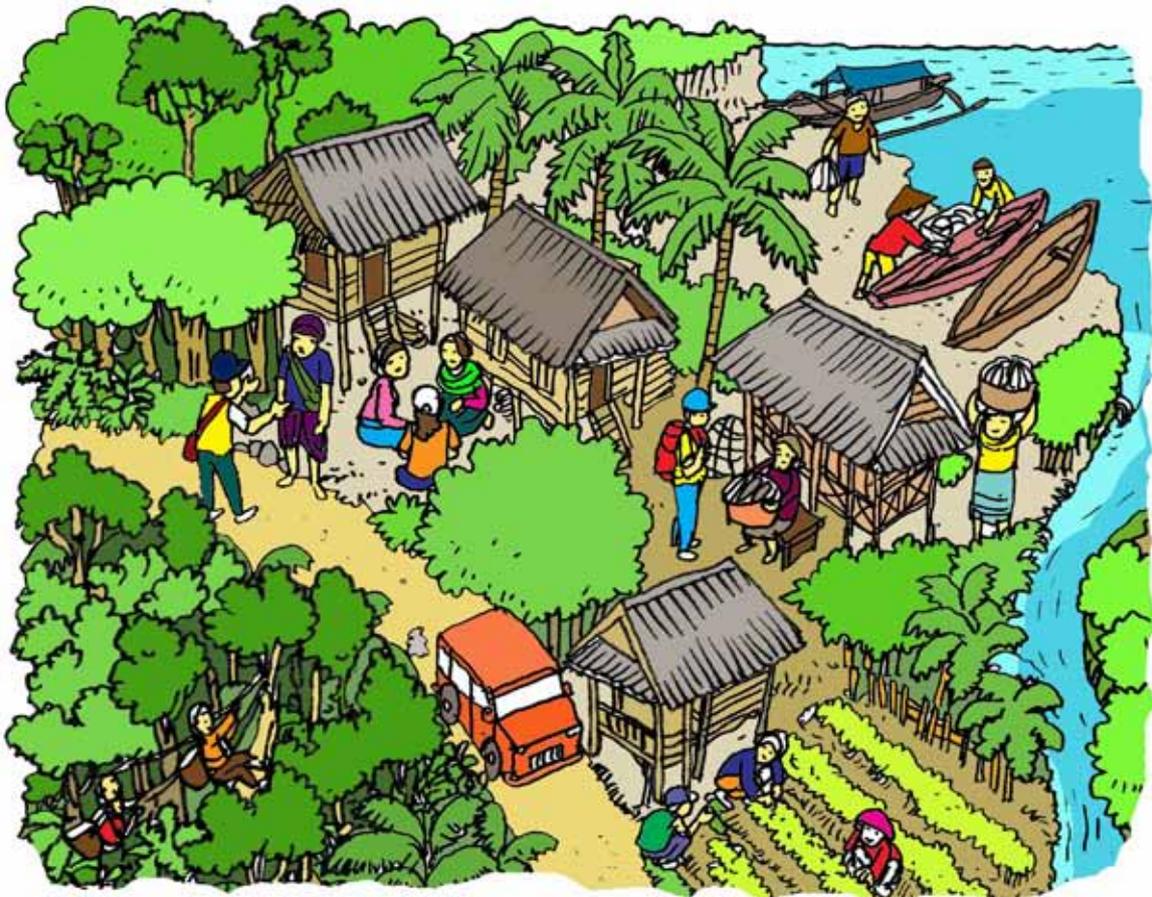
Sebagian bagian dari inisiatif pemantauan, fasilitator perlu membantu lembaga kampung dalam mengembangkan formulir atau tabel pemantauan yang sesuai, mengisi formulir atau tabel tersebut dengan teratur, dan selanjutnya menyampaikan hasil pemantauan tersebut pada seluruh warga secara teratur. Pada saat pertemuan ini, warga perlu didampingi dalam mengkaji kemajuan dan capaian yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, dan mengidentifikasi bagaimana mereka dapat memperbaiki capaian dan kinerja mereka pada tahap selanjutnya. Di akhir periode pelaksanaan rencana kerja, warga kampung perlu mengkaji seberapa jauh pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, seberapa jauh capaian dan indikator capaian telah diperoleh, pembelajaran yang diperoleh, dan bagaimana pembelajaran ini digunakan dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya sehingga mimpi dan visi bersama dapat semakin terwujud.



10. Merayakan dan Menggerakkan Warga

Setelah warga kampung melaksanakan komitmen sebagaimana tertera dalam rencana kerja selama setahun dan mengetahui bagaimana mereka dapat memperbaiki aksi dan kegiatan mereka di tahun berikutnya, fasilitator perlu mengajak warga kampung untuk merayakan capaian mereka. Perayaan ini perlu dilakukan mengingat warga kampung telah melakukan aksi inspiratif selama setahun penuh yang akan membawa mereka semakin dekat dengan mimpi besar.

Pada bab-bab berikutnya, setiap tahapan tersebut di atas akan diuraikan secara lebih rinci satu demi satu.



BAHAN BACAAN

Anderson, P. 2011. *Free, Prior, and Informed Consent in REDD+: Principles and Approaches for Policy and Project Development*. RECOFTC and GIZ, Bangkok.

Asford, G. and S. Patkar. 2001. *The Positive Path: Using Appreciative Inquiry in Rural Indian Communities*. Kromar Printing Limited, Winnipeg.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. 2013. *Berau Dalam Angka*. BPS Berau, Tanjung Redeb.

Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia. 2011. *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat dan atau Masyarakat Lokal yang akan Terkena Dampak dalam Aktivitas REDD+ di Indonesia*. UN-REDD Programme Indonesia, Jakarta.

Moeliono, I., W.H. Winarno, E.D. Hartono, dan T.S. Yulianto. 2010. *Masyarakat Kampung di Kabupaten Berau dan Rekomendasi Keterlibatannya Dalam Skema Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan*. World Education dan TNC, Jakarta.

O'Leary, T., I. Burkett, and K. Braithwaite. 2011. *Appreciating Assets*. Carnegie UK Trust, Dunfermline.

Standar Sosial & Lingkungan REDD+ Versi 2 (10 September 2012).





BAB 3

Perubahan Iklim, Hutan, dan REDD+

REFLEKSI PENULIS

“Ini semua hanyalah rekayasa untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan uang dan keuntungan serta mendapatkan kekuatan untuk mengontrol populasi dunia oleh para elite-elit dunia yang selama ini membuat mitos tentang terjadinya pemanasan global!” (Noel Sheppard)

“Kita semua merupakan satu keluarga besar dan berada di satu rumah, yaitu di bumi ini, jadi kita semua harus saling bersatu untuk mencari solusi dan jalan keluar guna menghadapi efek pemanasan global yang selama ini sedang terjadi” (Maurice Strong)

Hawa panas masih terasa menghajar Kampung Long Duhung suatu sore di bulan November tahun 2008. Walaupun demikian terik matahari tidak menghalangi semangat sekelompok muda-mudi duduk di dekat perapian untuk membakar penganan lemang yang terbuat dari bambu. Rencananya malam hari akan dilakukan pesta syukuran atas panen tahun ini. Meski hasil panen tidak terlalu baik, namun ucapan rasa syukur tetap menjadi bagian ritual masyarakat atas anugerah Tuhan. Sambil bersenda gurau, mereka mengangkut lemang yang telah matang ke gedung pertemuan tempat pesta panen akan dilakukan.

Malam mulai beranjak, dengan fasilitas lampu seadanya yang berasal dari generator milik salah seorang warga, acara pesta panen dimulai. Diawali dengan kata pengantar dari pembawa acara, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan Kepala Kampung Long Duhung. Disertai bunyi serangga dan bunyi genset yang terlalu nyaring, sambutan kepala kampung berakhir dan dilanjutkan doa bersama yang dipimpin oleh Pemimpin Agama (Gembala) Kampung Long Duhung.

Selanjutnya, pembawa acara mengundang seorang warga untuk mengantarkan pesan-pesan pesta panen tahun ini. Dimulai dengan mengutip salah satu ayat dalam Kitab Suci yang sedari awal ditentengnya, laki-laki paruh baya ini kemudian menyampaikan pesan tentang perlunya bersyukur atas hasil panen tahun ini. Di tengah pesan tersebut, laki-laki yang bernama Benyamin ini kemudian menyampaikan kutipan lain tentang perlunya manusia berperilaku bijaksana dalam memelihara bumi sebagai titipan generasi mendatang. Pesan ini disampaikan dengan latar belakang kondisi hutan yang semakin rusak, hasil buruan yang semakin sulit didapatkan dan cuaca yang sudah tidak bisa diprediksi lagi. Sudah saatnya warga berfikir untuk merubah pola bertanam padi tidak lagi dengan ladang berpindah. Sudah saatnya warga memikirkan bagaimana hutan yang ada di sekitar kampung dapat dipertahankan. Jika tidak, bisa saja warga yang tergantung hidupnya dari hutan akan mengalami musibah kelaparan. Di



akhir pembacaan doa, laki-laki ini berkata bahwa salah satu faktor panen ladang tahun ini tidak berhasil adalah akibat perubahan iklim yang sudah terjadi di sekitar mereka.

Terlepas dari perdebatan tentang benar atau tidak terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global, warga Long Duhung memaknai situasi akhir-akhir ini dengan sederhana. Mereka berpandangan bahwa perubahan kondisi hutan, cuaca yang tidak dapat mereka prediksi lagi, kegagalan panen, dan berkurangnya binatang buruan akan mengancam eksistensi hidup mereka di masa mendatang. Mungkin mereka tidak mengerti tentang perubahan iklim dan pemanasan global yang terjadi di belahan dunia lain. Namun yang jelas mereka telah merasakan perubahan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mereka dan anak cucu di masa mendatang.



Perubahan iklim telah menjadi topik hangat perdebatan dalam beberapa dekade terakhir. Di satu sisi ada kelompok yang betul-betul percaya ada bukti kuat bahwa perubahan iklim betul-betul terjadi. Di sisi lain, ada kelompok yang meyakini bahwa perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang bersifat sementara bila dilihat dalam keseluruhan siklus iklim bumi. Terlepas dari perdebatan ini, jelas ada kekhawatiran bahwa perubahan iklim akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia di dunia jika upaya-upaya konkrit tidak dilakukan.

Warga kampung mungkin sulit membedakan perubahan iklim dan perubahan cuaca. Mereka mungkin mengasosiasikan perubahan iklim dengan perubahan cuaca yang terjadi dan sering berubah-ubah tanpa distribusi waktu yang jelas. Dalam mengidentifikasi perubahan iklim, mungkin mereka tidak memasukkan faktor periode waktu. Dengan demikian, penting bagi fasilitator untuk memberikan penjelasan yang tepat tentang terminologi perubahan iklim dengan visualisasi, seperti menggunakan media gambar, film, atau cara inovatif lainnya.

Perubahan Iklim

Perubahan iklim diasosiasikan sebagai perubahan jangka panjang distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata. Contohnya, jumlah peristiwa cuaca ekstrem yang semakin banyak atau sedikit. Perubahan iklim dapat terjadi pada wilayah terbatas hingga regional atau dapat terjadi di seluruh wilayah bumi.

Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, atau IPCC), badan dunia yang diberikan mandat untuk melakukan penelitian terkait dengan perubahan iklim, menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia di bumi. Dalam laporan terkininya (*Fifth Assessment Report*), IPCC mengatakan bahwa suhu rata-rata global pada periode 1850-1900 ke periode 2003-2012 telah mengalami peningkatan sebesar 0,78 °C. Jika hal ini dibiarkan, dalam satu abad ke depan peningkatan suhu rata-rata global diperkirakan akan mencapai 1,1-6,4 °C. Jika tidak ada upaya-upaya konkrit yang dilakukan maka perubahan iklim ini dapat menghancurkan sistem kehidupan yang ada saat ini. UNDP dalam *Human Development Report 2011*, menyebutkan bahwa meningkatnya suhu bumi, kemarau yang berkepanjangan dan curah hujan yang tidak menentu akan menurunkan produksi hasil pertanian seperti kacang-kacangan, jagung dan produksi pertanian lain.

Peningkatan suhu bumi akan menyebabkan mencairnya es di kutub dan naiknya permukaan air laut. Meningkatnya permukaan laut akan mengancam negara-negara kepulauan. Pulau-pulau yang lokasinya relatif rendah dapat seluruhnya tenggelam. Wilayah pantai pulau-pulau yang



lokasinya lebih tinggi pun dapat terendam. Bila ini terjadi, penduduk yang bermukim di wilayah pesisir dan dataran rendah harus dipindahkan ke wilayah yang lebih tinggi.

Perubahan iklim juga dapat menyebabkan munculnya penyakit baru terutama di wilayah tropis. Karena perubahan iklim, sebanyak 400 juta penduduk dunia berisiko terkena penyakit tropis seperti malaria, serta punahnya jutaan spesies flora dan fauna. Laporan organisasi kesehatan dunia WHO tahun 1997 menyebutkan, 1-3 juta penduduk meninggal dunia setiap tahun akibat malaria, diantaranya 80 persen merupakan anak-anak dan balita. Diperkirakan 1-3 juta orang, terutama anak-anak dan balita, dapat meninggal dunia setiap tahun akibat malaria.

Selain itu, perubahan iklim akan menyebabkan terjadinya bencana alam. Seperti yang disebutkan dalam laporan Peta Jalan Bali atau *Bali Road Map* yang dihasilkan Conference of Parties Ke-13 United Nations Framework Convention on Climate Change (COP ke-13 UNFCCC) di Bali tahun 2007, perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan bencana alam sebesar 77-80% khususnya di Indonesia terutama di wilayah yang rentan. Beberapa bentuk bencana alam yang akan terjadi antara lain banjir, terutama di beberapa daerah yang rentan, kekeringan yang berkepanjangan, penyakit dan longsor.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan manusia menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Data IPCC tahun 2007 yang berjudul *Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability* menyebutkan bahwa meningkatnya suhu bumi mayoritas akibat kegiatan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Ledakan populasi, revolusi industri, eksploitasi sumber daya hutan merupakan beberapa faktor utama terjadinya peningkatan yang merubah struktur dan kandungan gas rumah kaca di atmosfer. Perubahan kelimpahan gas rumah kaca yang bersumber dari kegiatan eksploitasi hutan mengganggu keseimbangan energi sistem iklim. Energi sistem iklim ini dimaksudkan dimana bumi harus melepaskan energi dengan laju yang sama ketika bumi menerima energi dari matahari. Selubung Gas Rumah Kaca (GRK) yang semakin tebal akan menyebabkan pengurangan energi yang dilepas ke angkasa sehingga sistem iklim harus menyesuaikan diri untuk mengembalikan keseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang keluar. Proses ini disebut efek GRK yang semakin besar.

Hutan dan Laju kehilangan hutan serta kaitannya dengan perubahan iklim

Secara teori, perubahan iklim terjadi karena panas atau energi matahari yang dipantulkan oleh bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer, kemudian tidak diteruskan ke luar atmosfer melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Akibatnya suhu bumi menjadi lebih panas dibandingkan sebelumnya. Kecenderungan terperangkapnya panas matahari oleh gas-gas atmosfer ini yang disebut sebagai efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena



meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer, yaitu: karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrooksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon (PFCs), dan sulfurheksafluorida (SF₆).

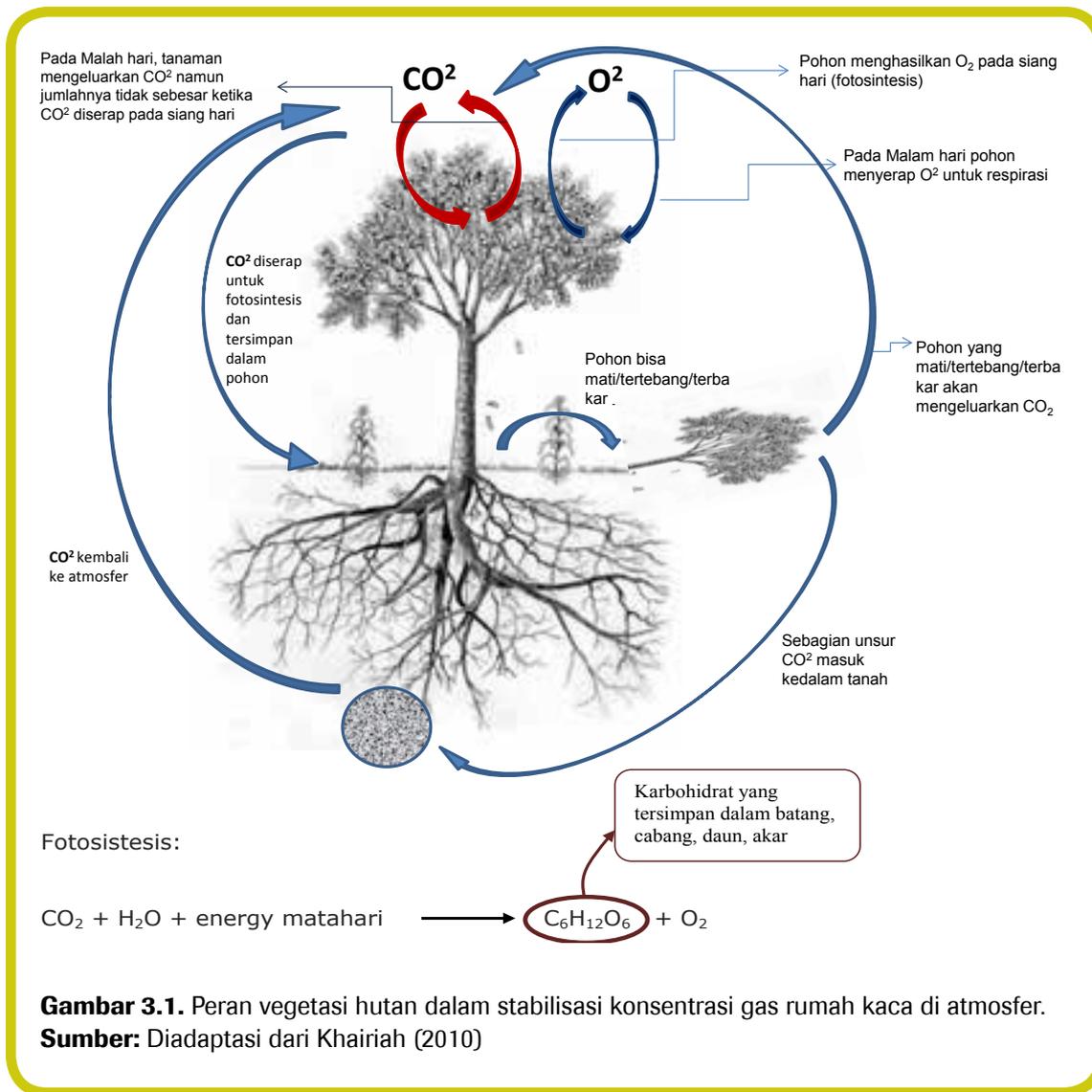
Nicholas Stern dalam bukunya yang berjudul *The Economics of Climate Change* menyebutkan bahwa sumber-sumber terjadinya efek gas rumah kaca antara lain: industri (19,4%), penyediaan energi (25,9%), kehutanan (17,4%), pertanian (13,5%), transportasi (13,1%), perumahan dan bangunan komersial (7,9%). Sektor kehutanan disebutkan sebagai penyumbang tiga terbesar penyebab terjadinya perubahan iklim secara global.

Ekosistem hutan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyerap CO₂ dan menghasilkan O₂. Proses penyerapan CO₂ dan menghasilkan O₂ ini dilakukan oleh hutan melalui kegiatan fotosintesis vegetasi di dalamnya. CO₂ yang diserap selanjutnya disimpan dalam biomasa kayu yang, berdasarkan data, berjumlah dua kali lebih besar dibandingkan CO₂ yang tersimpan di atmosfer. Stern juga menyebutkan bahwa karbon yang saat ini tersimpan di ekosistem hutan setara dengan 4500 Gt CO₂, melebihi jumlah karbon yang tersimpan di atmosfer sebesar 3000 Gt CO₂. Ketika hutan mengalami peningkatan kepadatan vegetasi maupun penambahan luas, maka hutan akan berperan sebagai penyerap CO₂. Mempertahankan keutuhan hutan akan membantu mengurangi emisi karbon dioksida di atmosfer dan mengurangi intensitas perubahan iklim. Sebaliknya, apabila bila hutan ditebang atau dibakar maka akan terjadi proses pembusukan dan pelepasan CO₂ kembali ke atmosfer. Dalam kondisi ini hutan menjadi sumber emisi karbon dan berkontribusi terhadap terjadinya perubahan iklim (lihat Gambar 3.1).

Dalam sektor kehutanan, kegiatan-kegiatan yang menyebabkan penggundulan dan kerusakan hutan merupakan penyebab utama terjadinya emisi CO₂. Di Indonesia, proses penggundulan dan kerusakan hutan sudah terjadi sejak tahun 1970, saat penebangan hutan dilakukan secara komersial melalui pemberian ijin konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang kini disebut Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA). Kerusakan hutan semakin meningkat ketika kebijakan yang disusun tidak diikuti dengan penegakan hukum yang kuat bagi pelaku industri kehutanan untuk melakukan penebangan hutan secara berkelanjutan. Selain itu, terjadi juga penggundulan hutan ketika hutan dikonversi menjadi berbagai jenis peruntukan seperti perkebunan, pertambangan, perumahan dan peruntukan lainnya

Selain penyebab-penyebab langsung tersebut di atas, terdapat beberapa penyebab tidak langsung yang mempercepat terjadinya penggundulan dan kerusakan hutan. Faktor-faktor tidak langsung ini, antara lain faktor ekonomi, kebijakan, budaya, teknologi dan demografi. Faktor ekonomi, berupa komersialisasi dan pertumbuhan pasar kayu serta meningkatnya permintaan terhadap produk hutan, mendorong para pihak yang berkepentingan untuk mengeksploitasi kayu dari hutan alam. Kondisi ini semakin diuntungkan dengan rendahnya





biaya untuk membuka hutan. Belum lagi faktor ekonomi makro seperti kebijakan perdagangan yang bergantung pada sektor kayu pada waktu-waktu tertentu, menjadi faktor penyebab tidak langsung yang mempercepat hilangnya hutan di Indonesia.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa kebijakan merupakan faktor penyebab utama hilangnya hutan di Indonesia. Kebijakan cenderung mempercepat konversi hutan menjadi peruntukan lain yang menghasilkan pendapatan yang lebih menguntungkan dibandingkan bila hutan tersebut dipertahankan. Tata ruang yang dikembangkan dan dilaksanakan juga lebih berpihak pada pembangunan sehingga tekanan pada hutan terus bertambah. Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku pembalakan liar dan pemegang ijin IUPHHK-HA yang tidak melaksanakan kewajibannya menyebabkan hutan makin rusak.



Faktor budaya turut diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya kehilangan dan kerusakan hutan di Indonesia. Budaya tebas bakar yang dilakukan oleh warga sering dipandang sebagai sumber pelepasan emisi walaupun besarnya kontribusi budaya tebas bakar dalam perladangan berpindah terhadap kerusakan hutan masih diperdebatkan. Di satu sisi, sistem tebas bakar dipandang sebagai sumber emisi, di sisi lain sistem ini dipandang sebagai bagian dari kontribusi masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal ini terjadi karena di beberapa tempat sistem ini tidak menyebabkan kerusakan dan penggundulan hutan karena masyarakat menerapkan kearifan lokalnya. Terlepas dari perdebatan tersebut, perlu dipelajari di tingkat tapak bagaimana pola-pola penggunaan lahan dengan sistem ini dapat dilakukan. Pembelajaran ini menjadi penting karena di beberapa tempat, pembukaan ladang dengan sistem tebas bakar ini dilakukan dalam skala besar dengan tujuan penguasaan lahan oleh oknum tertentu, yang berharap dapat meraup keuntungan saat lahan tersebut diubah peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawit atau pertambangan.

Kurangnya perhatian publik untuk melindungi dan mempertahankan hutan juga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada kerusakan hutan. Ada kecenderungan, publik membiarkan terjadinya kerusakan hutan di sekitar mereka karena tidak memahami pentingnya hutan bagi mereka atau keberlangsungan hidup umat manusia di bumi.

REDD+ dan PKHB

Keterkaitan antara kehilangan dan kerusakan hutan terhadap meningkatnya efek gas rumah kaca sudah diketahui sejak lama. Beberapa penelitian telah memperlihatkan peranan hutan dalam menjaga suhu bumi atau iklim dunia. Namun baru pada *Conference of the Parties* ke-11 di Montreal yang diadakan pada tahun 2005, isu ini kembali dimasukkan dalam agenda pembahasan yang serius.

Keterkaitan antara kehilangan dan kerusakan hutan yang berdampak pada perubahan iklim semakin menjadi arus utama setelah terbitnya review Nicholas Stern tentang ekonomi perubahan iklim. Stern menyebutkan bahwa kehilangan dan kerusakan hutan khususnya di negara berkembang berkontribusi pada emisi global sebesar sekitar 20 persen. Bila kontribusi gas rumah kaca dari sektor kehutanan akan ditekan maka negara-negara maju dan berkembang harus bekerja sama. Negara-negara maju harus bersedia memberikan dukungan, dalam bentuk bantuan teknologi dan pendanaan kepada negara berkembang untuk menurunkan laju penggundulan dan kerusakan hutan dan melestarikan hutan yang akan menyerap gas rumah kaca yang dilepaskan juga oleh negara maju melalui kegiatan energi, industri, dan lain-lain.

Peran hutan dalam stabilisasi iklim dan sebagai sistem penyangga kehidupan secara finansial belum dinilai secara memadai baik di dalam mekanisme yang tersedia di bawah konvensi perubahan iklim maupun dalam sistem pasar terhadap produk dan jasa hutan. Sebenarnya



kesadaran tentang pembiayaan untuk kegiatan penyelamatan hutan sudah termaktub dalam Protokol Kyoto yang mencantumkan *Afforestation and Reforestation* melalui skema *Clean Development Mechanism* (A/R CDM). Skema ini merupakan mekanisme pasar yang tersedia untuk jasa penyimpanan CO₂ melalui kegiatan penanaman pohon, yang bertujuan memberikan manfaat bagi negara-negara yang melakukan kegiatan aforestasi/reforestasi di wilayah-wilayah yang tidak berhutan selama kurun waktu tertentu. Namun sayangnya skema ini belum berjalan dengan optimal karena prosedur dan metodologi yang begitu rumit.

Untuk mendorong negara berkembang melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan agar memberikan kontribusi berarti terhadap stabilisasi gas rumah kaca di atmosfer (stabilisasi iklim), diperlukan pendekatan kebijakan dan kerja sama internasional yang lebih baik. Kebijakan dan kerja sama ini harus lebih luas dan fleksibel sehingga negara-negara yang memiliki hutan yang luas dapat berpartisipasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Kebijakan dan kerja sama tersebut juga tidak boleh mengancam pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan dan kehidupan warganya. Negara berkembang akan terdorong melaksanakan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan apabila insentif yang diberikan setidaknya setara dengan biaya peluang (*opportunity costs*) dari penggunaan lahan/hutan tersebut.

Mengacu pada pemikiran tersebut, negara-negara berkembang yang masih memiliki hutan tropis seperti Indonesia, Costa Rica, Papua New Guinea, dan Congo mengajukan proposal tentang skema pendanaan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan untuk mengurangi emisi yang berdampak pada pemanasan global. Proposal ini diajukan sebagai alternatif inisiatif mitigasi perubahan iklim diluar skema A/R CDM, dan juga sebagai langkahantisipasi akan berakhirnya periode komitmen Protokol Kyoto tahun 2012.

Saat pelaksanaan Conference of the Parties ke-13 di Bali, UNFCCC, badan dunia yang bertanggung jawab atas isu perubahan iklim, menyepakati beberapa hal penting terkait transfer teknologi dan pendanaan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Salah satu hal penting yang disepakati dalam pertemuan itu adalah persetujuan peserta COP untuk menerapkan skema REDD yang diajukan oleh negara-negara pemilik hutan tropis. Skema REDD, yang kemudian berkembang menjadi REDD+, merupakan skema pendanaan bukan hanya untuk mendukung kegiatan pengurangan emisi dari kehilangan dan kerusakan hutan, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyerap karbon. Dengan skema REDD+ diharapkan negara yang memiliki hutan tropis dapat memiliki pendanaan untuk melindungi hutan sekaligus melakukan kegiatan pembangunan.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan pelaksanaan skema REDD+, pemerintah Indonesia melakukan penyusunan tahapan pelaksanaan skema REDD+ ini melalui pelaksanaan ujicoba di beberapa area. Salah satu kabupaten yang ditunjuk untuk melaksanakan ujicoba adalah



Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur. Melalui proses fasilitasi oleh berbagai pihak, termasuk The Nature Conservancy, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, lahir inisiatif yang bernama Program Karbon Hutan Berau (PKHB). PKHB bertujuan mewujudkan Kabupaten Berau sebagai model pembangunan daerah yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang rendah emisi.

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang rendah emisi tersebut, PKHB mengembangkan dua kelompok strategi, yaitu strategi penguatan kondisi pemungkin dan strategi berbasis tapak.

Strategi penguatan kondisi pemungkin, yang dilaksanakan secara lintas sektor, bertujuan untuk menciptakan atau memperkuat kondisi pemungkin sehingga sumber atau penyebab penggundulan dan pengrusakan hutan dapat dikendalikan atau diminimalkan. Strategi ini mencakup penyempurnaan rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan, perbaikan tata kelola sektor kehutanan, pelibatan para pemangku kepentingan, peningkatan kesejahteraan dan pelibatan masyarakat, pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan dan pembagian insentif, dan pengembangan sistem penghitungan pengurangan emisi yang dapat dipantau, dilaporkan, dan diverifikasi.

Strategi berbasis tapak, yang dilaksanakan di tingkat unit pengelola, bertujuan untuk mengembangkan model pengurangan emisi di berbagai tipe pengelolaan hutan. Strategi ini mencakup perbaikan tata kelola hutan produksi, perbaikan tata kelola hutan lindung, perbaikan tata kelola perkebunan sawit, dan perbaikan tata kelola hutan bakau. Melalui penerapan strategi-strategi tersebut selama lima tahun fase ujicoba, Kabupaten Berau diharapkan dapat mencegah pelepasan emisi karbon dioksida dari penggundulan dan pengrusakan hutan sekurang-kurangnya sebesar 10 juta ton.

Partisipasi Masyarakat dalam REDD+

Salah satu perdebatan yang cukup tajam dalam implementasi uji coba REDD+ adalah memastikan masyarakat tidak dirugikan dalam pelaksanaan skema ini. Beberapa pihak yang membela kepentingan masyarakat mengkhawatirkan bahwa pelaksanaan ujicoba ini akan memberikan dampak negatif bagi mereka yang hidup sekitar hutan, terutama hilangnya akses dan kontrol mereka atas sumber daya hutan. Hal ini akan mengancam kehidupan dan kesejahteraan mereka. Skema REDD+ dikhawatirkan akan semakin meminggirkan peran dan hak masyarakat dan hanya memberikan keuntungan pada kelompok-kelompok tertentu, misalnya pemerintah dan pemegang IUPHHK-HA saja. Muncul juga kekhawatiran terjadinya pengusiran masyarakat yang berdiam di dalam dan di sekitar hutan demi untuk mempertahankan hutan yang ada. Resiko lain yang mungkin dihadapi oleh masyarakat adalah ketidakadilan pembagian insentif dimana masyarakat, yang tidak memiliki hak formal atas



hutan, tidak atau hanya akan menerima insentif yang tidak berarti dibandingkan insentif yang diperoleh pemerintah atau pemegang hak pengelolaan hutan lainnya.

Kekhawatiran ini tentunya harus dijawab dengan membangun kepastian bahwa masyarakat menjadi bagian integral dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan program REDD+ ini. Masyarakat setempat juga harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang didasari pada sebuah informasi yang jelas dan tanpa paksaan.

Bentuk pelibatan masyarakat dapat dilakukan setidaknya dalam dua hal. **Pertama**, mendorong partisipasi masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Bentuk-bentuk partisipasi dilakukan dengan melakukan penguatan visi masyarakat yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam, menginventarisasi kearifan lokal dan potensi penggunaan lahan mereka dalam perencanaan tata guna lahan saat ini dan untuk masa yang akan datang. Potensi dan pola penggunaan lahan ini kemudian dituangkan dalam perencanaan sumber daya alam yang terintegrasi dengan perencanaan kampung yang ada sebelumnya. Komitmen ini selanjutnya diterjemahkan dalam kesepakatan untuk melakukan mitigasi perubahan iklim di kampung masing-masing.

Kedua, memastikan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan strategis dalam program REDD+. Masyarakat atau perwakilan masyarakat perlu dilibatkan dalam proses-proses diskusi dan pengambilan keputusan penting yang dilakukan oleh berbagai kelompok kerja atau lembaga REDD+ yang dibentuk di berbagai tingkat. Aspirasi atau suara mereka dapat juga dikumpulkan melalui wadah, forum, atau lingkaran belajar masyarakat dimana kelompok-kelompok masyarakat lintas bentang alam dapat berkumpul dan mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi dan harapan mereka terhadap pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Wadah atau lingkaran belajar masyarakat ini akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan atau menyalurkan aspirasi kepada pengambil keputusan.



RANCANGAN PROSES

1. Perubahan Iklim dan Peranan Hutan



Tujuan

- Peserta memahami apa itu perubahan iklim dan mengapa perubahan iklim terjadi
- Peserta memahami dan mampu membuat daftar tanda dan dampak akibat terjadinya perubahan iklim
- Peserta memahami peran hutan dalam perubahan iklim
- Peserta memahami beberapa skenario masa depan yang dapat terjadi terkait dengan perubahan iklim



Alat dan Bahan

- Flipchart
- Spidol berwarna
- Kertas plano
- Slide presentasi mengenai perubahan iklim
- Film berdurasi pendek tentang perubahan iklim dan peran hutan



Waktu 2 Jam



Persiapan

Siapkan film atau alat bantu visual lain yang relevan dengan sesi pemanasan global, perubahan iklim dan kaitannya dengan hutan.



Proses

Pemutaran Film (30 Menit)

- Putarlah sebuah film yang terkait dengan pemanasan global, perubahan iklim dan bagaimana perubahan iklim itu terjadi. Di dalam *compact disc* (CD) direkomendasikan film-film yang menjelaskan tentang perubahan iklim, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan dampak yang dihadapi oleh masyarakat jika perubahan iklim terjadi. Pilih salah satu yang paling sesuai.



- Tanyakan kepada peserta tentang kesan mereka setelah menonton film tersebut, dan apa yang mereka pahami.

- Setelah peserta menyampaikan tanggapannya, putarlah film durasi pendek tentang siklus fotosintesis yang menggambarkan bagaimana pohon menyerap CO₂ dan melepaskan O₂.



- Setelah pemutaran film selesai, ajaklah peserta untuk mendiskusikan secara singkat apa pesan yang dapat digali dari film durasi pendek tersebut. Kaitkan perubahan iklim yang terjadi dengan peran hutan dalam perubahan iklim.
- Tunjukkan contoh kasus bagaimana situasi jika berada dibawah pohon saat siang dan malam hari. Bagaimana perasaan peserta jika berteduh dibawah pohon pada siang hari dan berdiam dibawah pohon di malam hari. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan dua kejadian tersebut?



Diskusi atau Curah Pendapat (30 Menit)

- Siapkan daftar pertanyaan kepada peserta yang mengacu pada film yang telah diputar sebelumnya:
 - Apa itu pemanasan global
 - Apa itu perubahan iklim
 - Apa penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim
 - Apa tanda-tanda terjadinya perubahan iklim
- Siapkan kertas plano untuk mencatat seluruh pendapat peserta tentang pertanyaan di atas.
- Rangkum kata-kata kunci dari jawaban peserta terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan.
- Sampaikan presentasi singkat yang merangkum apa yang dimaksud dengan perubahan iklim, kenapa terjadi perubahan iklim, efek gas rumah kaca, tanda-tanda terjadinya perubahan iklim, dan peran hutan dalam perubahan iklim. Kaitkan presentasi ini dengan kata-kata kunci yang muncul saat diskusi dengan warga pada sesi sebelumnya.



Diskusi kelompok (60 Menit)

- Bagi peserta kedalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan tanda-tanda perubahan iklim dan contoh-contoh lokal tanda-tanda terjadinya perubahan iklim yang mereka lihat atau alami.
- Setelah diskusi kelompok, minta perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi di dalam kelompok masing-masing.
- Ajak peserta untuk menarik kesimpulan atas hasil presentasi kelompok terkait dengan tanda-tanda perubahan iklim baik yang terjadi di sekitar mereka.
- Kemudian ajak peserta untuk bersama-sama membahas tentang dampak perubahan iklim bagi kehidupan warga.
- Setelah itu, ajak peserta untuk mendiskusikan keterkaitan hutan dan perubahan iklim, khususnya kaitan hutan di sekitar mereka dengan perubahan iklim yang mereka lihat atau alami. Sesi ini mendiskusikan pertanyaan kunci yakni tentang perubahan-perubahan apa yang terjadi disekitar mereka akibat terjadinya penurunan fungsi hutan.
- Fasilitator menarik beberapa poin/isu penting atau kesimpulan dari hasil diskusi pleno untuk dijadikan sebagai kata-kata kunci sesi ini yang mengaitkan hutan dan perubahan iklim.



2. Penggundulan dan Kerusakan Hutan



Tujuan

- Peserta memahami apa arti dari penggundulan hutan
- Peserta memahami apa arti dari kerusakan hutan
- Peserta mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terjadinya penggundulan dan kerusakan hutan



Alat dan Bahan

- Karton untuk membuat replika pohon kayu
- Karton untuk membuat replika pohon madu
- Ranting kayu untuk tanduk
- Rotan
- Karton untuk membuat replika pohon yang sudah ditebang
- Rumpuk atau ilalang yang dikumpulkan di sekitar kampung
- Batang atau ranting kayu yang telah terbakar
- Gunting
- Stapler
- Lem kertas
- Tali plastik
- Slide presentasi tentang hutan lebat dan hutan gundul
- Kertas plano
- Metaplan
- Spidol berwarna



Waktu 1 Jam 30 Menit



Persiapan

Mempersiapkan catatan untuk bermain peran dengan meminta beberapa untuk bermain peran

Proses



Permainan untuk menjelaskan Deforestasi/Penggundulan Hutan (60 menit)

- Bagi peserta dalam 3 kelompok untuk memainkan peran hutan yang lebat, hutan yang rusak dan hutan yang gundul.
- Mintalah satu kelompok yang terdiri dari 10 orang untuk membentuk areal hutan lebat dengan menggunakan anggota tubuh dan alat bantu yang tersedia (pohon kayu, pohon madu, berbagai jenis binatang, rotan, dan lain-lain).
- Beri waktu 15-20 menit untuk anggota kelompok untuk berdiskusi dan kemudian memasang alat-alat bantu pada tubuh mereka. Dorong peserta untuk kreatif dalam menggunakan bahan-bahan yang tersedia.



- Minta anggota kelompok untuk mengambil posisi masing-masing dan menjelaskan apa saja yang direpresentasikan oleh setiap peserta.
- Minta satu kelompok kedua dengan peserta 10 orang untuk menggambarkan kawasan hutan yang rusak (pohon kayu bekas ditebang, pohon kecil (beberapa), ilalang, pohon bekas terbakar, dll).
- Minta anggota kelompok untuk mengambil posisi masing-masing dan menjelaskan apa saja yang direpresentasikan oleh setiap peserta.
- Minta satu kelompok peserta (10 orang) lainnya untuk menggambarkan kawasan hutan gundul (pohon kayu bekas ditebang, pohon kecil, ilalang, pohon bekas terbakar, dan lain-lain).
- Mintalah anggota kelompok untuk mengambil posisi masing-masing dan menjelaskan apa saja yang direpresentasikan oleh setiap peserta.
- Setelah bermain peran ini selesai, selanjutnya minta seluruh peserta untuk menyampaikan pendapatnya tentang perbedaan antara wilayah hutan lebat dan hutan yang rusak. Catatlah dalam kertas plano pendapat peserta
- Selanjutnya tanyakan perbedaaan antara hutan lebat dan hutan yang gundul. Catat pendapat peserta dalam kertas plano.
- Selanjutnya sampaikan beberapa pertanyaan singkat di bawah:
 - Apa padanan kata dalam bahasa lokal untuk hutan gundul
 - Kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa menyebabkan penggundulan hutan
 - Pihak mana yang mungkin melakukan kegiatan-kegiatan tersebut
- Catat jawaban peserta di metaplan. Jawaban untuk 2 pertanyaan terakhir akan dipakai dalam diskusi kelompok.
- Lanjutkan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan singkat terkait dengan:
 - Apakah ada padanan kata dalam bahasa lokal tentang kerusakan hutan?
 - Kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa menyebabkan kerusakan hutan
 - Pihak mana yang mungkin melakukan kegiatan-kegiatan pengrusakan hutan
- Catat jawaban peserta di metaplan. Jawaban untuk 2 pertanyaan terakhir akan dipakai dalam diskusi kelompok.



- Selanjutnya tayangkan slide yang menggambarkan foto-foto hutan lebat, hutan yang rusak dan hutan gundul serta penyebab umum terjadinya perubahan kawasan hutan lebat menjadi hutan gundul.



Diskusi Kelompok (60 menit)

- Bagi peserta dalam dua kelompok. Satu kelompok akan membahas tentang penggundulan hutan. Kelompok kedua membahas tentang kerusakan hutan.
- Sampaikan pertanyaan kunci kepada masing-masing kelompok penggundulan hutan dan kelompok kerusakan hutan. Pertanyaan kuncinya adalah:
 - Apa saja kegiatan yang menyebabkan penggundulan hutan? Pihak mana (luar atau warga kampung) yang menyebabkan terjadinya penggundulan hutan (Kelompok 1).
 - Apa saja kegiatan yang menyebabkan kerusakan hutan? Pihak mana (luar atau warga kampung) yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan (Kelompok 2).
- Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dalam pleno.
- Catat poin-poin penting dari hasil diskusi kelompok dan kategorisasi ke dalam kegiatan penggundulan hutan dan kerusakan hutan. Kategorikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar dan kegiatan yang dilakukan warga kampung sendiri.
- Jika dalam diskusi kelompok peserta belum mengidentifikasi ladang berpindah sebagai kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan, tanyakan bagaimana pandangan peserta tentang kegiatan ini. Apakah peserta berpandangan bahwa kegiatan ini merupakan kearifan lokal atau peserta mengakui bahwa kegiatan ladang berpindah merupakan kegiatan yang merusak hutan.
- Lakukan curah pendapat tentang pola-pola perladangan berpindah yang dilakukan oleh warga. Berapa luasan lahan untuk ladang dan berapa jumlah ladang mereka.
- Lakukan juga curah pendapat untuk melihat apakah kegiatan pembalakan liar terjadi di wilayah mereka, siapa yang lakukan dan apa tanggapan peserta mengenai kegiatan ini.
- Sampaikan presentasi singkat tentang kegiatan apa saja yang berpotensi menyebabkan terjadinya penggundulan hutan dan kerusakan hutan serta pihak-pihak yang melakukan kegiatan ini.
- Kaitkan dengan hasil diskusi kelompok dengan presentasi yang ditulis di kertas plano.
- Tarik kesimpulan dari hasil diskusi ini dan dapatkan kesepakatan atas hasil diskusi.



3. REDD+ dan Peranan Masyarakat dalam REDD+



Tujuan

- Peserta memahami apa itu REDD+
- Peserta memahami latar belakang lahirnya skema REDD+ di Negara berkembang
- Peserta memahami mengapa REDD+ penting bagi Indonesia
- Peserta memahami Program Karbon Hutan Berau dan strategi pelibatan masyarakat dalam PKHB



Alat dan Bahan

- Slide presentasi
- Kertas plano
- Lem kertas



Waktu 2 Jam



Proses

- Mulailah sesi dengan mengajak peserta untuk menonton film yang berjudul “Masyarakat Menghadapi Perubahan Iklim.”
- Setelah pemutaran film selesai, tunjuk 3-5 orang peserta untuk memberikan pandangannya tentang film tersebut secara umum.
- Tanyakan kepada peserta tentang isu spesifik yang ada di film tersebut, antara lain: apakah mereka mendengar istilah tentang REDD? Tanyakan kepada peserta apakah dari film tersebut mereka sudah mendapatkan gambaran tentang REDD.
- Presentasikan tentang Program Karbon Hutan Berau dan strategi yang dibangun dalam program ini.
- Berikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan jika ada yang belum dipahami dari presentasi PKHB.
- Lanjutkan proses dengan mengajak peserta untuk menonton film/video grafik tentang partisipasi masyarakat dalam PKHB.
- Minta perwakilan peserta untuk memberikan pandangannya atas film/video grafik yang diputar.
- Tarik beberapa pesan kunci dari hasil pemutaran film tersebut dan tuliskan dalam kertas plano.



- Selanjutnya presentasikan slide mengenai potensi manfaat dan resiko bagi masyarakat jika terlibat dan berpartisipasi dalam PKHB.
- Diskusikan dengan peserta potensi manfaat dan resiko yang mungkin akan dihadapi oleh masyarakat jika terlibat.
- Di akhir sesi, tanyakan kembali kepada peserta, dengan mempertimbangkan potensi manfaat dan resiko tersebut, apakah mereka tertarik untuk terlibat dalam PKHB.
- Tarik kesimpulan dari hasil diskusi tersebut dan catat dalam berita acara pertemuan tentang ketertarikan warga untuk terlibat dalam PKHB.

BAHAN BACAAN

IPCC. 2007. *Climate Change Report 2007*. Working Group I Contributions to the IPCC Fourth Assessment Report. Cambridge University Press, Cambridge.

IPCC. 2013. *Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Approved Summary for Policymakers*, 27 September 2013.

Khairiah. 2010. Konsep-konsep Perdagangan Karbon. Presentasi dalam Lokakarya Perdagangan Karbon, LATIN. Bogor, Indonesia.

RECOFTC. 2012. *Kita, Hutan dan Perubahan Iklim*. RECOFTC, Bangkok.

Stephen, P. 2009. *Introductory Course on Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*. CCBA, Rainforest Alliance, TNC, WWF, CI, and GTZ, Indonesia.

Stephen, P. 2009. *REDD Training: Social Consideration*. CCBA, Rainforest Alliance, The Nature Conservancy, WWF, Conservation International, GTZ, Indonesia.

Stern, N. 2006. *The Economics of Climate Change: Stern Review*, Cambridge University Press, Cambridge.

UNDP. 2011. *Human Development Report: Sustainability and Equity: A Better Future for All*. UNDP, New York.

UNDP. 2007. *Laporan Peta Jalan Bali*. Conference of the Parties, UNFCCC, Bali, Indonesia.





BAB 4

Membangun Peta Kekuatan Masyarakat



REFLEKSI PENULIS

"Hutan bagi kami masyarakat Mabnan [Punan] adalah bank yang dapat melayani kami 24 jam tanpa pernah tutup. Setiap saat kami membutuhkan daging, hanya dengan bermodalkan tombak dan ditemani anjing pemburu, maka kami ke hutan dan kebutuhan protein kami terpenuhi" (Zenas Daring)

"Jika hutan dikelola secara serampangan oleh perusahaan, bisa saja 10 tahun yang akan datang kami punah" (Diskusi kelompok perempuan tentang fungsi hutan)

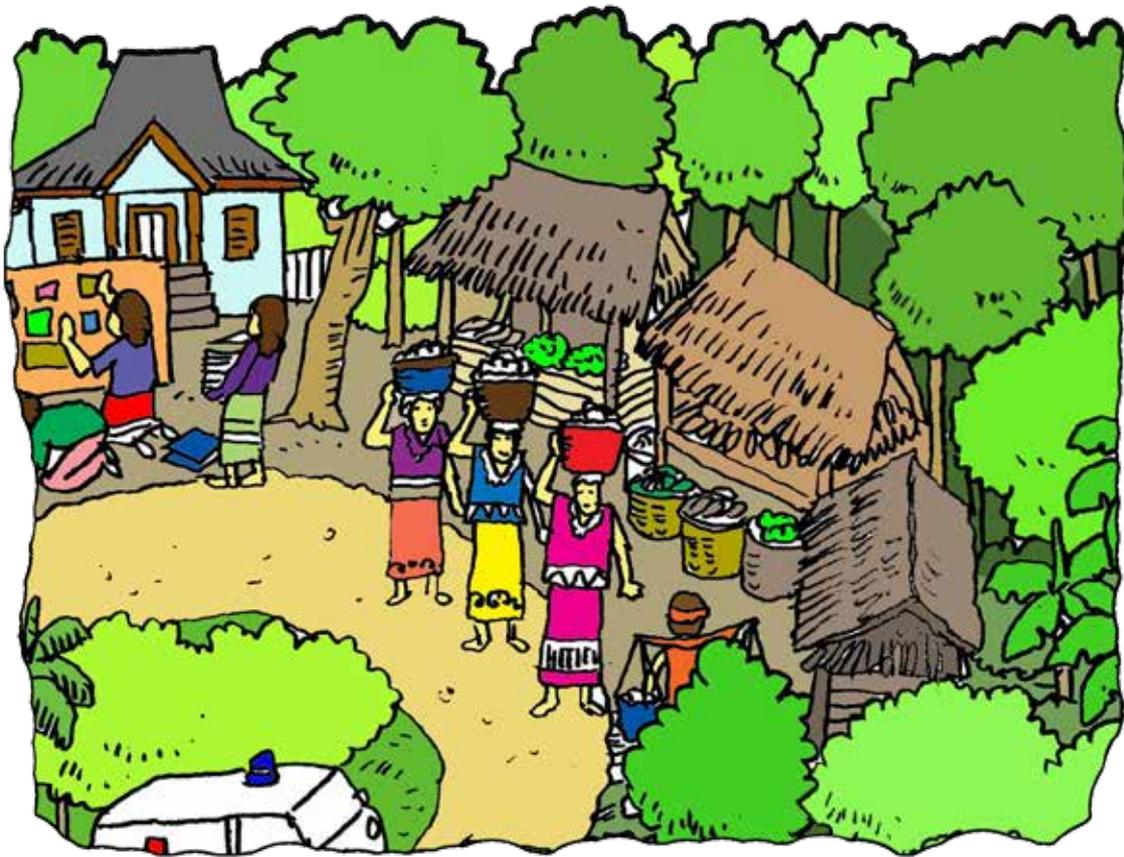
Menyusuri sungai Hulu Kelay dipagi hari memberikan sensasi tersendiri. Suara burung dan monyet tidak henti menyambut pagi. Ketika kabut masih enggan untuk beranjak dari daun-daun pohon yang berbaris rapi di sepanjang sungai, aktifitas warga sudah mulai menggeliat. Sejak pagi buta beberapa laki-laki sudah beranjak dari tidur menuju sungai di belakang rumah untuk memeriksa perangkap ikan yang terbuat dari rotan dan bambu dengan harapan mereka menemukan ikan sapan (kakap sungai) terjaring dalam perangkap mereka. Beberapa laki-laki lain menyusuri sungai, sambil menenteng sumpit, sembari berharap mereka akan cukup beruntung mendapatkan binatang buruan untuk pemenuhan protein hari ini.

Pagi ini, ditemani seorang lelaki setengah baya yang perawakannya melebihi umur yang sesungguhnya, kami menelusuri Hulu Sungai Kelay menuju kawasan yang disebut sebagai *wungun* oleh warga Long Duhung. Di sela-sela deru perahu motor yang mereka namakan ketinting, laki-laki ini menyampaikan: "Setiap musim buah tiba, jangan heran jika hampir seluruh warga akan berbondong-bondong masuk ke hutan. Hutan memberikan banyak bantuan dengan menyediakan buah yang akan membuat kami lebih sehat. Jika musim buah tiba, kami akan ke hutan untuk berekreasi bersama. Salah satu wilayah yang banyak sumber buah-buahan ada di wilayah ini." Demikian kata lelaki yang bernama Matias ini, sambil menambatkan perahunya.

Menurut Matias, berdasarkan cerita tokoh adat kampung Long Duhung, suku Mapnan tidak pernah melakukan penebangan pohon besar. Bila warga Long Duhung melakukan penebangan maka mereka akan melakukan upacara untuk memohon maaf kepada penunggu pohon tersebut agar diizinkan menebang. "Itupun kami menebang pohon besar untuk membuat perahu dan ramuan [bahan bangunan] untuk rumah. Kami tidak pernah memperjualbelikan kayu kepada orang lain," lanjutnya sambil mengarahkan perjalanan kami menelusuri area wungun yang dilindungi warga.



Sekelumit cerita warga tentang fungsi hutan memberikan pencerahan betapa hutan memberikan nilai yang tidak terhingga bagi warga setempat. Mereka melihat hutan sebagai wilayah interaksi satu sama lain. Hutan membutuhkan keberadaan warga untuk menjaganya, dan sebaliknya hutan akan menyediakan sumber penghidupan bagi mereka. Hutan adalah aset yang tidak ternilai, sehingga kerusakan hutan akan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap eksistensi mereka. Kesadaran ini yang menjadi modal penting bagi warga Long Duhung untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itu, sangat lumrah jika semua perencanaan pembangunan yang dilakukan di Long Duhung berangkat dari keinginan agar hutan tetap lestari. Hutan bagi warga Long Duhung perlu dipertahankan karena eksistensi hidup mereka sangat tergantung pada hutan yang ada di sekitar mereka.



Konsep pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat sipil lainnya. Hakikat sebuah program pemberdayaan adalah memastikan bahwa tantangan dan potensi masyarakat dapat dikelola secara menyeluruh. Tujuan ini menuntut proses dan metode pemberdayaan dengan indikator-indikator yang dibuat dengan sudut pandang yang tepat. Seluruh proses pemberdayaan dilakukan untuk mewujudkan kemandirian yang berkelanjutan masyarakat setempat.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan peningkatan kemampuan atau kapasitas masyarakat. Menurut Rappaport dalam Adimiharja (2001), pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam simbol-simbol yang mengkomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk mengubah hal-hal yang ada dalam diri kita. Artinya, proses fasilitasi pemberdayaan masyarakat perlu mendorong kekuatan yang dimiliki masyarakat sehingga perubahan yang terjadi masyarakat didominasi oleh keinginan kuat masyarakat sendiri, dengan memanfaatkan seluruh potensi/aset yang dimiliki mereka. Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan mereka untuk melakukan kontrol atas sumber daya materi dan non-material melalui distribusi modal atau kepemilikan.

Proses pemberdayaan pada intinya dimaksudkan untuk membantu masyarakat untuk memiliki kemampuan mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan terkait dengan diri mereka sendiri. Kemampuan mengambil keputusan termasuk mengurangi tantangan yang dihadapi, baik secara individu maupun kolektif, dalam meningkatkan keberdayaannya. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki. Terkait dengan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat mengembangkan proses peningkatan kapasitas dan kemampuan individu dan kelompok dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Peningkatan kapasitas dan kemampuan sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan atau aset yang dimiliki oleh individu, kelompok maupun sebuah komunitas. Kekuatan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kekayaan pribadi atau komunitas yang memiliki nilai ekonomi, sosial dan budaya, yang dapat membantu tercapainya tujuan. Kekuatan merupakan modal yang penting disadari sebagai landasan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh seseorang atau komunitas untuk berubah.



Pemberdayaan Berbasis Kekuatan Masyarakat

Di Indonesia banyak lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Namun dari sekian banyak lembaga tersebut, sebagian besar tidak melihat masyarakat sebagai aset atau sumber kekuatan. Lembaga-lembaga ini cenderung melihat dan memperlakukan masyarakat sebagai pihak yang lemah, pembangunannya tertinggal, dan tidak memiliki apa-apa kecuali masalah. Dengan sudut pandang seperti ini, mereka memotret semua masalah yang ada di masyarakat dan selanjutnya menyusun program “pemberdayaan” untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Akibatnya, program pemberdayaan yang diciptakan adalah program yang membawa sumber daya dari luar untuk pengembangan aspek fisik dan ekonomi masyarakat.

Paradigma pembangunan (*developmentalist paradigm*) berasumsi bahwa dengan membangun infrastruktur, membuka akses jalan dan pasar, dan mendukung kegiatan ekonomi maka masyarakat dengan sendirinya akan sejahtera. Di banyak tempat, proses fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan semacam ini tidak memberikan dampak optimal karena tidak menyentuh maupun memanfaatkan kekuatan masyarakat. Proses fasilitasi dan pemberdayaan yang terjadi berada pada permukaan saja dan bertumpu pada mobilisasi sumber daya dari luar. Akibatnya dampak program pemberdayaan yang dilakukan tidak berbekas terutama setelah fasilitator meninggalkan masyarakat tersebut, dan cenderung menciptakan ketergantungan baru di tingkat masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat harus memperhatikan dan memahami kondisi masyarakat, terutama aset-aset yang ada di dalamnya. Hal ini penting karena aset yang ada di dalam masyarakat dapat menjadi modal yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berbasis aset adalah pemberdayaan yang mendayagunakan aset dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pendekatan ini mengubah cara pandang yang melihat masyarakat sebagai ‘korban’ dan perlu dibantu menjadi masyarakat sebagai ‘modal’ untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis aset mengajak masyarakat untuk mengubah sudut pandang dari ‘apa yang kita butuhkan dari luar?’ menjadi ‘apa yang kita miliki’. Perubahan sudut pandang ini mendorong masyarakat atau komunitas menjadi lebih mandiri, inovatif, dan kreatif.

Department for International Development (DFID) mengelompokkan aset masyarakat ke dalam lima kelompok. Kelima kelompok aset tersebut adalah:

1. **Aset Manusia:** sikap, keterampilan, pengetahuan, kesehatan, dan kemampuan untuk menjalankan strategi-strategi peningkatan sumber kehidupan yang lebih baik.



2. **Aset Fisik:** bangunan (seperti: perumahan, pasar, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya) dan infrastruktur dasar (seperti: jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan telepon, dan sebagainya) yang merupakan sarana yang membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya.
3. **Aset Sosial:** sumber daya sosial (jaringan sosial, anggota kelompok, hubungan dan kepercayaan, akses yang luas terhadap berbagai lembaga sosial) untuk meningkatkan sumber kehidupan masyarakat.
4. **Aset Finansial:** sumber-sumber keuangan yang dapat digunakan masyarakat (seperti tabungan, pinjaman atau kredit, uang yang diperoleh dari sanak keluarga di luar kampung, atau dana pensiun) untuk dapat memilih sumber kehidupan yang tepat bagi mereka.
5. **Aset Natural:** sumber-sumber alam (seperti tanah, air, keanekaragaman hayati, sumber-sumber yang berasal dari lingkungan) yang dapat digunakan sebagai sumber kehidupan masyarakat.

Kelima aset yang diidentifikasi di atas sangat penting untuk dipetakan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Misalnya, aset manusia tentunya sangat berperan dalam proses pengembangan atau pemberdayaan kapasitas atau kemampuan masyarakat. Aset manusia dapat berupa pengetahuan masyarakat tentang kondisi sosial budaya masyarakat desa, sejarah desa, perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar mereka selama ini. Disamping itu, motivasi dan keinginan kuat individu untuk melakukan perubahan dan menyejahterakan kehidupan mereka juga termasuk aset manusia.



Aset sumber daya alam juga perlu dipetakan terutama bagi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Pemetaan potensi sumber daya alam hutan akan memberikan informasi bagi fasilitator dan masyarakat mengenai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Salah satu contoh pemetaan sumber daya alam masyarakat adalah pemetaan wilayah yang berisi tegakan pohon sagu yang dapat dipertahankan atau dikembangkan menjadi kantong ketahanan pangan masyarakat. Aset ini menjadi penting bila suatu waktu masyarakat mengalami krisis pangan.

Dalam menerapkan pemberdayaan masyarakat berbasis aset, proses pendampingan perlu dilakukan secara komprehensif. Hal ini dilakukan karena adanya keterkaitan yang erat antara aset yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat (aset finansial), pendamping perlu juga mengembangkan aset sumber daya manusia, fisik, dan alam pada saat yang bersamaan. Untuk mengembangkan aset fisik, misalnya pembangunan mikrohidro, fasilitator perlu mengembangkan proses yang mendorong masyarakat untuk mendayagunakan aset manusia (pengetahuan mengenai kecepatan dan volume air sungai sepanjang tahun) dan aset sosial masyarakat (tradisi gotong royong).

Penyusunan Peta Kekuatan Masyarakat dalam PKHB

Strategi pelibatan masyarakat yang dikembangkan dalam PKHB menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset atau kekuatan (*Asset-Based Community Development, ABCD*). Landasan pendekatan ini adalah keyakinan bahwa masyarakat memiliki kekuatan atau aset, dalam bentuk keterampilan, kemampuan, pengalaman, hubungan sosial, sumber daya alam, dan lain-lain, yang dapat didayagunakan untuk membangun masyarakat mandiri.

Kekuatan atau aset sering tidak ditemukeni atau dinafikkan sehingga masyarakat menjadi tidak percaya dengan kekuatan mereka sendiri dan tergantung pada dukungan dan sumber daya dari luar. Dengan menggunakan pendekatan ini, fasilitator melakukan wawancara dan diskusi apresiatif bersama masyarakat untuk menemukeni kekuatan-kekuatan yang dimilikinya dan mendiskusikan bagaimana kekuatan tersebut dapat lebih dimanfaatkan untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik.

Dalam memfasilitasi proses menemukeni kekuatan yang dimiliki masyarakat, fasilitator mengajak warga untuk melihat diri mereka sendiri dan mengidentifikasi aset yang mereka miliki dengan cara berbeda. Proses ini penting karena seringkali orang fokus pada apa yang kurang atau tidak dimiliki, dan tidak melihat aset yang ada sebagai modal luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Khususnya, fasilitator perlu mendorong warga menemukeni dan menyadari pentingnya kekuatan individu, kelompok dan sumber daya alam yang mereka miliki karena kekuatan ketiga



jenis aset ini sering disepelekan. Fasilitator perlu menumbuhkan kesadaran, rasa percaya diri, dan kebanggaan masyarakat terhadap diri mereka sendiri di tengah derasnya persepsi banyak pihak bahwa masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah hutan adalah masyarakat yang terpinggirkan. Kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai kelompok yang memiliki potensi yang luar biasa akan menjadi daya dorong yang besar bagi masyarakat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan mencapai mimpi mereka dengan kekuatan yang mereka miliki.

Wawancara apresiatif adalah langkah pertama untuk menemukan aset yang dimiliki oleh masyarakat. Proses ini dimulai dengan mengajak warga menceritakan pengalaman-pengalaman membanggakan yang tidak terlupakan, yang merupakan cerita sukses warga di masa lalu dan menjadi inspirasi warga hingga saat ini. Pengalaman sukses di masa lalu ini digunakan untuk membuat peta kekuatan warga.

Kekuatan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: **Pertama**, aset individu yang dapat berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku warga dalam melakukan perubahan. **Kedua**, aset relasi atau hubungan yang dibangun oleh warga untuk membangun asosiasi, perkumpulan, paguyuban, forum dan organisasi masyarakat lainnya untuk memperjuangkan kepentingan warga yang relevan. **Ketiga**, aset situasi yang berupa pemetaan potensi atas kondisi di sekitar warga. Pemetaan aset situasi ini dilakukan dengan menemukan potensi kekayaan alam yang ada di sekitar mereka. Kekayaan alam tersebut dapat berupa pemenuhan kebutuhan protein, karbohidrat dan obat-obatan warga yang bersumber dari hutan di sekitar mereka. Demikian pula kekuatan situasi ini dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan warga untuk melindungi wilayah tertentu agar eksistensi identitas budaya tetap terjaga.

Berdasarkan pada percakapan apresiatif ini, warga selanjutnya mengidentifikasi kondisi ideal yang mereka ingin wujudkan di masa mendatang. Kondisi ideal tersebut akan dicapai dengan kekuatan yang mereka miliki sendiri. Peta kekuatan diyakini akan membawa energi tersendiri bagi masyarakat untuk mewujudkan cita-cita kolektif mereka.



RANCANGAN PROSES

1. Wawancara Apresiatif



Tujuan

- Menggali cerita sukses warga dimasa lalu yang sangat berkesan bagi warga
- Menemukan kondisi ideal yang ingin dicapai warga dimasa yang akan datang



Alat dan bahan

- Panduan pertanyaan
- Perekam suara



Waktu 1 minggu



Proses

- Identifikasi warga terpilih yang dapat memberikan informasi tentang pengalaman sukses di masa lalu.
 - Dengan menggunakan panduan pertanyaan, minta warga untuk menceritakan:
 - Pengalaman sukses di masa lalu baik berupa pengalaman pribadi, pengalaman kelompok, atau pengalaman bersama seluruh warga kampung.
 - Kondisi ideal yang diinginkan oleh warga untuk kampung mereka.
 - Bagaimana pengalaman sukses masa lalu tersebut dapat bermanfaat bagi warga untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan.
- Catatlah hasil wawancara apresiatif ini dan kemudian dijadikan bahan diskusi dalam pertemuan warga yang lebih luas.

2. Pertemuan menyusun peta kekuatan warga



Tujuan

- Peserta memahami apa yang dimaksud dengan peta kekuatan warga
- Peserta mampu memahami bentuk-bentuk kekuatan yang dimiliki oleh warga
- Peserta memahami pentingnya penyusunan peta kekuatan warga dibandingkan pemetaan berdasarkan masalah
- Peserta mampu memetakan kekuatan yang dimilikinya
- Peserta mampu bertukar pikiran tentang pembangunan berdasarkan aset yang dimiliki oleh masyarakat





Alat dan Bahan

- Flipchart
- Spidol
- Metaplan
- Kertas post-it
- Slide presentasi
- Peta kampung dan peta lain yang tersedia.
- Informasi pembangunan kampung seperti data-data pembangunan sarana prasarana, laporan kegiatan pembangunan dan lain-lain.



Waktu 3 jam

Proses



Tahap 1: Identifikasi kekuatan diri dan kekuatan relasi

- Ajak peserta untuk mengingat 5 peristiwa pribadi yang membanggakan yang pernah dialami dalam kehidupan pribadi, kelompok, atau kampung mereka. Minta mereka masing-masing menuliskan peristiwa-peristiwa itu pada kartu metaplan, cukup dengan kalimat pendek atau judul peristiwa itu. Tekankan bahwa peristiwa itu harus pengalaman yang benar-benar dialami.
- Tergantung jumlah peserta, minta agar setiap peserta berbagi cerita secara berpasangan. Tekankan agar ketika menceritakan pengalaman yang membanggakan, peserta harus menghadirkan peristiwa itu pada saat ini. Proses berbagi cerita harus dilakukan dengan bersemangat, agar energi dari pengalaman membanggakan itu dibangkitkan lagi.
- Setelah cerita berpasangan selesai, jika peserta di bawah 20 orang, minta masing-masing peserta memilih satu cerita paling membanggakan untuk diceritakan di kelompok besar. Berikan batasan waktu, misalnya 2 menit per orang. Proses berbagi di kelompok besar penting agar energi kekuatan mulai menular lebih luas. Tekankan pada peserta untuk benar-benar menyimak ketika ada yang sedang bercerita.
- Jika peserta di atas 20 orang dan waktu terbatas, proses berbagi di kelompok besar bisa diubah dengan menggabungkan beberapa pasangan dalam satu kelompok. Misalnya, menjadi kelompok yang terdiri dari 3 pasangan (total 6 orang). Dalam kelompok kecil, masing-masing peserta harus menceritakan peristiwa-peristiwa membanggakan yang disampaikan oleh pasangannya dalam tahap sebelumnya. Jadi, bukan menceritakan pengalamannya sendiri, tetapi pengalaman pasangannya.



- Ketika peserta bercerita dalam pasangan dan/atau kelompok kecil, fasilitator harus benar-benar menyimak dan berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lain. Fasilitator bisa membuat catatan singkat tentang kejadian-kejadian yang diceritakan peserta.
- Setelah proses berbagi dalam kelompok kecil (atau besar) selesai, berikan penjelasan singkat tentang apa itu kekuatan diri (pengetahuan, ketrampilan dan perilaku), kekuatan relasi (asosiasi, perkumpulan, minat, jejaring, organisasi sosial) serta kekuatan situasi (kekayaan alam sekitar, tantangan bersama yang dihadapi).
- Minta agar setiap peserta menemukan 5 kekuatan yang dimiliki berdasarkan pengalamannya dalam peristiwa-peristiwa membanggakan yang sudah diceritakan. Kekuatan berupa kekuatan diri dan kekuatan relasi. Berikan contoh secara tertulis dari pengalaman pribadi fasilitator.
- Minta agar peserta menuliskan kekuatan dirinya pada kertas metaplan; 1 metaplan ditulisi dengan 1 kekuatan. Dorong peserta agar menemukan 5 kekuatan diri. Jika menemui kesulitan, mereka bisa meminta teman sekelompoknya untuk membantu. Namun, perlu ditekankan bahwa kekuatan yang ditulis memang benar-benar diakui sebagai kekuatan penulisnya, bukan kata orang.
- Setelah peserta menuliskan kekuatannya, minta agar setiap orang membacakan kekuatannya di kelompok besar. Contoh: Nama saya Budi. Kekuatan saya adalah ..., ..., ..., ..., dan ...
- Setelah semua kekuatan sudah disampaikan, metaplan itu bisa ditempel berdasarkan kekuatan diri dan kekuatan relasi. Tempelkan di tempat yang bisa dengan mudah dilihat semua peserta..
- Sebelum membuat rangkuman atas proses yang baru dilakukan, tanyakan pada peserta bagaimana perasaan mereka ketika menemukan dan berbagi cerita yang membanggakan. Jika saat berkeliling mendengarkan cerita-cerita mereka terdapat beberapa kejadian kolektif, fasilitator bisa menggaris bawahi peristiwa-peristiwa tersebut.
- Ajak peserta melihat kumpulan kekuatan yang dimiliki warga secara individu dan kolektif. Kekuatan relasi adalah kekuatan kolektif dan bersama dengan kekuatan masing-masing warga secara keseluruhan menjadi aset manusia dan sosial yang menjadi landasan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat.
- Fasilitator menyampaikan juga hasil wawancara apresiatif yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperkaya diskusi kelompok warga.





Tahap 2: Identifikasi kekuatan situasi

- Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi kekuatan situasi yang dimiliki komunitas. Mintalah kepada peserta untuk menjelaskan kondisi kampung mereka dan mengidentifikasi berbagai sumber daya alam dan buatan (hasil pembangunan) yang mereka miliki. Gunakan alat bantu berupa peta kampung, dan peta-peta pendukung lainnya.
- Agar lebih hidup dan terjadi partisipasi penuh, minta agar peserta bekerja dalam kelompok maksimal 6 orang dari tahapan sebelumnya. Kekuatan situasi dituliskan pada kertas metaplan atau bisa juga dibuat poster berisi gambar dan tulisan.
- Setelah selesai, minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dengan singkat. Lalu tempelkan kekuatan situasi di dekat kekuatan diri dan relasi yang sudah ditempelkan sebelumnya.
- Buat rangkuman atas semua kekuatan yang dimiliki oleh kampung.



Tahap 3: Membuat Peta Kekuatan

- Tahap selanjutnya adalah melengkapi Peta Kekuatan Masyarakat atau dapat juga disebut peta kekuatan kampung berdasarkan identifikasi aset-aset yang ada. Sampaikan presentasi singkat tentang bentuk-bentuk aset yang perlu dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: aset manusia, aset fisik, aset sosial, aset finansial dan aset sumber daya alam.
- Untuk memudahkan dan mempercepat proses, minta agar setiap kelompok bertanggung jawab mengidentifikasi satu kelompok aset saja. Pastikan bahwa mereka menggunakan hasil dari tahap-tahap sebelumnya, lalu memperkayanya lagi. Hasil kelompok ditulis pada plano dalam bentuk poster, atau bisa juga menggunakan metaplan.
- Pajang hasil kelompok pada dinding, lalu lakukan presentasi menggunakan metode semi *world café*. Minta agar setiap kelompok menunjuk satu jurubicara yang akan menjelaskan hasil kelompok, sedangkan anggota lainnya berpindah ke kelompok lain untuk mendengarkan presentasi mereka.
- Ketika mendengarkan presentasi kelompok lain, peserta boleh bertanya dengan mencatat pertanyaan pada post-it dan ditempelkan pada poster presentasi. Ini penting dilakukan agar klarifikasi dapat dilakukan dengan mudah. Jurubicara boleh menjawab langsung, tetapi bisa juga menjawab pada waktu presentasi pleno di akhir.



- Berikan waktu 10 menit untuk setiap presentasi, lalu minta peserta berpindah ke presentasi berikutnya. Setelah 4 putaran, minta kelompok kembali ke meja asalnya dan beri kesempatan pada masing-masing kelompok untuk berdiskusi tentang tanggapan terhadap pertanyaan kelompok lain yang sudah ditulis pada post-it.
- Setelah proses presentasi kelompok selesai, tempelkan semua plano di depan, dan minta masing-masing kelompok menanggapi komentar serta pertanyaan pada post-it saja, bukan mempresentasikan ulang seluruh presentasi. Ingatkan bahwa semua peserta sudah mendengar presentasi kelompok ketika berkeliling.
- Fasilitator melakukan rangkuman atas keseluruhan proses dan hasil, lalu mengajak peserta melakukan refleksi singkat tentang mengapa penting melakukan identifikasi aset dalam pemberdayaan dibandingkan identifikasi masalah.
- Sampaikan secara singkat tentang studi kasus keberhasilan pemberdayaan berdasarkan aset dan potensi kegagalan dari pemberdayaan masyarakat berdasarkan masalah.
- Tutup sesi dengan memberikan motivasi bahwa peserta memiliki aset yang selanjutnya dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan mereka.



BAHAN BACAAN

Adimihardja, K. dan H. Harry. 2001. *Participatory Research Appraisal* dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Modul Latihan. Humaniora, Bandung.

Mathie, 2002. *Asset-Based Community Development: An Overview*. Coady International Institute, Bangkok.

Anderson, B. and D. Paton. 2004. *ABCD Toolkit*.

Anderson, B. 2004. *What is Asset Based Community Development?*

Dureau, C. 2013. *Pembaru dan Kekuatan Lokal dalam Pembangunan*. ACCESS, Bali.

Cunningham, G. and A. Usman, S. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Merto, S.B. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Munggoro, D. W. dan B. Kismadi. 2013. *Pertemuan Apresiatif Multipihak*. ACCESS, Bali.

Wollenberg, E. 2001. *Mengantisipasi perubahan: Skenario sebagai sarana pengelolaan hutan adaptif*. CIFOR, Bogor.





BAB 5

Membangun Mimpi Bersama

REFLEKSI PENULIS

“...Kami merasakan bahwa kami belum mengalami perubahan kehidupan sebagaimana yang kami harapkan, meskipun wilayah kampung kami sangat luas, potensi yang ada di dalam hutan sangat melimpah, dan jumlah penduduk kami sedikit. Dengan potensi yang luar biasa itu, semestinya masyarakat kami sudah lama mengalami perubahan hidup dengan lebih baik...”

Begitulah ungkapan kegelisahan Asrani, mantan kepala Kampung Merabu di Kabupaten Berau, melihat kesejahteraan masyarakat kampungnya belum berada pada kondisi yang diharapkannya.

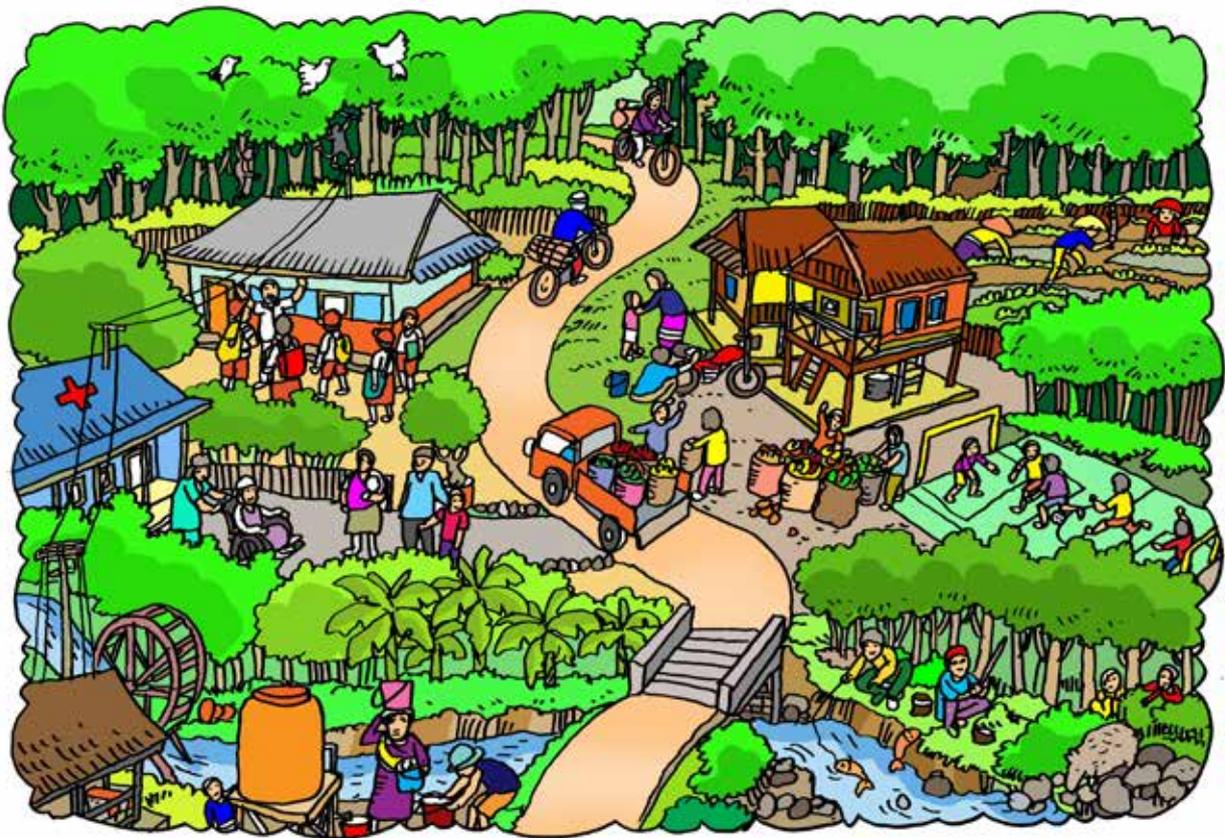
Berangkat dari kegelisahan yang mendalam terhadap kondisi kampungnya, ia mulai mengajak beberapa tokoh masyarakat untuk mempercakapkan kondisi itu dan mulai mencetuskan gagasan bagaimana mengubahnya. Berbekal pemahaman yang baik mengenai wilayah dan potensi yang ada di kampung, mereka mulai mengidentifikasi potensi yang mereka miliki dan menggambarkan harapan mereka terhadap kehidupan kampung di masa mendatang. Dengan menggambar ataupun menempel gambar-gambar dari media cetak yang mencerminkan harapan yang dikehendaki, mereka mulai memvisualisasikan harapan bersama yang dikehendaki dalam sebuah gambar tentang kampung ideal masa depan. Gambaran kampung ideal itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang perubahan hidup yang mereka inginkan. Penjelasan pada setiap gambar memperjelas cita-cita mereka di masa mendatang.

Sebagai deklarasi perubahan kehidupan yang diinginkan, visualisasi masa depan itu mereka tuangkan dalam sebuah kalimat yang sederhana, yaitu “Menjadikan Kampung Merabu sebagai Kampung yang Aman, Sejahtera, Indah, dan Kreatif.” ‘Aman’ bagi mereka berarti setiap warga maupun tamu yang berada di kampung tersebut akan mendapatkan jaminan rasa aman dan kenyamanan dari gangguan dalam bentuk apapun. ‘Sejahtera’ berarti dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, warga dapat mengelola potensi-potensi yang terdapat di wilayahnya dan dapat meningkatkan ekonomi dan indikator-indikator kesejahteraan lainnya. ‘Indah’ adalah karena kampung mereka mempunyai potensi keindahan alam dalam bentuk gunung-gunung karst, hutan yang masih lebat, dan sungai yang jernih. Keindahan di wilayah kampung mereka ini ingin dipertahankan agar di masa depan kampung mereka dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan kunjungan wisata. ‘Kreatif’ karena diharapkan semua warga kampung di masa depan mempunyai kreativitas yang tinggi dalam mengelola potensi sumber daya alamnya. Kalimat visi tersebut menjadi mantera untuk mengantarkan perubahan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik di masa depan, dan ketika disingkat menjadi Kampung Merabu yang ASIK, menjadi ciri khas dari kampung tersebut.



Apa yang dilakukan oleh warga Kampung Merabu baru seumur jagung. Inisiatif ini baru dimulai tahun 2011 yang lalu. Walaupun masih baru, sudah ada beberapa langkah awal yang telah dilakukan. Berdasarkan visi bersama itu, saat ini mereka secara bersama-sama mulai membangun kebun karet, membangun kebun aren, mengembangkan peternakan, dan beberapa kegiatan lainnya. Mereka juga mengajukan proposal kepada Kementerian Kehutanan untuk memperoleh izin pengelolaan terhadap sekitar 8.000 hektar hutan lindung yang akan mereka kelola sebagai hutan desa.

Visualisasi masa depan yang ingin diwujudkan (visi bersama) itu telah memandu mereka untuk memulai langkah perubahan kehidupan yang mereka cita-citakan dan senantiasa diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari.



Kondisi di atas dialami oleh sebagian besar masyarakat yang berdiam di dalam dan di sekitar hutan di Indonesia. Menurut Menteri Kehutanan, sekitar 21% masyarakat yang tinggal di sekitar hutan masuk dalam kategori miskin (Republika Online, 18 Agustus 2013). Data Kementerian Kehutanan (2010) menyebutkan bahwa dari total 48,8 juta penduduk desa yang tinggal di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh negara, sekitar 10,2 juta di antaranya masuk kategori miskin.

Apa yang disampaikan oleh Pak Asrani dari Kampung Merabu menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu mempunyai aset alam yang sangat besar berupa sumber daya hutan, baik kayu maupun non-kayu. Aset tersebut bila dikelola secara serius, terarah dan mendapatkan dukungan dari negara serta para pemangku kepentingan lainnya, diyakini akan membawa masyarakat kepada kehidupan yang jauh lebih baik dari kondisi yang ada saat ini. Hanya saja, pada kenyataannya, masyarakat berada dalam posisi yang gamang untuk melakukan pengelolaan sumber daya hutan tersebut karena berbagai tantangan yang harus mereka hadapi.

Hal mendasar yang menjadi tantangan adalah kurangnya kemampuan warga untuk mendefinisikan harapan bersama atau visi terhadap pengelolaan atas sumber daya hutan yang mereka miliki. Kondisi ini terjadi karena warga sering diposisikan sebagai objek dalam skema pembangunan hutan sehingga mereka tidak bisa kreatif dalam mengelola hutan dan sumber daya alam yang berada di dalamnya. Keterbatasan kreativitas tersebut menyebabkan warga tidak mampu mendayagunakan potensi-potensi yang mereka miliki secara maksimal.

Selain menjadi objek sehingga kreativitas menurun, terdapat beberapa tantangan lain. **Pertama**, lemahnya hak pengelolaan masyarakat atas hutan dan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun dalam kenyataannya, negara lebih banyak memberikan izin pengelolaan kepada pihak swasta untuk mengelola hutan dibandingkan kepada masyarakat, meskipun masyarakat sudah lebih dulu dan lebih lama tinggal di dalam kawasan tersebut. Hal ini disebabkan karena pengelolaan oleh pihak swasta dianggap akan menghasilkan pendapatan bagi negara untuk mendukung pelaksanaan kepentingan nasional.

Kedua, masyarakat tidak memiliki kemampuan sumber daya manusia dan finansial untuk melakukan eksploitasi sumber daya hutan dan alam lainnya secara besar-besaran. Pengambilan hasil hutan dan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat umumnya dalam skala kecil atau hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun dengan masuknya permintaan



pasar, terjadi pergeseran pola pemanfaatan ke arah ekstraktif untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar. Bila hal ini terjadi, maka mereka akan menghadapi tantangan berikutnya.

Ketiga, terbatasnya jaringan pemasaran yang dimiliki oleh masyarakat. Bila masyarakat mengumpulkan hasil hutan untuk tujuan komersial, mereka umumnya tergantung pada pemilik modal dari luar maupun tengkulak yang datang ke kampung mereka untuk menjual hasil hutan tersebut.

Dalam konteks saat ini, ketika negara membuka ruang bagi warga untuk mengelola sumber daya hutan melalui beberapa skema pengelolaan hutan, maka ada peluang yang mempunyai kekuatan hukum bagi mereka untuk merevitalisasi arah pembangunan kampung untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk melakukan revitalisasi tersebut, warga perlu mendefinisikan kehidupan lebih baik seperti apa yang mereka inginkan. Dalam rangka mencapai perubahan kehidupan yang lebih baik tersebut, mereka perlu membangun mimpi atau visi besar bersama. Tony Buzan dalam bukunya *The Power of Spiritual Intelligence* (2003) mendefinisikan visi sebagai kemampuan berpikir atau merencanakan masa depan dengan bijak dan imajinatif dengan menggunakan gambaran mental tentang situasi yang kemungkinan dapat terjadi di masa mendatang. Dalam konteks kampung, visi kampung merupakan keinginan ideal kampung yang dirumuskan secara seksama, yang menentukan arah atau keadaan masa depan kampung tersebut. Visi warga kampung merupakan representasi dari kehendak terdalam atas sebuah keadaan yang lebih baik di masa depan.

Proses membangun visi bersama untuk mewujudkan perubahan kehidupan warga berbasiskan pengelolaan sumber daya alam dipercayai sebagai suatu upaya yang dapat mengembalikan nilai-nilai kehidupan yang pernah ada dan sekaligus memandu mereka untuk mewujudkan harapan bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Visi kampung yang baik merupakan rangkaian gagasan atau harapan besar yang dibuat secara kolektif dan diyakini dapat diwujudkan dalam kurun waktu 10 – 15 tahun mendatang dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan potensi atau aset yang dimiliki saat ini. Visi ini akan menjadi daya tarik, membangkitkan komitmen, tenaga, dan semangat warga kampung untuk melakukan perubahan kehidupan. Selain itu, visi ini tidak hanya dapat menciptakan makna bagi kehidupan warga, namun juga sebagai ciri warga kampung tersebut yang membedakannya dengan warga kampung lain.

Visi bersama penting dibangun karena beberapa alasan: **Pertama**, penetapan visi menjadikan arah perubahan yang dikehendaki semakin terfokus karena menjelaskan langkah-langkah (misi) yang dapat diambil untuk mencapai visi tersebut. Perubahan membutuhkan arah, tujuan, alamat, atau gambaran mental yang dapat dibayangkan oleh semua komponen masyarakat sehingga setiap tindakan, keputusan strategis, dan kebijakan taktis dilakukan dalam rangka mendekatkan diri pada tujuan ideal yang diinginkan.



Kedua, sebagai alat untuk mengakomodasi harapan-harapan setiap warga menjadi harapan bersama. Visi merupakan gambaran besar yang merepresentasikan harapan dari masing-masing individu setelah melalui diskusi panjang di antara mereka sendiri. Setiap individu memiliki kepentingan, pikiran, maksud, dan tujuan masing-masing. Jika keinginan masing-masing warga dibiarkan tidak terakomodasi, maka dapat terjadi gesekan atau benturan kepentingan. Visi besar juga tidak bisa diwujudkan oleh setiap warga sendirian dan secara terpisah. Visi tersebut hanya bisa diwujudkan bila setiap warga kampung bekerja sama. Untuk itu perlu dibangun komunikasi di antara warga kampung untuk merumuskan, membangun, dan menyepakati visi tersebut sehingga visi yang muncul merepresentasikan harapan seluruh warga.

Ketiga, untuk memberikan gambaran kepada pihak luar yang diharapkan dapat mendukung warga untuk membuat perubahan kehidupan. Dengan adanya visi ini, pihak luar dapat melihat gambaran mental warga terhadap perubahan yang diharapkan sehingga mereka dapat dengan mudah memberikan dukungan yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama tersebut.

Terakhir, untuk mengukur keberhasilan pembangunan kampung, visi ini juga dapat dijadikan alat ukur perubahan kehidupan yang telah terjadi dalam satu periode visi tersebut.

Visi bersama kampung ini harus bersifat holistik dan mengakomodasi kebutuhan warga untuk mengembangkan semua aspek kehidupannya ke arah yang lebih baik. Aspek ini terdiri dari aspek sumber daya manusia, pelayanan publik/infrastruktur/kesehatan, sumber-sumber ekonomi lokal, sumber daya alam, dan budaya. Pengalaman mendampingi warga selama ini memperlihatkan bahwa titik berat pembangunan sebuah kampung sering diarahkan kepada pencapaian tiga aspek saja, yaitu infrastruktur, ekonomi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Padahal untuk konteks masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan, aspek sumber daya hutan merupakan aspek kehidupan yang sangat penting dan merupakan modal dasar untuk mengubah kehidupan mereka. Selain itu, masuknya hutan sebagai bagian dari visi bersama akan menumbuhkan kembali rasa kepemilikan yang tinggi warga terhadap keberadaan hutan. Demikian juga dengan budaya. Di kampung yang masih memegang dan menjalankan adat istiadatnya dengan teguh, masuknya aspek budaya ini akan memperkuat komitmen dan usaha warga untuk senantiasa mempertahankan budayanya.

Visi yang dibangun bersama oleh warga diharapkan dapat diwujudkan dalam rentang waktu 10-15 tahun mendatang. Hal ini didasarkan karena sifat visi yang berorientasi ke masa depan tentunya memerlukan waktu yang panjang untuk mencapainya. Visi tersebut akan diterjemahkan kedalam beberapa misi dan tahapan kegiatan tahunan. Dalam bahasa perencanaan, visi ini biasa disebut dengan rencana pembangunan jangka panjang, kemudian akan diturunkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah dengan rentang waktu lima tahun, lalu terakhir akan diturunkan lagi menjadi rencana pembangunan tahunan. Pembagian menjadi beberapa tahapan ini akan mempermudah pencapaian visi tersebut.



Visi perlu dirumuskan dalam sebuah kalimat sederhana, mudah diingat, memiliki daya tarik, dan dapat menggerakkan komitmen dan hati warga kampung untuk terlibat dalam mencapai mimpi bersama tersebut. Sebagai contoh kasus dapat diambil dari Kampung Merabu. Untuk mendeklarasikan perubahan kehidupan yang mereka kehendaki, warga Kampung Merabu merumuskan visi mereka kedalam sebuah kalimat yang sederhana, yaitu: “Menjadikan Kampung Merabu sebagai kampung yang aman, sejahtera, indah dan kreatif,” yang kemudian disingkat menjadi ASIK.

Untuk meneguhkan visi kampung sebagai milik bersama semua warga kampung tersebut maka diperlukan kesepakatan bersama untuk memakai visi tersebut sebagai visi kampung. Dan dalam proses selanjutnya visi tersebut harus senantiasa disosialisasikan dan diinternalisasikan sehingga visi tersebut masuk kedalam benak warga dan menjadi kehendak alam bawah sadar mereka. Sebagai contoh, di Kampung Long Duhung visi kampung dijadikan sebagai lagu oleh warganya dan senantiasa dinyanyikan pada beberapa pertemuan di tingkat kampung. Dengan demikian, tanpa sadar mereka selalu diingatkan akan cita-cita yang mereka bangun sendiri. Dalam perkembangannya, karena mayoritas warga Kampung Long Duhung adalah umat Kristiani, maka untuk memperkuat visi tersebut sebagian warga juga mengusulkan agar dibuat menjadi lagu/doa rohani yang akan dipanjatkan pada setiap ibadah mingguan mereka. Menurut mereka, selain mereka akan senantiasa teringat akan cita-citanya, mereka juga berharap cita-cita mereka akan dikabulkan oleh Tuhan karena senantiasa dipanjatkan dalam ibadah mingguan mereka.

Saat ini di Kampung Merabu dan Long Duhung visi yang telah mereka bangun bersama serta didasarkan oleh keyakinan mereka tersebut telah menuntun proses pembangunan yang tengah mereka lakukan. Visi, yang kemudian diturunkan menjadi misi dan rangkaian kegiatan dalam tata waktu tertentu, telah membantu mereka dalam memulai proses pembangunan menuju kehidupan lebih baik yang mereka cita-citakan.



RANCANGAN PROSES



Persiapan

Ajak warga kampung untuk memilih perwakilannya, beberapa perwakilan untuk setiap Rukun Tetangga, untuk hadir pada Pertemuan Impian Masyarakat (PIKAT). PIKAT adalah pertemuan warga untuk berbagi impian. Perwakilan yang ditunjuk selanjutnya diundang pada waktu dan tempat yang sudah disepakati bersama.



Tujuan

- Peserta mampu membayangkan perubahan yang ingin diraih di masa depan dalam kurun 10 tahun mendatang
- Peserta mampu merespon dan mengubah situasi dari persoalan menjadi peluang



Alat dan bahan

- Koran atau majalah bekas
- Gunting
- Lem kertas
- Kertas plano
- Spidol
- Krayon
- Lagu untuk meditasi



Waktu 180 menit



Proses

- Peserta diminta untuk duduk dengan nyaman mungkin. Lalu mintalah mereka untuk memejamkan mata seperti meditasi.
- Ajaklah peserta untuk membayangkan perubahan bentuk kampung yang diharapkan 10 tahun mendatang berdasarkan potensi yang dimiliki oleh kampungnya. Putarlah lagu yang berisi instrumen musik dengan suara alam sehingga peserta berada dalam kondisi lebih nyaman dan rileks dalam membayangkan masa depannya.
- Lakukan 3-5 menit saja.
- Secara acak, mintalah 3-5 peserta untuk menceritakan secara singkat apa yang dilihatnya di masa depan saat mereka melakukan meditasi.



- Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok dengan jumlah anggota antara 5 – 7 orang per kelompok.
- Bagikan majalah bekas, kertas plano, gunting, lem, spidol, dan krayon kepada masing-masing kelompok.
- Berilah tugas kepada masing-masing kelompok sebagai berikut:
 - Mintalah mereka untuk menggambarkan cita-cita mereka untuk masa depan kampung mereka dalam 10 tahun mendatang, dengan menggunakan imajinasi.
 - Gambarkan atau tempelkanlah gambar-gambar tersebut pada kertas plano.
 - Buatlah sebuah kalimat yang menggambarkan perubahan yang ingin diwujudkan dimana kalimat tersebut tidak lebih dari 16 kata.
- Mintalah pada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan berikan kesempatan kepada semua peserta untuk memberikan komentar atau menambahkan idenya.
- Mintalah kepada semua peserta untuk menyepakati sebuah gambaran tentang perubahan kampung di masa depan yang mereka harapkan bersama dan juga menyepakati sebuah kalimat visi yang akan mengantarkan perubahan kehidupan yang ingin diwujudkan bersama. Kalimat visi sebaiknya disusun tidak lebih dari 16 kata, sederhana, mudah diingat, memiliki daya tarik, dan dapat menggerakkan komitmen dan hati warga kampung.
- Pada akhir sesi, mintalah kepada semua peserta untuk berpikir dan merenungkan kembali visi yang telah mereka sepakati tersebut. Ajaklah mereka untuk menyederhanakan makna dari visi tersebut agar mudah diingat dan menuntun alam bawah sadar mereka untuk mencapainya. Penyederhanaan bahasa visi ini dapat dilakukan dengan membuat akronim, simbol, atau bahkan dengan melagukannya.



BAHAN BACAAN

Buzan, T. 2003. *The Power of Spiritual Intelligence*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2010. Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014. Kementerian Kehutanan, Jakarta.

Republika. 2013. Menhut: 21 Persen Masyarakat Sekitar Hutan Miskin. Republika Online, 18 Agustus 2013.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Wollenberg, E., D. Edmunds, dan L. Buck. 2010. Mengantisipasi Perubahan: Skenario Sebagai Sarana Pengelolaan Hutan secara Adaptif. CIFOR, Bogor.





BAB 6

Penataan Lahan: Pembangunan Peta Tata Guna Lahan Tiga-Dimensi



REFLEKSI PENULIS

“Di tempat ini saya pernah melihat orangutan,” ucap Eng, warga Kampung Long Duhung yang berusia 13 tahun, sambil meletakkan orangutan yang terbuat dari lilin malam di atas miniatur pohon yang terbuat dari kertas.

“Di wilayah ini ada lubang yang belum ditemukan oleh perusahaan walet. Cuma memang perjalanan menuju kesana cukup jauh dan tidak ada jalur yang jelas untuk sampai ke tempat ini.” (Ransum, tokoh adat Kampung Merabu)

Ucapan tersebut di atas terdengar saat warga Kampung Long Duhung dan Merabu membuat peta tata guna lahan tiga dimensi. Jika selama ini diskusi pemetaan ruang dan lahan masyarakat kurang diminati, diskusi dengan menggunakan peta tiga dimensi sangat berbeda suasananya. Warga berkumpul mengelilingi miniatur wilayah kampung dan sekitarnya sambil bercerita dan menunjuk dengan bersemangat tempat-tempat di dalam hutan dan perbukitan sekitar kampung yang pernah mereka kunjungi.

Anak kecil, orang dewasa, perempuan dan laki-laki, hingga tokoh adat dengan antusias terlibat dalam proses penataan lahan di atas peta tiga dimensi tersebut. Sambil bercerita tentang kondisi kampung mereka, warga Long Duhung menancapkan berbagai tusuk gigi yang telah dihiasi kertas krep aneka warna yang merepresentasikan pohon buah, pohon kayu, dan sagu di atas peta tiga dimensi. Demikian pula warga Merabu. Dengan ramainya, mereka bercerita tentang jumlah lubang atau gua burung walet yang ada di dalam wilayah administrasi kampung mereka dan lamanya waktu perjalanan yang harus mereka tempuh untuk mencapai lubang tersebut.

Proses menyusun tata guna lahan dengan peta tiga dimensi ini menjadi sarana berbagai informasi dan pengetahuan antar warga tentang kondisi kampung dan wilayah sekitar. Warga, yang memiliki banyak informasi tentang kondisi hutan dan potensinya, dimana hutannya masih baik, di wilayah mana sering dijumpai binatang buruan, pohon sagu, dan lainnya, dengan senang hati berbagi informasi dan pengetahuan dengan warga lain.

Apa yang disampaikan oleh Eng Long Duhung dan Ransum dari Merabu saat diskusi tata guna lahan merupakan informasi yang sangat penting bagi warga di kedua kampung dalam inisiatif mereka dalam merencanakan pembangunan kampung, mengelola hutan dan sumber daya alam lain di dalam wilayah kampung mereka.

Peta tata guna lahan tiga dimensi memberikan pencerahan bagi warga. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kampung Merabu Franly Olley:



”Awalnya saat kami diminta untuk membuat tata guna lahan dengan peta tiga dimensi ini, saya tidak tahu bagaimana bentuk wilayah Kampung Merabu yang sesungguhnya. Namun setelah peta ini selesai, terbuka mata kami. Kampung Merabu memang pantas disebut sebagai kampung yang ASIK karena topografinya sangat indah dan potensi sumber daya alamnya yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan serta dikelola untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.”



Sejak tahun 1990-an, inisiatif pemberdayaan masyarakat banyak menggunakan alat pemetaan partisipatif. Konsep dasar dari pemetaan partisipatif adalah melibatkan warga secara aktif dalam menuangkan informasi dan pengetahuan mereka mengenai wilayah yang akan dipetakan kedalam bahasa peta. Melalui pemetaan partisipatif ini, warga mengidentifikasi wilayah kelola sosial, ekonomi dan budayanya. Peta yang dihasilkan biasanya digunakan oleh warga untuk bernegosiasi dengan pihak lain dalam upaya mereka untuk mendapatkan hak kelola atau akses terhadap wilayah dan/atau sumber daya alam di dalamnya.

Hasil pemetaan partisipatif selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan rencana tata guna lahan. Jika dalam proses pembuatan peta warga mengidentifikasi wilayah kelola sosial, ekonomi, ekologi dan budaya dan menuangkannya dalam bentuk peta, maka dalam proses pembuatan rencana tata guna lahan, warga menuangkan rencana mereka untuk menata wilayah-wilayah tersebut secara lebih rinci.

Dalam proses penyusunan tata guna lahan, hal yang penting dilakukan adalah memastikan bahwa rencana warga dalam menata penggunaan wilayah atau lahan berdasarkan visi yang telah mereka sepakati bersama. Proses ini dapat dilihat sebagai proses menyelaraskan rencana aksi yang akan dilakukan dengan mimpi dalam konteks ruang. Contohnya: warga Merabu memimpikan setiap keluarga memiliki kebun buah dan kebun karet dalam lima tahun ke depan. Mimpi ini akan diwujudkan dengan beberapa aksi nyata, misalnya dengan mengajukan proposal ke dinas perkebunan untuk mendapatkan dukungan pendanaan, menyediakan bibit, menyiapkan lahan, dan lainnya. Dalam konteks ruang, warga kampung perlu mengidentifikasi wilayah dalam kampung mereka dimana kebun tersebut akan dibangun. Identifikasi wilayah tersebut juga harus mempertimbangkan mimpi mereka yang lain, misalnya mimpi untuk mendapatkan hak pengelolaan atas sekitar 10.000 hektar hutan lindung. Dengan demikian, kebun buah dan kebun karet yang diimpikan tidak dapat dibangun di dalam kawasan hutan yang akan dilindungi.

Selain untuk memastikan adanya keselarasan antara mimpi dan rencana aksi, ada beberapa manfaat lain yang dapat diperoleh oleh warga kampung dari proses penataan lahan. **Pertama**, proses ini membantu warga untuk mengelola hutan dan sumber daya alam di sekeliling mereka secara lebih bijaksana. Melalui proses ini, warga dapat merencanakan di mana kegiatan-kegiatan mereka seharusnya dilakukan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan tanpa menyebabkan pembukaan hutan atau kerusakan sumber daya alam lainnya. **Kedua**, melalui proses ini, warga akan lebih memahami ancaman dan tekanan terhadap hutan dan sumber daya alam di sekeliling kampung saat ini atau mengantisipasi ancaman dan tekanan di masa mendatang. Mereka juga dapat mendiskusikan dan menyepakati tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut.



Ketiga, rencana tata guna lahan dapat digunakan warga sebagai alat negosiasi dengan pihak lain. Bila warga mengetahui ada rencana pihak lain untuk membangun atau menggunakan lahan dalam wilayah kampung mereka di mana rencana tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan mimpi warga, mereka dapat menyampaikan rencana tata guna lahan yang telah mereka susun kepada pihak lain tersebut. Dengan demikian, kegiatan yang tidak diinginkan dapat dinegosiasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan warga.

Keempat, peta tata guna lahan juga dapat ditujukan untuk memetakan dan menata wilayah adat bagi komunitas yang secara kesejarahan memiliki wilayah yang diperuntukkan dan diakui sebagai hutan atau tanah adat. Pemetaan dan tata guna lahan ini akan memberikan informasi yang sangat berguna bagi warga untuk kemudian mendiskusikan peruntukan dan pemanfaatan wilayah adat tersebut berdasarkan sejarah yang secara turun temurun diakui dan dilaksanakan oleh warga yang berada pada wilayah tersebut. Tentunya pemetaan hutan atau tanah adat ini juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor termasuk status kawasan, para pihak yang selama ini mengelola dan memanfaatkan wilayah tersebut, hak yang melekat pada hutan atau tanah tersebut dan faktor-faktor lainnya yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas wilayah yang diakui sebagai wilayah adat.

Rencana tata guna lahan dapat berbentuk peta dua dimensi atau tiga dimensi. Pembuatan peta dua dimensi memiliki beberapa keterbatasan. Pengalaman dalam mendampingi masyarakat menunjukkan bahwa warga kampung terkadang mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami apa yang direpresentasikan oleh garis, bentuk, skala, atau coretan lain di atas kertas. Mereka sulit memproyeksikan atau membayangkan bentuk-bentukan di atas peta menjadi realitas sungai, bukit, dan bentukan lain di alam. Karena kesulitan ini, peta dua dimensi tidak terlalu efektif sebagai alat diskusi, komunikasi, dan pembelajaran bagi seluruh warga kampung.

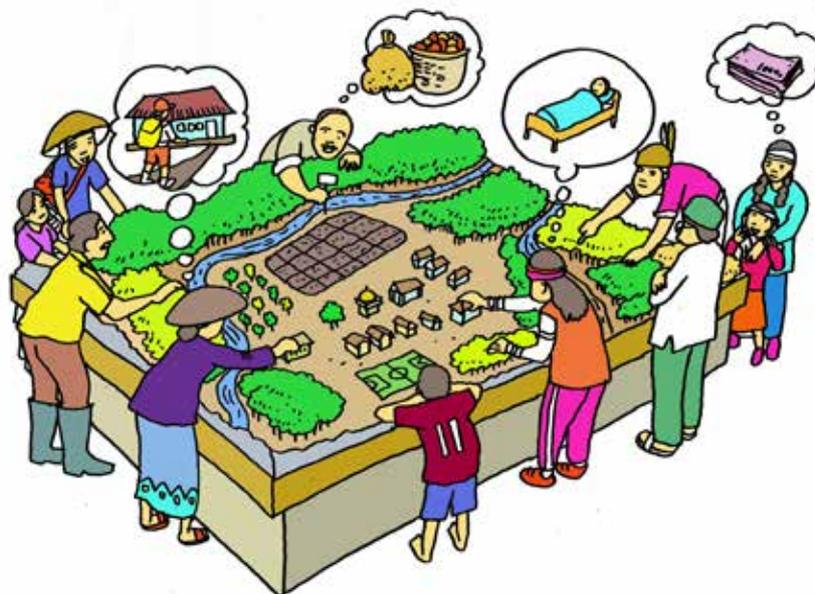
Dibandingkan peta dua dimensi yang datar, peta tata guna lahan tiga dimensi lebih mudah dipahami oleh warga. Bila menggunakan skala yang sesuai maka peta tiga dimensi ini akan terlihat seperti miniatur suatu wilayah atau bentang alam yang sesungguhnya. Warga kampung dapat dengan mudah mengenali bukit, lembah sungai, dan bentukan lain di dalam wilayah kampung mereka yang dipresentasikan oleh peta tiga dimensi ini. Karena warga dapat memahami peta tiga dimensi ini dengan mudah dan cepat, mereka dapat terlibat langsung dalam mendiskusikan kondisi wilayah di sekitar kampung mereka. Hal ini terjadi saat dilakukan pendampingan penyusunan peta tiga dimensi di Kampung Long Duhung, Berau. Warga kampung dengan mudah mengenali bentang alam sekitar kampung yang ditampilkan di peta tiga dimensi. Mereka dengan antusias menunjukkan wilayah dimana tutupan hutannya masih baik, dimana berbagai pohon buah dapat ditemukan, dimana warga sering melihat orangutan, dan wilayah penting yang ingin mereka lindungi.



Proses pembuatan peta tiga dimensi, bila difasilitasi dengan baik, akan bermanfaat bagi warga kampung. Proses pembuatan peta yang partisipatif menjadi sarana bagi warga untuk berbagi informasi sehingga mereka lebih mengenali dan memahami kondisi wilayah di sekitar kampung. Walaupun warga sudah bermukim cukup lama di kampung, tidak berarti mereka mengenal seluruh wilayah dan mengetahui seluruh potensi di dalamnya dengan baik. Informasi dan pengetahuan mengenai wilayah tertentu mungkin hanya dimiliki kelompok warga tertentu saja. Proses pembuatan peta tiga dimensi memberi kesempatan bagi warga untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Orang tua dalam kampung dapat bercerita mengenai kondisi wilayah beberapa waktu yang lalu, perubahan yang mereka amati, dan mengapa perubahan tersebut terjadi. Di Kampung Merabu, Berau, sekelompok warga yang sangat memahami lokasi berbagai gua yang tersebar di wilayah perbukitan dan pegunungan kapur di sekeliling kampung berbagi informasi mengenai lokasi, nama, dan jalur yang dapat digunakan untuk mencapai gua tersebut. Proses berbagi informasi dan pengetahuan mengenai gua ini baru terjadi pertama kalinya di kampung tersebut ketika warga berkumpul di depan peta tiga dimensi tersebut.

Karena peta tiga dimensi mudah dipahami oleh warga, peta ini dapat menjadi alat perencanaan yang efektif. Warga dapat menggunakan peta ini untuk mendiskusikan bagaimana lahan, hutan, dan sumber daya alam lainnya sebaiknya dimanfaatkan, misalnya di wilayah mana mereka akan berladang, membangun kolam ikan air tawar, mengembangkan sawah, kebun karet, kebun buah, dan lainnya.

Disamping itu, karena peta tiga dimensi adalah miniatur wilayah dan bentang alam yang sesungguhnya, warga dapat dengan mudah membayangkan bagaimana wilayah dalam dan sekitar kampung mereka akan berubah sebagai hasil dari tindakan yang akan mereka lakukan. Mereka dapat membayangkan bagaimana bentuk bentang alam di sekitar kampung mereka ketika mimpi mereka tercapai.



Peta tata guna lahan tiga dimensi juga akan menjadi alat komunikasi dan negosiasi yang efektif bagi warga dengan pihak lain. Miniatur bentang alam sekitar kampung akan mudah dipahami oleh pihak luar. Warga dapat menyampaikan tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola hutan dan sumber daya alam di sekitar kampung dengan pihak luar. Warga dapat menyampaikan rencana mereka dalam mengelola dan menggunakan lahan di sekitar kampung, misalnya kepada perusahaan yang memegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di dalam wilayah administrasi kampung. Hal ini penting dilakukan oleh warga mengingat perusahaan tersebut diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan kayu selama suatu periode. Dengan demikian, warga perlu membangun kesepakatan dengan perusahaan itu bila mereka ingin memanfaatkan lahan di dalam kampung mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam situasi di mana sistem peruntukan lahan dan hak pengelolaannya yang ditentukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan sistem yang dianut oleh masyarakat, peta tiga dimensi dapat berfungsi sebagai alat untuk melakukan diskusi yang konstruktif antara warga dengan pihak terkait. Peta ini tidak bertujuan untuk meneguhkan hak dan kekuasaan salah satu pihak semata, melainkan sebagai alat untuk membangun diskusi dan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Misalnya, bila lahan yang ingin dimanfaatkan oleh warga berhimpitan dengan wilayah pemegang IUPHHK, warga dapat menggunakan peta tiga dimensi sebagai alat untuk menyampaikan komitmen mereka untuk mengawasi wilayah tertentu dan bagaimana rencana penggunaan lahan mereka akan mendukung dan memperkuat pengelolaan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Diharapkan proses negosiasi yang dilakukan akan mencapai titik temu yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.

Agar tujuan penyusunan peta tiga dimensi ini dapat terwujud maka perlu upaya-upaya kreatif agar seluruh warga dapat menginternalisasi tata guna lahan yang telah disepakati bersama. Hal ini dapat dilakukan dengan meletakkan peta tiga dimensi ini pada wilayah publik di kampung yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh warga. Peta tiga dimensi akan menjadi alat yang sangat strategis jika dimanfaatkan oleh warga untuk mempercakapkan dan meneguhkan mimpi mereka dari waktu ke waktu sehingga perubahan yang diharapkan dapat terwujud.

Dalam mendampingi warga untuk menyusun peta tata guna lahan berbasis mimpi, fasilitator memerlukan peta kampung yang menunjukkan batas wilayah kampung dan informasi-informasi utama, seperti wilayah pemukiman, jalan utama, atau sungai. Rancangan proses di bawah memberikan proses-proses utama yang dapat digunakan oleh fasilitator dalam mendampingi warga untuk melakukan pemetaan partisipatif sebelum melakukan pemetaan tiga dimensi.



RANCANGAN PROSES

1. Pemetaan partisipatif



Persiapan

- Ajak warga untuk berdiskusi mengenai wilayah kampung, apa itu peta, mengapa wilayah tersebut harus dipetakan, apa yang dimaksud dengan pemetaan partisipatif dan tahapan-tahapan pembuatan peta secara partisipatif.
- Pastikan bahwa warga memahami sepenuhnya mengenai tujuan pemetaan.
- Bila warga sepakat untuk memetakan wilayah kampungnya, dampingi warga dalam memilih perwakilan yang akan duduk dalam Tim Pemetaan.
- Ajak anggota tim untuk melakukan tahapan-tahapan pembuatan peta partisipatif seperti yang diuraikan di bawah.



Tujuan

- Warga mengetahui dan memahami wilayah kelola mereka.
- Warga mampu mengidentifikasi potensi-potensi sumberdaya alam yang berada di dalam kampung mereka.
- Warga mampu mengidentifikasi peluang dan ancaman terhadap potensi yang berada di kampung.
- Warga mempunyai peta wilayah yang dibangun secara partisipatif



Alat dan bahan

- Kertas plano
- Spidol
- Peta dasar
- Peralatan survey dan pemetaan (kompas, *Global Positioning System* atau GPS, clinometer, pita ukur)



Waktu 1 bulan



Proses

- Informasikan kepada Tim Pemetaan tahapan-tahapan pemetaan dan informasi dasar yang diperlukan dalam pemetaan.
- Dampingi Tim Pemetaan dalam membuat sketsa kampung. Dalam membuat sketsa kampung ini, minta Tim Pemetaan untuk mengajak warga-warga kampung yang mempunyai informasi dan pengetahuan terkait sejarah pemukiman, batas wilayah kampung.



- Dampingi Tim Pemetaan dan warga dalam membuat gambar sketsa yang menunjukkan lokasi pemukiman, jalan utama, sungai, bukit atau gunung, wilayah perburuan, ladang, kebun, kuburan, dan lainnya.
- Dampingi Tim Pemetaan dalam mempresentasikan sketsa yang dihasilkan dengan warga lainnya untuk mendapatkan masukan dan informasi tambahan.
- Latih Tim Pemetaan mengenai prinsip-prinsip pemetaan, penggunaan alat, dan sepakati rencana kerja pengukuran dan pengambilan data di lapangan.
- Dampingi warga dalam membuat tanda-tanda di lapangan, memasang pal batas, mengambil titik-titik GPS, dan data-data lain yang diperlukan.
- Dampingi Tim Pemetaan untuk menunjukkan draft peta kepada warga kampung lainnya untuk mendapatkan masukan dan informasi tambahan.
- Setelah draft peta disempurnakan, dampingi Tim Pemetaan untuk mendapatkan pengesahan warga dan pemerintah kampung terhadap peta tersebut.
- Bila diperlukan, dampingi pemerintah kampung untuk mendiskusikan peta tersebut dengan warga dan pemerintah kampung tetangga.
- Anjurkan pemerintah kampung untuk menyampaikan hasil pemetaan tersebut kepada pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten (bagian tata pemerintahan) untuk mendapatkan dukungan dan pengesahan.

2. Pembuatan peta tata guna lahan tiga dimensi



Tujuan

- Warga mampu membuat peta tata guna lahan tiga dimensi
- Warga mampu menata guna lahan berdasarkan mimpi mereka



Alat dan bahan

- *Styrofoam* ukuran 200cm x 100cm x 1 cm (paling tipis) untuk kontur. Bahan alternatif: kardus, kertas karton tebal, atau plywood
- *Styrofoam* ukuran 200cm x 100cm x 2 cm untuk alas
- Tripleks 244 x 122 x 0,6 cm untuk dasar
- Gergaji untuk memotong tripleks
- Lem kayu untuk merekatkan tripleks dan *styrofoam*
- Cat aneka warna
- Alat pemotong khusus *styrofoam* (tersedia alat bertenaga listrik atau batere). Hasil



pemotongan dengan *styrofoam* cutter sangat halus. Pemotongan dapat dilakukan dengan cepat sehingga menghemat waktu mengingat banyak potongan kontur yang harus dibuat. Apabila menggunakan cutter, hasilnya sangat kasar dan terkadang harus dibuat ulang bila potongan yang sesuai tidak diperoleh.

- 2 kopi peta kontur wilayah yang akan dibuat tiga dimensi. Interval kontur disesuaikan dengan skala peta. Untuk Long Duhung skala yang digunakan adalah 1: 5.000 karena peta tata guna lahan tiga dimensinya difokuskan untuk daerah sekitar pemukiman kampung yang tidak terlalu luas. Penentuan interval kontur sangat penting untuk menampilkan ketinggian model tiga dimensi.
- 1 kopi peta status kawasan (budidaya kehutanan, hutan lindung, budidaya non-kehutanan, dan lainnya) untuk panduan mengklasifikasikan kawasan.
- 1 kopi peta *hill shade* dengan sungai untuk membantu tampilan akhir kontur.
- Serbuk gergaji, serbuk padi sekam yang dicampur lem kayu atau lilin malam atau plastisin beraneka warna untuk melapis potongan *styrofoam*.
- Gunting
- Kertas karbon
- Cat berbagai warna
- Kuas
- Bahan untuk membuat model vegetasi (pohon/semak): kertas krep berbagai warna dan tusuk gigi. Sebagai alternatif bisa digunakan jarum pentul dengan kepala bulat berbagai warna.



Cara pembuatan

- Bantu warga untuk membuat alas peta dengan memotong tripleks sesuai dengan ukuran kertas peta.
- Bantu warga dalam memotong *styrofoam* dengan ketebalan 2 cm sesuai dengan ukuran kertas peta. *Styrofoam* kemudian direkatkan ke atas tripleks yang sudah dipotong dengan lem kayu. Tunggu hingga agak kering.
- Selembar peta kontur selanjutnya direkatkan di atas *styrofoam* setebal 2 cm. Peta ini digunakan sebagai acuan untuk menempelkan potongan kontur (seperti permainan puzzle yang mencocokkan potongan-potongan puzzle dan menyatukannya menjadi gambar yang utuh).
- Peta kontur kedua digunakan sebagai acuan untuk memotong *styrofoam*. Kontur perlu disalin ke atas *styrofoam* dengan menggunakan kertas karbon.
- *Styrofoam* dipotong mengikuti garis kontur dengan ketinggian paling rendah terlebih dahulu (bagian ini paling besar). Bagian ini kemudian direkatkan dengan lem kayu sesuai



dengan posisinya di atas peta kontur yang sudah direkatkan sebelumnya pada alas. Proses ini dilanjutkan bertahap dengan garis kontur yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan seterusnya sampai garis kontur tertinggi.

- Proses selanjutnya adalah mengisi sela-sela kontur yang sudah ditempel dengan campuran serbuk gergaji atau serbuk dedak padi dengan lilin, atau dengan plastisin atau lilin malam. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan permukaan yang halus. Proses ini akan membuat peta tiga dimensi mendekati bentuk aslinya.
- Warnai wilayah-wilayah tertentu dengan cat, misalnya: wilayah berhutan dengan warna hijau, sungai dengan warna biru, dan jalan utama dengan warna merah.
- Ajak warga untuk mendiskusikan bagaimana mereka akan menata lahan sesuai dengan mimpi mereka. Jika mereka ingin membangun kebun karet dan kebun buah, dimana kebun-kebun tersebut sebaiknya dialokasikan, wilayah penting mana yang warga ingin lindungi, dimana wilayah rusak yang akan warga hijaukan kembali, dan lainnya.
- Buat model vegetasi (pohon/semak) dengan menggunakan kertas krep warna hijau tua, hijau muda, atau kuning yang direkatkan pada ujung tusuk gigi. Sebagai alternatif, dapat digunakan jarum pentul. Susun model vegetasi ini di tempat yang sesuai.
- Buat legenda atau keterangan mengenai wilayah-wilayah yang digambarkan, judul peta, skala, dan arah mata angin.
- Diskusikan di mana peta tiga dimensi ini akan diletakkan sehingga seluruh warga dapat mengakses peta tersebut dengan mudah.



BAHAN BACAAN

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. 2005. Membuat Peta 3 Dimensi. Seri Panduan Pemetaan Partisipatif No. 6. Garis Pergerakan, Bandung.

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. 2005. Membuat Peta Sketsa. Seri Panduan Pemetaan Partisipatif No. 9. Garis Pergerakan, Bandung.

Rambaldi, G. and J. Callosa-Tarr. 2000. *Manual on Participatory 3-Dimensional Modeling for Natural Resource Management. Essentials of Protected Area Management in the Philippines Volume 7*. National Integrated Protected Areas Programme, PAWB-DENR, Quezon City.





BAB 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung dan Penggalangan Dana



REFLEKSI PENULIS

*“... Entah bagaimana caranya,
Desalah masa depan kita,
Keyakinan ini datang begitu saja,
Desa adalah kenyataan,
Kota adalah pertumbuhan,
Desa dan kota tak terpisahkan,
Tapi desa harus diutamakan...”*

Syair yang menyerukan pentingnya mengutamakan desa sebagai harapan kehidupan bangsa Indonesia dimasa depan yang dilantunkan oleh Iwan Fals seharusnya menginspirasi banyak orang untuk kembali ke kampung halamannya. Sesungguhnya, jika negara secara sungguh-sungguh memberikan kepercayaan dan dukungan penuh terhadap pembangunan desa, dan masyarakat desa juga secara sungguh-sungguh mengeluarkan segenap daya dan potensinya maka diniscayai tidak ada satupun manusia di Indonesia akan kelaparan.

Itulah yang menginspirasi Franly Olley, pada saat baru terpilih menjadi Kepala Kampung Merabu. Franly Olley, umur 24 tahun, adalah tamatan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari Sulawesi Utara dan terpilih menjadi Kepala kampung Merabu pada tahun 2012 yang lalu. Beliau menyakini bahwa kampung Merabu, yang mempunyai potensi yang luar biasa, apabila direncanakan dengan baik dan terarah, akan menjadi harapan masa depan bagi siapa pun yang tinggal di dalamnya dalam 10 – 15 tahun mendatang.

Berangkat dari keyakinan tersebut, mandat dari warga yang memilihnya, dan tugas negara yang diembannya, setelah terpilih menjadi kepala kampung maka langkah awal yang dilakukan Franly Olley bersama warga masyarakatnya adalah membuat perencanaan kampung. Mereka menentukan harapan bersama, merangkai tahapan-tahapan yang akan dilakukan dan menyusun kegiatan yang akan dilakukan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Merabu.

“Dokumen RPJMK tersebut sungguh membantu saya dalam menyusun kegiatan pembangunan tahunan. Saya tidak perlu susah-susah lagi dalam melakukan musrenbang yang diadakan setiap tahunnya. Terkait Alokasi Dana Kampung tahun 2013, kampung kami termasuk yang pertama mendapatkan ADK di Kecamatan Kelay. Semua ini berkat adanya dokumen RPJMK.”
(Franly Olley, Oktober 2013).



Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, desa, kampung atau sebutan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang disebutkan dalam UU No. 32/2004 tersebut merupakan pengakuan negara terhadap kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya. Dengan kata lain, undang-undang memberikan pengakuan atas kewenangan kampung untuk mengurus diri sendiri.

Karena negara telah memberikan kewenangan kepada desa (selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut sebagai kampung berdasarkan pilihan nama yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Berau) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, pemerintah dan masyarakat kampung memiliki kewenangan untuk mewujudkan mimpi dan menindaklanjuti tata guna lahan yang sudah dihasilkan bersama. Langkah-langkah ini perlu dituangkan kedalam perencanaan pembangunan. Bila proses perencanaan kampung ini dilakukan secara inklusif dan partisipatif maka proses perencanaan kampung menjadi arena di mana perubahan positif yang diharapkan masyarakat dapat direncanakan secara konkrit dan mengikat seluruh warga.

Pentingnya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

Dalam bab sebelumnya telah disampaikan bagaimana masyarakat kampung dilibatkan dalam mengidentifikasi aset-aset yang mereka miliki, menyusun visi bersama, dan membuat tata guna lahan kampung. Langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk mewujudkan visi tersebut. Perencanaan ini perlu dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh warga kampung, yang biasa disebut dengan perencanaan partisipatif pembangunan kampung.

Tujuan perencanaan pembangunan ini adalah untuk merincikan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi kampung, dan juga untuk mengetahui ketersediaan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai visi kampung. Melalui kegiatan perencanaan tersebut, pemerintah kampung dapat mengetahui langkah-langkah kegiatan yang harus mereka lakukan, kemudian melakukan kegiatan penggalangan dukungan jika ternyata sumberdaya pendanaan yang mereka miliki terbatas.

Dalam konteks ini, kampung tidak mengusulkan perencanaan ke kabupaten/kota melalui musrenbang, tetapi secara inklusif, partisipatif dan kolektif mengambil keputusan dan menghasilkan perencanaan kampung secara mandiri (*village self-planning*).

Untuk penyusunan perencanaan pembangunan kampung, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman penyusunannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66/2007,



tentang perencanaan pembangunan kampung, menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) memuat arah kebijakan keuangan kampung, strategi pembangunan, dan program kerja kampung dalam jangka waktu lima tahun. RPJMK ini kemudian dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan kampung tahunan. RKPK ini memuat kerangka ekonomi kampung, prioritas pembangunan kampung, rencana kerja, dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kampung maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

Bila kampung tidak dapat membiayai kegiatan-kegiatan tertentu, mereka dapat mendorong swadaya warga masyarakat dan menggagal dukungan dari pihak lain. Yang dimaksudkan pihak lain di sini antara lain pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi, pemerintah pusat, swasta atau pihak lainnya. Dukungan tersebut tidak selalu dalam bentuk pendanaan yang langsung diberikan kepada kampung. Dukungan tersebut dapat dalam bentuk dukungan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain selama termuat dalam dokumen perencanaan yang telah dibuat.

Abdur Rozaki et al, dalam buku manifesto Rappoa (2012) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan kampung sangat penting karena dapat memberikan manfaat secara sosial, politik dan ekonomi kepada kampung. Secara sosial, proses perencanaan kampung yang bersifat partisipatif-kolektif menjadi arena untuk memperkuat kohesi sosial dan menyemai rasa saling percaya antara pemerintah kampung, lembaga-lembaga kampung, organisasi masyarakat dan warga.

Secara politik, perencanaan kampung memberikan paling tidak empat manfaat. Pertama, sebagai instrumen untuk membangun kepemimpinan lokal yang demokratis dan visioner. Kedua, menjadi arena pelibatan demokratis, membuka akses bagi kaum marginal dan perempuan untuk terlibat sehingga mampu menembus struktur politik yang aristokratis, patriarkhis dan otokratis. Ketiga, menjadi arena pembuatan keputusan kampung secara kolektif dan mandiri. Keempat, sebagai instrumen politik representasi dan negosiasi kampung di hadapan pihak luar dan pemerintah supra-kampung. Dalam hal ini, RPJMK juga dapat menjadi instrumen penggalangan dukungan terhadap rencana pembangunan kampung dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, perusahaan sekitar kampung, dan pihak ketiga lainnya.

Secara ekonomi, perencanaan kampung menjadi arena dan instrumen untuk mengidentifikasi aset-aset ekonomi lokal yang dapat dikembangkan. Setelah diputuskan dalam musrenbang, keputusan pengembangan ekonomi ini akan dijalankan secara kolektif oleh pemerintah kampung dan warga masyarakat.



RPJMK sebagai instrumen perencanaan harus holistik sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kampung dan meningkatkan pendayagunaan aset kampung untuk mensejahterakan masyarakat. RPJMK yang holistik akan memandu perubahan kehidupan kampung ke arah yang lebih baik. Sayangnya, saat ini program dalam dokumen RPJMK cenderung lebih menitikberatkan kepada bidang infrastruktur fisik saja. Kecenderungan penitikberatan kegiatan infrastruktur ini disebabkan oleh penerjemahan yang salah dari pedoman pembangunan kampung di mana program pembangunan fisik senantiasa diterjemahkan dalam bentuk gedung, jalan, dan bangunan fisik lainnya. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik ini dianggap lebih mudah dikerjakan dan mudah diukur keberhasilannya. Dalam kenyataannya, seringkali bangunan fisik yang dibuat cepat rusak dan tidak berfungsi dengan baik. RPJMK yang holistik seharusnya meliputi program infrastruktur, peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi lokal, pelestarian sosial budaya dan pengelolaan sumberdaya alam atau lingkungan yang terdapat di kampung.

Pengaturan tata ruang kampung menjadi sangat penting untuk bahan penyusunan RPJMK. Tanpa penataan ruang atau lahan, kampung akan kesulitan mewujudkan RPJMK dengan baik. Selain itu, tata ruang bisa menjamin keberlanjutan manfaat hasil-hasil pembangunan. Seperti yang dapat dilihat saat ini, kampung dihadapkan pada berbagai masalah, misalnya tidak terkontrolnya kegiatan pengembangan kampung atau tumpang tindihnya pemanfaatan lahan dan sengketa pemanfaatan lahan di antara warga. Lahan hutan, yang semestinya dialokasikan sebagai kawasan berburu, dijadikan lahan perladangan atau perkebunan. Jika hal ini tidak segera diatur maka akan berdampak pada kerusakan kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan berhutan.

Ada beberapa persoalan yang diamati terkait penyusunan RPJMK. Pertama, Peraturan Pemerintah No. 72/2005 menyebutkan perencanaan pembangunan kampung sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota. Namun dalam pelaksanaannya, perencanaan yang diusulkan oleh kampung ini seringkali dianggap oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten hanya sebagai pelengkap dari sistem perencanaan kabupaten. Atau dengan kata lain dokumen perencanaan yang disusun oleh kampung dikategorikan sebagai usulan dari kampung semata, karena keputusan tetap berada di kabupaten untuk menjalankan atau tidak menjalankan rencana tersebut.

Kedua, partisipasi masyarakat kampung dalam penyusunan RPJMK masih rendah karena mereka melihat proses perencanaan dan pengambilan keputusan masih didominasi elit. Akibatnya, hasil perencanaan belum mengakomodasi harapan masyarakat. Pengamatan di lapangan mengungkapkan bahwa para elit cenderung memaknai pelibatan warga sebagai proses untuk mendengarkan suara warga saja di mana suara tersebut tidak harus diikuti atau ditindaklanjuti.



Ketiga, lemahnya kemampuan pemerintah kampung untuk menyusun dokumen RPJMK yang baik secara mandiri. Di banyak tempat, penyusunan dokumen ini perlu didampingi pihak luar, baik itu instansi pemerintah, fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Ketika dokumen RPJMK menjadi salah satu persyaratan penerimaan Alokasi Dana Kampung, beberapa kampung memilih untuk memakai jasa pihak ketiga untuk menyusunnya.

Keempat, inkonsistensi penggunaan dokumen RPJMK sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan pembangunan kampung. Dokumen ini dilihat hanya sebagai formalitas untuk melengkapi administrasi desa semata. Banyaknya program limpahan dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi, pusat atau dari pihak lain yang tidak sejalan dengan rencana pembangunan kampung juga ikut mendorong terjadinya inkonsistensi ini.

Tahapan Penyusunan RPJMK

Pedoman penyusunan dokumen RPJMK, berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 membagi proses penyusunan RPJMK ini kedalam tiga proses yaitu proses persiapan, proses pelaksanaan dan proses pelembagaan. Secara rinci ketiga proses tersebut adalah sebagai berikut:

- Proses Persiapan, merupakan rangkaian kegiatan untuk mempersiapkan pelaksanaan penyusunan RPJMK yang meliputi penentuan tanggal pelaksanaan, mengumumkan dan mengundang keterlibatan masyarakat, mengundang narasumber, dan mempersiapkan alat dan bahan untuk pelaksanaan lokakarya penyusunan RPJMK.
- Proses Pelaksanaan, merupakan rangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan potensi yang terdapat di dalam kampung, melakukan kajian terhadap pemecahan masalah, kajian terhadap pengembangan potensi kampung, penyusunan peringkat masalah dan program kegiatan, pengisian matrik atau formulir standar yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- Proses Pelembagaan, merupakan kegiatan untuk mendapatkan persetujuan bersama terhadap program kegiatan yang telah disusun. Selanjutnya dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kampung tersebut di tetapkan melalui peraturan kampung.

Dalam konteks pendampingan masyarakat dalam PKHB, fasilitator yang mendampingi masyarakat dalam penyusunan RPJMK akan menemukan bahwa informasi-informasi yang diperlukan untuk penyusunan RPJMK sudah dikumpulkan sebelumnya, yaitu potensi kampung, visi kampung dan tata guna lahan atau ruang. Dengan demikian, dalam proses pelaksanaan yang disebutkan di atas, fasilitator tidak perlu mendampingi masyarakat dalam mengkaji masalah dan



potensi kampung lagi. Informasi-informasi ini dapat dikaji ulang dan dipastikan keakuratannya. Proses pelaksanaan penyusunan RPJMK dapat langsung masuk kepada penyusunan program, penyusunan peringkat usulan kegiatan, dan pembuatan matrik program.

Proses yang dilakukan dalam pelaksanaan penyusunan RPJMK seperti tersebut diatas, adalah: Pertama, perumusan program kerja dimulai dari informasi visi yang sudah ada sebelumnya. Warga kampung diminta untuk merumuskan cara atau tindakan untuk mencapai visi tersebut. Dalam proses ini dapat dimulai berdasarkan tematik visi tersebut, atau juga dapat dimulai dari aspek pokok kegiatan pembangunan yang akan dituju misalnya aspek peningkatan sumberdaya manusia, aspek peningkatan pelayanan publik/infrastruktur, aspek pengembangan sumber-sumber ekonomi lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, aspek pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan, serta aspek sosial budaya.

Kedua, penilaian bersama dan penyusunan peringkat untuk menentukan skala prioritas dan kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Dalam proses ini setiap usulan akan dinilai bersama, apakah usulan tersebut dapat mencapai visi bersama atau tidak. Proses penilaian dan penyusunan peringkat ini seringkali membingungkan warga kampung karena kriteria yang digunakan. Misalnya, menurut kriteria Permendagri No. 66/2007, pertanyaannya adalah apakah kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan orang banyak atau tidak, apakah kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat atau tidak dan apakah kegiatan tersebut mempunyai potensi dukungan atau tidak. Kriteria tersebut bersifat kualitatif dan subyektif sehingga warga kampung memberikan penilaian secara subyektif juga. Seringkali juga didasarkan pada kepentingan untuk mendorong suatu kegiatan, misalnya pembuatan pasar kampung, dimana warga menilai pasar tersebut dibutuhkan orang banyak, ada lahan dan bahan untuk pembuatannya, dapat meningkatkan pendapatan penghasilan masyarakat, serta tersedia tukang kayu di kampung. Maka kegiatan ini diberi nilai yang sangat tinggi. Padahal, dalam kenyataannya warga kampung tersebut jumlahnya sangat sedikit sehingga, jika pasar kampung dibangun, maka hampir dipastikan pasar tersebut tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, proses penilaian dan penyusunan peringkat ini perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

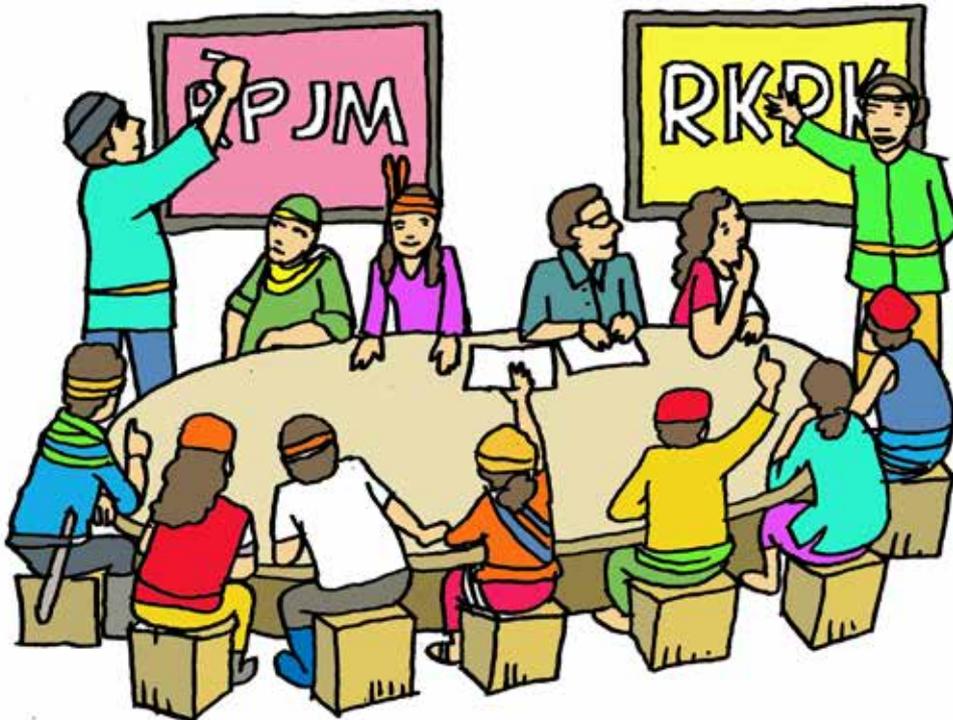
Ketiga, dari hasil penilaian bersama yang dilakukan pada tahap kedua diatas, maka didapatkan daftar usulan kegiatan berdasarkan prioritas. Selanjutnya dalam tahap ketiga ini, daftar usulan kegiatan tersebut dimasukkan kedalam sebuah matriks yang telah ditentukan oleh pedoman penyusunan RPJM dalam Permendagri Nomor 66 tahun 2007 Lampiran ID/4. Pengisian matriks ini dilakukan secara bersama untuk menentukan lokasi kegiatan, volume kegiatan, kapan akan dilaksanakan kegiatan tersebut dan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.



Keempat, meskipun ditahap ketiga telah dimulai memperkirakan biaya yang diperlukan untuk kegiatan, namun masih bersifat perkiraan saja. Biaya tersebut belum diperhitungkan secara rinci. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan yang lebih rinci, sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam pengalaman pendampingan, proses ini memerlukan waktu yang khusus untuk mendetailkan perkiraan biaya ini. Untuk itu perlu dibentuk tim tersendiri yang akan bekerja menghitung komponen-komponen biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Setelah proses penyusunan RPJMK selesai, maka selanjutnya dilakukan pelebagaan dokumen RPJMK tersebut. Yang dimaksudkan dengan pelebagaan adalah pembuatan peraturan kampung tentang RPJMK dan melengkapi naskah dokumen RPJM. Kegiatan ini dilakukan oleh tim kecil atau tim perumus. Tim ini akan menyelesaikan dokumen RPJMK sebagai dokumen yang lengkap dan kemudian menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dokumen RPJMK tersebut selanjutnya perlu senantiasa dipakai sebagai acuan penyusunan RKPK yang dibahas pada setiap tahun dalam musrenbang kampung. Bila hal ini dilakukan, pemerintah kampung tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembangunan di kampung setiap tahunnya dan akan dengan mudah melihat perkembangan kampung dalam kurun lima tahun mendatang.



RANCANGAN PROSES

1. Menyusun Program Kegiatan



Tujuan

- Peserta mampu memahami visi perubahan kehidupan yang menjadi harapan bersama
- Peserta mampu menemukan cara pencapaian untuk mewujudkan visi tersebut
- Peserta mampu menyusun program kegiatan pembangunan yang sistematis untuk mencapai visi bersama



Alat dan bahan

- Kertas metaplan/post it
- Spidol
- Kertas Plano



Waktu 180 menit



Proses

- Berikanlah penjelasan tentang visi kampung yang telah mereka susun bersama, dan berikan gambaran bagaimana visi bekerja
- Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok berdasarkan tematik program
- Bagikan metaplan/post it, spidol dan kertas plano kepada masing-masing kelompok
- Berilah tugas kepada masing-masing kelompok satu tema sebagai berikut:
 - Program Peningkatan Sumberdaya Manusia: Menyusun daftar kegiatan dan menganalisa kegiatan yang dibutuhkan untuk peningkatan sumberdaya manusia agar visi kampung tercapai.
 - Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat: Menyusun daftar kegiatan dan menganalisa kegiatan yang dibutuhkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat agar visi kampung tercapai.
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana: Menyusun daftar kegiatan dan menganalisa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat agar visi kampung tercapai.
 - Program Pelestarian Sumberdaya Hutan dan Lingkungan: Menyusun daftar kegiatan dan menganalisa kegiatan pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat agar visi kampung tercapai.



- Program Pelestarian Sosial dan Budaya: Menyusun daftar kegiatan dan menganalisa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat agar visi kampung tercapai.
- Mintalah pada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya, dan berikan kesempatan kepada semua peserta untuk memberikan komentar atau menambahkan idenya.
- Di akhir sesi mintalah kepada semua peserta untuk menyepakati daftar kegiatan yang akan dipakai untuk mencapai visi kampung.

2. Penilaian dan Penyusunan Peringkat



Tujuan

- Peserta mampu melakukan penilaian usulan program kegiatan terhadap pencapaian visi kampung yang diharapkan
- Peserta mampu menentukan program kegiatan prioritas yang akan dilakukan berdasarkan tahapan waktu untuk mencapai visi



Alat dan bahan

- Lem kertas
- Lakban
- Kertas plano
- Spidol



Waktu 150 menit



Proses

- Berikanlah penjelasan tentang bagaimana caranya melakukan penilaian usulan dan pemberian bobot terhadap masing-masing kegiatan yang telah diusulkan.
 - Untuk penilaian didasarkan kepada pertanyaan apakah jika program kegiatan ini dilaksanakan dapat mewujudkan visi kampung atau tidak. Jika jawabannya iya maka lanjutkan kepada pemberian bobot. Jika jawabannya tidak, maka hilangkan kegiatan tersebut.
 - Untuk program kegiatan yang dinyatakan akan berkontribusi terhadap perwujudan visi kampung, maka lakukan pemberian bobot dengan kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Apakah program kegiatan dibutuhkan oleh orang banyak
 - ❖ Apakah program kegiatan tersebut cepat dirasakan hasilnya oleh masyarakat



- ❖ Apakah program kegiatan tersebut mempunyai peluang dukungan pendanaan baik itu dari ADK, APBD/N dan pihak ketiga
- Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok berdasarkan tematik program
- Bagikan metaplan/post it, spidol dan kertas plano kepada masing-masing kelompok
- Berilah tugas kepada masing-masing kelompok sebagai berikut:
 - Program Peningkatan Sumberdaya Manusia: Melakukan penilaian dan memberikan bobot terhadap usulan kegiatan, kemudian menyusun urutan kegiatan berdasarkan kegiatan yang mempunyai bobot nilai tertinggi sampai yang terendah.
 - Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat: Melakukan penilaian dan memberikan bobot terhadap usulan kegiatan, kemudian menyusun urutan kegiatan berdasarkan kegiatan yang mempunyai bobot nilai tertinggi sampai yang terendah.
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana: Melakukan penilaian dan memberikan bobot terhadap usulan kegiatan, kemudian menyusun urutan kegiatan berdasarkan kegiatan yang mempunyai bobot nilai tertinggi sampai yang terendah.
 - Program Pelestarian Sumberdaya Hutan dan Lingkungan: Melakukan penilaian dan memberikan bobot terhadap usulan kegiatan, kemudian menyusun urutan kegiatan berdasarkan kegiatan yang mempunyai bobot nilai tertinggi sampai yang terendah.
 - Program Pelestarian Sosial dan Budaya: Melakukan penilaian dan memberikan bobot terhadap usulan kegiatan, kemudian menyusun urutan kegiatan berdasarkan kegiatan yang mempunyai bobot nilai tertinggi sampai yang terendah.
- Mintalah pada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya, dan berikan kesempatan kepada semua peserta untuk memberikan komentar atau menambahkan idenya.
- Di akhir sesi mintalah kepada semua peserta untuk menyepakati daftar kegiatan yang telah disusun berdasarkan prioritas dan bobot nilai tertinggi untuk mencapai visi kampung.



BAHAN BACAAN

Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah No 72/2005 tentang Desa.

Rozaki, A., S. Eko, M. Z. Anwar dan Bornie Kurniawan. 2012. Manifesto Rappoa. IRE FPPD, Yogyakarta.

Djohani. R. 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa. Canadian International Development Agency dan The Asian Foundation, Jakarta.





BAB 8

Dana Pendukung Dalam PKHB

REFLEKSI PENULIS

“...Kami diminta menggambarkan mimpi tentang perubahan yang kami kehendaki, merumuskan program kerja dan membuat perincian kebutuhan dana untuk melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan mimpi tersebut. Setelah dijumlahkan, total biaya yang diperlukan sangat besar, mencapai milyaran rupiah. Dari mana uang sebanyak itu akan diperoleh oleh kampung kita yang kecil ini? Apakah mungkin bagi kita mewujudkan semua itu...”

Itulah ungkapan kegelisahan dari beberapa orang warga Merabu ketika mempercakapkan hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) pada suatu sore di bulan Maret yang lalu. Kegelisahan ini wajar, setelah mereka menemukan bahwa dalam lima tahun mendatang mereka akan melakukan sekitar 75 item kegiatan, baik kegiatan fisik maupun non-fisik, dan memerlukan biaya sekitar 11 milyar rupiah. Pengurus kampung artinya harus mengumpulkan dana sebesar sekitar 2 milyar rupiah per tahun!

Setengah tahun kemudian, saat mereka bertemu kembali untuk mendiskusikan pembuatan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung (ADK), terlihat ada perubahan ekspresi wajah dari para peserta. Wajah mereka terlebih lebih ceria, sumringah, dan antusias. Keceriaan tersebut setelah mereka mengetahui dan menghitung bahwa ada 30 kegiatan yang sudah dan tengah dilaksanakan, dan sekitar 1,7 milyar rupiah telah berhasil dimobilisasi untuk kegiatan yang sudah diprogramkan di RPJMK mereka. Keceriaan ini tetap terlihat keesokan harinya saat warga melakukan senam pagi dan Jum'at bersih bersama di lapangan. Demikian juga pada minggu berikutnya. Hampir semua warga terlihat bersemangat dan rukun ketika menanam pohon aren bersama-sama di hutan sekitar kampung.

Tanpa disadari, warga terus mempercakapkan harapan, strategi pembangunan kampung, dan mengevaluasi kemajuan mereka bersama-sama. Di alam bawah sadar mereka telah terbentuk jalan perubahan kehidupan yang lebih sistematis yang menuntun naluri dan aksi para pengurus kampung untuk mencari peluang mewujudkan harapan bersama tersebut. Dan tanpa disadari juga, dokumen RPJMK tersebut telah memudahkan pihak-pihak lain dalam mendukung pembangunan kampung Merabu.

Warga juga akan semakin optimis menatap kehidupan dengan warna yang lebih indah dan cerah karena selain ADK, mereka juga akan mendapatkan dana dari TNC pada tahun berikutnya. Dana ini diberikan sebagai penghargaan atas kesungguhan warga Merabu untuk senantiasa menjaga dan melindungi hutan, dan melakukan aksi nyata dalam mewujudkan kampung mereka sebagai kampung yang ASIK. Dana untuk mendukung aksi inspiratif warga Merabu, sebagai bagian dari inisiatif PKHB, akan dikelola langsung oleh warga. Dana ini dapat dipakai



untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi, kapasitas sumberdaya manusia, dan pengelolaan hutan desa atau hutan kampung. Seperti ungkapan yang berbunyi “*Man Jadda wa Jada*” (barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia pasti berhasil), catatan di atas merupakan suatu pembelajaran mengenai kekuatan kesungguhan, dan keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan orang yang melakukan upayanya secara bersungguh-sungguh.



Pada tahap sebelumnya, warga kampung didampingi dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) yang merinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai mimpi bersama masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat dibiayai oleh pemerintah kabupaten melalui skema APBD/APBN. Dalam kenyataannya, tidak semua kegiatan prioritas yang diusulkan dapat dibiayai oleh pemerintah. Dalam pengalaman pendampingan masyarakat selama ini, kegiatan pengelolaan hutan dan sumber daya alam sering tidak dapat dibiayai. Misalnya, kegiatan rehabilitasi lahan yang rusak di dalam wilayah kampung dan/atau sepanjang sempadan sungai, patroli dan pengamanan hutan dari perambahan liar, dan pengelolaan hutan desa serta kegiatan lainnya.

Untuk mengisi kesenjangan pendanaan untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan dan sumber daya alam, maka diperlukan pendanaan dari sumber-sumber lain. Di Kabupaten Berau, dengan dilaksanakannya Program Karbon Hutan Berau (PKHB), masyarakat memiliki sumber pendanaan baru yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Bab ini mengurai tentang potensi sumber pendanaan yang tersedia dalam PKHB yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, kegiatan yang dapat didanai, dan bagaimana sistem yang dikembangkan untuk menentukan besaran dana yang dapat mereka peroleh. Uraian ini akan membantu fasilitator dalam mendampingi warga dalam memanfaatkan dana pendukung yang tersedia dalam PKHB.

Pendanaan REDD+ Dalam PKHB

Sebagai salah satu kabupaten percontohan pengurangan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan, Kabupaten Berau mendapat perhatian yang tinggi oleh berbagai pihak di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Berau juga telah mendapat pendanaan untuk mendukung pelaksanaan PKHB. Salah satu dana utama yang tersedia saat ini adalah dana Konservasi Hutan Tropis (*Tropical Forest Conservation*) yang merupakan dana pengalihan utang Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Amerika Serikat (*debt-for-nature swap*) yang difasilitasi oleh TNC dan WWF. Selain itu, tersedia juga pendanaan dari sumber-sumber lain yang disalurkan oleh lembaga-lembaga, seperti TNC, untuk mendukung pelaksanaan PKHB dan keterlibatan masyarakat Berau. Dana tersebut tidak berasal dari perdagangan karbon karena PKHB tidak memperdagangkan karbon saat ini. Selain dana yang sudah tersedia untuk mendukung PKHB tersebut di atas, pada saat ini beberapa mekanisme penyaluran dana juga sedang dikembangkan oleh beberapa lembaga di tingkat nasional yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang mengurangi laju penggundulan dan kerusakan hutan.

Untuk mendukung pelibatan masyarakat Berau, TNC mengembangkan sistem pendanaan untuk masyarakat dalam PKHB. Dalam sistem pendanaan tersebut, pendanaan akan disediakan



untuk mendukung tiga kategori program, yaitu: **program mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam**, yaitu kegiatan-kegiatan yang akan mengurangi laju penggundulan dan kerusakan hutan, serta mendukung pengelolaan sumber daya alam, **program pengembangan ekonomi** yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan hutan secara lestari, dan **program penguatan kondisi pemungkin**. Contoh-contoh kegiatan yang dapat didanai untuk setiap kategori program dapat dilihat di Tabel 8.1 di bawah ini.

Tabel 8.1. Contoh-contoh kegiatan warga atau kelompok warga dalam tiga kategori program yang dapat didanai

KATEGORI PROGRAM	CONTOH KEGIATAN
Mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan perladangan berpindah (ladang tidak dibuka di atas lahan yang masih berhutan) • Patroli atau pengamanan hutan untuk mengurangi atau memberantas pembalakan atau perburuan liar • Penanaman pohon di sempadan sungai atau di lahan yang tandus • Survei hutan atau keanekaragaman hayati • Pemantauan cadangan karbon • Penyusunan rencana pengelolaan Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan
Pengembangan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kebun karet, coklat, buah-buahan, atau wana tani lainnya • Pengembangan dan pengelolaan kebun bibit • Budidaya sayur atau hasil pertanian lainnya • Peternakan (ayam, bebek, kambing, sapi, dan lainnya) • Budidaya ikan air tawar • Budidaya lebah madu • Pengembangan hasil hutan non-kayu (rotan, bambu, dan lainnya) • Pengembangan ekowisata
Penguatan kondisi pemungkin	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan budidaya pertanian, wana tani, atau peternakan • Dukungan teknis untuk mendukung berbagai kegiatan pengembangan ekonomi, seperti pemberantasan hama, pemasaran hasil pertanian dan perkebunan, dan lainnya • Pelatihan survei hutan dan keanekaragaman hayati • Pelatihan fasilitasi, mediasi, dan negosiasi • Pelatihan dan dukungan teknis untuk pemetaan dan tata batas wilayah kampung • Dukungan teknis dalam mendapatkan hak pengelolaan hutan desa atau hutan kemasyarakatan • Dukungan teknis untuk mengembangkan Kesepakatan Pengelolaan Hutan secara Kolaboratif dengan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) • Pengembangan kapasitas lembaga tingkat kampung yang akan mengelola dan menyalurkan dana program • Pelatihan penulisan proposal • Pelatihan dan dukungan teknis dalam mengembangkan sistem pengelolaan keuangan

Dalam sistem pendanaan yang dikembangkan oleh TNC, warga akan mendapatkan dukungan pendanaan untuk melaksanakan ketiga kategori program dalam satu paket. Ini berarti pendanaan untuk mendukung pengembangan ekonomi hanya akan diberikan bila warga sepakat untuk melakukan inisiatif-inisiatif mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Pendanaan untuk pengembangan ekonomi diberikan untuk menggantikan sumber-sumber



penghidupan warga yang mungkin berkurang dengan melakukan kegiatan mitigasi, seperti pengurangan perladangan berpindah atau penghentian aktivitas pembalakan liar. Dengan pendanaan ini, warga dapat mengembangkan sumber mata pencaharian yang lebih ramah lingkungan dan memperbanyak sumber-sumber mata pencahariannya. Untuk memastikan agar warga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi dan pengembangan ekonomi, pendanaan juga diberikan untuk memperkuat kondisi pemungkin, antara lain melalui peningkatan kapasitas, membangun sistem pengelolaan keuangan yang baik, dan lainnya.

Pendanaan Berbasis Kinerja

Pendanaan pendukung yang diuraikan di atas berbasis kinerja. Ini berarti besaran yang diterima oleh warga akan ditentukan oleh tingkat kinerja warga dalam melaksanakan rencana kerjanya. Warga yang kinerjanya baik akan memperoleh jumlah pendanaan yang lebih besar. Selain itu, pendanaan ini hanya diberikan kepada warga yang sudah bersepakat untuk berpartisipasi dalam inisiatif PKHB, yang ditunjukkan dengan adanya dokumen kesepakatan, rencana kerja, dan perjanjian kerja sama.

Ada tiga jenis pendanaan berbasis kinerja yang dikembangkan, yaitu:

- **Pendanaan berbasis *input***: pendanaan yang besarnya ditentukan oleh kinerja warga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja mereka. Pendanaan berbasis *input* ini diberikan setiap tahun. Di tahun pertama, warga akan menerima dana awal yang jumlahnya mereka ajukan sendiri berdasarkan rencana kerja yang disusun. Dana pada tahun-tahun berikutnya akan ditentukan oleh kinerja pada tahun sebelumnya.
- **Pendanaan berbasis *output***: pendanaan yang diberikan bila kegiatan-kegiatan warga dalam mengurangi penggundulan dan kerusakan hutan, memperbaiki kondisi hutan, atau pengelolaan sumber daya alam memberikan hasil (*output*) yang diharapkan. Misalnya: kegiatan patroli yang dilakukan oleh warga atau kelompok warga berhasil memberantas pembalakan liar atau perburuan liar secara tuntas. Contoh lain: kegiatan penanaman pohon oleh warga dilakukan dengan baik sehingga hasilnya lebih dari 60% bibit yang ditanam hidup dan tumbuh dengan baik. Dana ini diberikan setelah hasil yang diharapkan terwujud, mungkin 1-2 tahun terhitung sejak kegiatan tersebut mulai dilaksanakan.
- **Pendanaan berbasis *outcome***: pendanaan yang diberikan bila terjadi perbaikan kondisi hutan dan sumber daya alam sebagai hasil akhir (*outcome*) dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga. Perbaikan kondisi hutan dan sumber daya alam ini, misalnya dapat berupa peningkatan luas tutupan hutan sebagai hasil pengurangan perladangan berpindah dan penanaman pohon. Sama seperti pendanaan berbasis *output*, dana ini juga diberikan setelah hasil yang diharapkan terwujud.



Ketiga jenis pendanaan, basis pembayaran, dan indikator kinerja atau keberhasilan warga diuraikan dalam Tabel 8.2.

Tabel 8.2. Pendanaan berbasis *input*, *output*, dan *outcome*

JENIS PENDANAAN	BASIS PEMBAYARAN	INDIKATOR KINERJA
Pendanaan berbasis <i>input</i>	Tingkat pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh warga seperti yang diusulkan dalam rencana kerja mereka.	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluarga yang membuka ladang di lahan bekas ladang • Luas ladang yang dibuka tiap keluarga setiap tahun • Jumlah hari orang Tim Pengawas Lingkungan yang melakukan patroli dalam setahun • Jumlah pohon yang ditanam
Pendanaan berbasis <i>output</i>	Hasil pelaksanaan kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam oleh warga yang menjadi kondisi pemungkin bagi terwujudnya perbaikan kondisi hutan dan sumber daya alam yang diharapkan.	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase (%) bibit yang tumbuh dan sehat • Tidak ada pembalakan liar • Tidak ada perburuan liar
Pendanaan berbasis <i>outcome</i>	Hasil akhir pelaksanaan kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam oleh warga dalam bentuk perbaikan kondisi hutan dan sumber daya alam yang diharapkan.	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase (%) peningkatan luas tutupan hutan • Penurunan sedimentasi

Sistem Penilaian untuk Menentukan Besaran Pendanaan Berbasis *Input*

TNC mengembangkan sistem penilaian kinerja warga untuk menentukan besaran pendanaan berbasis *input* yang akan mereka terima setiap tahunnya. Penilaian dilakukan terhadap kinerja warga dalam melakukan kegiatan dalam 2 kategori, yaitu kategori kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam dan kategori penguatan kondisi pemungkinan. Penilaian tidak dilakukan terhadap kategori pengembangan ekonomi karena pengembangan ekonomi merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada warga terhadap peran serta mereka dalam mengurangi penggundulan dan kerusakan hutan. Walaupun kinerja warga dalam kategori ini tidak dinilai, keseriusan mereka dalam melaksanakan pengembangan ekonomi tersebut tetap harus diperhatikan karena dua alasan utama. **Pertama**, bila kegiatan pengembangan ekonomi gagal atau tidak berhasil, maka kesejahteraan masyarakat akan terancam sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama PKHB. **Kedua**, kegagalan ini dapat memicu warga untuk kembali melakukan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan hutan gundul atau rusak. Untuk memastikan kegiatan pengembangan ekonomi tidak gagal, maka penilaian kinerja perlu dilakukan terhadap kategori penguatan kondisi pemungkin. Hal ini



dilakukan untuk memastikan bahwa warga bersungguh-sungguh melakukan kegiatan-kegiatan yang akan menciptakan kondisi pemungkin yang secara tidak langsung akan mendukung keberhasilan kegiatan pengembangan ekonomi.

Sistem penilaian kinerja yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- Penilaian akan dilakukan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh warga atau kelompok warga pada dua kategori tersebut di atas.
- Nilai yang diberikan terhadap kinerja warga ada tiga, yaitu 0, 5, atau 10, dimana nilai tersebut ditentukan oleh seberapa jauh mereka dapat memenuhi sasaran yang disepakati bersama.
- Seberapa jauh pergeseran atau deviasi dari sasaran yang dapat diterima (kisaran) akan menentukan penilaian. Kisaran yang disarankan ada dua yaitu 10% dan 20% dimana kisaran yang lebih ketat (10%) digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki kontribusi yang sangat penting, misalnya kegiatan yang akan mengurangi penggundulan dan kerusakan hutan. Kisaran 20% digunakan untuk kegiatan-kegiatan di mana toleransi lebih besar perlu diberikan karena ada faktor-faktor penyebab kegagalan yang sulit dikontrol. Sama seperti sasaran, besarnya kisaran ini juga harus didiskusikan dan disepakati bersama dengan warga.
- Kisaran 10% dan 20% ini tidak bisa diberlakukan untuk semua kegiatan. Kisaran ini tidak bisa diterapkan untuk beberapa kegiatan untuk memperkuat kondisi pemungkin. Walaupun demikian, kriteria pemberian nilai 0, 5, dan 10 masih dapat dikembangkan dan disepakati bersama dengan warga.

Nilai 0, 5, dan 10 diberikan sesuai dengan seberapa jauh warga mencapai sasaran, seperti yang diuraikan di Tabel 8.3.

Tabel 8.3. Sistem penilaian untuk pendanaan berbasis *input*

KEGIATAN	SASARAN	KISARAN	SASARAN YANG DICAPAI	NILAI
Kegiatan 1	X	10%	Kurang dari 90%	0
			90-99%	5
			100%	10
Kegiatan 2	Y	20%	Kurang dari 80%	0
			80-99%	5
			100%	10

Contoh penggunaan sistem penilaian tersebut di atas dapat dilihat di **Tabel 8.4**. Tabel ini



memberikan contoh sasaran ideal yang dituju untuk setiap kegiatan sebagaimana tersebut dalam kolom 2. Sasaran ideal ini akan ditentukan dan disepakati bersama dengan warga sehingga mungkin berbeda dengan sasaran yang diberikan dalam tabel di bawah.

Tabel 8.4. Contoh penerapan sistem penilaian untuk pendanaan berbasis *input*

KATEGORI KEGIATAN	KEGIATAN DAN SASARAN	KISARAN	SASARAN YANG DICAPAI	NILAI
Mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam	Pembatasan perladangan berpindah (ladang tidak dibuka di atas lahan yang masih berhutan). Sasaran: semua KK, kecuali KK baru, menerapkan sistem gilir balik dan membuka ladang di areal bekas ladang.	10%	Kurang dari 90% KK membuka ladang di bekas ladang (ATAU: lebih dari 10% KK membuka ladang di atas lahan yang masih berhutan)	0
			90-99% KK membuka ladang di bekas ladang (ATAU: 1-10% KK membuka ladang di atas lahan yang masih berhutan)	5
			100% KK membuka ladang di bekas ladang (ATAU: tidak ada KK yang membuka ladang di atas lahan yang masih berhutan)	10
	Pembatasan perladangan berpindah (luas maksimum ladang tidak melebihi 1 ha/plot). Sasaran: semua ladang yang dibuka (1 plot/KK/tahun) maksimum luasnya 1 ha/plot.	10%	Kurang dari 90% plot tidak melebihi 1 ha/plot (ATAU: lebih dari 10% plot berukuran lebih dari 1 ha)	0
			90-99% plot tidak melebihi 1 ha/plot (ATAU: 1-10% plot berukuran lebih dari 1 ha)	5
			100% plot ladang yang dibuka berukuran tidak melebihi 1 ha/plot (ATAU: semua ladang berukuran 1 ha atau kurang)	10
	Patroli hutan Sasaran: patroli dilakukan oleh 5 orang sebanyak 6x setahun, 2 hari/patroli (total 600 hari orang dalam setahun) dan menghasilkan 6 formulir laporan patroli yang lengkap. Pelanggaran yang terjadi dilaporkan ke pemangku kepentingan terkait.	20%	Kurang dari 80% sasaran tercapai	0
			80-99% sasaran tercapai	5
			100% sasaran tercapai	10
	Penanaman pohon Sasaran: sebanyak 1,000 pohon ditanam di sepanjang sungai Catatan: pada tahun berikutnya perlu dibuat sasaran pemeliharaan pohon yang sudah ditanam, misalnya: setidaknya 70% dari jumlah pohon yang ditanam tumbuh dengan baik (Tahun ke-2) dan 60% (Tahun ke-3)	20%	Kurang dari 80% pohon ditanam (ATAU: pohon yang berhasil ditanam kurang dari 800)	0
			80-99% pohon ditanam (ATAU: 800 pohon atau lebih berhasil ditanam)	5
			100% pohon ditanam (ATAU: 1,000 pohon atau lebih berhasil ditanam)	10



Penguatan kondisi pemungkin	Lembaga lokal pengelola dana Sasaran: adanya lembaga di tingkat kampung yang mendapat legitimasi (SK Kampung) dan mandat untuk mengelola dana hibah yang mendukung kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam.	tidak ber-laku	Lembaga lokal dibentuk tetapi anggotanya belum ditunjuk atau belum lengkap	0
			Lembaga lokal dibentuk dengan struktur organisasi dan keanggotaan yang jelas tetapi belum mendapat mandat resmi	5
			Lembaga lokal dibentuk dengan struktur organisasi yang jelas, dan mendapat mandat untuk mengkoordinir dan mengelola dana hibah, dengan Peraturan Kampung	10
	Penyaluran dan pengelolaan dana Sasaran: Lembaga lokal dan kelompok2 kecil menyusun rencana kerja rinci, menyalurkan dana tepat waktu, dan membuat laporan keuangan sederhana dengan baik.	tidak ber-laku	Lembaga lokal dan kelompok-kelompok kecil menyusun rencana kerja rinci tetapi belum berhasil menyalurkan dan mengelola dana dengan baik	0
			Lembaga lokal dan kelompok-kelompok kecil menyusun rencana kerja rinci dan menyalurkan dana tepat waktu tetapi laporan keuangan belum baik	5
			Lembaga lokal dan kelompok-kelompok kecil menyusun rencana kerja rinci, menyalurkan dana tepat waktu, dan membuat laporan keuangan sederhana dengan baik	10
	Penyebaran informasi dan pelaporan kegiatan dan keuangan kepada warga kampung Sasaran: lembaga lokal mengorganisir pelaporan kegiatan dan keuangan kepada warga kampung sebanyak 4 kali dalam setahun.	20%	Lembaga lokal mengorganisir pertemuan sebanyak 1-2x dalam setahun	0
			Lembaga lokal hanya mengorganisir pertemuan sebanyak 3x dalam setahun	5
			Lembaga lokal menyampaikan kegiatan dan keuangan secara transparan kepada warga dalam 4x pertemuan.	10
	Pelatihan teknik budidaya karet Sasaran: 30 peserta dari kampung mengikuti dan berpartisipasi secara penuh dan aktif selama 2 hari pelatihan.	20%	Kurang dari 24 peserta/hari mengikuti pelatihan	0
			Rata-rata hanya sekitar 24 peserta yang mengikuti 2 hari pelatihan secara penuh (seluruh peserta hadir di hari pertama tetapi sekitar 12 orang tidak mengikuti pelatihan di hari kedua tanpa alasan yang jelas)	5
			Seluruh peserta mengikuti pelatihan secara penuh dan aktif selama 2 hari penuh	10

Total nilai keseluruhan kinerja warga pada tahun tersebut selanjutnya dibandingkan dengan total nilai maksimum yang mungkin diperoleh oleh warga untuk memperoleh total nilai relatif. Nilai relatif ini akan menentukan besaran dana berbasis input yang akan diperoleh warga pada tahun berikutnya. Contoh:



- Warga mengusulkan 10 kegiatan yang akan mereka laksanakan di rencana kerja tahun pertama. Total nilai maksimum yang mungkin mereka peroleh adalah sebesar 100.
- Di akhir tahun, fasilitator dan warga melakukan penilaian bersama. Total nilai yang mungkin mereka peroleh untuk 10 kegiatan tersebut adalah sebesar 75.
- Total nilai relatif yang diperoleh warga adalah $75/100$ atau 75%.
- Warga hanya akan mendapatkan 75% dari total dana hibah yang mereka usulkan di rencana kerja tahun kedua.
- Besaran dana yang tidak seperti yang diharapkan akan berdampak pada kegiatan pengembangan ekonomi yang ingin mereka lakukan di tahun kedua. Mereka harus memutuskan kegiatan pengembangan ekonomi yang terpaksa mereka tunda sampai mereka memperbaiki kinerjanya. Kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam serta penguatan kondisi pemungkin masih dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Bagaimana total nilai relatif akan mempengaruhi besaran dana yang akan diterima dan kegiatan yang dapat dilakukan warga di di tahun berikutnya diuraikan di Tabel 8.5.

Tabel 8.5. Kategori kinerja, total nilai relatif, dan besaran pendanaan berbasis *input* yang akan diperoleh warga pada tahun berikutnya

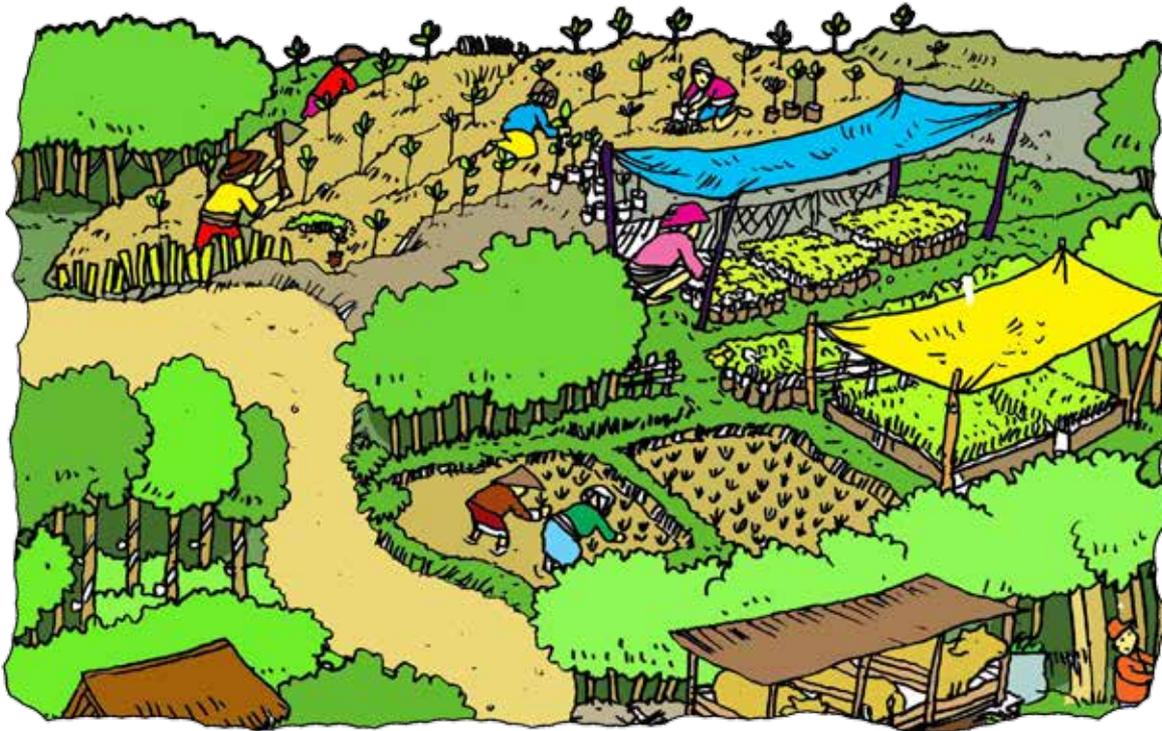
Kategori Kinerja	Total Nilai Relatif	Pendanaan berbasis input yang diberikan untuk tahun berikutnya	Perbandingan dengan total dana hibah yang diusulkan untuk tahun berikutnya
Memuaskan	Lebih besar atau sama dengan 85%	Pendanaan untuk seluruh kegiatan di tiga kategori: <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam; ■ Pengembangan ekonomi; ■ Penguatan kondisi pemungkin. 	Setara dengan 100% total dana yang diusulkan
Baik	Lebih besar atau sama dengan 55%	Pendanaan untuk sebagian kegiatan di tiga kategori: <ul style="list-style-type: none"> ■ Seluruh kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam; ■ Sebagian kegiatan pengembangan ekonomi; ■ Seluruh kegiatan penguatan kondisi pemungkin. 	Setara dengan 75% total dana yang diusulkan
Perlu ditingkatan	Lebih kecil dari 55%	Pendanaan untuk kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam saja	Setara dengan 50% total dana yang diusulkan



Dalam menerapkan sistem penilaian kinerja, fasilitator dianjurkan untuk:

- **Memperketat sistem penilaian secara bertahap:** Hindari cara penilaian kinerja secara ketat di akhir tahun pertama. Beri kesempatan bagi warga untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme dan sistem yang diterapkan. Penilaian kinerja bisa diperketat pada tahun-tahun berikutnya dengan meningkatnya pemahaman warga terhadap program dan sistem penilaian kinerja.
- **Menggunakan sistem penilaian dengan bijaksana:** Jangan terjebak dalam angka. Bila saat penilaian kinerja warga berada di nilai ambang batas 2 kategori, misalnya antara 'baik' dan 'memuaskan', maka fasilitator disarankan untuk menggunakan pemahamannya mengenai komitmen warga secara umum, mengapa kinerja mereka baik, sedang, atau rendah, dan memberikan penilaian secara bijaksana. Mintalah masukan dari pihak ketiga yang ditunjuk dan disepakati oleh warga bila ada keraguan. Sistem penilaian ini dikembangkan agar warga memahami bahwa mereka bertanggung jawab atas komitmen dan kinerjanya, bukan untuk mematahkan atau mencederai semangat mereka.

Pada saat ini, TNC sedang mengembangkan sistem pemantauan untuk menilai apakah kegiatan warga memberikan hasil (*output*) atau hasil akhir (*outcome*) yang diharapkan sebagai basis untuk menentukan besaran pendanaan berbasis *output* dan *outcome* yang akan diberikan kepada warga pada tahap selanjutnya.



RANCANGAN PROSES



Persiapan

Fasilitator menyalin Tabel 8.1 sampai Tabel 8.5 ke atas kertas plano.



Tujuan

- Membantu warga dalam memahami pendanaan yang tersedia dalam PKHB dan tiga jenis pendanaan berbasis kinerja yang dikembangkan.
- Membantu warga dalam memahami sistem penilaian kinerja dan penghitungan pendanaan berbasis *input*



Alat bantu

- Kertas plano
- Spidol warna-warni



Waktu 2-3 jam



Proses

- Jelaskan tujuan pertemuan dan hasil yang diharapkan.
- Jelaskan pendanaan yang tersedia dalam PKHB, ketiga kategori program yang dapat didanai, dan kegiatan-kegiatan yang dapat diusulkan oleh warga. Gunakan Tabel 8.1 yang sudah ditulis di atas kertas plano. Beri waktu bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan bila belum jelas.
- Jelaskan bahwa ada tiga jenis pendanaan, yaitu berbasis *input*, *output*, dan *outcome*, dan besarnya ditentukan oleh kinerja warga. Presentasikan Tabel 8.2 yang sudah ditulis di atas kertas plano. Beri waktu bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan bila belum jelas.
- Jelaskan sistem penilaian kinerja yang dikembangkan. Presentasikan Tabel 8.3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sasaran, kisaran, dan 3 jenis angka penilaian (0, 5, dan 10). Beri waktu bagi peserta untuk bertanya.
- Ajak peserta untuk membuat simulasi penilaian kinerja:
 - Umpamakan warga akan mengusulkan 5 kegiatan: 3 kegiatan dalam Kategori Mitigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan 2 kegiatan dalam Kategori Penguatan Kondisi Pemungkin. Masukkan ke dalam tabel seperti Tabel 8.4. Tabel 8.4 di atas dapat digunakan sebagai referensi.



- Diskusikan dan tentukan sasaran untuk setiap kegiatan.
 - Diskusikan dan sepakati kisaran untuk setiap kegiatan.
 - Sebagai simulasi, asumsikan bahwa di akhir tahun warga mendapat nilai 5 untuk 3 kegiatan dan nilai 10 untuk 2 kegiatan.
 - Hitung total nilai keseluruhan kinerja warga pada tahun tersebut.
 - Hitung total nilai maksimum yang mungkin diperoleh oleh warga untuk ke-5 kegiatan (yaitu: 50).
 - Hitung total nilai relatif.
 - Presentasikan Tabel 8.5 yang sudah ditulis di atas kertas plano. Tunjukkan berapa pendanaan yang akan diperoleh warga dan kegiatan apa saja yang mungkin diusulkan pada tahun berikutnya.
 - Beri kesempatan bagi peserta untuk bertanya bila belum jelas.
- Ajak peserta untuk mengkaji apa implikasi sistem penilaian ini terhadap strategi warga dalam menyusun dan melaksanakan komitmen dan rencana kerja mereka. Lalu tariklah kesimpulan.
 - Tutup sesi ini dengan memberikan motivasi kepada peserta bahwa sistem penilaian yang dikembangkan akan berdampak positif bagi mereka bila mereka bersungguh-sungguh melaksanakan komitmennya.





BAB 9

Penyusunan Rencana Kerja
dan Pembahasan Mengenai
Pembagian Manfaat



REFLEKSI PENULIS

Dari tahun ke tahun nasib kami tidak kunjung mengalami perubahan. Kami masih merupakan masyarakat yang tertinggal dibandingkan warga kampung lainnya. Kehidupan ekonomi kami masih bergantung pada pencarian emas, masuk ke hutan, berburu dan mencari buah. Kami juga ingin berubah....kami juga ingin sejahtera. Sejahtera karena dapat menyekolahkan anak-anak kami tetapi hutan kami juga tetap terjaga....walaupun hutan kami sudah diserahkan ke perusahaan, kami tetap menganggap hutan itu milik kami. Kami sudah menyusun peraturan kampung untuk melindungi wilayah sumber air bersih dan daerah berburu kami, kami juga sudah menyusun peta lahan dan membuat rencana kampung. Kami butuh dukungan agar rencana ini dapat berjalan....sehingga mimpi kami dapat terwujud.....

Inilah penggalan cerita Misak Lungui, Kepala Kampung Long Duhung pada suatu waktu disela-sela perbincangan santai di teras rumah salah seorang warga kampung Long Duhung. Sepintas terdengar seperti bentuk keputusan atas kondisi kampung yang belum memperlihatkan perubahan yang berarti. Namun jika digali lebih jauh, sebenarnya masih ada harapan yang digantungkan untuk melakukan perubahan. Misak Lungui tidak menyerah begitu saja terhadap kondisi yang ada. Dia punya komitmen bersama warga lainnya untuk menjaga hutan mereka. Walaupun hutan “bukan” lagi milik mereka, namun rasa sayang mereka terhadap hutan masih sangat tinggi.

Laki-laki sederhana ini melanjutkan kisahnya dengan bercerita tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh warga kampung Long Duhung. Tentang mimpi untuk memiliki sawah basah agar warga tidak perlu membuka hutan untuk berladang padi, tentang keinginan menanam karet di bekas ladang agar warga memiliki tabungan masa depan, dan tentang keinginan agar pemegang izin hutan yang ada di sekitar kampung melakukan pemanenan kayu secara baik dan benar. Juga tentang mimpi agar pemegang izin mengakui wilayah hidup warga yang memang secara turun temurun bergantung pada hutan, dan mimpi untuk belajar beternak ayam dan memelihara ikan tanpa meninggalkan budaya masuk hutan untuk panen buah dan berburu.

Bagi warga Long Duhung, mimpi mereka sederhana: Melihat lebatnya hutan dengan keberlimpahan makanan dan sejahteranya kehidupan warga.

Di akhir perbincangan Misak Lungui menyampaikan harapan ...”*Kami ini siap bekerja sama dengan siapapun agar sumber daya hutan yang ada di sekitar kami tetap terjaga. Kami juga siap menjaga hutan, tidak melakukan penebangan seenaknya, dan menata lahan kami. Bantu kami untuk mewujudkan cita-cita kami.*”



Bab 8 mengurai potensi pendanaan dalam PKHB untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi penggundulan dan kerusakan hutan, mengembangkan ekonomi, dan meningkatkan kapasitas. Untuk memanfaatkan dana tersebut, warga kampung perlu menyusun rencana kerja untuk menterjemahkan program yang telah disusun sebelumnya secara lebih rinci dan memperkirakan pendanaan yang mereka butuhkan.

Sebelum mendampingi warga kampung dalam menyusun rencana kerja ini, fasilitator perlu melakukan beberapa hal. **Pertama**, mengingatkan warga kembali akan mimpi bersama mereka agar saat menyusun rencana kerja mereka merujuk pada mimpi dan perencanaan pembangunan yang telah dibangun sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut memang telah direncanakan dan menjadi cita-cita bersama.

Kedua, fasilitator juga perlu mengajak warga berdiskusi secara mendalam tentang komitmen dan ketertarikan warga untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Seperti yang disebut di atas, komitmen dan ketertarikan ini sangat penting mengingat dukungan pendanaan hanya dapat diberikan jika ada kesepakatan bersama masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan mitigasi atau pengelolaan sumber daya alam.

Ketiga, jika ada komitmen dan ketertarikan, maka selanjutnya fasilitator perlu membantu warga memastikan bahwa program yang akan diusulkan realistis dan dapat dilaksanakan dengan aset yang mereka miliki. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa banyak program yang gagal karena program tersebut tidak sesuai dengan aset yang dimiliki oleh warga. Contohnya program pengembangan budidaya coklat untuk warga kampung yang belum memiliki budaya berkebun secara intensif dan masih memiliki kebiasaan meninggalkan kampung dalam jangka kurun waktu yang panjang untuk berburu. Program ini tidak memberikan hasil dan dampak optimal karena warga tidak dapat memelihara tanaman coklat dengan baik.

Keempat, fasilitator perlu menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam PKHB mengandung potensi manfaat dan potensi resiko. Potensi manfaat misalnya terbukanya peluang bagi warga untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kapasitas warga, dan pengakuan para pihak atas kawasan kelola sosial masyarakat, dan peningkatan kondisi hutan. Sementara potensi resiko antara lain kemungkinan pembatasan kegiatan berladang tebas bakar warga pada area yang masih berhutan karena pertimbangan kelestarian. Masing-masing potensi tersebut perlu diketahui dan dikaji oleh warga kampung dengan cermat.

Jika keempat hal tersebut di atas telah diketahui, dikaji, dan warga memutuskan untuk terlibat dalam PKHB maka fasilitator selanjutnya perlu mengumpulkan beberapa informasi terkait



yang akan membantu perencanaan kegiatan. Pengumpulan informasi ini perlu dilakukan agar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan tepat sasaran, tepat guna, manfaatnya dibagikan secara adil kepada warga kampung. Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan melalui kajian cepat **Penggunaan Lahan, Toleransi Perubahan dan Pendanaan berbasis kinerja (PLTPP)** yang dikembangkan oleh TNC dan The Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI).

Kajian Cepat Penggunaan Lahan, Toleransi Perubahan dan Pendanaan Berbasis Kinerja

Kajian cepat ini akan menggali tiga hal:

Penggunaan lahan dan kegiatan pertanian, perladangan, dan sumber mata pencaharian pada tingkat keluarga dan kecenderungan yang akan terjadi bila tidak ada intervensi apapun dari pihak luar. Informasi yang dikumpulkan, antara lain jumlah lahan yang digunakan oleh setiap keluarga untuk perladangan dan perkebunan, jumlah dan luasan ladang yang dikelola oleh keluarga setiap tahunnya serta kecenderungan penggunaan lahan di masa yang akan datang.

Toleransi perubahan terhadap sistem perladangan, pertanian, dan mata pencaharian yang dapat diterima oleh keluarga, bila ada dukungan dari luar. Kajian ini akan mengumpulkan informasi antara lain seberapa jauh setiap keluarga mau dan dapat mengurangi jumlah atau luasan ladang berpindah bila ada bantuan dari luar. Bila keluarga mau dan mampu melakukan hal ini, apa sumber mata pencaharian baru yang ingin mereka kembangkan dan kegiatan perbaikan kondisi alam dan hutan sekitarnya yang ingin mereka lakukan, bila ada dukungan dari luar. Contohnya: pengembangan kebun karet, peternakan ayam dan hewan kecil, dan penanaman pohon di dalam kebun mereka dan di lahan umum kampung.

Menggali aspirasi tiap keluarga dan **menemukenali dukungan serta pendanaan yang diperlukan untuk mendorong perubahan terhadap kegiatan yang dilakukan sebelumnya.** Bila keluarga menyatakan ketertarikannya dalam mengurangi perladangan berpindah, dan ingin mengembangkan kebun karet, sebagai mata pencaharian baru, informasi berikutnya yang dikumpulkan adalah bentuk dukungan yang mereka perlukan: bibit karet, pupuk, alat pertanian, atau uang tunai yang selanjutnya akan mereka gunakan dalam membeli bibit, pupuk, dll.

Melalui kajian cepat ini, fasilitator akan menggali perubahan pola-pola penggunaan lahan yang dapat diterima oleh warga jika ada dukungan pendanaan dari pihak luar. Hasil kajian ini sangat penting dalam menggali bentuk dukungan yang diperlukan, mengembangkan bentuk insentif



yang tepat dan mengidentifikasi penerima manfaat yang tepat. Kerangka kajian cepat PLTPP ini digambarkan pada Gambar 9.1.

Kajian cepat ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu berbasis kuesioner yang dilakukan dengan mewawancari setiap kepala keluarga, suami dan istri. Kajian ini tidak dilakukan melalui pertemuan kampung karena berdasarkan pengalaman, pertemuan kampung dapat didominasi oleh elit bila tidak dikelola dengan baik. Bila ini terjadi, fasilitator tidak dapat menggali aspirasi warga secara menyeluruh, terutama kelompok-kelompok warga yang rentan. Lahan di kampung, seperti ladang dan kebun, umumnya dimanfaatkan dan dikelola oleh keluarga, walaupun ada beberapa area dalam kampung yang dikelola oleh kelompok atau secara kolektif. Keputusan mengenai perubahan pola penggunaan lahan yang dimanfaatkan dan dikelola oleh keluarga akan diambil pada tingkat keluarga juga. Dengan demikian, pengumpulan informasi paling tepat dilakukan di tingkat keluarga. Penggalan informasi dan aspirasi pada tingkat keluarga ini juga diharapkan akan makin memotivasi warga dan membangun rasa kepemilikan mereka atas program yang akan dikembangkan.



Kajian cepat ini perlu dilakukan karena informasi-informasi yang dikumpulkan akan membantu fasilitator dalam memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan akan memberikan manfaat bagi warga, dan manfaat tersebut dirasakan adil dan tepat sasaran. Program pemberdayaan masyarakat yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai warga atau keluarga tidak akan mencapai hasil yang baik dan berpotensi semakin meminggirkan warga. Berdasarkan pengamatan di lapangan, beberapa program dan kegiatan terkadang menyalurkan dukungan kepada warga tanpa mengkaji siapa warga atau keluarga yang seharusnya menerima dukungan atau manfaat tersebut. Kajian cepat ini akan membantu mengidentifikasi warga atau keluarga yang rentan dan tergantung pada sumber daya hutan. Mereka akan dilibatkan dalam kegiatan sehingga dapat menerima dukungan dan manfaat. Besarnya manfaat yang akan mereka terima akan disesuaikan dengan kontribusi, komitmen, dan kinerja mereka dalam mengurangi kerusakan dan penggundulan hutan.

Kuesioner yang dapat digunakan, dan panduan pengisiannya, dapat dilihat pada Lampiran 9.1, 9.2, dan 9.3. Kuesioner ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi masyarakat yang didampingi. Data yang dikumpulkan selanjutnya perlu dianalisis. Kuesioner dan *excel spreadsheet* yang dapat digunakan untuk mengorganisir dan mengolah data disediakan di dalam *compact disc* atau CD.

Hasil analisis selanjutnya perlu dipaparkan kepada seluruh warga. Pemaparan dapat dilakukan melalui diskusi kelompok kecil. Tergantung pada jumlah keluarga di kampung, diskusi kelompok dapat dilakukan beberapa kali dengan kelompok yang berbeda, misalnya per Rukun Tetangga (RT). Pemaparan perlu dilakukan dalam kelompok kecil untuk memastikan agar warga betul-betul memahami tiga hal yang dikaji melalui proses wawancara yaitu: pola penggunaan lahan saat ini, perubahan yang dapat mereka terima, kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam yang ingin dilakukan, dan dukungan yang dibutuhkan. Diskusi kelompok kecil memberi kesempatan bagi warga untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan lebih mendalam, dan memberi kesempatan bagi fasilitator untuk menggali lebih dalam keinginan atau minat warga dan kekhawatiran mereka, bila ada. Fasilitator juga perlu memberi umpan balik untuk membantu warga membuat keputusan yang terbaik.

Terkait pola penggunaan lahan, dalam diskusi kelompok kecil ini fasilitator dapat menggali lebih dalam beberapa aspek terkait pembatasan perladangan berpindah. Jika hasil kajian menunjukkan bahwa kebanyakan keluarga dalam kampung bersedia menerima pembatasan perladangan berpindah, yaitu tidak membuka ladang di atas lahan yang masih berhutan, fasilitator dapat menggali bentuk pembatasan perladangan yang bisa diterima oleh warga. Sebelumnya fasilitator dapat berbagi informasi tentang beberapa sistem perladangan berpindah sehingga dapat membantu kelompok dalam mendiskusikan:



- Bagaimana tata cara pembukaan ladang berdasarkan kearifan tradisional masyarakat di masa lampau;
- Berapa jumlah ladang dengan sistem ladang berpindah yang memenuhi kaidah kesuburan tanah;
- Jika warga setuju untuk membatasi perladangan berpindah mereka, berapa jumlah ladang dari total ladang yang ada yang akan dikelola secara bergilir;
- Apakah warga akan menetapkan luasan ladang maksimum yang dapat dikelola setiap keluarga setiap tahunnya;
- Bila pembatasan pembukaan ladang di atas lahan berhutan tidak dapat diterapkan kepada keluarga baru, berapa jumlah dan luas ladang maksimal yang boleh dibuka dan dikelola oleh keluarga baru.

Bila warga khawatir pembatasan perladangan ini akan mengurangi akses mereka terhadap ladang yang sudah dibuka, fasilitator dapat membantu menjelaskan dan memberi masukan bahwa warga masih dapat memanfaatkan lahan tersebut, dan menanaminya dengan pohon buah-buahan dan jenis kayu lainnya.

Terkait mata pencaharian baru yang ingin dikembangkan oleh warga, fasilitator perlu mengajak warga untuk membantu memastikan bahwa manfaat kegiatan ini dapat dibagi secara adil dan tepat sasaran. Hasil analisis kajian akan memberikan informasi mengenai jenis-jenis sumber mata pencaharian yang ingin dikembangkan dan jumlah keluarga yang tertarik. Hasil analisis kajian juga akan memberikan informasi prioritas setiap keluarga: satu keluarga mungkin mengidentifikasi pengembangan kebun karet sebagai prioritas pertama dan peternakan ayam sebagai prioritas kedua, sedangkan keluarga lain memiliki prioritas berbeda.

Dalam diskusi kelompok, hasil analisis tersebut perlu dipaparkan dan didiskusikan. Misalnya: bila setiap keluarga tertarik untuk mengembangkan perkebunan karet, kapan dan di mana kebun karet akan dikembangkan. Untuk sumber mata pencaharian lain di mana minat keluarga berbeda-beda, warga perlu mendiskusikan sumber mata pencaharian apa yang akan dikembangkan di kampung dan landasan pembagian manfaat berasas keadilan. Warga juga dapat mulai mendiskusikan kemungkinan dibentuknya kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan minat, kapan pengembangan sumber mata pencaharian tersebut sebaiknya dilakukan (tahun ini, tahun depan, atau tahun berikutnya), siapa penerima manfaat (individu, kelompok, atau rumah tangga).



Fasilitator perlu memastikan bahwa pengembangan sumber mata pencaharian baru tidak bertentangan dengan tujuan pengurangan kerusakan dan penggundulan hutan. Misalnya, jika setiap keluarga tertarik untuk mengembangkan perkebunan karet atau perkebunan perkebunan lainnya, maka fasilitator perlu mengajak warga untuk mendiskusikan luasan kebun maksimal yang akan dikelola tiap keluarga dan di mana perkebunan tersebut akan dikembangkan sehingga pengembangan perkebunan ini tidak memicu pembukaan hutan. Diskusi dan kesepakatan luasan ini perlu merujuk pada analisis ekonomi dan pengalaman masyarakat di tempat lain, dengan mempertimbangkan aset yang warga miliki, termasuk tenaga kerja, sehingga warga dapat menentukan luasan optimum yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Sehubungan dengan lokasi, fasilitator perlu mendorong warga untuk mencari dan memilih wilayah tidak berhutan, misalnya bekas ladang warga atau lokasi yang sudah rusak, sehingga pengembangan perkebunan justru menghijaukan wilayah tersebut. Bila lokasi yang diidentifikasi masuk ke dalam wilayah kelola pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu atau izin lainnya, fasilitator perlu mendampingi warga kampung dalam menyusun rencana untuk mendapatkan izin dari pemegang izin usaha terkait dan pihak pemerintah terkait.

Fasilitator perlu menekankan bahwa kesepakatan yang memuaskan hanya bisa didapat melalui proses negosiasi dengan berbagai pihak terkait agar warga dapat melakukan penataan penggunaan lahan dan kegiatan pengembangan perkebunan. Ijin ini penting diperoleh mengingat usaha perkebunan bersifat jangka panjang dan warga tentunya tidak ingin kegiatan yang mereka lakukan dinilai sebagai kegiatan perambahan.

Pada tahap selanjutnya, keputusan mengenai luas maksimum dan lokasi perlu diikat dalam bentuk kesepakatan untuk menghindari dampak negatif di kemudian hari. Kesepakatan harus dibangun sejak awal untuk memastikan perluasan perkebunan bisa dikendalikan. Jika tidak, insentif yang diberikan kepada warga atas komitmen mereka dalam mengurangi laju kerusakan dan penggundulan hutan malah dapat menjadi pemicu kerusakan hutan.

Hasil analisis kajian dan diskusi yang dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil dan komitmen warga untuk mengurangi kerusakan dan penggundulan hutan menjadi basis penyusunan rencana kerja. Rencana kerja ini selanjutnya akan diusulkan kepada penyandang dana sehingga warga mendapat dukungan pendanaan yang akan melengkapi aset yang mereka miliki untuk mencapai mimpi bersama mereka.



Penyusunan Rencana Kerja

Dokumen rencana kerja merupakan dokumen yang memuat secara rinci kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam yang akan dilakukan warga, sumber mata pencaharian yang ingin mereka kembangkan, dan kondisi pemungkin yang perlu diperkuat, seperti peningkatan kapasitas warga, dan lain-lain.

Rencana kerja juga merinci pendanaan dari luar yang dibutuhkan untuk melengkapi sumber daya yang akan dimobilisir oleh warga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Hal ini sejalan dengan pendekatan berbasis aset yang digunakan pada tahap awal. Warga dapat memobilisir aset yang mereka miliki dalam bentuk tenaga, materi, dana, kekompakan, atau semangat gotong royong.

Saat menyusun rencana kerja, warga perlu menggunakan hasil diskusi kelompok kecil yang sudah dilakukan sebelumnya sehubungan mekanisme pembagian dana yang akan diperoleh, kelompok penerima manfaat, anggota kelompok, bagaimana usulan kegiatan tersebut akan diprioritisasi bila pendanaan yang tersedia tidak mampu memenuhi seluruh usulan warga.

Penyusunan skala prioritas kegiatan tidak bertujuan untuk menggugurkan usulan kegiatan tetapi menentukan kegiatan mana yang perlu dilakukan terlebih dulu, dan kegiatan mana yang bisa ditunda ke tahun berikutnya. Bila peminat suatu kegiatan sangat besar, perlu disepakati kelompok mana yang akan menjalankan kegiatan tersebut di tahun pertama, kelompok mana yang akan melakukannya di tahun kedua, dan seterusnya. Proses diskusi yang transparan dan partisipatif dengan warga akan menjadi landasan tersusunnya rencana kerja yang realistis, dapat dipertanggungjawabkan, dan dijalankan oleh seluruh warga.

Terkait pengelolaan dana yang akan diterima, warga perlu mendiskusikan dan memutuskan penanggung jawab utama yang akan ditunjuk untuk mengelola dana. Warga perlu mendiskusikan lembaga di kampung yang dapat dipercaya dan mampu untuk mengelola, menyalurkan dana, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Lembaga yang dipilih selanjutnya akan mengelola dana, menyalurkan dana tersebut, melaporkan penggunaan dana kepada warga dan penyanggah dana, dan mengawasi pemakaian dana oleh warga dan kelompok warga, sesuai dengan rencana kerja yang disusun.

Untuk memudahkan proses penyusunan rencana kerja ini, terutama jika kampung yang didampingi memiliki jumlah warga atau keluarga yang besar, fasilitator disarankan untuk mendampingi warga dalam membentuk Tim Perumus. Fasilitator selanjutnya mendampingi Tim Perumus dalam membahas dan menyusun butir-butir yang akan dirumuskan dan diusulkan dalam rencana kerja.



Seperti yang sebagian sudah diuraikan di atas, butir-butir tersebut antara lain:

1. Kegiatan-kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam yang diusulkan oleh warga, sumber mata pencaharian yang ingin mereka kembangkan, dan kondisi pemungkin yang perlu diperkuat di tahun pertama, kedua, dan ketiga;
2. Besaran dana yang dibutuhkan masing-masing kegiatan, dan kontribusi warga;
3. Waktu penyaluran dana dari penyandang dana kepada warga, dan bagaimana tingkat kinerja warga pada tahun berjalan akan menentukan besaran dana yang akan mereka terima pada tahun berikutnya;
4. Lembaga kampung yang diusulkan sebagai penanggung jawab umum kegiatan dan yang akan mengelola, menyalurkan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada warga dan penyandang dana;
5. Kriteria warga atau keluarga yang diusulkan menjadi prioritas utama penerima manfaat atau pelaksana kegiatan;
6. Individu, keluarga, atau kelompok yang akan melaksanakan kegiatan yang diusulkan;
7. Sistem pemantauan yang akan dikembangkan untuk mengukur kemajuan dan kinerja warga dalam melaksanakan kegiatan;
8. Sanksi yang akan dikenakan kepada warga bila terjadi pelanggaran;
9. Mengidentifikasi hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja tetapi di luar kendali warga, seperti banjir, gempa, dan lainnya.;
10. Mengidentifikasi pihak ketiga yang akan dihubungi oleh warga bila ada keluhan dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Pihak ketiga ini akan bertindak sebagai penengah atau mediator bila ada konflik antara warga dengan fasilitator atau penyandang dana. Pihak ketiga ini akan ikut menilai kinerja warga yang menjadi landasan penentu besaran dana yang akan diterima warga pada tahun berikutnya.
11. Mekanisme pelaporan keuangan dari lembaga kampung kepada penyandang dana;
12. Mekanisme yang akan dikembangkan untuk menangani konflik antar warga, bila terjadi.

Hasil Tim Perumus ini selanjutnya dipaparkan kepada warga kampung secara luas untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan. Tim Perumus selanjutnya menfinalisasi rencana kerja ini berdasarkan masukan yang diperoleh.



RANCANGAN PROSES

1. Menggumpulkan dan memaparkan hasil kajian cepat Penggunaan Lahan, Toleransi Perubahan dan Pendanaan berbasis kinerja (PLTPP)



Persiapan

Fasilitator mengkaji kuesioner yang tersedia dan memodifikasi kuesioner tersebut sesuai konteks masyarakat kampung yang didampingi. Fasilitator bisa melakukan uji coba terlebih dahulu dengan mewawancarai 1-2 keluarga untuk memastikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat dimengerti. Fasilitator juga perlu menyampaikan rencana kajian dan tujuannya saat pertemuan kampung sehingga warga kampung sudah mengetahui secara umum bahwa kajian akan dilakukan. Bila diperlukan, fasilitator dapat menyusun jadwal wawancara.



Tujuan

Melakukan kajian cepat **Penggunaan Lahan, Toleransi Perubahan dan Pendanaan berbasis kinerja (PLTPP)** dan membantu warga dalam memahami hasil kajian tersebut.



Alat bantu

- Kuesioner
- Kertas Plano
- Spidol



Proses

Wawancara (1-1,5 jam per keluarga)

- Wawancara dilakukan kepada seluruh keluarga yang terdaftar sebagai penduduk di kampung bersangkutan.
- Jelaskan tujuan wawancara dan tanyakan kesediaan kepala keluarga, suami dan istri, untuk diwawancarai. Sebaiknya suami dan istri hadir pada saat wawancara sehingga jawaban yang diajukan sudah merupakan hasil diskusi dan kesepakatan mereka berdua.
- Lakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner.
- Bacakan pertanyaan satu demi satu, catat jawaban yang diberikan. Jangan meninggalkan kuesioner kepada keluarga untuk diisi sendiri.

Memasukkan dan menganalisis data (3-5 hari, tergantung jumlah keluarga)

- Gunakan dokumen dalam format *excel* yang tersedia dalam CD untuk memasukkan data yang terkumpul dari hasil wawancara.



- Lakukan analisis sederhana untuk setiap jenis data yang dikumpulkan.
- Kaji hasil analisis tersebut.
- Tulis beberapa hasil analisis penting dalam kertas plano untuk dipaparkan dan didiskusikan dengan warga dalam diskusi kelompok kecil.



Diskusi kelompok kecil (3 jam per diskusi)

- Diskusi dilakukan dengan 10-15 keluarga. Bila kampung yang didampingi memiliki jumlah keluarga yang besar, bagi seluruh keluarga ke dalam beberapa kelompok, dan diskusi dilakukan dengan kelompok-kelompok ini secara terpisah.
- Sampaikan kembali kajian yang dilakukan, tujuan kajian tersebut, kapan kajian dilakukan, berapa keluarga yang sudah diwawancarai.
- Paparkan hasil analisis yang telah dilakukan, dengan menggunakan kertas plano yang sudah disiapkan, antara lain:
 - Pola penggunaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat: total lahan yang dikelola seluruh keluarga untuk ladang, kebun, dll., jumlah rata-rata ladang, kebun yang dikelola tiap keluarga;
 - Perubahan yang dapat diterima bila ada dukungan dari luar: pembatasan perladangan berpindah, jumlah ladang yang dapat diterima, kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang diminati oleh keluarga;
 - Kegiatan pengembangan ekonomi yang diminati keluarga: kegiatan sumber mata pencaharian apa saja, mata pencaharian yang menjadi prioritas tiap-tiap keluarga, berapa keluarga yang berminat untuk setiap jenis mata pencaharian;
 - Dukungan yang diharapkan keluarga untuk setiap kegiatan pengembangan ekonomi tersebut;
- Diskusikan hasil kajian tersebut dengan peserta diskusi dan gali apakah ada pertanyaan dari peserta mengenai hasil kajian yang dipaparkan.
- Gali lebih pembatasan perladangan berpindah yang dapat diterima oleh warga: jumlah ladang maksimum yang akan dikelola per keluarga, luas maksimum ladang, apakah pembatasan akan dilakukan kepada keluarga baru, dll.
- Gali lebih dalam sumber mata pencaharian baru yang ingin dikembangkan oleh warga, dan diskusikan bagaimana memastikan manfaat kegiatan ini dapat dibagi secara adil dan tepat sasaran.
- Di akhir diskusi kelompok, sampaikan langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu menyusun rencana kerja yang akan disampaikan kepada penyanggah dana.



2. Menyusun Rencana Kerja



Persiapan

Dampingi tokoh dan warga kampung untuk mengidentifikasi 8-10 warga yang akan diminta untuk duduk di dalam Tim Perumus. Pastikan ada perwakilan keterwakilan pemerintah kampung, BPK, tokoh adat, perempuan, dan tokoh pemuda dalam Tim Perumus ini.



Tujuan

Mendampingi Tim Perumus dalam menyusun rancangan dokumen rencana kerja.



Alat bantu

- Hasil analisis kajian cepat
- Kertas plano
- Spidol



Waktu Beberapa kali pertemuan, 3-4 jam/pertemuan



Proses

- Jelaskan tujuan penyusunan rencana kerja.
- Paparkan kembali hasil analisis kajian cepat yang sudah disampaikan kepada warga melalui diskusi kelompok.
- Paparkan isi rencana kerja yang akan disusun oleh Tim Perumus.
- Fasilitasi Tim Perumus dalam mendiskusikan secara mendalam butir-butir dalam rencana kerja (lihat butir-butir tersebut di atas).
- Dampingi Tim Perumus dalam menyusun tata waktu pertemuan penyelesaian rancangan rencana kerja dan waktu pelaporan Tim Perumus kepada warga kampung secara luas.
- Dampingi Tim Perumus dalam mempersiapkan presentasi rancangan rencana kerja kepada warga kampung.
- Berikan kesempatan kepada warga kampung untuk memberikan masukan terhadap rancangan rencana kerja.
- Bantu Tim Perumus dalam memperbaiki dan menfinalisasi rencana kerja berdasarkan masukan dari warga.



BAHAN BACAAN

Pirard, R. and R. Lapeyre. 2013. *Building a Rapid Assessment Tool to Help Design Community Incentive Agreements in the Context of the Berau Carbon Program*. A Report Submitted to TNC. IDDRI, Paris.

Hartanto, H., L. Hayden, E.M. Madeira, T. S. Yulianto and T. Hidayat. 2013. *Envisioning a Green & Prosperous Future with the Berau Forest Carbon Program*. TNC, Arlington.



LAMPIRAN 9.1

QUIZZ ID (*enumerator tidak perlu mengisi*): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Catatan bagi Enumerator:

Bacalah kuesioner ini dengan seksama sebelum melakukan wawancara. Pastikan Anda memahami cara mengisinya, agar proses wawancara berjalan dengan lancar dan nyaman bagi responden.

Catatan khusus untuk beberapa pertanyaan tertentu dicantumkan langsung pada pertanyaan yang bersangkutan.

Petunjuk Umum bagi Enumerator:

1. Bila orang yang paling sesuai untuk diwawancarai tidak punya waktu saat ditemui, buat perjanjian pertemuan di waktu atau hari yang berbeda. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, catat hal ini di buku catatan, dan wawancarai rumah tangga lainnya.
2. Dalam kuesioner ini, bila responden tidak dapat/mau menjawab pertanyaan atau tidak dapat memberikan informasi, tuliskan "tidak tahu," "tidak menjawab," atau lingkari "-99".
3. Usahakan mewawancarai suami dan istri bersama-sama. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan informasi mendalam dari keduanya. Libatkan istri sebanyak mungkin selama wawancara, terutama terkait pengembangan sumber mata pencaharian.
4. Bila suami dan istri tidak sepakat mengenai isu-isu tertentu dalam menjawab pertanyaan, catat ketidaksepakatan ini dan nomor pertanyaan dalam kolom "Komentar" di bawah? halaman.
5. Bila responden tidak mempunyai pasangan, duda atau janda dan "memiliki" lahan yang pengelolaannya dibantu oleh orang lain atau sanak keluarga, wawancarai responden dan pihak yang membantu ini pada saat bersamaan.
6. Jika yang diwawancarai sebagai kepala rumah tangga adalah seorang ibu (misalnya janda), bersama-sama dengan anak laki-lakinya, catat di kolom "komentar" status ibu ini dan nama anak yang ikut diwawancarai.

BAGIAN A: INFORMASI MENGENAI KEGIATAN SURVEI

1. Tanggal survei dilakukan (dd/mm/yyyy) : |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|_|
2. Waktu survei dimulai (24-jam; HH:MM) : |_|_|:|_|_|
3. Nama pelaksana survei : _____
4. Nama orang lain dari luar desa yang hadir : _____ / _____
5. Nama desa : _____
6. ID desa (*enumerator tidak perlu mengisi*) : |_|_|_|
7. ID rumah tangga (*enumerator tidak perlu mengisi*) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|



BAGIAN B: PERSETUJUAN UNTUK DIWAWANCARAI DAN INFORMASI PRIBADI

Bacakan paragraph di bawah kepada orang yang diwawancarai (responden) dan tanyakan apakah responden bersedia untuk diwawancarai. Jelaskan kepada responden bahwa penting bagi mereka untuk berpartisipasi dalam wawancara ini karena lembaga pendamping akan merancang program di masa depan berdasarkan hasil wawancara ini.

“Selamat pagi/siang/sore/malam. Apa kabar? Saya (nama) dari[Isi nama lembaga pendamping], yang pada saat ini melakukan kegiatan di kampung ini. Kami ingin mengetahui lebih dalam mengenai masyarakat, sumber penghidupan masyarakat, pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya. Bolehkah kami berbicara dengan kepala rumah tangga ini yang biasanya mengambil keputusan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut di atas?”

Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai anda, rumah tangga anda, dan cara anda dalam berladang dan melakukan penanaman. Wawancara ini tidak akan lebih dari satu jam. Anda tidak harus terlibat dalam wawancara ini. Bila Anda bersedia diwawancarai, Anda bisa menghentikan wawancara ini kapan saja saat Anda tidak mau menjawab pertanyaan atau merasa tidak nyaman dalam menjawab pertanyaan tersebut. Bila Anda punya pertanyaan atau komentar mengenai kegiatan ini, Anda bisa juga menghubungi dan bicara dengan staf lembaga pendamping di nomor ini: _____ (Nomor Telp Staf)

“Apakah Anda bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan, dan bersedia diwawancarai?”

1. Persetujuan diberikan? (1=Ya, 0=Tidak) _____

Bila P1=0 (tidak), lanjutkan ke P2 dan akhiri wawancara ini. Jika P1=1 (ya), lanjutkan ke P3

2. Bila responden tidak memberikan persetujuan: Kenapa? _____

3. Siapa nama lengkap anda (responden saja)? / _____ / _____ / _____ /

(Enumerator: Isi selengkap mungkin)

4. Apakah anda kepala keluarga? (1=Ya, 0=Tidak) _____

5. Apakah istri hadir dan ikut menjawab pertanyaan? (1=Ya, 0=Tidak) _____

Jika P5=1 (ya), lanjutkan ke P6. Jika P5=0 (tidak), lanjutkan ke P7.

6. Nama Istri (Jika diwawancarai bersama dengan istri): / _____ / _____ / _____ /

(Enumerator: Isi selengkap mungkin)

7. Nomor Telp: _____



BAGIAN C. INFORMASI DEMOGRAFI DAN SOSIO-EKONOMI

Petunjuk bagi Enumerator:

1. Tuliskan jenis kelamin responden utama yang namanya dicantumkan di Pertanyaan No. 3 di Bagian B.
2. Bila responden hanya mengetahui umurnya, enumerator harus menghitung tahun kelahiran responden.
3. Sumber mata pencaharian yang dimaksud di sini adalah sumber mata pencaharian seluruh anggota rumah tangga, bukan hanya suami dan istri. Pastikan semua sumber mata pencaharian utama semua anggota rumah tangga dicantumkan di sini.
4. Tanyakan kapan RT dibentuk di kampung ini. Bila RT pindah dan menetap di kampung ini dari tempat lain, tanyakan kapan RT ini mulai menetap di kampung ini.

1. Jenis Kelamin (1=Laki-laki; 0=Perempuan)	2. Status pernikahan	3. Tahun Lahir	4. Tingkat pendidikan terakhir?	5. Sumber pencaharian utama	6. Sumber pencaharian sampingan (bisa lebih dari satu jawaban)	7. Jumlah orang dalam Rumah Tangga (RT)	8. Jumlah lelaki yang masih tinggal dengan RT dan yang umurnya di atas 14 tahun	9. Sudah berapa tahun RT tinggal di desa ini (1000= dari dulu tinggal di sini atau berasal dari sini)
					a. b.			

BAGIAN D. POLA PENGGUNAAN LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM DAN PERUBAHANNYA:

Petunjuk bagi Enumerator:

1. Gunakan Lampiran berjudul “Deskripsi Pola Penggunaan Lahan Rumah Tangga” saat mewawancarai responden mengenai jumlah dan luas lahan yang mereka “miliki.” Lampiran tersebut akan membantu anda dalam mengisi tabel di bawah, untuk sub-pertanyaan 1-16 dan 18-25.
2. Pastikan bahwa responden hanya menghitung lahan yang “dimiliki” atau dikelola di dalam wilayah kampung ini, bukan di wilayah kampung lain (bila responden sebelumnya tinggal dan membuka lahan di kampung lain). Responden jangan menghitung lahan di mana responden hanya membantu orangtuanya atau orang lain.
3. Yang dimaksud dengan “ladang” di sini adalah lahan untuk perladangan berpindah, baik yang sedang dikelola maupun yang sedang diistirahatkan (untuk dipakai kembali di kemudian hari).
4. Yang dimaksud dengan “kebun” di sini adalah lahan yang dikelola untuk menanam pohon dalam jumlah yang cukup banyak, seperti perkebunan karet, kopi, buah-buahan, atau wanatani lainnya, dan bukan lahan bekas ladang yang hanya ditanami dengan beberapa batang pohon. Jumlah ladang dicatat di pertanyaan sebelumnya.
5. Pertanyaan ini untuk ladang saja, bukan kebun atau lahan lainnya. Jangan memasukan kebun atau sawah.
6. Yang dimaksud dengan lahan pertanian di sini adalah lahan pertanian yang dikelola secara permanen dari tahun ke tahun, di mana komoditasnya bukan komoditas pohon. Misalnya: sawah, lahan singkong, jagung, dan lainnya.
7. Responden diminta untuk tidak memperhitungkan kebun/lahan di sekitar rumah dan area hutan tempat mengambil kayu bakar, kayu, maupun hasil hutan non-kayu.
8. Jelaskan bahwa pertanyaan terkait masa depan perlu dijawab *tanpa* mempertimbangkan kegiatan dan insentif yang akan diberikan oleh program lembaga pendamping.



PERTANYAAN 1. RONA AWAL: LAHAN YANG RESPONDEN MILIKI DAN TIPENYA

5 TAHUN YANG LALU (Jika responden belum tinggal di kampung ini 5 tahun yang lalu, langsung ke subpertanyaan 9 di bawah)

Petunjuk khusus terkait dengan sub-pertanyaan tertentu:

- P. 1 Angka yang ditulis di sini = angka P.2+P.3+P.4+P.5+P.6
- P. 6 Yang dimaksud dengan ladang yang susah sekali dijangkau adalah ladang yang letaknya jauh (lebih dari dua jam dengan berjalan kaki perjalanan) atau memerlukan alat transportasi khusus, dan kondisi ini dialami lima tahun yang lalu, bukan saat ini. Bisa saja responden mengatakan ladang tersebut sulit dijangkau saat ini karena responden pindah rumah dan sulit menjangkau ladang itu. Atau sebaliknya, ladang tersebut saat ini menjadi terjangkau karena telah dibangun jalan yang mempermudah akses. Jumlah ladang yang sulit dijangkau menjadi bagian dari total ladang yang dicantumkan di Pertanyaan 1.
- P. 7 Jumlah ladang berpindah, dan luasnya, yang ditanami oleh RT dalam setahun. Jumlah ladang ini menjadi bagian dari total ladang yang dicantumkan di Pertanyaan 1.

1. 5 TAHUN LALU , BERAPA JUMLAH LAHAN YANG RT INI MILIKI? <i>(Catat jumlah lahan dan luasnya dalam hektar)</i>	2. JUMLAH LADANG	3. JUMLAH KEBUN (BERBASIS POHON YANG DITANAM SENDIRI)	4. JUMLAH LAHAN PERMANEN UNTUK PERTANIAN PERMANEN	5. JUMLAH LAHAN UNTUK KEGU-NAAN LAIN (jelaskan__)	6. BERAPA JUMLAH LADANG YANG SUSAH SEKALI DI-JANGKAU?	7. 5 TAHUN LALU , BERAPA JUMLAH LADANG YANG RT INI TANAMI DALAM SATU TAHUN? <i>(Catat jumlah ladang dan luasnya dalam hektar)</i>	8. 5 TAHUN LALU , APAKAH ANDA MEMBAYAR ORANG UN-TUK BEKERJA DI LADANG ANDA? (0=TIDAK, 1=YA)
a. _____plot b. _____ luas area (Ha)						a. _____plot b. _____ luas area (Ha)	

SAAT INI

9. SAAT INI , BERAPA JUMLAH LAHAN YANG RT INI MILIKI? <i>(Catat jumlah lahan dan luasnya dalam hektar)</i>	10. JUMLAH LADANG	11. JUMLAH KEBUN (BERBASIS POHON YANG DITANAM SENDIRI)	12. JUMLAH LAHAN PERMANEN UNTUK PERTANIAN PERMANEN	13. JUMLAH LAHAN UNTUK KEGU-NAAN LAIN (jelaskan__)	14. BERAPA JUMLAH LADANG YANG SUSAH SEKALI DI-JANGKAU?	15. SAAT INI , BERAPA JUMLAH LADANG YANG RT INI TANAMI DALAM SATU TAHUN? <i>(Catat jumlah lahan dan luasnya dalam hektar)</i>	16. SAAT INI , APAKAH ANDA MEMBAYAR ORANG UN-TUK BEKERJA DI LADANG ANDA? (0=TIDAK, 1=YA)
a. _____plot b. _____ luas area (Ha)						a. _____plot b. _____ luas area (Ha)	



Petunjuk khusus terkait dengan sub-pertanyaan tertentu:

P. 9 Angka yang ditulis di sini = angka P.10+P.11+P.12+P.13

(Jika responden belum tinggal di kampung ini 5 tahun yang lalu, lanjutkan ke subpertanyaan 18 di bawah)

17. KENAPA ANDA MENAMBAH/MENGURANGI/MEMPERTAHANKAN JUMLAH LAHAN SEJAK 5 TAHUN SAMPAI SEKARANG?

a. _____

b. _____

5 TAHUN DARI SEKARANG**Petunjuk bagi Enumerator:**

Ingat bahwa yang ditanyakan di sini adalah jumlah total lahan yang dimiliki 5 tahun dari sekarang, bukan jumlah lahan baru yang dibuka dari sekarang sampai 5 tahun mendatang. Dengan demikian, anda perlu menjumlahkan jumlah lahan yang dimiliki saat ini dan jumlah lahan baru yang akan dibuka atau dimiliki dari sekarang sampai 5 tahun mendatang.

18. 5 TAHUN DARI SEKARANG, BERAPA JUMLAH LAHAN YANG RT INI MILIKI? <i>(Catat jumlah lahan dan luasnya dalam hektar)</i>	19. JUMLAH LADANG	20. JUMLAH KEBUN (BERBASIS POHON YANG DITANAM SENDIRI)	21. JUMLAH LAHAN PERMANEN UNTUK PERTANIAN PERMANEN	22. JUMLAH LAHAN UNTUK KEGUNAAN LAIN (jelaskan___)	23. BERAPA JUMLAH LADANG YANG SUSAH SEKALI DIJANGKAU?	24. 5 TAHUN DARI SEKARANG, BERAPA JUMLAH LADANG YANG RT INI TANAMI DALAM SATU TAHUN? <i>(Catat jumlah lahan dan luasnya dalam hektar)</i>	25. 5 TAHUN DARI SEKARANG, APAKAH ANDA MEMBAYAR ORANG UNTUK BEKERJA DI LADANG ANDA? <i>(0=TIDAK; 1=YA.)</i>
a. _____plot b. _____ luas area (Ha)						a. _____plot b. _____ luas area (Ha)	

26. KENAPA ANDA MERENCANAKAN MENAMBAH/MENGURANGI/MEMPERTAHANKAN JUMLAH LAHAN MULAI SEKARANG SAMPAI 5 TAHUN KE DEPAN?

a. _____

b. _____

Petunjuk untuk Enumerator: Jika jumlah lahan yang dimiliki 5 tahun dari sekarang (Sub-pertanyaan 18a) lebih banyak daripada yang dimiliki sekarang (Sub-pertanyaan 9a), tanyakan: "Mengapa anda menambah lahan?" Jika jumlah lahan 5 tahun dari sekarang (Sub-pertanyaan 18a) lebih sedikit daripada yang dimiliki sekarang (Sub-pertanyaan 9a), tanyakan: "mengapa anda mengurangi jumlah lahan anda?" Jika jumlah lahan 5 tahun dari sekarang (Sub-pertanyaan 18a) sama dengan jumlah lahan yang dimiliki sekarang (Sub-pertanyaan 9a), tanyakan "mengapa anda mempertahankan jumlah lahan anda?"



PERTANYAAN 2. PENGURANGAN LAHAN PERLADANGAN BERPINDAH YANG RESPONDEN MILIKI SECARA KESELUHURAN

<p>1. APAKAH MUNGKIN UNTUK ANDA UNTUK MENGURANGI JUMLAH LADANG BILA ADA DUKUNGAN DARI PIHAK LUAR?</p> <p>Petunjuk untuk Enumerator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah mungkin responden mengurangi jumlah ladang yang akan dikelola dengan sistem gilir balik di kemudian hari. - Enumerator lingkari satu jawaban. 	<p>0=TIDAK 1=YA -99=Tidak memberi jawaban</p>	<p><i>JIKA SubP1 = TIDAK (=0), LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 2</i></p> <p><i>JIKA SubP1 = YA (=1) LANJUTKAN DENGAN SUB-PERTANYAAN 3 DI BAWAH</i></p> <p><i>JIKA SubP1 = -99, LANJUT KE PERTANYAAN 3</i></p>	
<p>2. KENAPA TIDAK MAU MENGURANGI JUMLAH LADANG SEANDAINYA ADA DUKUNGAN DARI PIHAK LUAR?</p>			<p style="text-align: center;"><i>LANJUT KE PERTANYAAN 3</i></p>
<p>3. APA AKIBATNYA BAGI ANDA JIKA ANDA MENGURANGI JUMLAH LADANG?</p> <p>Petunjuk untuk Enumerator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minta responden mengidentifikasi akibat pengurangan jumlah ladang, baik yang positif maupun yang negatif. Yang dimaksud dengan "jumlah ladang" di sini adalah ladang yang dikelola sebagai bagian dari sistem perladangan berpindah (gilir balik). - Urutkan jawaban dari yang paling penting. - Responden tidak harus memberikan 3 jawaban. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 		
<p>4. BERAPA JUMLAH PALING SEDIKIT LADANG YANG ANDA PERLUKAN BILA ADA DUKUNGAN DARI PIHAK LUAR</p> <p>Petunjuk untuk Enumerator: Tuliskan angka yang disebut responden.</p>	<p>_____</p>		
<p>5. DUKUNGAN APA YANG ANDA PERLUKAN UNTUK MENURUNKAN JUMLAH LADANG KE JUMLAH PALING SEDIKIT TERSEBUT</p> <p>Petunjuk untuk Enumerator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaitkan pertanyaan ini dengan jawaban yang diberikan oleh responden untuk Pertanyaan sebelumnya. - Pertanyaan ini hanya khusus untuk ladang. Di bagian berikutnya akan ditanyakan dukungan yang diperlukan untuk kegiatan lain - Berikan responden waktu untuk berpikir mengenai pertanyaan yang diajukan tanpa memberikan opsi jawaban terlebih dahulu. Hanya bila responden ragu atau tidak bisa menjawab enumerator bisa membacakan opsi yang disediakan. Ingat, responden bisa memberikan jawaban yang berbeda dari opsi yang disediakan. Bila ini terjadi, pilih opsi "Dukungan Lain," dan berikan rinciannya. - Urutkan jawaban dari yang paling penting. - Pilih opsi "sumber mata pencaharian baru" bila responden menyebutkan kegiatan selain ladang, misalnya: kebun, ternak, madu, dan lainnya. Sama untuk pertanyaan berikut di bawah. Ingat bahwa pertanyaan lebih rinci mengenai kegiatan ekonomi yang diinginkan oleh responden akan ditanyakan di bawah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan penyuluhan/pelatihan pertanian (untuk ladang) 2. Bibit padi (dengan kualitas baik) (untuk ladang) 3. Pupuk (untuk ladang) 4. Racun (untuk ladang) 5. Tenaga kerja tambahan (untuk ladang) 6. Sumber mata pencaharian baru 7. Modal/dana (untuk ladang), <i>berapa jumlahnya</i> _____ 8. Alat (untuk ladang) 9. Dukungan lain, <i>jelaskan</i> _____ <p>-99 Tidak memberi tahu</p>	<p><i>ENUMERATOR:</i> <i>JIKA JAWABAN RESPONDEN = 6,</i></p> <p><i>INGAT NANTI HARUS MENGAJUKAN PERTANYAAN 5</i></p>



PERTANYAAN 3. PENGURANGAN LUAS AREA LADANG YANG DITANAM SETIAP TAHUN

<p>1. APAKAH MUNGKIN UNTUK ANDA UNTUK MENGURANGI LUASAN LADANG YANG DITANAM SETIAP TAHUNNYA BILA ADA DUKUNGAN DARI PIHAK LUAR?</p> <p>Petunjuk untuk Enumerator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanyaan ini mengenai kemungkinan responden untuk mengurangi luas ladang yang ditanami tiap tahunnya dibandingkan dengan luas yang ditanami sekarang. Misalnya, mengurangi luas 1 ha ladang saat ini menjadi 1/2 ha di masa mendatang. - Lingkari satu jawaban. 	<p>0= TIDAK 1= YA -99=Tidak memberi jawaban</p>	<p><i>BILA SubP1 = TIDAK (=0) LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 2 DI BAWAH</i></p> <p><i>Bila SubP1 =YA (=1), LANJUTKAN DENGAN SUB-PERTANYAAN 3 DI BAWAH</i></p> <p><i>JIKA SubP1 = -99, LANJUT KE PERTANYAAN 4</i></p>	
<p>2. KENAPA TIDAK MAU MENGURANGI LUASAN LADANG YANG DITANAM SETIAP TAHUNNYA SEANDAINYA ADA DUKUNGAN DARI PIHAK LUAR?</p>	<p><i>LANJUT KE PERTANYAAN 4</i></p>		
<p>3. BILA ADA DUKUNGAN DARI PIHAK LUAR, APA LUASAN YANG PALING KECIL YANG BISA DITANAM SETIAP TAHUN?</p>	<p>_____ ha</p>		
<p>4. DUKUNGAN APA YANG ANDA PERLUKAN UNTUK MENURUNKAN LUASAN SAMPAI YANG PALING KECIL TERSEBUT?</p>	<p>1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____</p>	<p>1. Dukungan penyuluhan pertanian/pelatihan (untuk ladang yang ditanam) 2. Bibit padi (dengan kualitas baik) (untuk ladang yang ditanam) 3. Pupuk (untuk ladang yang ditanam) 4. Racun (untuk ladang yang ditanami) 5. Tenaga kerja tambahan (untuk ladang yang ditanam) 6. Sumber mata pencaharian baru 7. Modal/dana (untuk ladang yang ditanami), <i>berapa jumlahnya</i> _____ 8. Alat (untuk ladang yang ditanam) 9. Dukungan lain, <i> jelaskan</i> _____ -99 Tidak memberi tahu</p>	<p><i>ENUMERATOR:</i> <i>JIKA JAWABAN RESPONDEN = 6,</i> <i>INGAT NANTI HARUS MENGAJUKAN PERTANYAAN 5</i></p>



PERTANYAAN 4. SUMBER DAYA ALAM LAIN YANG DIGUNAKAN

<p>SUMBER DAYA ALAM YANG MANA YANG ANDA GUNAKAN?</p> <p>SEBUTKAN SUMBER DAYA ALAM YANG MANA, DIMANA SUMBER DAYA ALAM ITU DICARI, BERAPA SERING (SETIAP BERAPA LAMA). APAKAH DIJUAL DI LUAR DESA</p> <p>Petunjuk untuk Enumerator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responden tidak perlu mengukur jawabannya. - Boleh menyebutkan pilihan yang disediakan di bawah. Tuliskan nomornya saja. Misalnya "1" bila responden menyebutkan "berburu" 	<p>SUMBER DAYA ALAM</p> <p>A1. _____</p> <p>B1. _____</p> <p>C1. _____</p> <p>D1. _____</p>	<p>DI MANA SUMBER DAYA ALAM TERSEBUT DICARI?</p> <p>A2. _____</p> <p>B2. _____</p> <p>C2. _____</p> <p>D2. _____</p>	<p>FREKUENSI (berapa kali per bulan)</p> <p>A3. _____/bulan</p> <p>B3. _____/ bulan</p> <p>C3. _____/ bulan</p> <p>D3. _____/ bulan</p>	<p>APAKAH DIJUAL DI LUAR DESA? (0=tidak; 1=Ya)</p> <p>A4. _____</p> <p>B4. _____</p> <p>C4. _____</p> <p>D4. _____</p>
	<p>1. Berburu</p> <p>2. Mencari Ikan</p> <p>3. Mencari Emas</p> <p>4. Sarang Burung</p> <p>5. Mencari Gaharu</p> <p>6. Tanaman obat</p> <p>7. Kayu bakar</p> <p>8. Kayu tebang</p> <p>9. Lain, Sebutkan _____</p>	<p>1. Dalam wilayah konsesi (HPH)</p> <p>2. Dalam hutan lindung</p> <p>3. Di kebun</p> <p>4. Di ladang</p> <p>5. Tempat lain, sebutkan _____</p> <p>-99. Tidak memberi tahu</p>		



PERTANYAAN 5. KEGIATAN LAIN APA YANG ANDA MAU LAKUKAN

INSTRUKSI PENTING BAGI ENUMERATOR: Bila responden sudah menjawab bahwa dia perlukan “Sumber mata pencaharian baru”, yaitu jawaban 6 di pertanyaan 2 sub-pertanyaan 5 atau/dan di pertanyaan 3 sub-pertanyaan 4, silahkan ajukan kedua sub-pertanyaan 1 & 2 di bawah.

Sebaliknya (jika tidak), silahkan lanjut ke pertanyaan 6 di bawah

<p>1. KEGIATAN LAIN APA YANG ANDA MAU LAKUKAN (MAKSIMUM 4) UNTUK MENGURANGI KEGIATAN TERSEBUT (LADANG, LADANG DI TANAM, DIUPAH UNTUK AMBIL KAYU YANG DI JUAL DI LUAR DESA)?</p>	<p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p>4. _____</p>	<p>1. Sawah</p> <p>2. Sayur-sayuran</p> <p>3. Beternak: kambing, sapi, dll. Sebutkan _____</p> <p>4. Beternak ayam</p> <p>5. Beternak bebek</p> <p>6. Berkebun karet</p> <p>7. Menanam pohon buah²an</p> <p>8. Tananam pohon kayu</p> <p>9. Beternak lebah madu</p> <p>10. Pengumpulan sarang burung</p> <p>11. Kerajinan tangan</p> <p>12. Kolam ikan</p> <p>13. Lain, sebutkan _____</p> <p>-99 tidak memberi tahu</p>	<p><i>JIKA SubP1 = -99, LANJUT KE PERTANYAAN 6</i></p>
<p>2. APA YANG ANDA PERLUKAN UNTUK MENGALIHKAN MATA PENCAHARIAN KE KEGIATAN YANG DISEBUTKAN (DI PERTANYAAN SEBELUMNYA)?</p> <p>Petunjuk untuk Enumerator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangan sebutkan jenis-jenis dukungan terlebih dahulu. Sebutkan hanya sesudah responden mencoba menjawab. - Untuk setiap kegiatan ekonomi yang disebutkan oleh responden, tanyakan bentuk dukungan yang diperlukan. Tanyakan mulai dari Kegiatan 1, kemudian Kegiatan 2, dan seterusnya. Responden hanya boleh mengajukan 3 macam dukungan untuk tiap kegiatan, diurutkan mulai dari yang paling penting. 	<p>1. a) _____ b) _____ c) _____</p> <p>2. a) _____ b) _____ c) _____</p> <p>3. a) _____ b) _____ c) _____</p> <p>4. a) _____ b) _____ c) _____</p>		<p>1. Tenaga kerja tambahan</p> <p>2. Bibit (pohon, ikan, ternak, ayam, bebek)</p> <p>3. Pupuk</p> <p>4. Racun</p> <p>5. Penyuluhan/Pelatihan</p> <p>6. Alat</p> <p>7. Modal/dana, berapa jumlahnya _____</p> <p>8. Lain, sebutkan _____</p> <p>-99 tidak memberi tahu</p>



PERTANYAAN 6. PENANAMAN POHON

<p>1. APAKAH ANDA SUDAH MENANAM POHON DI LAHAN ANDA SENDIRI (YAITU DI KEBUN)?</p> <p>Petunjuk untuk Enumerator: Jelaskan bahwa "kebun" adalah lahan yang sebagian besar areanya ditanami pohon. Jika responden hanya menanam beberapa pohon di pinggir lahan, lingkari angka 0 (tidak).</p>	<p>0 = TIDAK</p> <p>1 = YA</p> <p>-99= saya tidak memberi tahu</p>	<p><i>JIKA MENJAWAB = 0 (TIDAK), LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 2</i></p> <p><i>JIKA MENJAWAB = 1 (YA), LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 6</i></p> <p><i>JIKA SubP1 = -99, LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 2</i></p>	
<p>2. APAKAH ANDA MAU MENANAM POHON DI LAHAN ANDA SENDIRI BILA ANDA MENDAPAT DUKUNGAN DARI PIHAK LUAR?</p>	<p>0= TIDAK</p> <p>1= YA</p> <p>-99 = Tidak memberi tahu</p>	<p><i>JIKA MENJAWAB = 0 (TIDAK), LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 3</i></p> <p><i>JIKA MENJAWAB = 1 (YA), LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 4</i></p> <p><i>JIKA SubP2 = -99, LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 11</i></p>	
<p>3. KENAPA TIDAK MAU MENANAM POHON DI LAHAN ANDA SENDIRI BILA ANDA MENDAPAT DUKUNGAN DARI PIHAK LUAR?</p>			<p><i>SETELAH SUB-PERTANYAAN 3 INI, LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 11</i></p>
<p>4. ENIS APA YANG ANDA MAU TANAM DI LAHAN ANDA SENDIRI; URUTKAN DARI YANG PALING PENTING?</p> <p>Petunjuk untuk Enumerator: Lihat Lembar Kode</p>	<p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p>		
<p>5. APA YANG ANDA BUTUHKAN/MINTAKAN UNTUK MENANAM POHON DI LAHAN ANDA SENDIRI?</p>	<p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p>	<p>1. Tenaga kerja tambahan</p> <p>2. Bibit</p> <p>3. Pupuk</p> <p>4. Racun</p> <p>5. Modal/dana, sebutkan jumlahnya _____</p> <p>6. Pelatihan/penyuluhan</p> <p>7. Alat</p> <p>8. Lain, sebutkan _____</p> <p>-99 saya tidak memberi tahu</p>	<p><i>ENUMERATOR:</i> <i>SETELAH SUB-PERTANYAAN 5 INI, LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 11</i></p>
<p>6. JENIS pohon APA YANG ANDA SUDAH TANAM DI LAHAN ANDA SENDIRI (YAITU KEBUN)? BERIKAN LUASAN UNTUK SETIAP JENIS POHON YANG SUDAH DITANAMI</p>	<p>1. a. (jenis) _____ b. (luasan) _____ ha</p> <p>2. a. (jenis) _____ b. (luasan) _____ ha</p>		
<p>7. APAKAH ANDA MAU MENANAM LEBIH BANYAK POHON DI LAHAN ANDA SENDIRI BILA ANDA MENDAPAT DUKUNGAN DARI PIHAK LUAR?</p>	<p>0 = TIDAK</p> <p>1 = YA</p> <p>-99 = Tidak memberi tahu</p>	<p><i>JIKA MENJAWAB = 0 (TIDAK), LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 8</i></p> <p><i>JIKA MENJAWAB = 1 (YA), LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 9</i></p> <p><i>JIKA SubP7 = -99, LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 11</i></p>	
<p>8. KENAPA TIDAK MAU MENANAM LEBIH BANYAK POHON DI LAHAN ANDA SENDIRI BILA ANDA MENDAPAT DUKUNGAN DARI PIHAK LUAR?</p>			<p><i>SETELAH SUB-PERTANYAAN 8 INI, LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 11</i></p>



<p>9. JENIS APA YANG ANDA MAU TANAM DI LAHAN ANDA SENDIRI?</p> <p>Petunjuk untuk Enumerator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lihat Lembar Kode - Urutkan jawaban dari yang paling penting. 	<p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p>	
<p>10. APA YANG ANDA BUTUHKAN/MINTAKAN UNTUK MENANAM LEBIH BANYAK POHON DI LAHAN ANDA SENDIRI?</p>	<p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p>	<p>1. Tenaga kerja tambahan</p> <p>2. Bibit</p> <p>3. Pupuk</p> <p>4. Racun</p> <p>5. Modal/dana, sebutkan jumlahnya _____</p> <p>6. Pelatihan/penyuluhan</p> <p>7. Alat</p> <p>8. Lain, sebutkan _____</p> <p>-99 Tidak memberi tahu</p>
<p>11. APAKAH ANDA MAU MENANAM POHON DI LAHAN LAIN (BUKAN LAHAN SENDIRI) BILA ANDA MENDAPAT DUKUNGAN DARI PIHAK LUAR?</p> <p>Petunjuk untuk Enumerator:</p> <p>Jelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah lahan milik umum atau komunal, bukan lahan yang dimiliki responden atau individu lain.</p>	<p>0 = TIDAK</p> <p>1 = YA</p> <p>-99 = tidak memberi tahu</p>	<p><i>JIKA MENJAWAB = 0 (TIDAK), LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 12</i></p> <p><i>JIKA MENJAWAB = 1 (YA), LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 13</i></p> <p><i>JIKA SubP11 = -99, LANJUT KE PERTANYAAN 7</i></p>
<p>12. KENAPA TIDAK MAU MENANAM POHON DI LAHAN DI LAHAN LAIN (BUKAN LAHAN SENDIRI) BILA ANDA MENDAPAT DUKUNGAN DARI PIHAK LUAR?</p>		<p><i>SETELAH SUB-PERTANYAAN 12 INI, LANJUT KE PERTANYAAN 7</i></p>
<p>13. DI LAHAN MANA POHON2 TERSEBUT ANDA USULKAN UNTUK DITANAM?</p> <p>Petunjuk untuk Enumerator:</p> <p>Pastikan responden memberi lokasi yang spesifik</p>	<p>a. _____</p> <p>b. _____</p> <p>c. _____</p>	
<p>14. JENIS APA YANG ANDA MAU TANAM DI POHON DI LAHAN LAIN (BUKAN LAHAN SENDIRI)</p> <p>Petunjuk untuk Enumerator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lihat Lembar Kode - Urutkan jawaban dari yang paling penting. 	<p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p>	
<p>15. APA YANG ANDA BUTUHKAN/MINTA UNTUK MENANAM POHON DI LAHAN LAIN?</p> <p>Petunjuk untuk Enumerator:</p> <p>Jelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah lahan milik umum atau komunal, bukan lahan yang dimiliki responden atau individu lain.</p>	<p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p>	<p>1. Tenaga kerja tambahan</p> <p>2. Upah / Gaji</p> <p>3. Bibit</p> <p>4. Modal/dana, sebutkan jumlahnya _____</p> <p>5. Pelatihan/penyuluhan</p> <p>6. Dikasih hak di atas lahan untuk dimanfaatkan</p> <p>7. Alat</p> <p>8. Lain, sebutkan _____</p> <p>-99 tidak memberi tahu</p>



PERTANYAAN 7. LAHAN PERTANIAN PERMANEN

<p>1. APAKAH ANDA MAU MENGELOLA / MEMPERLUAS LAHAN PERTANIAN PERMANEN BILA ANDA MENDAPAT DUKUNGAN DARI LUAR?</p>	<p>0 = TIDAK 1 = YA -99 = Tidak memberi tahu</p>	<p><i>JIKA MENJAWAB = 0 (TIDAK), LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 2</i> <i>JIKA MENJAWAB = 1 (YA), LANJUT KE SUB-PERTANYAAN 3</i> <i>JIKA SubP1 = -99, LANJUT KE PERTANYAAN 8</i></p>
<p>2. KENAPA TIDAK MAU MENGELOLA/ MEMPERLUAS LAHAN PERTANIAN PERMANEN BILA ANDA MENDAPAT DUKUNGAN DARI LUAR?</p>		<p><i>SETELAH SUB-PERTANYAAN 2 INI, LANJUT KE PERTANYAAN 8</i></p>
<p>3. JENIS TANAMAN APA YANG MAU DIKELOLA/ DIPERLUAS? Petunjuk untuk Enumerator: Pertanyaan ini terkait dengan lahan pertanian permanen, seperti sawah, kebun/ladang sayur, dan lainnya, sehingga tanaman keras seperti karet tidak bisa disebut di sini.</p>	<p>a. _____ b. _____</p>	
<p>4. BERAPA LUAS PALING BANYAK (HA) YANG DAPAT ANDA KELOLA TANPA MENGUPAH ORANG? Petunjuk untuk Enumerator: Tekankan kondisi "tanpa mengupah" ini, baik mengupah pekerja dari dalam maupun luar kampung.</p>	<p>_____ ha</p>	
<p>5. APA YANG ANDA BUTUHKAN UNTUK MENGELOLA / MENINGKATKAN LUAS LAHAN TERSEBUT KE LUASAN PALING BANYAK TERSEBUT?</p>	<p>1. _____ 2. _____ 3. _____</p>	<p>1. Bibit 2. Pupuk 3. Racun 4. Modal/dana, sebutkan jumlahnya _____ 5. Pelatihan/penyuluhan 6. Alat 7. Irrigasi 8. Lain, sebutkan _____ -99 tidak memberi tahu</p>

PERTANYAAN 8. PENUTUP

TERIMA KASIH ATAS KESABARAN BAPAK/IBU DALAM MENJAWAB PERTANYAAN TERSEBUT. KAMI SANGAT BERTERIMA KASIH. KESEDIAAN BAPAK/IBU DALAM MENJAWAB PERTANYAAN2 TERSEBUT AKAN SANGAT MEMBANTU LEMBAGA PENDAMPING DALAM Mendukung MASYARAKAT DI BERAU DALAM MENGELOLA HUTAN DAN SUMBER DAYA ALAM DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

1. APAKAH ANDA PUNYA PERTANYAAN UNTUK LEMBAGA PENDAMPING? BILA IYA, SILAHKAN TANYAKAN

2. APAKAH ADA PUNYA KOMENTAR LAIN?

PERTANYAAN 9. WAKTU BERAKHIRNYA SURVEI: (24-JAM; HH:MM) |__|_|:|__|_|



LAMPIRAN 9.2

LEMBAR KODE UNTUK ENUMERATOR

BAGIAN C. DEMOGRAFI DAN KARAKTERISTIK SOSIO-EKONOMI

Pertanyaan 1. Informasi rumah tangga

Subpertanyaan 2. Status pernikahan

1. Menikah 2. Duda atau janda	3. Lainnya, sebutkan _____
----------------------------------	----------------------------

Subpertanyaan 4. Tingkat pendidikan

0. Tidak sekolah 1. Sekolah Dasar SD Kelas 1 2. Sekolah Dasar SD Kelas 2 3. Sekolah Dasar SD Kelas 3 4. Sekolah Dasar SD Kelas 4 5. Sekolah Dasar SD Kelas 5 6. Sekolah Dasar SD Kelas 6	7. Sekolah Menengah Pertama SMP Kelas 1 8. Sekolah Menengah Pertama SMP Kelas 2 9. Sekolah Menengah Pertama SMP Kelas 3 10. Sekolah Menengah Atas SMA Kelas 1 11. Sekolah Menengah Atas SMA Kelas 2 12. Sekolah Menengah Atas SMA Kelas 3 13. Kuliah /Perguruan Tinggi
--	--

Subpertanyaan 5. Pekerjaan utama dan Subpertanyaan 6. Pekerjaan sampingan

1. Berladang (petani) 2. Buruh tani di ladang 3. Peternak (termasuk kambing, sapi, ayam, dll.) 4. Pengumpul/pedagang 5. PNS (contoh guru, dll.) 6. Pegawai swasta 7. Pengangguran 8. Montir 9. Tukang bangunan 10. Sopir ojek 11. Sopir angkot 12. Buruh panggul kayu	13. Buruh penebang kayu 14. Nelayan 15. Penjaga kedai 16. Berburu 17. Mencari ikan 18. Mencari emas 19. Mengumpulkan sarang burung 20. Mengumpulkan gaharu 21. Berkebun 22. Buruh tani di kebun 23. Lainnya, sebutkan _____
--	---



BAGIAN D. POLA PENGGUNAAN LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM DAN PERUBAHANNYA

Pertanyaan 5. Jenis Pohon

Subpertanyaan 4 dan Subpertanyaan 7

1. Melinjo	12. Sengon/Albacia
2. Kopi	13. Mahoni
3. Durian	14. Mangga
4. Salak	15. Alang alang
5. Pisang	16. Rumput ternak
6. Coklat	17. Kelapa
7. Petai	18. Rambutan
8. Kapas	19. Manggis
9. Jengkol	20. Karet
10. Cengkeh	21. Sawit
11. Jati	22. Lainnya, sebutkan _____



LAMPIRAN 9.3

DESKRIPSI POLA PENGGUNAAN LAHAN RUMAH TANGGA

Petunjuk untuk Enumerator:

Mulai dari 5 tahun yang lalu (bila responden sudah tinggal di kampung 5 tahun yang lalu). Tanyakan berapa plot lahan yang “dimiliki” oleh responden. Satu sel atau kotak di bawah mewakili satu plot lahan. Informasi yang dikumpulkan di sini adalah berapa kali responden membuka area berhutan. Contohnya, bila responden mengatakan bahwa mereka memiliki 1 plot lahan seukuran 2 hektar tetapi lahan tersebut dibuka sedikit demi sedikit setiap tahunnya, Anda harus mendapatkan informasi dari responden berapa lama atau berapa tahun yang diperlukan responden sampai lahannya mencapai ukuran 2 hektar. Bila responden melakukannya 3 kali atau 3 tahun maka Anda harus menghitungnya sebagai 3 plot atau 3 sel/kotak pada gambar di bawah.

Untuk setiap sel atau kotak, beri kode L, LYD, K, atau S (lihat penjelasan di bawah) dan luas setiap plot (dalam hektar). Bila responden tidak tahu luas lahannya dalam hektar, tanyakan luasannya dalam kaleng dan konversikan ke dalam hektar (1 kaleng = ½ hektar). Hitung total luas semua sel/kotak dan tulis angka total ini kedalam kuesioner.

Kode :

- L = Ladang
- LYD = Ladang yang ditanami (padi) setiap tahun
- K = Kebun
- S = Lahan pertanian permanen (sawah)



Setelah mendapatkan informasi mengenai situasi 5 tahun yang lalu, tambahkan pada gambar jumlah lahan yang dibuka dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Lanjutkan dengan kode lahan dan luasannya. Hitung jumlah total plot lahan dan luasannya. Pindahkan angka ini ke dalam kuesioner. Perlu diperhatikan bahwa ada kemungkinan beberapa plot telah berubah penggunaannya sejak 5 tahun yang lalu, misalnya ladang menjadi kebun.





BAB 10

Penyusunan Kesepakatan Masyarakat dan Perjanjian Kerja Sama



REFLEKSI PENULIS

"...nantuk cita-cita tam, merapikan dokoan lahan, rima' tetu'u di untuk pengebeluman ulun Merabu...."

Terjemahan bebas dari kalimat tersebut adalah: "...membangun harapan bersama, menata ruang dan lahan, mengelola dan menjaga hutan, kesungguhan untuk mewujudkan perubahan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Merabu...."

Itulah komitmen warga Kampung Merabu dalam mendukung Program Karbon Hutan Berau. Pada pertengahan bulan November 2013, komitmen tersebut dituangkan kedalam Dokumen Kesepakatan dan ditandatangani oleh seluruh 55 kepala keluarga. Warga kampung akan mewujudkan komitmen tersebut melalui 18 tindakan utama.

Komitmen dan kesepakatan tersebut tidak dicapai dengan mudah. Prosesnya cukup sulit, alot, dan menegangkan ketika mendiskusikan isu mengenai penataan ruang dan lahan. Sebagian besar warga awalnya mengartikan penataan lahan sebagai pelarangan dan pembatasan kegiatan perladangan yang telah mereka lakukan secara turun temurun. Mereka khawatir penataan lahan akan mengancam kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga dan anak cucu di kemudian hari.

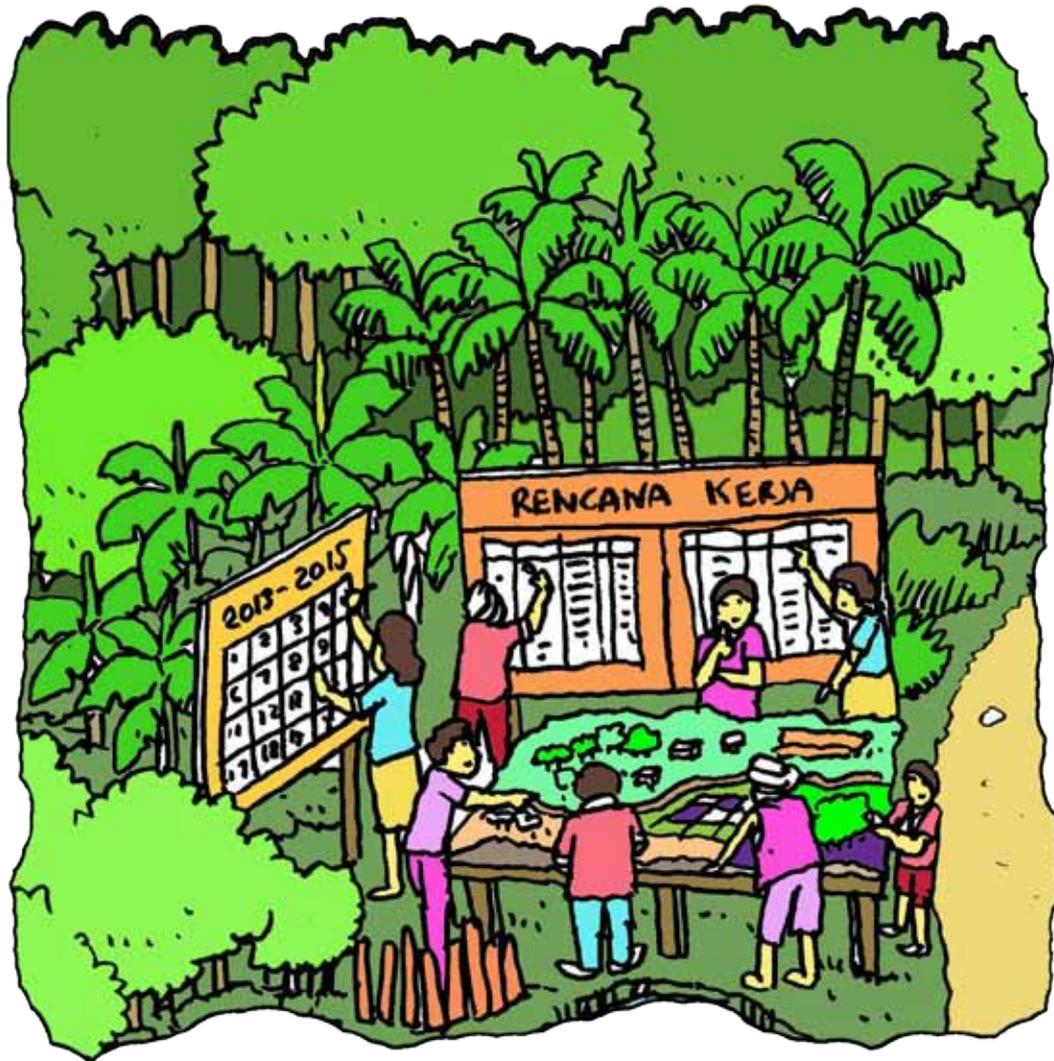
Yang menjadi pertanyaan adalah berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan suatu keluarga di Kampung Merabu? Beberapa warga memaparkan sistem perladangan yang mereka anut selama ini. Ternyata kebutuhan setiap keluarga untuk lahan perladangan tidak lebih dari 4 lahan. Setiap musim berladang, setiap keluarga membuka 1 lahan dengan luas tidak lebih dari 1 hektar. Empat lahan ini yang dikelola dengan sistem gilir balik dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Beberapa warga memiliki lahan lebih dari empat karena mereka menggunakan lahan tersebut untuk menanam karet atau buah-buahan, atau karena mencadangkan lahan-lahan tersebut untuk kebutuhan anak cucu mereka di kemudian hari.

Proses penataan lahan akhirnya berujung di sebuah kesepakatan, yang dijamin oleh pemerintah kampung, di mana setiap keluarga mendapat alokasi 4 hektar lahan perladangan, yang akan dikelola dengan sistem gilir balik, 2 hektar untuk kebun karet, serta 2 hektar untuk kebun buah dan wanatani. Lahan cadangan juga dialokasikan untuk keluarga baru dengan alokasi seperti di atas. Melalui proses diskusi dan membangun kesepakatan ini, warga juga makin memahami apa yang dimaksud dengan penataan ruang dan lahan.



Setelah makna dan proses penataan ruang dan lahan ini dipahami, warga kemudian mendiskusikan tindakan atau aksi yang akan mereka lakukan untuk mengelola dan menjaga hutan. Diskusi mengenai isu ini berjalan lebih mudah karena warga memang tergantung dengan hutan dalam keseharian kehidupannya. Warga selanjutnya menuangkan aksi yang akan mereka lakukan bersama kedalam dokumen kesepakatan.

Seorang warga kemudian bertanya mengenai makna komitmen. Pendamping memberi penjelasan bahwa komitmen itu adalah *"...sikap dan kesediaan diri untuk memegang teguh visi serta kemauan, serta kesungguhan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada untuk mewujudkan visi tersebut..."* Mendengar penjelasan ini, warga tersebut menyimpulkan: "Kalau begitu, komitmen itu seperti janji yang kita berikan saat kita menikah ya, Pak..." Sesungguhnya komitmen menata ruang dan lahan, mengelola dan menjaga hutan, serta kesungguhan untuk melakukan perubahan sama sakralnya dengan janji pernikahan sehingga harus dijalankan dengan sepenuh hati.



Pada tahap sebelumnya, fasilitator sudah merancang proses dan mendampingi warga kampung untuk memutuskan apakah mereka sepakat untuk terlibat dalam PKHB dan, bila mereka sepakat, fasilitator akan membantu mereka untuk menyusun rencana kerja. Pada tahap penyusunan kesepakatan masyarakat dan perjanjian kerja sama, fasilitator akan merancang proses dan mendampingi warga dalam menuangkan kesepakatannya dalam suatu dokumen dan membuat perjanjian kerja sama dengan penyandang dana.

Bab ini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesepakatan masyarakat dan perjanjian kerja sama, mengapa kedua dokumen ini perlu dirumuskan dan dipahami dengan baik, dan mengapa komitmen masyarakat perlu diinternalisasi oleh setiap warga kampung. Bab ini juga menguraikan mengapa kedua dokumen ini perlu dikomunikasikan dan mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan terkait.

Kesepakatan Masyarakat

Kesepakatan masyarakat adalah dokumen yang merangkum komitmen warga untuk melakukan aksi (perubahan) guna mewujudkan mimpi bersama memperbaiki kondisi mereka dan memperbaiki atau mempertahankan kondisi hutan dan sumber daya alam yang terdapat di sekeliling mereka. Dokumen kesepakatan mengurai komitmen yang telah dan akan dijalankan oleh warga, misalnya komitmen untuk mempertahankan identitas mereka sebagai masyarakat yang menjaga dan mengelola hutan, komitmen untuk membatasi perladangan berpindah guna mengurangi tekanan terhadap hutan, mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan, dan memperbaiki tata kelola dalam kampung. Dokumen kesepakatan yang dikembangkan oleh warga Kampung Long Duhung dapat dilihat di Kotak 10.1 sebagai contoh.

Agar dapat mengikat komitmen seluruh warga, kesepakatan masyarakat harus dirumuskan, yaitu dituangkan dalam bentuk tertulis, dan diinternalisasi dengan baik. Ada beberapa alasan mengapa hal ini harus dilakukan: **Pertama**, keinginan untuk melakukan perubahan dan mewujudkan mimpi memerlukan usaha bersama seluruh warga, terutama bila perubahan-perubahan tersebut cukup mendasar dan mengubah kebiasaan warga, misalnya menghentikan pembukaan ladang di atas lahan yang masih berhutan. Bila kesepakatan masyarakat tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan tidak diinternalisasi melalui proses yang baik, maka pelanggaran dapat terjadi dan akan mempengaruhi semangat seluruh warga, terutama bila pelanggaran tersebut dibiarkan saja.

Kedua, penghargaan dan dukungan pendanaan yang dikembangkan dalam PKHB untuk masyarakat adalah berbasis kinerja. Pelanggaran yang terjadi akan mempengaruhi dukungan pendanaan pada tahun berikutnya yang akan berdampak pada seluruh warga, termasuk warga kampung yang menjaga komitmennya.



Kotak 10.1

KESEPAKATAN MASYARAKAT KAMPUNG LONG DUHUNG

Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Program Karbon Hutan Berau (PKHB) yang bertujuan untuk mengembangkan model pembangunan berkelanjutan yang rendah emisi, dan dengan mempertimbangkan komitmen masyarakat untuk mewujudkan Pembangunan Kampung Long Duhung sebagai kampung yang selaras dengan iklim di Kabupaten Berau, maka kami, Masyarakat Long Duhung, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Berkomitmen bersama untuk mewujudkan visi masyarakat kampung yang maju dan mandiri yang memiliki ekonomi kuat, sumberdaya alam hutan yang tetap lestari, pendidikan yang berkualitas dengan persatuan kampung yang kuat.
2. Untuk mewujudkan visi tersebut, Masyarakat Long Duhung akan memegang teguh pada perencanaan tata guna lahan dan berpedoman pada perencanaan pembangunan kampung yang termaktub dalam Rencana Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Long Duhung yang telah disepakati sebelumnya.
3. Bahwa untuk mencapai visi tersebut, Masyarakat Kampung Long Duhung sepakat untuk bekerja sama dengan The Nature Conservancy untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kesepakatan kerjasama ini akan berlangsung selama 3 tahun dan dapat dilanjutkan jika kedua belah pihak sepakat dan ada ketersediaan sumber daya para pihak dalam mendukung visi Kampung Long Duhung.
4. Dalam menjalankan kesepakatan kerjasama ini, Masyarakat Long Duhung bersepakat sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kesepakatan kerja sama tersebut dengan sungguh-sungguh.
 - b. Sebagai bentuk komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan sumber daya hutan, masyarakat Long Duhung tidak akan membuka lahan baru untuk ladang baik di dalam maupun di luar wilayah Kampung Long Duhung.
 - c. Untuk lahan perladangan, masyarakat Long Duhung akan memperkuat nilai-nilai kearifan tradisional dengan melakukan sistem ladang berpindah. Setiap keluarga akan berladang di 1 tempat setiap tahun, paling luas 1 hektar, dan membatasi perladangan berpindah di 7 tempat saja. Lahan perladangan ini digunakan untuk menanam padi sebagai tanaman utama.
 - d. Bagi keluarga baru yang belum memiliki ladang seperti pada poin c, maka mereka dapat membuka lahan baru dengan jumlah lahan paling banyak 7 tempat dengan luasan 1 hektar setiap keluarga.



- e. Pembukaan lahan baru bagi keluarga yang belum memiliki lahan pada poin d di atas, dilakukan setiap tahun pada 1 tempat. Pembukaan lahan untuk ladang ini atas sepengetahuan Pemerintah Kampung Long Duhung
- f. Membuka lahan perkebunan karet di lokasi yang telah disepakati, seperti di dalam rencana tata guna lahan kampung, dan akan ditata sehingga kebun karet setiap keluarga terletak di satu tempat untuk memudahkan pemeliharaan, penyadapan dan pemasaran di masa depan. Luasan untuk lahan karet tersebut sebesar 2 hektar untuk setiap keluarga.
- g. Jika saat ini satu keluarga mempunyai lahan di lokasi pengembangan kebun karet tersebut di atas sebanyak lebih dari satu tempat dengan luasan lebih dari 2 hektar, maka lahan tersebut akan dialihkan kepada keluarga terdekat atau keluarga lain yang belum mempunyai lahan.
- h. Mengalokasikan lahan cadangan untuk lahan karet bagi keluarga baru. Lahan cadangan ini akan dimasukkan ke dalam peta tata guna lahan Kampung Long Duhung. Pembukaan lahan untuk perkebunan karet bagi keluarga baru tersebut akan dilakukan atas pengetahuan dan persetujuan Pemerintah Kampung Long Duhung.
- i. Apabila saat ini satu keluarga memiliki lahan di lebih dari 7 tempat, tidak berarti hak keluarga tersebut atas lahan tersebut hilang. Lahan tersebut masih menjadi milik keluarga yang membuka lahan dan dapat diperuntukkan untuk kebun (penanaman pohon buah-buahan, karet, kayu, dll) atau pertanian permanen (sawah, kebun sayur, dll.)
- j. Membuat Peraturan Kampung untuk mengatur sanksi yang akan dikenakan bila terjadi pelanggaran terhadap butir-butir kesepakatan ini.
- k. Dokumen kesepakatan ini dapat ditinjau jika pelaksanaannya menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat, seperti gagal panen di area bekas ladang, atau bila kegiatan ekonomi yang dikembangkan tidak meningkatkan ekonomi masyarakat.

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan bersama.

Long Duhung,

Kepala Kampung,

Ketua Adat,

Ketua BPK

Misak Lungui

Penandatangan Kesepakatan (seluruh KK di Long Duhung)



Ketiga, dokumen kesepakatan akan mempermudah proses komunikasi antar warga: antar warga kampung yang lama dengan warga kampung yang baru, misalnya pendatang yang baru menetap; dan antara warga kampung dengan pihak lain, baik warga kampung tetangga maupun pihak pemangku kepentingan terkait.

Terakhir, kesepakatan dan komitmen masyarakat ini diharapkan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selama jangka waktu tersebut, ingatan warga mengenai beberapa butir kesepakatan tertentu dapat hilang atau melemah sehingga kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan didokumentasikan dengan baik.

Selain alasan-alasan penting tersebut di atas, dokumen kesepakatan ini juga penting bagi fasilitator karena selama proses pendampingan fasilitator perlu mendapatkan pernyataan dari warga bahwa mereka sepakat untuk terlibat dalam inisiatif PKHB, berdasarkan keinginan mereka sendiri dan tanpa paksaan.

Dokumen kesepakatan merupakan dokumen utama dari puncak proses pendampingan yang dilakukan. Karena pentingnya kesepakatan ini, proses penyusunan dan pengesahannya perlu dikawal dengan baik sehingga warga kampung memberikan persetujuannya tanpa ada paksaan dan memahami bahwa mereka bertanggung jawab untuk menjalankan komitmen tersebut dengan sungguh-sungguh.

Komitmen ini selanjutnya perlu diinternalisasi oleh seluruh warga. Proses internalisasi meliputi proses meningkatkan pemahaman warga kampung mengenai komitmen yang akan dilaksanakan bersama dan proses mengikat kesepakatan tersebut melalui cara atau mekanisme yang paling sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Setiap warga tidak dapat diharapkan untuk melaksanakan komitmen yang diuraikan di dalam dokumen kesepakatan bila mereka belum betul-betul memahami mengapa komitmen tersebut harus dilakukan, mengapa mereka harus mengubah praktik atau perilaku tertentu, dan apa manfaatnya bagi mereka. Proses peningkatan pemahaman ini dapat dilakukan oleh fasilitator melalui diskusi kelompok atau interaksi perorangan, atau dilakukan oleh tokoh masyarakat, baik kepala kampung, ketua adat, pemuka agama, tokoh perempuan, atau pemuda. Peranan tokoh-tokoh ini sangat penting dalam meningkatkan pemahaman warga.

Kesepakatan dapat diikat melalui beberapa cara, yaitu melalui cara tradisional dan non-tradisional. **Pertama**, komitmen warga dapat diikat melalui pelaksanaan proses ritual, yaitu pelaksanaan upacara, ritual adat, atau mekanisme lain yang sesuai dengan tradisi setempat. Fasilitator perlu menemukenali upacara, ritual, atau tradisi sosial budaya setempat yang memiliki arti mendalam bagi masyarakat. Di beberapa tempat, upacara atau perayaan adat,



kaya dengan ritual dan simbol-simbol yang sangat berarti dan dihormati oleh semua warga. Pelaksanaan proses ritual atas terbangunnya kesepakatan ini dapat membantu mengikat komitmen masyarakat dan menandai babak penting dalam kehidupan mereka.

Kedua, komitmen warga dapat diikat melalui proses penandatanganan. Untuk mengikat seluruh warga, dokumen kesepakatan dapat ditandatangani oleh setiap perwakilan keluarga atau setiap orang dewasa dalam kampung. **Ketiga**, komitmen warga dapat diikat dengan peraturan pemerintah kampung atau peraturan adat. Peraturan ini juga akan menguraikan sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar.

Fasilitator perlu mendiskusikan ketiga kemungkinan tersebut di atas dengan tokoh dan warga untuk memastikan bahwa cara yang dipilih sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Kombinasi cara, terutama kombinasi cara tradisional dan non-tradisional, disarankan untuk dilakukan sehingga memperkuat komitmen warga, terutama untuk masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya dan tradisi. Keterlibatan dan komitmen dari tokoh adat, agama, dan pemerintah kampung, yang dihormati oleh warga dalam pelaksanaan seluruh proses akan membantu mengikat komitmen seluruh warga, mempermudah proses perubahan perilaku yang diharapkan, dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Komitmen yang sudah disepakati bersama, baik dalam bentuk dokumen kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh warga kampung, peraturan kampung, atau peraturan adat, selanjutnya dapat dicetak dan ditempelkan di tempat-tempat penting dalam kampung sebagai pengingat.

Perjanjian Kerja Sama

Pada tahap sebelumnya fasilitator sudah mendampingi warga kampung dalam menyusun rencana kerja. Rencana kerja yang sudah final selanjutnya perlu diajukan kepada penyandang dana.

Pada saat ini, ada beberapa lembaga penyandang dana yang mendukung masyarakat untuk terlibat dalam inisiatif PKHB atau REDD+. Sebagai hasil proses negosiasi pengalihan utang pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika, yang difasilitasi oleh The Nature Conservancy (TNC) dan World Wide Fund for Nature (WWF), tersedia dana sekitar USD 28 juta atau sekitar 280 miliar rupiah untuk mendukung upaya konservasi, restorasi, dan pengelolaan hutan tropis, terutama di Kabupaten Berau, Kapuas Hulu, dan Kutai Barat untuk kurun waktu sekitar 10 tahun. Dana ini dapat dipakai untuk mendukung keterlibatan masyarakat Berau dalam PKHB.

Rencana kerja dan proposal masyarakat kemudian perlu diajukan kepada Yayasan KEHATI, sebagai administrator dana tersebut. Dalam pengajuan rencana kerja dan proposal, warga kampung perlu membentuk badan hukum dalam bentuk perkumpulan atau yayasan, atau



warga dapat meminta bantuan lembaga lain yang sudah berbentuk badan hukum yayasan atau perkumpulan untuk bertindak sebagai pendamping mereka dalam mengajukan rencana kerja dan proposal tersebut kepada Yayasan KEHATI. Jika lembaga pendamping tersebut mendapatkan dana dari Yayasan KEHATI, maka dana itu akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja warga. Selain itu, (TNC) juga memberikan dana untuk mendukung keterlibatan masyarakat Berau dalam inisiatif PKHB. Selain sumber-sumber dana ini, beberapa mekanisme penyaluran dana sedang dikembangkan oleh beberapa lembaga di tingkat nasional dimana dana-dana ini rencananya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terlibat dalam inisiatif REDD+ dalam waktu dekat.

Bila rencana kerja disetujui, penyandang dana akan merumuskan perjanjian atau kontrak kerja sama. Perjanjian atau kontrak kerja sama adalah dokumen yang secara hukum mengikat penyandang dan penerima dana dalam kurun waktu tertentu. Perjanjian ini akan merinci persyaratan dan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Setiap penyandang dana memiliki format perjanjian kerja sama yang berbeda-beda. Fasilitator perlu membantu warga kampung untuk memahami isi perjanjian yang diajukan oleh penyandang dana, syarat pemberian dan pemakaian dana, dan ketentuan-ketentuan lain yang harus diikuti selama masa perjanjian. Fasilitator juga harus memastikan bahwa warga memahami dan dapat memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan, misalnya frekuensi dan format laporan yang harus diserahkan kepada penyandang dana serta adanya rekening bank dan sistem pengelolaan keuangan. Selama proses ini, fasilitator perlu menjajaki kemungkinan perwakilan penyandang dana untuk berdiskusi langsung dengan warga kampung dan memastikan bahwa masukan dari warga dapat diakomodasi ke dalam dokumen perjanjian. Setelah seluruh isi perjanjian disepakati, maka perjanjian tersebut dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Komunikasi dan Dukungan dari Pihak Pemangku Kepentingan di Luar Kampung

Mengingat pentingnya dokumen kesepakatan masyarakat dan perjanjian kerja sama ini, kedua dokumen perlu dikomunikasikan kepada para pihak pemangku kepentingan terkait di luar kampung dan mendapat dukungan dari mereka. Para pemangku kepentingan mencakup pimpinan dan warga kampung lain, pemerintah kecamatan dan kabupaten, perwakilan PKHB, dinas pemerintah terkait, perusahaan pemegang izin yang relevan, dan pihak ketiga yang diminta untuk ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan masyarakat.

Dukungan dari para pemangku kepentingan ini sangat penting mengingat wilayah kampung di Berau, dan banyak wilayah kampung lain di Indonesia, terletak di dalam dan di sekitar kawasan hutan negara dan hak pengelolaannya mungkin sudah diberikan kepada perusahaan. Wilayah kampung warga yang terlibat dalam PKHB juga kemungkinan berbatasan dengan wilayah kampung lain sehingga komitmen warga mungkin ada yang akan berimplikasi terhadap warga



kampung tetangga. Dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut akan memudahkan warga kampung untuk menjalankan komitmen dan rencana kerjanya, dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Bila kedua dokumen dapat disahkan pada saat bersamaan, melalui cara atau mekanisme yang sudah disepakati warga, maka para pemangku kepentingan terkait dapat diundang untuk mengikuti acara pengesahan tersebut. Pelaksanaan acara ini sebaiknya juga direkam dan didokumentasikan dengan baik oleh fasilitator sehingga dapat dikomunikasikan dengan pihak lain secara lebih luas dan dapat dipakai sebagai bahan rujukan di kemudian hari.



RANCANGAN PROSES

Rancangan proses di bawah mengurai proses yang dapat dipakai oleh fasilitator dalam mendampingi warga dalam menyusun dokumen kesepakatan, mengembangkan mekanisme untuk membantu proses internalisasi komitmen ini oleh seluruh warga kampung, dan untuk mengkaji dan memahami perjanjian kerja sama yang diusulkan oleh penyandang dana.

1. Menyusun Kesepakatan Bersama Masyarakat



Persiapan

Sebelum melakukan proses ini, fasilitator perlu mendiskusikan mekanisme perumusan kesepakatan masyarakat. Fasilitator dianjurkan untuk mengusulkan pembentukan Tim Perumus. Bila usulan ini diterima maka fasilitator dapat membantu warga dalam memilih 6-8 orang yang akan diberi tugas untuk merumuskan rancangan kesepakatan. Pastikan di dalam susunan Tim Perumus tersebut ada perwakilan dari pemerintah kampung, adat, perempuan, dan pemuda. Akan lebih baik bila di dalam Tim Perumus juga ada perwakilan lembaga kampung (yang akan mempertanggungjawabkan kegiatan dan pemakaian dana kepada lembaga penyandang dana) dan kelompok-kelompok masyarakat yang akan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan seperti yang diuraikan dalam rencana kerja.



Tujuan

- Membantu Tim Perumus dalam menyusun rancangan kesepakatan masyarakat dan mendiskusikan pilihan-pilihan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.
- Membantu Tim Perumus dalam merancang proses untuk mengkonsultasikan rancangan kesepakatan dan pilihan pengesahan dengan seluruh warga kampung.



Alat bantu

- Kertas plano
- Spidol
- Dokumen yang berisi mimpi masyarakat dan visi kampung
- Model tata guna lahan 3 dimensi
- Dokumen rencana kerja
- Kesepakatan masyarakat Long Duhung (sebagai contoh)



Waktu 4 jam

Proses

- Jelaskan tujuan pertemuan dan hasil yang diharapkan.
- Minta 2 atau 3 peserta untuk mengingat dan menceritakan kepada seluruh peserta perihal mimpi bersama masyarakat, visi kampung, penataan lahan yang telah disepakati, komitmen



masyarakat dalam melakukan kegiatan mitigasi, pengembangan ekonomi, dan peningkatan tata kelola (seperti yang tertuang dalam rencana kerja).

- Sarikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh 2-3 peserta tersebut, terutama pernyataan terkait komitmen masyarakat.
- Jelaskan kepada peserta mengapa komitmen tersebut perlu dirumuskan ke dalam sebuah dokumen dan diinternalisasi oleh seluruh warga.
- Uraikan dokumen kesepakatan masyarakat Long Duhung sebagai contoh.
- Sebagai contoh dokumen kesepakatan, fasilitator dapat menunjukkan dokumen kesepakatan masyarakat Long Duhung.
- Minta peserta untuk mendiskusikan butir-butir penting yang perlu dimasukkan ke dalam dokumen kesepakatan.
- Bantu peserta untuk membuat rumusan yang paling sesuai untuk setiap butir kesepakatan dan tuliskanlah di atas kertas plano.
- Ajak peserta untuk mengkaji seluruh butir kesepakatan yang sudah selesai dirumuskan dan melakukan perbaikan bila diperlukan.
- Diskusikan cara yang akan dipakai untuk mengesahkan kesepakatan ini (tanda tangan oleh setiap kepala keluarga, upacara adat, atau perumusan peraturan adat/kampung), kekuatan, kelemahan, dan tantangan cara-cara tersebut. Sarankan peserta untuk memilih kombinasi cara-cara tersebut.
- Diskusikan kapan dan bagaimana Tim Perumus akan mengkonsultasikan rancangan dokumen kesepakatan untuk mendapat masukan dari seluruh warga kampung (apakah konsultasi dilakukan dalam satu pertemuan besar dengan seluruh warga atau diskusi kelompok kecil dimana Tim Perumus membagi diri menjadi kelompok kecil dalam mendiskusikan hal ini sehingga Tim Perumus dapat menghemat waktu dan tenaga) dan mendiskusikan cara pengesahan yang diusulkan Tim Perumus.
- Bantu Tim Perumus dalam merancang proses dan mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam proses konsultasi ini.



2. Menyusun Perjanjian Kerja Sama



Persiapan

- Fasilitator perlu mengkaji tokoh-tokoh kunci yang harus dilibatkan dalam pertemuan ini. Pastikan ada perwakilan lembaga kampung (yang akan mempertanggungjawabkan kegiatan dan pemakaian dana kepada lembaga penyanggah dana) dan kelompok-kelompok masyarakat yang akan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan seperti yang diuraikan dalam rencana kerja. Pastikan ada perwakilan dari pemerintah kampung, adat, perempuan, dan pemuda.
- Bahasa yang dipakai dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh penyanggah dana, mungkin bernuansa hukum sehingga sulit dipahami oleh warga. Fasilitator perlu mempelajari perjanjian kerja sama tersebut dan menuliskan butir-butir utama dari perjanjian tersebut pada kertas plano sebagai bahan diskusi dengan warga. Butir-butir utama ini termasuk, misalnya, pertanggungjawaban keuangan, frekuensi pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan, kapan pencairan dana akan dilakukan dan persyaratannya.
- Bila memungkinkan, pada pertemuan ini diundang juga staf dari penyanggah dana yang bisa membantu memberikan penjelasan dan memastikan bahwa masukan dari peserta dapat diakomodasi dalam rancangan final perjanjian kerja sama.



Tujuan

- Jelaskan tujuan pertemuan dan hasil yang diharapkan.
- Membantu peserta untuk mengkaji dan memahami perjanjian kerja sama yang diajukan oleh lembaga penyanggah dana.
- Membantu peserta untuk merancang proses untuk mengkonsultasikan isi perjanjian kerja sama dengan seluruh warga kampung.



Alat bantu

- Kertas plano
- Spidol
- Rancangan dokumen perjanjian kerja sama yang disusun oleh lembaga penyanggah dana



Waktu 3 jam

Proses

- Jelaskan kepada peserta apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja sama.
- Jelaskan butir-butir utama perjanjian tersebut yang sudah dituliskan di atas kertas plano.
- Diskusikan butir-butir utama tersebut satu demi satu dan konsekuensinya kepada warga (bila ada). Pastikan bahwa peserta betul-betul memahami butir-butir utama dan konsekuensinya tersebut.



- Bila perwakilan dari lembaga penyanggah dana hadir, maka fasilitator dapat meminta perwakilan tersebut untuk menanggapi pertanyaan dan masukan dari peserta. Bila tidak ada perwakilan lembaga penyanggah dana, maka fasilitator perlu mencatat masukan atau pertanyaan dari peserta untuk disampaikan kepada lembaga penyanggah dana.
- Diskusikan dengan peserta mekanisme yang perlu digunakan untuk menyebarluaskan butir-butir utama dari perjanjian tersebut kepada warga kampung lain dan kapan kegiatan tersebut akan dilakukan.
- Diskusikan mekanisme finalisasi dan pengesahan perjanjian kerja sama, termasuk siapa yang akan menandatangani perjanjian kerja sama tersebut, kebutuhan administrasi yang harus disiapkan, dan lainnya.
- Bantu peserta atau kelompok yang ditunjuk untuk melakukan proses konsultasi dalam merancang proses dan mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam proses konsultasi tersebut.

BAHAN BACAAN

Babin, D. and A. Bertrand. 1998. *Managing Pluralism: Subsidiarity and Patrimonial Mediation*. Unasylva 194: 19-25.

Borrini-Feyerabend, G., M.T. Farvar, J.C. Nguingiri, and V.A. Ndangang. 2007. *Co-management of Natural Resources: Organising, Negotiating and Learning-by-Doing*. GTZ and IUCN. Kasperek Verlag, Heidelberg.

Kesepakatan Kerjasama Pemerintah Kampung Long Duhung dan The Nature Conservancy dalam Program Karbon Hutan Berau. 2013.

Kesepakatan Kerjasama Kerima' Puri dan The Nature Conservancy dalam Program Karbon Hutan Berau Rencana Kerja Kampung Merabu. 2014.





BAB 11

Pelaksanaan Kesepakatan,
Rencana Kerja, dan Pemantauan



REFLEKSI PENULIS

*“...Kesadaran adalah matahari,
Kesabaran adalah bumi,
Keberanian menjadi cakrawala,
Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata...”*
(“Paman Dobleng”, karya WS Rendra)

Dalam sebuah pertemuan di malam hari di Kampung Merabu, hampir semua kepala keluarga hadir untuk mendiskusikan rencana kerja yang akan mereka lakukan di tahun 2014. Berdasarkan kesepakatan yang mereka bangun bersama dengan The Nature Conservancy, warga kampung harus mengurai kesepakatan itu menjadi rencana kerja. Kesepakatan masyarakat berisi tiga butir utama, yaitu: kesediaan untuk menjaga dan mengelola hutan, kesediaan untuk turut serta mengurangi kerusakan hutan, dan kesungguhan untuk melakukan perubahan kehidupan.

Pada awal pertemuan, beberapa orang kembali mengingatkan peserta tentang potensi yang mereka miliki, cita-cita mulia mereka untuk kehidupan yang lebih baik, dan bagaimana mereka harus mewujudkan rangkaian kata-kata kesepakatan mereka kedalam sebuah karya nyata. Peserta mulai menyampaikan ide-ide mereka untuk menjalankan kesepakatan itu. Ide-ide tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga program kerja utama, yaitu: kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumberdaya hutan. Ketika seluruh aksi dan tindakan yang harus mereka lakukan terkumpul dan tergambar jelas, mereka tertegun sejenak. Sebagian orang terdiam. “...Ini kerja berat!,” gerundel beberapa peserta.

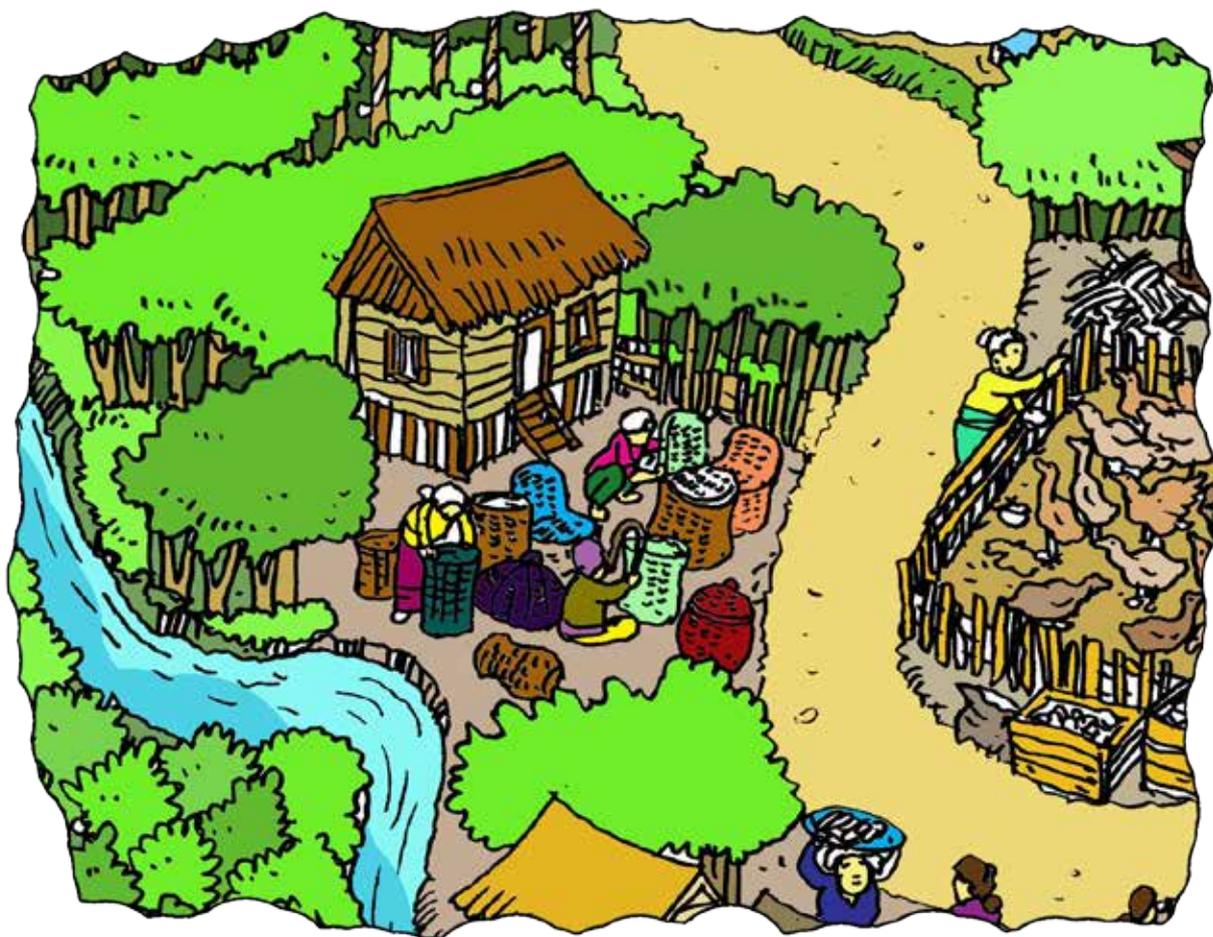
Warga kampung sudah sering mempercakapkan keinginan mereka atas perubahan untuk kehidupan yang lebih baik dan keinginan untuk mendapatkan hak pengelolaan atas hutan di sekitar kampung. Ketika keinginan tersebut dinyatakan dalam sebuah bentuk rencana kerja yang sistematis, mendapatkan dukungan pendanaan yang cukup, didampingi oleh fasilitator yang akan memastikan arah kerja tersebut sesuai rencana, warga kembali ditantang apakah mereka betul-betul berniat dan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan keinginan mereka tersebut.

Bagi sebagian besar orang yang terbiasa dengan pola kehidupan lama, yang menyerahkan diri pada aliran kehidupan yang berjalan tanpa berani melakukan perubahan sikap dan mentalnya, tentunya semua aksi dan tindakan itu dirasakan sebagai beban yang berat dan tidak masuk



akal. Apalagi dalam pelaksanaannya, beberapa pihak luar juga akan dilibatkan untuk mengukur perkembangan dan kemajuan setiap kegiatan yang akan mereka lakukan. Semua itu harus melalui proses yang cukup panjang, tidak mudah membalikkan telapak tangan.

Ketika pintu kesadaran akan kehidupan yang lebih baik sudah terbuka, berbagai mimpi sudah dibumikan, dan janji sudah diikrarkan, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah mewujudkan kata-kata tersebut dengan tindakan yang diyakini akan mengubah hidup mereka. Hanya dengan niat yang kuat, kerelaan untuk berkeringat dan meluangkan waktu akan membawa keberhasilan.



Setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh perwakilan warga dan penyandang dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang diusulkan sudah diterima, warga kampung selanjutnya melaksanakan berbagai kegiatan yang disepakati. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, warga harus memantau kinerja mereka. Pemantauan ini penting karena kinerja akan menentukan besaran dana yang akan diterima pada tahun selanjutnya, sekaligus mengukur seberapa besar perubahan positif yang telah berhasil dilakukan atas kehidupan mereka, kondisi kondisi sumber daya alam, dan dalam mewujudkan mimpi bersama. Pada tahap ini, fasilitator perlu mendampingi warga dalam melaksanakan kesepakatan dan rencana kerja, dan melakukan pemantauan.

Pelaksanaan Kesepakatan dan Rencana Kerja

Fasilitator mendukung lembaga kampung dan kelompok-kelompok warga yang dibentuk untuk melaksanakan komitmen dan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja dengan menggunakan kekuatan dan aset yang dimiliki, dan memanfaatkan dana yang berasal dari penyandang dana.

Dukungan yang perlu diberikan oleh fasilitator tergantung pada berbagai faktor, antara lain kemampuan lembaga kampung dan kelompok warga dan tingkat kepercayaan diri mereka. Intensitas pendampingan yang diberikan juga akan disesuaikan seiring berjalannya waktu, dimana intensitas pendampingan menurun dengan meningkatnya kemampuan dan kepercayaan diri warga. Pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator untuk tiga kategori kegiatan diuraikan di **Tabel 11.1**.

Pemantauan

Selain mendampingi warga kampung dalam melaksanakan komitmen dan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja, fasilitator mendampingi mereka dalam mengembangkan sistem pemantauan dan melakukan aktivitas pemantauan. Apa itu pemantauan? Mengapa dan kapan pemantauan harus dilakukan?

Pemantauan dapat didefinisikan sebagai pengamatan yang dilakukan secara berulang dan periodik terhadap parameter tertentu untuk memahami dampak suatu kebijakan atau strategi pengelolaan pada suatu sistem (Bosch *et al.*, 1996). Pemantauan terhadap parameter sumber daya alam memungkinkan pengelola, baik masyarakat, LSM, pemegang IUPHHK, atau badan pemerintah, memahami dampak keputusan dan kegiatan pengelolaan terhadap sumber daya alam tersebut. Pemantauan seharusnya merupakan kegiatan yang tidak sulit dilakukan mengingat manusia secara alami memantau dan mengamati lingkungan sekitarnya melalui, antara lain, penglihatan, pendengaran, dan penciuman (Alexandra *et al.*, 1996).



Tabel 11.1. Contoh berbagai pendampingan yang dapat dilakukan oleh fasilitator untuk tiga kategori kegiatan.

KATEGORI KEGIATAN	CONTOH KEGIATAN	PENDAMPINGAN
Mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembatasan perladangan berpindah (ladang tidak dibuka di atas lahan yang masih berhutan) ● Patroli atau pengamanan hutan untuk mengurangi atau memberantas pembalakan atau perburuan liar ● Penanaman pohon di sempadan sungai atau di lahan yang tandus ● Survei hutan atau keanekaragaman hayati ● Pemantauan cadangan karbon ● Penyusunan rencana pengelolaan Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu mengembangkan sistem pemantauan komitmen warga dalam membatasi perladangan berpindah ● Membantu mengembangkan sistem pemantauan dampak perladangan gilir balik terhadap kuantitas dan kualitas padi ladang yang dihasilkan ● Membantu memperkirakan jumlah bibit pohon yang perlu disiapkan untuk kegiatan penanaman ● Menghubungkan warga kampung dengan penyedia bibit berkualitas ● Membantu mengembangkan formulir yang akan dilengkapi oleh Tim Pengawas Lingkungan ● Membantu mengembangkan formulir survei hutan, karbon, atau keanekaragaman hayati ● Menghubungkan warga dengan LSM, kelompok warga, atau dinas pemerintah terkait ● Membantu warga dalam menyusun rencana pengelolaan Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan
Pengembangan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan kebun karet, coklat, buah-buahan, atau wanatani lainnya ● Pengembangan dan pengelolaan kebun bibit ● Budidaya sayur atau hasil pertanian lainnya ● Peternakan (ayam, bebek, kambing, sapi, dan lain-lain) ● Budidaya ikan air tawar ● Budidaya lebah madu ● Pengembangan hasil hutan non-kayu (rotan, bambu, dan lain-lain) ● Pengembangan ekowisata 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menghubungkan warga dengan LSM, kelompok warga, atau dinas pemerintah terkait ● Mengidentifikasi dan menata lahan yang sesuai untuk pengembangan pertanian, perkebunan, dan budidaya lainnya sehingga dampak terhadap hutan seminimal mungkin ● Memantau kesulitan dan tantangan apa yang dihadapi oleh warga dalam pengembangan ekonomi dan membantu mencari solusi ● Membantu warga dalam memantau harga dan memasarkan produk pertanian atau perkebunan yang dihasilkan ● Memberi masukan terhadap rencana-rencana warga



KATEGORI KEGIATAN	CONTOH KEGIATAN	PENDAMPINGAN
Penguatan kondisi pe- mungkin	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan budidaya pertanian, wana tani, atau peternakan ● Dukungan teknis untuk mendukung berbagai kegiatan pengembangan ekonomi, seperti pemberantasan hama, pemasaran hasil pertanian dan perkebunan, dan lain-lain ● Pelatihan survei hutan dan keanekaragaman hayati ● Pelatihan fasilitasi, mediasi, dan negosiasi ● Pelatihan dan dukungan teknis untuk pemetaan dan tata batas wilayah kampung ● Dukungan teknis dalam mendapatkan hak pengelolaan hutan desa atau hutan kemasayarakatan ● Dukungan teknis untuk mengembangkan Kesepakatan Pengelolaan Hutan secara Kolaboratif dengan pemegang ijin IUPHHK ● Pengembangan lembaga tingkat kampung yang akan mengelola dan menyalurkan dana program ● Pelatihan penulisan proposal ● Pelatihan dan dukungan teknis dalam mengembangkan sistem pengelolaan keuangan ● Penyebaran informasi dan pelaporan kegiatan dan keuangan kepada warga secara teratur 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menghubungkan warga dengan LSM, kelompok warga, atau dinas pemerintah terkait yang dapat memberikan pelatihan dan dukungan teknis yang dibutuhkan ● Memastikan agar warga dapat menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dengan baik ● Membantu mendapatkan informasi mengenai peraturan dan tahap-tahapan untuk mendapatkan hak pengelolaan ● Menghubungkan warga dengan pemegang ijin IUPHHK ● Membantu mempersiapkan warga untuk bernegosiasi dengan pihak lain ● Memastikan lembaga tingkat kampung dan kelompok mencatat pengeluaran dan pendapatan, dan menyimpan bukti-bukti pembayaran dengan baik ● Memeriksa catatan keuangan lembaga kampung dan kelompok dan memberi masukan untuk memperbaiki sistem. ● Membantu lembaga pengelola tingkat kampung dalam mempersiapkan informasi dan bahan-bahan yang perlu dilaporkan kepada seluruh warga.



Dalam mendukung keterlibatan masyarakat dalam inisiatif PKHB, ada dua jenis pemantauan akan dikembangkan. Pemantauan jenis pertama adalah **pemantauan internal**, yaitu pemantauan yang dikembangkan dan dilakukan oleh warga untuk memantau:

- Kinerja mereka dalam melaksanakan komitmen dan berbagai kegiatan yang diajukan dalam rencana kerja, dan
- Dampak kegiatan yang mereka lakukan terhadap tingkat kesejahteraan mereka dan kondisi hutan dan sumber daya alam lainnya, atau dengan kata lain, seberapa jauh kemajuan yang mereka capai dalam mewujudkan mimpi bersama mereka.

Pemantauan jenis kedua adalah **pemantauan eksternal**, yaitu pemantauan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pihak eksternal (penyandang dana dan pihak ketiga yang ditunjuk warga). Pemantauan eksternal dilakukan untuk menilai kinerja warga dalam melaksanakan komitmen dan melakukan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja. Hasil pemantauan akan digunakan untuk menentukan besaran dana yang akan mereka peroleh pada tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaannya, kedua jenis pemantauan ini tidak berdiri sendiri. Pemantauan eksternal juga harus melibatkan perwakilan warga dan akan memanfaatkan hasil pemantauan internal yang dilakukan oleh warga. Penentuan besaran dana juga akan dilakukan melalui proses diskusi dengan warga.

Walaupun kedua jenis pemantauan ini mempunyai dua tujuan yang berbeda, keduanya akan bermanfaat untuk warga bila hasil kedua pemantauan tersebut digunakan oleh warga sebagai bahan pembelajaran untuk memperbaiki strategi pengelolaan dan kinerja mereka selanjutnya. Kedua jenis pemantauan tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Pemantauan internal: Pemantauan untuk menilai kemajuan warga dalam mewujudkan mimpi

Pemantauan internal adalah pemantauan yang dikembangkan dan dilakukan oleh warga untuk memantau kinerja mereka dalam melaksanakan komitmen dan berbagai kegiatan yang diajukan dalam rencana kerja setiap tahunnya. Dengan melakukan pemantauan secara teratur, warga dapat mengetahui kinerja mereka dan mengidentifikasi dengan cepat bila pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu perlu diperbaiki. Contoh pemantauan internal yang dapat dikembangkan dapat dilihat di Tabel 11.2.

Pada Tabel 11.2 ada beberapa contoh pemantauan kegiatan ekonomi. Walaupun kinerja warga dalam mengembangkan ekonomi tidak dinilai dan tidak menentukan besaran pendanaan berbasis kinerja, warga perlu didampingi dalam mengembangkan sistem pemantauan yang sesuai mengingat pentingnya kegiatan pengembangan ekonomi ini dalam menyejahterakan mereka.



Pemantauan internal yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu cukup panjang (tiga tahun atau lebih), akan membantu warga mengkaji dampak kegiatan yang mereka lakukan terhadap tingkat kesejahteraan mereka dan kondisi hutan dan sumber daya alam lainnya. Misalnya, dengan memantau pemasukan dari kegiatan pengembangan ekonomi, seperti peternakan ayam, bebek, atau ikan, warga dapat mengkaji seberapa jauh kegiatan ini berkontribusi terhadap kesejahteraan rumah tangga yang terlibat. Dengan memantau berapa banyak pohon karet yang ditanam di bekas ladang, atau pohon buah-buahan dan kayu yang ditanam di lahan tandus tumbuh dengan baik di tahun-tahun berikutnya, mereka dapat mengamati perubahan bentang alam di wilayah tersebut.

Pemantauan internal dapat juga dimanfaatkan untuk mengkaji seberapa jauh kemajuan yang mereka capai dalam mewujudkan mimpi bersama mereka. Gambar mimpi bersama atau model tata guna lahan 3-Dimensi dapat digunakan sebagai alat untuk membantu kajian. Di Bagian Rancangan Proses, ada penjelasan tentang proses yang dapat dilakukan untuk mendampingi warga dalam mengembangkan dan melakukan pemantauan internal.

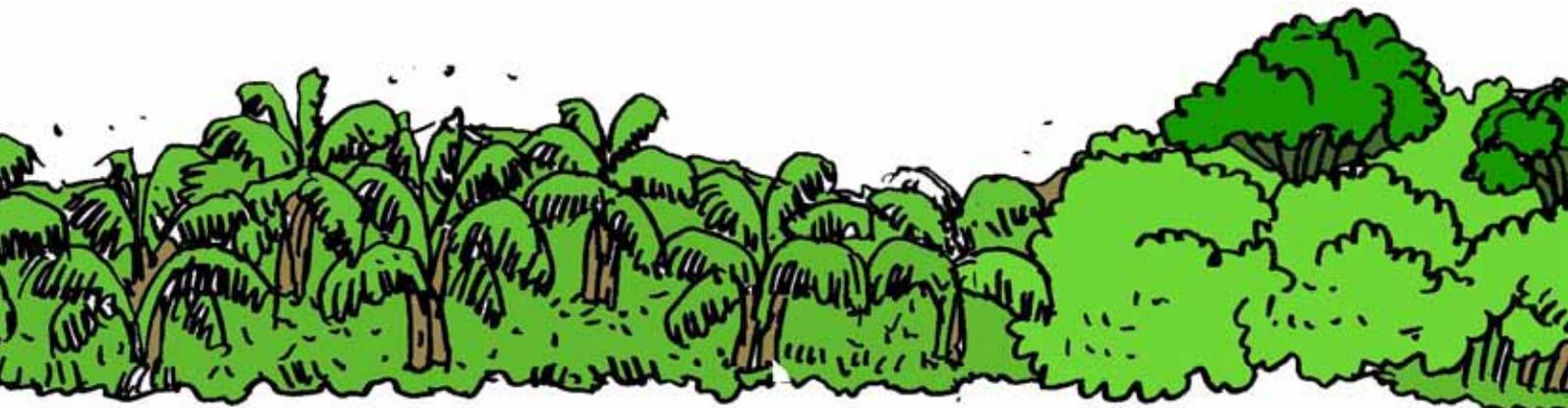
Fasilitator perlu membantu lembaga kampung atau kelompok warga dalam mengembangkan sistem pemantauan internal. Selain membantu dalam mengembangkan formulir atau tabel pemantauan yang sesuai, fasilitator perlu membantu anggota lembaga kampung atau kelompok warga melengkapi formulir atau tabel tersebut dengan teratur.

Selanjutnya, fasilitator juga perlu membantu mereka dalam mengkaji hasil pemantauan tersebut dan, bila diperlukan, mengidentifikasi tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja lembaga kampung atau kelompok warga. Hasil pemantauan harus disampaikan oleh lembaga pengelola atau kelompok warga pada seluruh warga secara teratur, sesuai dengan kesepakatan. Fasilitator perlu membantu lembaga pengelola atau kelompok warga dalam mempersiapkan dan menyampaikan hasil pemantauan, mengkaji kemajuan dan capaian yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, dan mengidentifikasi bagaimana mereka dapat memperbaiki capaian dan kinerja mereka.



Tabel 11.2. Contoh pemantauan internal

KEGIATAN DAN SASARAN	INDIKATOR	WAKTU	PEMANTAUAN
Mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam			
<p>Pembatasan perladangan berpindah (ladang tidak dibuka di atas lahan yang masih berhutan).</p> <p>Sasaran: semua KK, kecuali KK baru, menerapkan sistem gilir balik dan membuka ladang di areal bekas ladang.</p>	<p>Jumlah KK yang membuka ladang di lahan bekas ladang</p> <p>(atau: Jumlah KK yang membuka ladang di atas lahan yang masih berhutan)</p>	Tiap tahun	<p>Fasilitator dan lembaga pengelola sebelumnya perlu memetakan semua lahan ladang yang dimiliki setiap KK.</p> <p>Dengan menggunakan peta ladang ini, setelah warga selesai membuka ladang, Tim Pengawas Lingkungan memeriksa apakah KK membuka ladang di lahan bekas ladang atau lahan yang sebelumnya masih berhutan. Tim sebaiknya memeriksa setidaknya 50% dari total ladang yang dibuka. Pemilihan ladang, atau wilayah/areal perladangan, yang akan diperiksa, bisa dilakukan secara acak.</p> <p>Catatan: Bila jumlah KK tidak lebih dari 50 dan ladang terletak berdekatan, Tim bisa memeriksa seluruh ladang.</p>
<p>Pembatasan perladangan berpindah (luas maksimum ladang tidak melebihi 1 ha/plot).</p> <p>Sasaran: semua ladang yang dibuka (1 plot/KK/tahun) maksimum luasnya 1 ha/plot.</p>	Luas ladang yang dibuka tiap KK setiap tahun	Tiap tahun	<p>Tim Pengawas Lingkungan memperkirakan luas ladang yang dibuka oleh KK. Tim sebaiknya memeriksa setidaknya 50% dari total ladang yang dibuka. Pemilihan ladang, atau wilayah/areal perladangan, yang akan diperiksa, bisa dilakukan secara acak.</p>



KEGIATAN DAN SASARAN	INDIKATOR	WAKTU	PEMANTAUAN
Patroli hutan Sasaran: patroli dilakukan oleh 5 orang sebanyak 6x setahun, 2 hari/patroli (total 600 hari orang dalam setahun) dan menghasilkan 6 formulir laporan patroli yang lengkap.	Jumlah hari orang yang melakukan patroli dalam setahun	Tiap tahun	Tim Pengawas Lingkungan melengkapi formulir laporan yang berisi, antara lain: tanggal patroli, nama anggota Tim yang ikut patrol, rute yang ditempuh atau lokasi pemantauan.
	Jumlah formulir yang dilengkapi dengan baik oleh Tim Pengawas Lingkungan		Tim Pengawas Lingkungan melengkapi formulir dengan data atau informasi yang dikumpulkan selama patroli, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> ● Ada atau tidaknya, lokasi dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh warga desa atau orang luar di dalam hutan (pembalakan, pembukaan ladang, penangkapan burung yang dilindungi, penambangan emas, pengambilan gaharu, dan lain-lain), ● Ada atau tidaknya anak sungai yang terputus karena pohon yang ditebang oleh operator perusahaan kayu, ● Bagaimana pelanggaran ini ditindaklanjuti (kapan dilaporkan, ke siapa, dll).
	Pelaporan pelanggaran (perambahan liar, dll) kepada pemangku kepentingan yang relevan		Tim Pengawas Lingkungan melaporkan temuan pelanggaran kepada lembaga kampung yang sesuai, dan selanjutnya lembaga kampung menindaklanjuti ke pemangku kepentingan terkait, misalnya: Dinas Kehutanan, pemegang IUPHHK, kepala kampung pelaku pelanggaran, dan lain-lain
Penanaman pohon Sasaran Tahun 1: sebanyak 1,000 pohon ditanam di sepanjang sungai	Jumlah pohon yang ditanam	Tahun 1	Tim Pengawas Lingkungan atau Ketua Kelompok Rehabilitasi Hutan menghitung dan mencatat: <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah pohon yang ditanam (Tahun ke-1)
Sasaran Tahun ke-2: setidaknya 70% dari jumlah pohon yang ditanam tumbuh dengan baik	Jumlah pohon yang tumbuh	Tahun 2	<ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah pohon yang tumbuh atau jumlah pohon yang mati (Tahun ke-2) ● Jumlah pohon yang tumbuh dengan baik, atau jumlah pohon yang mati (Tahun ke-3)
Sasaran Tahun ke-3: setidaknya 60% dari jumlah pohon yang ditanam tumbuh dengan baik	Jumlah pohon yang tumbuh dengan baik	Tahun 3	



KEGIATAN DAN SASARAN	INDIKATOR	WAKTU	PEMANTAUAN
Pengembangan ekonomi			
Pengembangan dan pengelolaan kebun bibit Sasaran: peningkatan pendapatan kelompok tani	# Jumlah pendapatan yang diperoleh kelompok tani	Tiap tahun	Ketua kelompok atau anggota yang ditunjuk mengumpulkan data secara berkala, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah bibit yang ditanam ● Jumlah bibit yang tumbuh ● Jumlah bibit yang dijual, kapan ● Jumlah pendapatan ● Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh kelompok untuk bibit, pupuk, upah kerja (bila ada), transportasi, dan lain-lain
<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan dan pengelolaan: ● Peternakan (ayam, bebek, dan lain-lain) ● Peternakan kambing, sapi, dan lain-lain ● Budidaya ikan air tawar Sasaran: peningkatan pendapatan kelompok atau anggota kelompok	Jumlah pendapatan yang diperoleh kelompok atau anggota kelompok	Tiap tahun	Ketua kelompok atau anggota yang ditunjuk mengumpulkan data secara berkala, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah hewan yang diberikan kepada setiap anggota kelompok ● Jumlah anakan yang dihasilkan ● Jumlah hewan yang mati (bila ada), dan penyebab ● Jumlah hewan yang dikonsumsi sendiri ● Jumlah hewan yang dijual ● Jumlah pendapatan ● Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh kelompok untuk pakan, upah kerja (bila ada), transportasi, dan lain-lain Untuk peternakan unggas, perlu ditambahkan: <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah telur yang dihasilkan ● Jumlah telur yang dikonsumsi ● Jumlah telur yang dijual ● Jumlah penghasilan dari penjualan telur
Penguatan kondisi pemungkin			
Lembaga lokal pengelola dana Sasaran: adanya lembaga di tingkat kampung yang mendapat legitimasi (SK Kampung) dan mandat untuk mengelola dana hibah yang mendukung kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam.	AD/ART Lembaga dan Struktur organisasi SK Kampung	Tahun 1	Ketua kelompok atau anggota yang ditunjuk mengumpulkan data yang relevan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ● Notulensi pertemuan untuk membentuk lembaga lokal ● AD/ART lembaga ● Struktur organisasi ● SK Kampung



KEGIATAN DAN SASARAN	INDIKATOR	WAKTU	PEMANTAUAN
<p>Penyaluran dan pengelolaan dana</p> <p>Sasaran: Lembaga lokal dan kelompok2 kecil menyusun rencana kerja rinci, menyalurkan dana tepat waktu, dan membuat laporan keuangan sederhana dengan baik.</p>	<p>Rencana kerja rinci</p> <p>Jumlah dana yang diperoleh, dikeluarkan, dan disalurkan</p>	<p>Tiap tahun atau per kegiatan jika kurang dari satu tahun.</p>	<p>Ketua kelompok atau anggota yang ditunjuk mengumpulkan bukti-bukti keuangan dan mencatat data yang relevan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah dana yang diperoleh, kapan ● Jumlah dana yang dikeluarkan, untuk apa, kapan ● Jumlah dana yang disalurkan kepada kelompok lain atau anggota, kapan
<p>Penyebaran informasi dan pelaporan kegiatan dan keuangan kepada warga</p> <p>Sasaran: lembaga lokal mengorganisir pelaporan kegiatan dan keuangan kepada warga kampung sebanyak 4 kali dalam setahun.</p>	<p>Frekuensi dan kualitas pelaporan kegiatan dan keuangan</p>	<p>Tiap tahun atau per kegiatan jika kurang dari satu tahun.</p>	<p>Lembaga kampung menyusun dan menyimpan notulensi pertemuan yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kapan dan di mana pertemuan diadakan ● Informasi yang disampaikan ● Pertanyaan yang diajukan ● Kesepakatan tindak lanjut ● Daftar absen
<p>Pelatihan teknik budidaya karet</p> <p>Sasaran: 30 peserta dari kampung mengikuti dan berpartisipasi secara penuh dan aktif selama 2 hari pelatihan.</p>	<p>Jumlah peserta pelatihan dan keaktifan peserta</p>	<p>Tahun di mana pelatihan dilakukan</p>	<p>Ketua kelompok atau anggota yang ditunjuk membuat notulensi singkat pelatihan atau meminta pelatih membuat laporan pelatihan yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kapan dan di mana pertemuan diadakan ● Informasi yang disampaikan ● Pertanyaan dari peserta (siapa) ● Bahan pelatihan yang disampaikan ● Hasil evaluasi pelatihan ● Daftar absen setiap hari

Pemantauan eksternal: Pemantauan untuk menilai kinerja warga

Pemantauan eksternal dilakukan untuk kepentingan pihak luar, terutama penyandang dana atau pihak yang mewakili penyandang dana, untuk menilai kinerja warga. Seperti yang diuraikan di Bab 8, penilaian akan dilakukan oleh Tim Penilai yang dapat terdiri dari fasilitator, pihak ketiga yang ditunjuk oleh warga, perwakilan penyandang dana, atau perwakilan pihak pemangku terkait lainnya (pemegang IUPHHK, Dinas Kehutanan atau SPKD lainnya). Tim Penilai akan menggunakan hasil pemantauan internal yang dilakukan oleh warga. Contoh pemantauan eksternal yang dapat dikembangkan untuk digunakan oleh Tim Penilai dapat dilihat di Tabel 11.3.



Hasil pemantauan ini selanjutnya akan digunakan oleh Tim Penilai dan perwakilan warga untuk menentukan apakah kinerja warga masuk dalam kategori perlu ditingkatkan, baik, atau sangat baik. Hasil penilaian ini akan menentukan besaran pendanaan berbasis kinerja yang akan disalurkan kepada warga pada tahun selanjutnya.

Selain pemantauan eksternal yang akan dilakukan Tim Penilai untuk menilai kinerja warga di tingkat kampung, TNC mendukung PKHB dalam melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengkaji apakah PKHB memberikan kontribusi terhadap tingkat keamanan, kesejahteraan, dan kemandirian bagi warga yang terlibat. Kajian ini dilakukan di tingkat kabupaten dengan mengumpulkan data dan informasi untuk indikator-indikator yang relevan.

Tabel 11.3. Contoh pemantauan eksternal yang dapat dikembangkan untuk menilai kinerja warga untuk berbagai kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja

KEGIATAN DAN SASARAN	INDIKATOR	WAKTU	PEMANTAUAN
Mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam			
Pembatasan perladangan berpindah (ladang tidak dibuka di atas lahan yang masih berhutan). Sasaran: semua KK, kecuali KK baru, menerapkan sistem gilir balik dan membuka ladang di areal bekas ladang.	Jumlah KK yang membuka ladang di lahan bekas ladang (ATAU: Jumlah KK yang membuka ladang di atas lahan yang masih berhutan)	Tiap tahun	Tim Penilai memeriksa hasil pemantauan internal dan melakukan uji lapangan secara acak untuk memastikan akurasi data yang tercatat. Tim sebaiknya memeriksa setidaknya 25% dari total ladang yang dibuka. Pemilihan ladang, atau wilayah/areal perladangan, yang akan diperiksa, bisa dilakukan secara acak.
Pembatasan perladangan berpindah (luas maksimum ladang tidak melebihi 1 ha/plot). Sasaran: semua ladang yang dibuka (1 plot/KK/tahun) maksimum luasnya 1 ha/plot.	Luas ladang yang dibuka tiap KK setiap tahun	Tiap tahun	Tim Penilai memeriksa data luas dari hasil pemantauan internal. Tim sebaiknya memeriksa setidaknya 25% dari total ladang yang dibuka. Pemilihan ladang, atau wilayah/areal perladangan, yang akan diperiksa, bisa dilakukan secara acak.



KEGIATAN DAN SASARAN	INDIKATOR	WAKTU	PEMANTAUAN
Patroli hutan Sasaran: patroli dilakukan oleh 5 orang sebanyak 6x setahun, 2 hari/patroli (total 600 hari orang dalam setahun) dan menghasilkan 6 formulir laporan patroli yang lengkap.	Jumlah hari orang yang melakukan patroli dalam setahun	Pada tahun kegiatan patroli diusulkan dalam rencana kerja	Tim Penilai memeriksa formulir laporan yang sudah dilengkapi oleh Tim Pengawas Lingkungan. Formulir ini berisi, antara lain: nama anggota Tim Pengawas Lingkungan yang ikut patrol dan berapa lama patroli dilakukan.
	Jumlah formulir yang dilengkapi dengan baik oleh Tim Pengawas Lingkungan		Tim Penilai memeriksa jumlah formulir dan apakah formulir tersebut diisi dengan baik.
	Pelaporan pelanggaran (perambahan liar, dll) kepada pemangku kepentingan yang relevan		Bila ada temuan pelanggaran di dalam formulir pemantauan, Tim Penilai menanyakan kepada Tim Pengawas Lingkungan, lembaga kampung, dan/atau pemangku kepentingan terkait apakah pelanggaran ini dilaporkan.
Penanaman pohon Sasaran Tahun 1: sebanyak 1,000 pohon ditanam di sepanjang sungai	Jumlah pohon yang ditanam	Tahun 1	Tim Penilai memeriksa hasil pemantauan internal. Tim selanjutnya memilih secara acak lokasi penanaman pohon, setidaknya 25% dari total area yang ditanami dan memeriksa:
Sasaran Tahun ke-2: setidaknya 70% dari jumlah pohon yang ditanam tumbuh dengan baik	Jumlah pohon yang tumbuh	Tahun 2	<ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah pohon yang ditanam (Tahun ke-1) ● Jumlah pohon yang tumbuh atau jumlah pohon yang mati (Tahun ke-2)
Sasaran Tahun ke-3: setidaknya 60% dari jumlah pohon yang ditanam tumbuh dengan baik	Jumlah pohon yang tumbuh dengan baik	Tahun 3	<ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah pohon yang tumbuh dengan baik, atau jumlah pohon yang mati (Tahun ke-3)



KEGIATAN DAN SASARAN	INDIKATOR	WAKTU	PEMANTAUAN
Penguatan kondisi pemungkin			
Lembaga lokal pengelola dana Sasaran: adanya lembaga di tingkat kampung yang mendapat legitimasi (SK Kampung) dan mandat untuk mengelola dana hibah yang mendukung kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam.	AD/ART Lembaga dan Struktur organisasi SK Kampung	Tahun 1 atau per kegiatan jika kurang dari satu tahun.	Tim Penilai mengkaji data pemantauan internal, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ● Notulensi pertemuan untuk membentuk lembaga lokal ● AD/ART lembaga ● Struktur organisasi ● SK Kampung
Penyaluran dan pengelolaan dana Sasaran: Lembaga lokal dan kelompok2 kecil menyusun rencana kerja rinci, menyalurkan dana tepat waktu, dan membuat laporan keuangan sederhana dengan baik.	Rencana kerja rinci Kualitas laporan keuangan	Tiap tahun atau per kegiatan jika kurang dari satu tahun.	Tim Penilai mengkaji ada/tidaknya rencana kerja rinci dan kualitas laporan keuangan.
Penyebaran informasi dan pelaporan kegiatan dan keuangan kepada warga Sasaran: lembaga lokal mengorganisir pelaporan kegiatan dan keuangan kepada warga kampung sebanyak 4 kali dalam setahun.	Frekuensi dan kualitas pelaporan kegiatan dan keuangan	Tiap tahun atau per kegiatan jika kurang dari satu tahun.	Tim Penilai mengkaji notulensi pertemuan yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> ● Kapan dan di mana pertemuan diadakan ● Informasi yang disampaikan ● Pertanyaan yang diajukan ● Kesepakatan tindak lanjut ● Daftar absen
Pelatihan teknik budidaya karet Sasaran: 30 peserta dari kampung mengikuti dan berpartisipasi secara penuh dan aktif selama 2 hari pelatihan.	Jumlah peserta pelatihan dan keaktifan peserta	Tahun di mana pelatihan dilakukan	Tim Penilai mengkaji laporan pelatihan.

Di akhir periode pelaksanaan rencana kerja, warga, penyandang dana, pihak ketiga yang ditunjuk, dan pemangku kepentingan terkait akan mengkaji hasil pemantauan. Hasil kajian pemantauan akan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kinerja warga dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan menggunakan sistem penilaian yang disepakati. Selain itu, fasilitator perlu mendampingi warga dalam mengkaji pembelajaran yang diperoleh dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, dan bagaimana pembelajaran ini digunakan dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya.



RANCANGAN PROSES

Patroli hutan



Persiapan

Sebelum melakukan proses ini, fasilitator perlu mengkaji apakah seluruh anggota Pengawas Lingkungan memahami mengapa patroli hutan diusulkan di dalam rencana kerja warga. Bila tidak seluruh anggota Pengawas Lingkungan memahami alasannya, fasilitator perlu mengundang tokoh kampung yang dapat memberi penjelasan mengenai hal ini di dalam pertemuan.



Tujuan

- Membantu Pengawas Lingkungan dalam mengembangkan sistem pemantauan internal yang sesuai dengan tujuan patroli.
- Membantu Ketua Kelompok atau anggota yang ditunjuk dalam menentukan mekanisme pengumpulan data yang diperlukan.



Alat bantu

- Kertas plano
- Spidol
- Buku tulis
- Kertas A4



Waktu 3 jam

Proses

- Jelaskan tujuan pertemuan dan hasil yang diharapkan.
- Tanyakan apakah seluruh anggota Tim Pengawas Lingkungan memahami alasan patroli hutan diajukan di dalam rencana kerja masyarakat. Bila tidak semua anggota paham, minta tokoh kampung yang diundang untuk memberi penjelasan.
- Ajak seluruh peserta untuk menformulasikan tujuan patroli, berbagai tekanan terhadap hutan yang akan diatasi dengan patroli hutan, siapa yang perlu diawasi, kondisi atau parameter hutan yang perlu dipantau.
- Berdasarkan informasi yang dikumpulkan di atas, ajak peserta untuk membuat tabel pemantauan di kertas plano. Contoh formulir yang bisa dikembangkan untuk memantau pelanggaran (pembalakan, pembukaan ladang, penambangan, penangkapan burung yang dilindungi, dan pengambilan gaharu, dan lain-lain) disediakan di bawah.



- Diskusikan peralatan yang diperlukan oleh Tim Pengawas Lingkungan (kamera, GPS, dan lain-lain), kawasan hutan mana yang akan dipantau dan bagaimana mekanisme patroli akan dilakukan (seluruh anggota tim melakukan patroli bersama-sama, tim dipecah menjadi dua kelompok yang akan melakukan patroli di dua kawasan hutan yang berbeda, dan lain-lain).
- Berdasarkan informasi yang diperoleh, tentukan apakah tabel pemantauan sebaiknya disalin di buku tulis atau di lembaran kertas A4.
- Ajak peserta untuk menentukan seberapa sering informasi yang dikumpulkan akan dikaji bersama, apakah setiap pertemuan rutin kelompok, sebagai bahan diskusi dan agar kelompok dapat cepat mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut.
- Informasikan bahwa kelompok perlu membagi informasi yang dikumpulkan secara berkala kepada lembaga kampung dan melaporkan kemajuan yang kelompok capai pada pertemuan rutin yang akan diadakan oleh lembaga kampung.
- Diskusikan mengenai pentingnya formulir pemantauan yang sudah dilengkapi diarsipkan dengan baik supaya informasi tidak hilang dan dapat digunakan di kemudian hari untuk kepentingan bersama. Usulkan dan diskusikan:
 - Bagaimana formulir pemantauan tersebut sebaiknya diarsipkan: berdasarkan kegiatan, waktu, dan lain-lain
 - Di mana formulir pemantauan akan diarsipkan.
 - Perlunya menyalin informasi penting hasil pemantauan ke kertas plano atau papan tulis yang diletakkan di tempat strategis sehingga informasi tersebut dapat diketahui dan dibaca oleh warga kampung lain.



Contoh formulir untuk memantau pelanggaran (pembalakan, pembukaan ladang, penambangan, penangkapan burung yang dilindungi, dan pengambilan gaharu, dan lain-lain) disediakan di bawah.

FORMULIR PEMANTAUAN PATROLI HUTAN

Tanggal Pengisian : _____ Nama Pengisi: _____

Tanggal Patroli : _____

Nama Pelaku Patroli : _____

Lokasi Patroli : _____

Pelanggaran yang ditemui

NO.	TANGGAL	LOKASI	JENIS PELANGGARAN	PELAKU DAN ASAL	TINDAKAN
	TOTAL				

Pengamatan Lain (hewan yang dilihat/didengar, anak sungai yang dihalangi oleh batang kayu yang tumbang, dll):

Pemantauan pengembangan ekonomi (peternakan ayam)



Tujuan

- Membantu Kelompok Peternak Ayam dalam mengembangkan sistem pemantauan internal untuk kelompok.
- Membantu Ketua Kelompok atau anggota yang ditunjuk dalam menentukan mekanisme pengumpulan data yang diperlukan.



Alat bantu

- Kertas plano
- Spidol
- Buku tulis



Waktu 2-3 jam





Proses

- Jelaskan tujuan pertemuan dan hasil yang diharapkan.
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemantauan dan kenapa harus dilakukan.
- Minta peserta kelompok untuk menentukan parameter atau informasi saja yang akan dipantau: ayam, telur, pendapatan, dan lain-lain dan frekuensi pengumpulan data (setiap bulan, 3 bulan sekali, dll).
- Ajak kelompok untuk membuat tabel pemantauan di kertas plano. Contoh tabel yang bisa dikembangkan disediakan di bawah. Tabel yang sudah disepakati bersama disalin di buku pemantauan yang selanjutnya akan dilengkapi oleh ketua kelompok atau anggota yang ditunjuk.
- Diskusikan bagaimana data tersebut sebaiknya dikumpulkan: ketua kelompok atau anggota yang ditunjuk mendatangi anggota di rumah masing-masing, sekaligus melakukan penghitungan, atau setiap anggota yang memberikan informasi pada pertemuan rutin, atau opsi lainnya.
- Ajak kelompok untuk menentukan seberapa sering informasi yang dikumpulkan akan dikaji bersama, apakah setiap pertemuan rutin kelompok, sebagai bahan diskusi dan agar kelompok dapat cepat mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut.
- Informasikan bahwa kelompok perlu membagi informasi yang dikumpulkan secara berkala kepada lembaga kampung dan melaporkan kemajuan yang kelompok capai pada pertemuan rutin yang akan diadakan oleh lembaga kampung.
- Diskusikan bagaimana formulir yang sudah dilengkapi akan diarsipkan.



Contoh Formulir Pemantauan Ayam

FORMULIR PEMANTAUAN AYAM

Nama anggota kelompok : _____

Jumlah ayam yang diberikan: _____

NO.	PERIODE PELAPORAN	JUMLAH MATI	JUMLAH ANAKAN	JUMLAH DIKONSUMSI	JUMLAH DIJUAL	PENGHASILAN
	TOTAL					

Contoh Formulir Pemantauan Telur Ayam

Catatan: Tabel ini hanya untuk mencatat telur yang dijual atau dikonsumsi saja. Yang dibiarkan menetas dicatat dalam bentuk anakan dan dicatat di tabel sebelumnya.

FORMULIR PEMANTAUAN TELUR AYAM

Nama Anggota Kelompok: _____

NO.	PERIODE PELAPORAN	JUMLAH TELUR YG DIHASILKAN	JUMLAH DIKONSUMSI	JUMLAH DIJUAL	PENGHASILAN
	TOTAL				



Di setiap akhir periode pelaporan yang disepakati (bulanan atau tiga bulanan), ketua kelompok atau anggota yang ditunjuk sebaiknya melakukan penghitungan untuk seluruh anggota kelompok dan mengisi tabel di bawah.

FORMULIR PEMANTAUAN SELURUH ANGGOTA KELOMPOK

Periode: _____

NO.	NAMA ANGGOTA	JUMLAH TOTAL AYAM SAAT INI	JUMLAH YANG DIKONSUMSI		TOTAL PENGHASILAN
			Ayam	Telur	
	TOTAL				



BAHAN BACAAN

Alexandra, J., S. Haffenden, and T. White. 1996. *Listening to the Land. A Directory of Community Environmental Monitoring Groups in Australia*. Australian Conservation Foundation, Fitzroy, Australia.

ANSAB. 2010. *Participatory Biodiversity Monitoring in Community Managed Forests*. Asia Network for Sustainable Agriculture and Bioresources, Kathmandu.

Awang, S.A., W.T. Widayanti, B. Himmah, A. Astuti, R.M. Septiana, Solehudin, dan A. Novenanto. 2008. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. CIRAD, CIFOR dan PKHR, Yogyakarta.

Bosch, O.J.H, W.J. Allen, and R.S. Gibson. 1996. *Monitoring as an Integral Part of Management and Policy Making*. "Resource Management: Issues, Visions, Practice" Symposium Proceedings. Lincoln University, New Zealand, 5–8 July 1996, pp. 12–21.

Hartanto, H., M.C.B. Lorenzo, and A.L. Frio. 2002. *Collective action and learning in developing a local monitoring system*. *International Forestry Review* 4(3): 184-195



The page features a light grey background with large, stylized floral and scrollwork patterns in a vibrant yellow color. These patterns are positioned in the top and bottom corners, framing a central yellow horizontal band. The band contains the chapter title in white text.

BAB 12

Perayaan

REFLEKSI PENULIS

*“...Atas padi yang engkau tumbuhkan dari sawah ladang bumimu,
Kupanjatkan syukur dan kunyanyikan lagu gembira,
Sebagaimana padi itu berterima kasih kepadamu dan bersukaria..”*
(Doa syukur sawah ladang, karya Emha Ainun Najib)

“Saat ini kami sudah bisa membayangkan pohon-pohon karet yang kami tanam akan bisa kami sadap dalam lima atau enam tahun lagi. Ternak-ternak akan berkembang biak seperti yang kami impikan, dan hasilnya akan menghidupi kami dan membiayai sekolah anak-anak kami. Sedangkan di hutan-hutan yang kami kelola akan banyak sarang burung lagi, wisatawan akan banyak datang dan binatang-binatang buruan tidak susah kami peroleh. Rasanya hidup ini menjadi lebih indah dan berarti.” Demikian ungkapan beberapa warga Kampung Merabu ketika menunjukkan tanaman karet di lahan mereka dan ternak yang mereka pelihara. Saat ini apa yang mereka upayakan memang belum menghasilkan karena inisiatif itu baru berjalan selama satu tahun. Namun, meskipun tanaman karet mereka baru tumbuh dan ternak yang dipelihara baru mulai berkembang, keceriaan sudah nampak di wajah-wajah mereka.

Sudah banyak waktu diluangkan warga kampung untuk mempercakapkan rencana-rencana mereka, mempersiapkan lahan-lahan yang akan ditanami, membuat kandang-kandang ayam dan bebek, serta menentukan luasan hutan yang akan dikelola. Bagi warga, hasil kerja mereka adalah capaian yang luar biasa. Proses yang mereka lalui dimulai dengan percakapan yang panjang, direncanakan secara bersama-sama, serta kemajuannya dipantau dengan seksama. Ini semua adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Meskipun kegiatan yang dilakukan tidak terlalu asing, jelas ada perbedaan dalam semangat dan tujuan akhir yang akan mereka tuju.

Untuk merayakan seluruh capaian itu, maka perlu diadakan kegiatan bersama sebagai ungkapan rasa syukur dan bangga atas semangat dan kerjasama seluruh warga. Pada saat yang sama, perayaan itu menjadi kesempatan bagi warga untuk meneguhkan kembali kesepakatan yang pernah mereka ikrarkan untuk mewujudkan impian bersama yang disepakati. Dengan demikian, setiap warga kampung senantiasa diingatkan pada akhir setiap tahun bahwa mereka membawa misi yang mulia untuk mewujudkan kehidupan kampung yang semakin ASIK (Aman, Sejahtera, Indah dan Kreatif).





Dengan pendampingan dari fasilitator, selama satu tahun warga sudah membangun mimpi, menata lahan, menyusun rencana pembangunan kampung, memobilisir dana dari berbagai sumber, dan terlibat secara penuh dalam upaya Berau dalam mengatasi perubahan iklim melalui Program Karbon Hutan Berau (PKHB).

Warga membatasi kegiatan perladangan berpindah, menanam pohon di bekas ladang dan lahan rusak di dalam wilayah kampung, mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar dalam hutan di sekeliling kampung, mengembangkan sumber mata pencaharian baru yang ramah lingkungan, meningkatkan tata kelola kampung dan kapasitas mereka. Warga juga melakukan pemantauan untuk mengkaji kemajuan yang dicapai dan bagaimana mereka dapat memperbaiki kinerja mereka pada tahun berikutnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama setahun penuh ini diyakini akan membawa warga makin dekat dengan mimpi bersama mereka. Mimpi besar ini tentunya tidak dapat dicapai dalam setahun. Warga masih harus melanjutkan usaha mereka di tahun-tahun selanjutnya.

Usaha warga di tahun-tahun berikutnya masih bisa mendapat dukungan pendanaan PKHB. Besaran dana pendukung ini akan ditentukan oleh kinerja warga, seperti yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Dengan menggunakan hasil pemantauan, Tim Penilai dan perwakilan warga akan menentukan besaran dana pendukung yang akan diterima oleh warga pada tahun berikutnya. Kinerja dan capaian warga akan dihargai dengan dukungan yang lebih besar. Besaran dana, dan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan selama setahun, akan membantu warga dalam membuat rencana kerja yang lebih rinci mengenai kegiatan mitigasi, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi, dan penguatan kondisi pemungkin yang akan mereka lakukan pada tahun berikutnya.

Dukungan pendanaan ini perlu dilihat sebagai penghargaan atas kontribusi dan capaian warga. Pendanaan ini bertujuan untuk melengkapi, bukan menggantikan, dan mengembangkan aset yang warga miliki. Pada saat pendanaan ini tidak tersedia lagi, aset warga diharapkan sudah meningkat sedemikian rupa sehingga mereka tidak lagi tergantung pada sumber daya dari luar. Dalam proses mencapai kemandirian tersebut, warga selayaknya merayakan capaian yang telah mereka raih selama ini melalui Pesta Kampung.

Mengapa warga perlu merayakan capaian mereka? Setidaknya ada tiga alasan: **Pertama**, capaian yang telah diraih makin mendekatkan warga kepada mimpi yang mereka bangun bersama. **Kedua**, capaian ini akan menambah percaya diri warga. Seperti yang diuraikan di bab sebelumnya, program pengembangan masyarakat sering menempatkan warga kampung sebagai kelompok yang tidak berdaya dan yang perlu dibantu. Pendekatan yang dipakai dalam PKHB menghargai warga sebagai kelompok yang memiliki kekuatan. Adanya capaian akan menambah rasa percaya diri warga akan keberdayaan mereka. **Ketiga**, perayaan akan menjadi ajang pemicu dan penggerak semangat warga untuk menggapai impian yang belum terwujud dan menciptakan mimpi baru.



Warga dapat merayakan capaiannya melalui Pesta Kampung yang formatnya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Perayaan ini dapat diselenggarakan sebagai suatu pesta khusus atau dapat juga digabungkan atau digandengkan dengan perayaan yang memang sudah rutin dilakukan oleh warga, misalnya pesta panen. Sebagai bagian utama dari Pesta Kampung adalah presentasi warga mengenai cerita-cerita sukses mereka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi, peningkatan kapasitas, dll. Cerita sukses ini dapat dipresentasikan oleh warga melalui pementasan drama, musik, puisi, atau cara kreatif lainnya.

Sebagai sebuah kegiatan untuk merayakan keberhasilan dan capaian warga, perayaan ini seharusnya menjadi kegiatan dari warga untuk warga. Walaupun demikian, perayaan dapat menjadi sarana bagi warga untuk berbagi pengalaman, nilai budaya dan kearifan pengelolaan sumber daya alam, dan mengajak warga kampung tetangga dan pihak lain untuk terlibat dalam inisiatif yang sama sehingga dampak kegiatan di kampung dapat meluas. Dengan demikian, warga dapat mengundang warga kampung tetangga dan para pihak yang sudah mendukung warga selama ini, antara lain penyandang dana, pihak ketiga, perwakilan pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta dinas terkait untuk ikut serta dalam Pesta Kampung.

Fasilitator dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan warga dalam mempersiapkan dan melaksanakan Pesta Kampung tersebut. Dukungan dan pendampingan tersebut, antara lain: mengkaji apakah Pesta Kampung ini sebaiknya dirayakan terpisah, digabungkan, atau digandengkan dengan perayaan-perayaan yang sudah rutin diselenggarakan oleh warga, misalnya pesta panen, pesta buah, dll. Fasilitator dapat juga mendampingi masyarakat dalam mempersiapkan perayaan tersebut, mulai dari membentuk panitia perayaan, mendukung panitia dalam mengidentifikasi berbagai format kreatif yang akan digunakan warga dalam mempresentasikan cerita sukses mereka, menentukan pihak-pihak yang akan diundang, mengkoordinir warga, mempersiapkan lokasi perayaan, dan mendokumentasikan pelaksanaan Pesta Kampung itu sendiri.

Perayaan keberhasilan dan capaian warga diharapkan dapat memberi kesadaran baru dan inspirasi bagi warga kampung dan pihak-pihak terkait. Kesadaran baru bahwa tantangan global, seperti perubahan iklim dan kerusakan hutan, dapat diatasi bila semua pihak bekerja sama. Kesadaran baru bahwa tantangan global tersebut dapat dihadapi melalui aksi nyata warga di tingkat lokal. Inspirasi bahwa warga kampung di pelosok Berau bukanlah kelompok tak berdaya melainkan sumber kekuatan. Inspirasi bagi warga kampung sendiri bahwa aksi inspiratif yang mereka lakukan, bukan hanya membantu menjawab tantangan global, tetapi juga akan membawa mereka lebih dekat kepada mimpi mereka: hidup sejahtera di tengah sumber daya hutan dan alam yang lestari.





Epilog

Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan sering terpinggirkan dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam. Mereka tidak mendapat akses dan hak pengelolaan walaupun mereka berdiam di sana dan memiliki hubungan sosial, budaya, dan sejarah yang kuat dengan hutan dan sumber daya alam tersebut. Hal ini menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat, pendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Ketika inisiatif REDD+ bermunculan di Indonesia dan negara berhutan tropis lainnya, kekhawatiran bahwa masyarakat akan dirugikan juga timbul. Himbauan agar masyarakat mendapatkan porsi dan peran yang strategis dalam upaya melakukan mitigasi atas perubahan iklim banyak didengungkan baik di perundingan internasional maupun di forum-forum lainnya. Hanya saja timbul pertanyaan: bagaimana masyarakat dilibatkan dalam inisiatif REDD+, bentuk pelibatan seperti apa yang perlu dibangun sehingga dapat dikatakan masyarakat benar-benar terlibat dan mendapatkan manfaat dari keterlibatannya.

Pertanyaan ini juga muncul saat The Nature Conservancy ingin melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Program Karbon Hutan Berau (PKHB). Pada saat itu tidak ada buku panduan dan strategi pelibatan masyarakat dalam REDD+ yang cukup operasional dan dapat langsung dapat dipakai. TNC harus merancang strategi dan proses pelibatan dan pendampingan masyarakat dalam PKHB dari awal, mengujicobakan, dan menyempurnakannya melalui proses iterasi berkali-kali. Hasil pembelajaran dan penyempurnaan inilah yang kemudian dituangkan ke dalam buku panduan SIGAP REDD+ ini.

Sesuai namanya, buku panduan ini menyajikan aksi inspiratif warga untuk melakukan perubahan sebagai bagian dari inisiatif PKHB. Kata kunci dari judul buku panduan ini adalah aksi inspiratif dan perubahan. Disebut sebagai aksi inspiratif untuk perubahan karena tahapan dan proses yang dilakukan oleh warga yang diungkapkan dalam buku panduan ini merupakan aksi kolektif warga untuk menguatkan eksistensi diri mereka sebagai komunitas yang hidup berdampingan dengan hutan dan melakukan perubahan untuk mewujudkan mimpi mereka untuk kehidupan yang lebih baik bagi mereka sendiri maupun komunitas yang lebih luas.

Buku SIGAP REDD+ ini menyajikan tahapan dan proses yang dapat dipakai oleh pendamping dalam melibatkan masyarakat dalam PKHB dan inisiatif REDD+ di tempat lain. Di setiap tahapan, pendamping dapat menggunakan alat bantu dan rancangan proses



yang disediakan. Proses-proses tersebut dirangkai ke dalam sebuah kerangka pelibatan yang sistematis, sederhana, dan inovatif. Pengalaman pendampingan TNC di Kampung Long Duhung dan Merabu menunjukkan bahwa kunci keberhasilan dari proses-proses tersebut ada di masyarakat. Masyarakat adalah sumber kekuatan. Strategi dan proses yang dikembangkan dalam SIGAP REDD+ akan menggali, menemukani, dan mendayagunakan kekuatan ini untuk menyejahterakan masyarakat dan menjawab tantangan global perubahan iklim. Kunci keberhasilan lain adalah para pendamping (fasilitator). Pendamping yang betul-betul mempercayai bahwa masyarakat memiliki kekuatan luar biasa dan yang mampu merancang proses untuk membangun dan mendayagunakan kekuatan tersebut akan memberi daya tambahan bagi warga dalam melaksanakan aksi inspiratif dan mewujudkan mimpi mereka.

Tim penulis meyakini bahwa tahapan-tahapan dan proses-proses yang disajikan dalam buku panduan ini akan memberikan hasil yang positif dalam bentuk kesejahteraan masyarakat dan hutan yang lestari. Keyakinan ini didasari pada hasil-hasil positif yang terlihat di kampung-kampung yang telah dan sedang didampingi pada saat ini. Walaupun demikian, kami menyadari bahwa buku panduan ini masih perlu disempurnakan seiring dengan perjalanan pendampingan masyarakat di kampung dampingan kami dan makin banyaknya pengalaman-pengalaman pengguna buku panduan SIGAP REDD+ di tempat lain. Kami mengharapkan masukan dari pengguna buku ini dan para pihak lain. Dengan demikian, buku panduan ini pada akhirnya betul-betul menjadi buku panduan yang berguna bagi pihak-pihak yang ingin menyejahterakan masyarakat dan membangun kekuatan masyarakat dalam menjawab tantangan lokal dan global.

Tim Penulis:

Herlina Hartanto (hhartanto@tnc.org)

Tomy S. Yulianto (tsyulianto@tnc.org)

Taufiq Hidayat (thidayat@tnc.org)



